



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

0

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

dan

WALIKOTA BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025 -2045.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

0

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan Pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak 2025 sampai tahun 2045.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Jawa Timur adalah dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak 2025 sampai tahun 2045.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2025 – 2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Kota Blitar untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak 2025 sampai tahun 2045.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Pembangunan daerah Kota Blitar untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota dengan berpedoman pada RPJPD Kota Blitar serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.

BAB II DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 2

- (1) RPJPD menjadi landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan Pembangunan 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak 2025 sampai tahun 2045.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk visi, misi dan arah Pembangunan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

!

Pasal 3

RPJPD mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Timur.

Pasal 4

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi dan program Walikota.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH
BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK
BAB VI : PENUTUP

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan RPJPD ditetapkan dalam 4 (empat) tahapan dengan periodisasi 5 (lima) tahunan.
- (2) Periodisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Tahap I adalah tahun 2025-2029;
 - b. Tahap II adalah tahun 2030-2034;
 - c. Tahap III adalah Tahun 2035-2039; dan
 - d. Tahap IV adalah Tahun 2040-2045.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah.

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah, telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah, telah dilaksanakan melalui RPJMD.

Pasal 8

- (1) Kepala perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (4) Kepala perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD kepada Walikota.

Pasal 9

Ketentuan terkait tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, RPJMD, Rencana Strategis Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan Daerah baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 22 Agustus 2024
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 22 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 2
NO REG PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 163-2/2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IJAYA, S.H., M.H.
210 200604 1 008

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025 – 2045

I. UMUM

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari system perencanaan Pembangunan nasional yang disusun dalam jangka Panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Perencanaan Pembangunan daerah dimaksudkan sebagai pedoman arah Pembangunan daerah dalam mencapai cita cita daerah. Oleh karena itu, agar Pembangunan daerah dalam jangka Panjang 20 (dua puluh) tahun dapat terarah, berkesinambungan, efektif dan efisien perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar.

Pemilihan Walikota Blitar sebagai pimpinan tertinggi pemerintah daerah dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun. Setiap Walikota memiliki kewajiban Menyusun Rencana Pembangunan untuk mewujudkan Visi dan Misi yang dijanjikan pada saat pemilihan. Rencana Pembangunan 5 (lima) tahunan itu disebut dengan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Agar terjadi keberlanjutan antar RPJMD maka diperlukan RPJPD yang meliputi 4 periode RPJMD, dimana RPJMD yang disusun harus berpedoman pada RPJPD. Oleh karena itu, RPJPD menjadi dokumen perencanaan Pembangunan yang berfungsi menjaga harmonisasi dan keberlanjutan antar RPJMD.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar adalah dokumen perencanaan Pembangunan Kota Blitar dalam bentuk visi, misi dan arah Pembangunan Kota Blitar untuk masa 20 (dua Puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045. RPJPD Kota Blitar digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD Kota Blitar sesuai dengan Visi. Misi dan program Walikota Blitar terpilih setiap 5 tahunan. RPJMD Kota Blitar dijabarkan dalam bentuk operasionalisasi tahunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar yang merupakan rencana Pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas Pembangunan daerah, rancangan perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

RPJPD Kota Blitar Tahun 2025 – 2045 ditujukan untuk (a) menjamin terbangunnya koordinasi antar pelaku Pembangunan untuk mencapai tujuan daerah, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergi dan kolaborasi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah Pusat dan daerah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara optimal, efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan (e) mengoptimalkan partisipasi Masyarakat.

Sehubungan dengan itu, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2025 – 2045

0

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 1

0

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH TAHUN 2025 -2045

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahun 2045 telah ditetapkan sebagai Indonesia Emas dalam pembangunan nasional. Kota Blitar sebagai bagian dari pembangunan nasional mempunyai kewajiban untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. Wujud dari dukungan pencapaian adalah hasil pembangunan daerah Kota Blitar memberikan kontribusi positif terhadap capaian target dari indikator-indikator pembangunan nasional. Karena sebagaimana diketahui capaian pembangunan kota dan kabupaten adalah capaian pembangunan provinsi dan capaian pembangunan provinsi adalah capaian pembangunan nasional.

Periode 2005 - 2025, Pemerintah Kota Blitar telah memberikan kontribusi positif pada pembangunan nasional, misalnya angka kemiskinan yang masih dibawa rata-rata provinsi dan nasional, Indeks Pembangunan Manusia di atas rata rata provinsi dan nasional. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan di Kota Blitar yang baik sehingga tidak menimbulkan gejolak yang dapat mengakibatkan terganggunya pembangunan daerah, regional maupun nasional. Pelaksanaan APBD yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 13 tahun berturut turut, serta berbagai prestasi positif di berbagai sektor dan urusan lainnya. Beberapa contoh tersebut memberikan gambaran bahwa Kota Blitar telah memberikan kontribusi positif dalam pembangunan Jawa Timur maupun nasional.

Pertanyaannya adalah apakah 20 tahun yang akan datang Kota Blitar akan tetap memberikan kontribusi positif pada konteks pembangunan regional dan nasional? Jawabannya adalah wajib, wajib hukumnya pembangunan daerah mendukung pencapaian pembangunan nasional. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana Kota Blitar dapat melakukan pembangunan daerah yang mendukung pencapaian pembangunan regional dan nasional? Pemerintah Kota Blitar harus menyusun perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dengan tujuan mendukung target yang ditetapkan dalam rencana pembangunan provinsi dan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kota Blitar harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar tahun 2025 - 2045 berdasarkan potensi dan kekuatan yang dimiliki dengan tujuan mendukung pencapaian Indonesia Emas sebagaimana ditetapkan dalam RPJP Nasional 2025 - 2045.

RPJPD Kota Blitar 2025 – 2045 yang disusun berdasarkan potensi dan kekuatan lokal juga harus mempertimbangkan berbagai faktor yang menjadi hambatan yang selama ini terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi, misalnya keterbatasan lahan di Kota Blitar ke depan akan mengakibatkan pembangunan yang dapat dinilai kurang peduli lingkungan hidup, karena sangat dimungkinkan ruang terbuka hijau dan lahan pertanian terus berkurang karena dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal dan perekonomian masyarakat. Selain itu harus pula memperhitungkan tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang misalnya mengurangi ketergantungan fiskal dari Pemerintah Pusat, karena selama ini 80% anggaran pembangunan daerah Kota Blitar masih bergantung pada pemerintah pusat. Pengelolaan sanitasi dan penyediaan air minum yang selama ini sudah 99% layak tapi masih belum aman 80%.

RPJPD Kota Blitar Tahun 2025 – 2045 perlu disusun dengan baik untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Kota Blitar. Pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan dunia pendidikan mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan arah pembangunan yang disepakati bersama. Sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat integratif, responsif, dan saling melengkapi satu dengan lain. RPJPD Kota Blitar diharapkan dapat mengarahkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk mewujudkan sejahtera secara inklusif serta kuat menghadapi tantangan global di masa depan.

Berkelanjutan

Kota Blitar harus dibangun secara berkelanjutan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Pembangunan harus dilakukan secara berkelanjutan dari tahapan jangka menengah pertama sampai dengan ke empat dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Sejahtera

Pembangunan Kota Blitar harus dapat menyejahterakan seluruh warganya dengan kehidupan yang berkualitas. Pembangunan harus berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dari sisi ekonomi, kesehatan dan pendidikan.

Inklusif

Kota Blitar harus menjadi kota yang inklusif, dimana semua warganya pada posisi kesetaraan secara proporsional dan berkeadilan dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan. Pembangunan inklusif harus berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan pengurangan kesenjangan.

Kuat Menghadapi Tantangan Global

Kota Blitar harus menjadi kota yang kuat menghadapi tantangan global, seperti perubahan iklim, urbanisasi, dan persaingan global untuk itu harus berfokus pada peningkatan daya saing daerah dan ketahanan masyarakat.

Penyusunan dokumen RPJPD meliputi berbagai aspek pembangunan kota termasuk pembangunan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, pembangunan ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan tata ruang yang berkelanjutan. Dokumen RPJPD juga menggambarkan kondisi permasalahan eksisting daerah, tantangan yang dihadapi baik dari sisi eksternal dan internal, potensi daerah, visi dan misi pembangunan daerah, serta arah kebijakan, strategi, dan program kerja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan penjabaran dari visi dan misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), RPJPD Provinsi Jawa Timur dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

RPJPD Kota Blitar Tahun 2025 – 2045 disusun dalam rangka mewujudkan Pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia guna mendukung terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045 “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”, serta disusun berdasarkan kaidah dan pendekatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

1. Pendekatan teknokratis, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2. Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
3. Pendekatan politis, dilaksanakan melalui persetujuan Kepala Daerah bersama dengan DPRD; dan
4. Pendekatan atas-bawah dengan mempedomani petunjuk baik yang bersifat terbuka maupun imperatif dari Pemerintah Pusat maupun provinsi dan pendekatan bawah-atas, merupakan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, sampai dengan tingkat Kota Blitar.

Tata cara penyusunan RPJPD Kota Blitar tahun 2025 - 2045 mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa penyusunan dokumen Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu: 1). Persiapan Penyusunan RPJPD; 2). Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) RPJPD; 3). Penyusunan Rancangan RPJPD; 4). Pelaksanaan Musrenbang RPJPD; 5) Perumusan Rancangan Akhir (Rankhir) RPJPD; dan 6) Penetapan RPJPD.

RPJPD Kota Blitar Tahun 2025 – 2045 diharapkan menjadi dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (RPJMD) dan tahunan (RKPD). Oleh karena itu, RPJPD Kota Blitar 2025 – 2045 disusun untuk menciptakan pembangunan Kota Blitar secara berkelanjutan.

1.2 Dasar Hukum

RPJPD Kota Blitar disusun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan operasionalnya adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada saat RPJPD ini diimplementasikan. Adapun pada saat disusunnya RPJPD ini landasan operasional yang berlaku adalah:

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

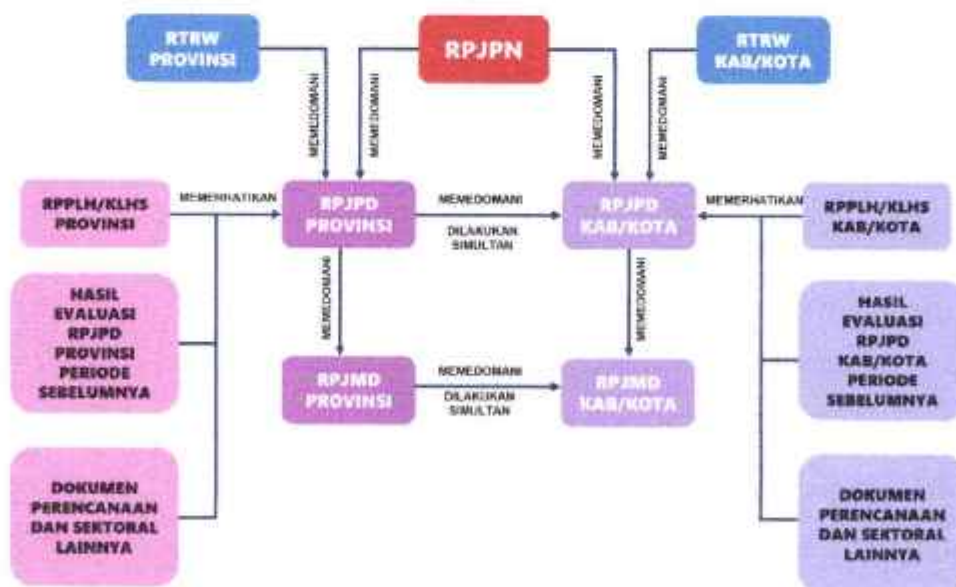
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2012 Nomor 1).

1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) salah satu tujuannya mengamanatkan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.



Gambar 1.1

Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektorial Lainnya

Hubungan RPJPD Kota Blitar dengan RPJP Nasional

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 156 ayat (2) pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Selanjutnya dalam pasal 260 ayat (1) daerah sesuai kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Yang kemudian hubungan RPJPD dengan RPJPN ditegaskan dalam pasal 263 ayat (2) RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Sehingga jelas RPJPD Kota Blitar harus selaras dan mendukung pencapaian RPJP Nasional. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan daerah mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan nasional.

- RPJPD Kota Blitar disusun mengacu pada RPJP Nasional.
- Visi dan misi RPJPD Kota Blitar harus selaras dengan visi dan misi RPJP Nasional.
- Arah kebijakan RPJPD Kota Blitar harus selaras dengan arah kebijakan RPJP Nasional.

Hubungan RPJPD Kota Blitar dengan RPJPD Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 276 ayat (2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah kabupaten/kota.

RPJPD Provinsi Jawa Timur merupakan dokumen perencanaan pembangunan provinsi untuk jangka panjang (20 tahun). RPJPD Kota Blitar harus selaras dan mendukung pencapaian RPJPD Provinsi Jawa Timur. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan daerah dapat mendukung pembangunan provinsi.

- RPJPD Kota Blitar disusun dengan mengacu pada RPJPD Provinsi Jawa Timur.
- Visi dan misi RPJPD Kota Blitar harus selaras dengan visi dan misi RPJPD Provinsi Jawa Timur.
- Arah kebijakan RPJPD Kota Blitar harus selaras dengan arah kebijakan RPJPD Provinsi Jawa Timur.

Hubungan RPJPD Kota Blitar dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Blitar

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 263 ayat (2) RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Amanah Undang undang tersebut jelas menggambarkan tentang hubungan RPJPD dengan RTRW Kota Blitar. Dimana RTRW Kota Blitar harus dijadikan pedoman bagi penyusunan RPJPD Kota Blitar. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan daerah dapat berjalan secara sinergi baik secara spasial keruangan dengan struktural pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Blitar.

- RPJPD Kota Blitar disusun dengan mengacu pada RTRW Kota Blitar.
- Visi dan misi RPJPD Kota Blitar selaras dengan visi dan misi RTRW Kota Blitar.
- Arah kebijakan RPJPD Kota Blitar selaras dengan arah kebijakan RTRW Kota Blitar.



Gambar 1.2

Penyelarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan RTRW

Hubungan RPJPD Kota Blitar dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Blitar

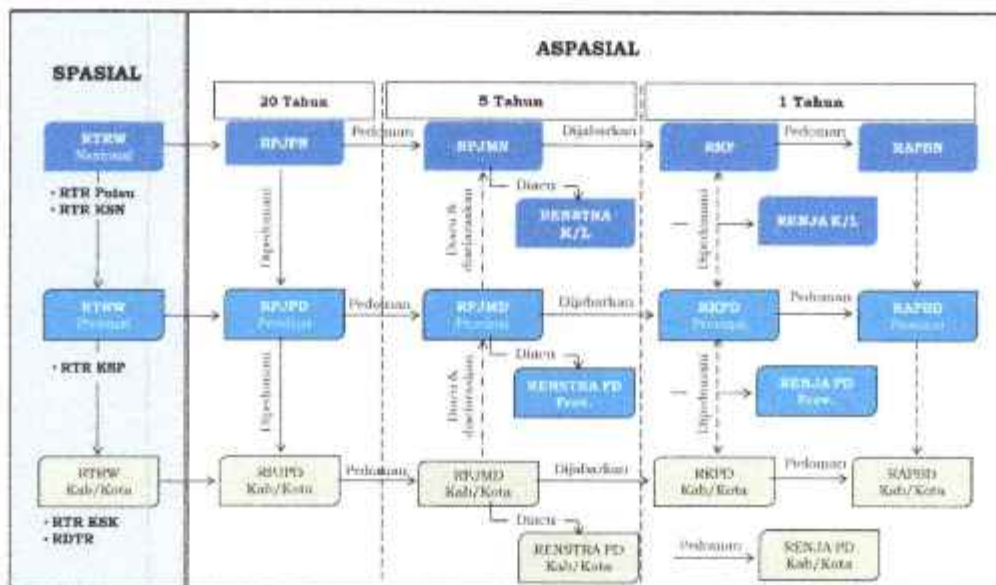
Penyusunan RPJPD harus memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hal ini bertujuan agar dapat tercipta keselarasan antara arah kebijakan sasaran pokok daerah dengan kaidah pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu mengelola potensi yang menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

Hubungan RPJPD Kota Blitar dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 263 ayat (3) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Sehingga jelas bahwa RPJMD berpedoman pada RPJPD.

Hubungan RPJPD Kota Blitar dengan Rencana Pembangunan Tahunan

Rencana pembangunan tahunan daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yaitu dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rencana pembangunan tahunan harus berpedoman pada RPJMD yang disusun berdasarkan RPJPD Kota Blitar.



Gambar 1.3

Sinkronisasi, Integrasi Perencanaan dan Penganggaran

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan RPJP Daerah Kota Blitar Tahun 2025–2045 dimaksudkan sebagai pokok-pokok arahan Pembangunan Daerah Kota Blitar dalam kurun waktu 20 tahun yaitu tahun 2025 – 2045, yang akan dipedomani sebagai dasar penyusunan dan pelaksanaan 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah daerah dan pembangunan tahunan daerah untuk mewujudkan Kota Blitar yang berkelanjutan, sejahtera, inklusif dan kuat menghadapi tantangan global di masa depan.

Tujuan penyusunan RPJPD Kota Blitar Tahun 2025-2045 adalah:

1. Sebagai acuan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melakukan semua proses pembangunan di daerah Kota Blitar selama 20 tahun ke depan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah baik jajaran birokrasi di lingkungan pemerintah daerah, DPRD maupun segenap komponen kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia pendidikan di Kota Blitar.
2. Sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJM Daerah) 2025 – 2029, 2030-2034, 2035 – 2039 dan 2040 – 2045.

1.5 Sistematika

RPJPD Kota Blitar Tahun 2025 – 2045 disusun dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab Pendahuluan ini memuat sekurang-kurangnya latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini memuat beberapa aspek sebagai berikut:

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Dibagi menjadi 2 bagian:

1. Geografi

Menjelaskan peran strategis daerah, potensi sumber daya alam serta gambaran kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan termasuk ancaman perubahan iklim.

2. Demografi

Menjelaskan karakteristik demografi daerah.

2.2 Aspek Kesejahteraan Sosial Budaya

a) Kesejahteraan Ekonomi

Menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi.

b) Kesejahteraan Sosial Budaya

Menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif sosial budaya.

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

a) Daya Saing Ekonomi Daerah

Menjelaskan sektor unggulan daerah yang menjadi penopang perekonomian dan sektor lainnya yang potensial untuk dikembangkan.

b) Daya Saing SDM

Menjelaskan kondisi SDM sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah.

c) Daya Saing Iklim Investasi

Menjelaskan kondisi iklim investasi di daerah dari aspek kemudahan berinvestasi, situasi politik serta keamanan dan ketertiban daerah.

d) Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Menjelaskan kondisi fasilitas/infrastruktur di daerah.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

Menjelaskan kondisi tata kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Menyajikan hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 untuk penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 termasuk kinerja RTRW dan rencana sektoral dalam dokumen perencanaan daerah.

2.6 Analisa Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Menjelaskan dinamika kependudukan yang harus diperhatikan untuk dilayani dan dipenuhi kebutuhan sarana prasarana oleh pemerintah daerah. Penjelasan ini sekurang-kurangnya memuat:

- a. Proyeksi kependudukan per lima tahun sampai dengan tahun 2045 yang meliputi perkembangan jumlah penduduk.
- b. Proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana per lima tahun sampai dengan tahun 2045 berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dari

kementerian/lembaga (K/L) terkait. Kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik dimaksud meliputi: rumah/tempat tinggal dan permukiman, air bersih, energi/listrik, persampahan, kesehatan, dan pendidikan (sesuai dengan kondisi daerah).

2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Menjelaskan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan indikasi program/proyek strategis yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis

3.1 Permasalahan

Menguraikan tentang permasalahan utama yang merupakan faktor penghambat yang mengikat dan apabila ditangani dapat melepaskan potensi daerah yang tertahan secara signifikan, yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

3.2. Isu strategis

Memuat kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Lebih jauh, bagian ini menguraikan isu-isu strategis daerah yang berdampak luas dan memiliki konsekuensi jauh ke depan yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan biaya yang makin besar.

Bab IV Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Bab ini berisikan penetapan visi dan misi pembangunan. Penyajian pada bab ini menjabarkan visi, sasaran visi, dan 5 (lima) misi pembangunan daerah. Perumusan visi, sasaran visi, dan misi dilakukan dengan merujuk pada RPJP Nasional dan RPJP Propinsi untuk menunjukkan konsistensi dan sinkronisasi antara muatan dokumen perencanaan di tingkat provinsi dan nasional dengan Kota Blitar dalam kerangka kesatuan rencana Pembangunan NKRI.

4.1. Visi dan Sasaran Visi

Menguraikan visi yang akan dicapai Kota Blitar pada Tahun 2045 disertai dengan penetapan Sasaran Visi dengan target yang disesuaikan dengan target Visi RPJP Nasional yang disesuaikan dengan karakteristik daerah.

4.2. Misi Daerah

Menguraikan tentang misi yang merupakan penjabaran dari visi yang ditetapkan.

Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

Bab ini memuat:

5.1 Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang disusun dengan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah. Pentahapan per lima tahun mengacu pada tahap dan tema pembangunan dalam RPJP Nasional Tahun 2025-2045 yang disesuaikan dengan karakteristik daerah.

5.2 Sasaran Pokok

Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan secara langsung terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045.

5.2.1 Arah Pembangunan Daerah

Arah Pembangunan Daerah merupakan strategi daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang nasional yang sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah.

5.2.2 Arah Kebijakan Transformasi

Menguraikan arah kebijakan yang menggambarkan upaya transformasi mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional serta menggambarkan upaya transformasi yang spesifik dengan kebutuhan/karakteristik daerah dan mendukung tercapainya visi daerah.

5.2.3 Indikator Utama Pembangunan Daerah

Menguraikan Indikator Utama Pembangunan Daerah sebagai alat ukur pencapaian dari tujuan pembangunan daerah serta kontribusi terhadap tujuan pembangunan nasional jangka panjang. Indikator Utama Pembangunan Daerah yang ditetapkan mengacu pada 45 (empat puluh lima) indikator RPJP Nasional Tahun 2025-2045.

Bab VI Penutup

Memuat tentang Pedoman Transisi, kaidah pelaksanaan, kerangka pengendalian dan evaluasi, mekanisme perubahan dan pembiayaan pembangunan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran Umum Kondisi Daerah memberikan gambaran kondisi daerah baik yang bersifat statis maupun yang dinamis sesuai perkembangan yang terjadi akibat pembangunan yang dilakukan. Kondisi statis seperti misalnya posisi geografis sedangkan yang bersifat dinamis adalah kondisi demografis dan kondisi sosial. Kondisi dinamis demografis digambarkan dengan proyeksi jumlah penduduk dengan kerangka waktu 5 (lima) tahunan atau jangka menengah. Selanjutnya proyeksi tersebut digunakan untuk menentukan proyeksi kebutuhan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh kota.

Selain gambaran kondisi daerah dengan perkembangannya, bab ini juga menggambarkan hasil pelaksanaan RPJPD 2005 – 2025 dalam bentuk Hasil Evaluasi RPJPD 2005 – 2025. Hasil evaluasi tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penyusunan rencana yang lebih efektif dan efisien. Hasil evaluasi juga dipergunakan untuk pertimbangan perencanaan berkelanjutan dengan memanfaatkan rekomendasi dari evaluasi.

Gambaran umum kondisi daerah dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis terhadap peluang, tantangan, ancaman, dan kesempatan untuk bahan dasar menemukan masalah dasar dan isu strategis.

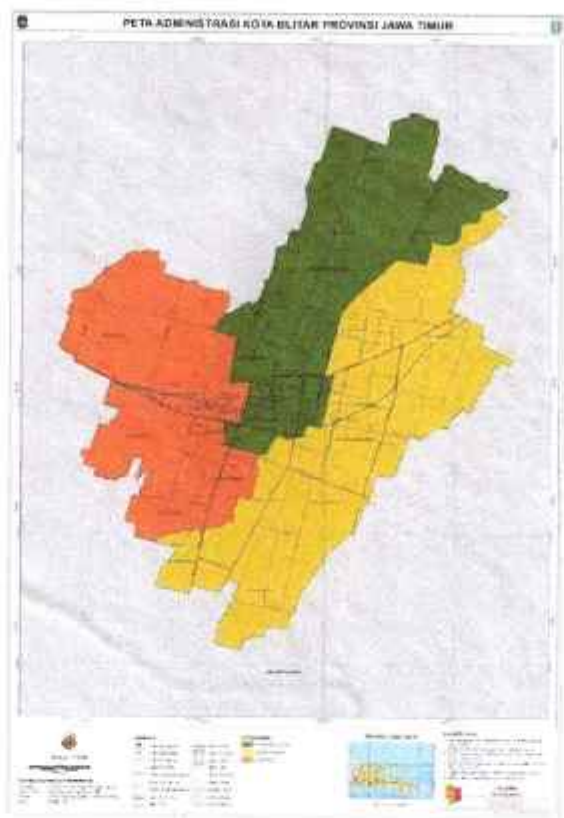
2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Geografi

2.1.1.1 Wilayah Administrasi

Secara geografis, wilayah Kota Blitar terletak 112°14'–112°28' Bujur Timur dan 8°2'–8°8' Lintang Selatan dengan luas wilayah 33,203 km² yang dibagi dalam tiga wilayah kecamatan, yaitu Sananwetan, Kepanjenkidul, dan Sukorejo. Kota Blitar terletak di sebelah selatan Provinsi Jawa Timur dan kota ini merupakan wilayah terkecil kedua di provinsi Jawa Timur setelah Kota Mojokerto serta wilayahnya hanya berbatasan langsung dengan Kabupaten Blitar. Adapun batas-batas wilayah Kota Blitar adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: Kecamatan Garum dan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar
2. Sebelah Barat: Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar
3. Sebelah Selatan: Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
4. Sebelah Timur: Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Garum Kabupaten Blitar



Sumber: petatematikindo.wordpress.com

Gambar 2.1

Peta Administrasi Kota Blitar

Wilayah Kota Blitar meliputi 3 kecamatan, yaitu Kepanjenkidul, Sukorejo, dan Sananwetan. Masing-masing kecamatan tersebut terdiri atas 7 kelurahan. Adapun luas masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Luas Wilayah Kota Blitar

NO	KELURAHAN	KODE	KECAMATAN	LUAS (KM2)
1	Kepanjenkidul	35.72.01.1001	Kepanjenkidul	1,043
2	Ngadirejo	35.72.01.1002	Kepanjenkidul	1,928
3	Sentul	35.72.01.1003	Kepanjenkidul	2,287
4	Kauman	35.72.01.1004	Kepanjenkidul	0,765
5	Tanggung	35.72.01.1005	Kepanjenkidul	2,449
6	Bendo	35.72.01.1006	Kepanjenkidul	1,254
7	Kepanjenlor	35.72.01.1007	Kepanjenkidul	0,7
8	Pakunden	35.72.02.1001	Sukorejo	2,31
9	Blitar	35.72.02.1002	Sukorejo	1,448
10	Tlumpu	35.72.02.1003	Sukorejo	1,081
11	Turi	35.72.02.1004	Sukorejo	0,438
12	Karang Sari	35.72.02.1005	Sukorejo	0,863
13	Sukorejo	35.72.02.1006	Sukorejo	1,384
14	Tanjungsari	35.72.02.1007	Sukorejo	2,604
15	Gedog	35.72.03.1001	Sananwetan	2,95
16	Plosokerep	35.72.03.1002	Sananwetan	1,164
17	Klampok	35.72.03.1003	Sananwetan	1,557
18	Sananwetan	35.72.03.1004	Sananwetan	2,154
19	Rembang	35.72.03.1005	Sananwetan	0,869
20	Karangtengah	35.72.03.1006	Sananwetan	1,899
21	Bendogerit	35.72.03.1007	Sananwetan	2,055
JUMLAH				33,203

Sumber: Badan Informasi Geospasial, 2022

Iklim di Kota Blitar sama dengan wilayah lain di Indonesia, yaitu tropis dengan musim hujan antara Oktober hingga Maret dan musim kemarau antara April hingga September.

Jenis tanah di Kota Blitar didominasi oleh tanah andosol dan regosol. Tanah andosol merupakan jenis tanah yang terbentuk dari proses vulkanis. Tanah ini memiliki ciri warna gelap kecoklatan, bersifat gembur, serta memiliki kadar organik dan kadar air tinggi. Tanah andosol berpotensi untuk dijadikan lahan pertanian dan agrowisata.

Tanah regosol merupakan jenis tanah yang juga terbentuk dari peristiwa vulkanis. Tanah ini memiliki ciri berupa tekstur tanah yang kasar, berwarna keabuan, cenderung gembur, mempunyai kemampuan menyerap air yang tinggi, serta kaya akan unsur hara. Tanah regosol juga berpotensi untuk dimanfaatkan untuk pertanian.

2.1.1.2 Topografi

Topografi di Kota Blitar terbagi menjadi 3 bagian menurut ketinggian dan kemiringan lerengnya, yaitu utara, tengah, dan selatan. Kota Blitar bagian utara memiliki ketinggian 245 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan 2-15°. Kota Blitar bagian tengah memiliki ketinggian rata-rata sebesar 185 meter dengan ketinggian 0-2°. Sementara itu, Kota Blitar bagian selatan memiliki ketinggian rata-rata 140 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan lereng berkisar 0-2°. Rata-rata ketinggian di Kota Blitar secara keseluruhan adalah 156 meter di atas permukaan air laut dengan perbedaan ketinggian antara 25 hingga 50 meter. Maka dari itu, Kota Blitar dapat dikategorikan sebagai daerah dengan dataran rendah atau datar.

Tabel 2.2

Tinggi Wilayah Di Atas Permukaan Laut Kota Blitar

Wilayah	Ketinggian (mdpl)	Kemiringan (°)
Kota Blitar Utara	245	2 - 15
Kota Blitar Tengah	185	0 - 2
Kota Blitar Selatan	140	0 - 2

Sumber: KLHS Kota Blitar Tahun 2025-2045

2.1.1.3 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan eksisting diklasifikasikan menjadi beberapa kelas penggunaan lahan yang terdiri dari budidaya kehutanan, budidaya kelautan, dan budidaya non kehutanan, dan permukiman perdesaan atau perkotaan. Penggunaan lahan di Kota Blitar didominasi oleh penggunaan lahan pertanian, terutama persawahan. Lahan tersebut menempati luasan 1157,14 ha atau 35,53 persen dari luas wilayah total, pekarangan yang menempati luasan 880,23 hektare atau 27,03 persen dari luas wilayah total, dan kebun yang menempati luasan 471,98 hektare atau 14,49 persen dari luas wilayah total.

Tabel 2.3
Persentase Penggunaan Lahan Kota Blitar

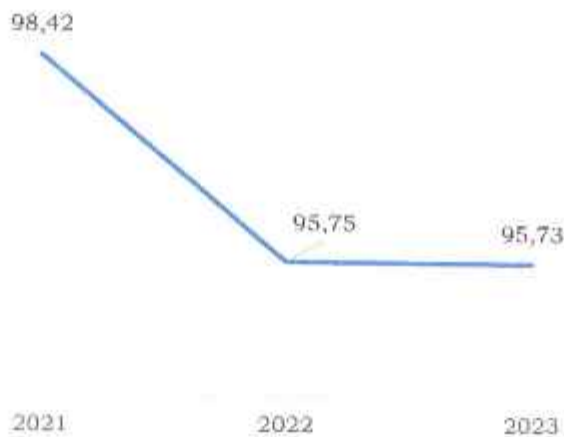
No.	Jenis Penutup / Penggunaan Lahan	Luas	
		Ha	%
1.	Bangunan	396,86	12,18
2.	Fasilitas Hankam	22,17	0,68
3.	Fasilitas Kesehatan	14,68	0,45
4.	Fasilitas Olahraga	29,54	0,91
5.	Fasilitas Pendidikan	58,14	1,79
6.	Fasilitas Peribadatan	3,74	0,11
7.	Fasilitas Perkantoran	45,18	1,39
8.	Fasilitas Sosial Budaya	2,33	0,07
9.	Fasilitas Transportasi	9,30	0,29
10.	Hotel/Losmen	0,81	0,02
11.	Industri dan Gudang	40,55	1,24
12.	Industri Pangan	0,03	0,00
13.	Industri Rokok	0,51	0,02
14.	Industri Roti	0,20	0,01
15.	Jalan	114,38	3,51
16.	Kebun	471,98	14,49
17.	Pariwisata	7,90	0,24
18.	Pekarangan	880,23	27,03
19.	Pemukaman	3,49	0,11
20.	Perdagangan dan Jasa	69,76	2,14
21.	Perdagangan dan Jasa (bank)	0,51	0,02
22.	Perdagangan dan Jasa (bengkel)	0,33	0,01
23.	Perdagangan dan Jasa (kios)	2,04	0,06
24.	Perdagangan dan Jasa (pasar)	3,01	0,09
25.	Perdagangan dan Jasa (pertokoan)	9,64	0,30
26.	Perdagangan dan Jasa (show room motor)	0,21	0,01
27.	Perdagangan dan Jasa (SPBU)	0,37	0,01
28.	Perdagangan dan Jasa (SPBE)	0,15	0,00
29.	Perdagangan dan Jasa (warung)	1,84	0,06
30.	Rel kereta api	4,39	0,13
31.	Ruang Terbuka Hijau	37,75	1,16
32.	Sawah	1157,14	35,53
33.	Sungai	5,46	0,17
34.	TPA	0,26	0,01
TOTAL		3257,00	100,00

Sumber: KLHS Kota Blitar 2025-2045

2.1.1.4. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Tujuan penataan ruang adalah mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Penataan ruang mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia dan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Berdasarkan tujuan penataan ruang maka perlu dilakukan secara konsisten antara pemanfaatan ruang dengan perencanaan tata ruang. Berikut disampaikan persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang Kota Blitar sebagai berikut:



Gambar 2.2
Kesesuaian Pemanfaatan Tata Ruang Kota Blitar Tahun 2021- 2023

Kinerja sasaran meningkatnya kualitas penataan ruang dengan indikator kinerja persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang, pada tahun 2023 terealisasi 95,73 persen dari target 95,40 persen sehingga tercapai 100,35 persen dan masuk dalam kategori sangat berhasil.

Pembangunan infrastruktur baik bina marga, cipta karya, maupun sumber daya air diarahkan tidak semata-mata mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan, tetapi harus tetap menjaga kelestarian lingkungan. Pencapaian kesesuaian pemanfaatan tata ruang selama 2 (dua) tahun terakhir mengalami penurunan yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman banyak pihak bahwa berkegiatan harus memperhatikan RTRW dan RDTR.

Data kesesuaian pemanfaatan ruang Kota Blitar dijabarkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.4
Data Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kota Blitar Tahun 2023

RDTR Kota Blitar Tahun 2017-2037		Penyimpangan	Persentase Kesesuaian
Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Total Luas (Ha)	
KAWASAN LINDUNG			
Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH Jalur Hijau Jalan, RTH Taman & Hutan Kota, RTH Fungsi Tertentu)	50.84	9.58	81.16
Kawasan Sempadan Mata Air	85.78	0.47	99.45
Kawasan Sempadan Rel KA	21.14	18.00	14.84
Kawasan Sempadan SUTT	30.25	7.43	75.44
Kawasan Sempadan Sungai	155.05	28.09	81.88
Kawasan Sempadan Embung	0.26	0.00	100.00
LUAS KETIDAKSESUAIAN PADA KAWASAN LINDUNG		63.58	
KAWASAN BUDIDAYA			
Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	34.81	17.68	49.21
Kawasan Industri (Industri Kecil & Aneka Industri)	69.19	16.65	75.94
Kawasan Olahraga	31.38	3.20	89.79
Kawasan Pariwisata	12.21	2.17	82.27
Kawasan Pelayanan Kesehatan	13.7	1.14	91.70
Kawasan Pelayanan Pendidikan	56.52	4.14	92.67
Kawasan Pelayanan Peribadatan	3.08	0.36	88.38
Kawasan Pelayanan Sosial Budaya	2.42	1.31	45.79
Kawasan Pelayanan Transportasi	4.33	0.00	100.00
Kawasan Perdagangan dan Jasa	286.92	1.56	99.46
Kawasan Perkantoran	39.77	7.21	81.87
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	13.41	0.06	99.55
Kawasan Pertanian	681.43	13.51	98.02
Kawasan Perumahan	1669.5	6.53	99.61
Kawasan Pembangkit Listrik	1.63	0.00	100.00
TPA	5.35	0.00	100.00
LUAS KETIDAKSESUAIAN PADA KAWASAN BUDIDAYA		75.50	
LUAS TOTAL KETIDAKSESUAIAN		139.08	
LUAS TOTAL KESESUAIAN		3118.92	
PERSENTASE KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG			95,73

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, 2023

2.1.1.5. Lingkungan Hidup

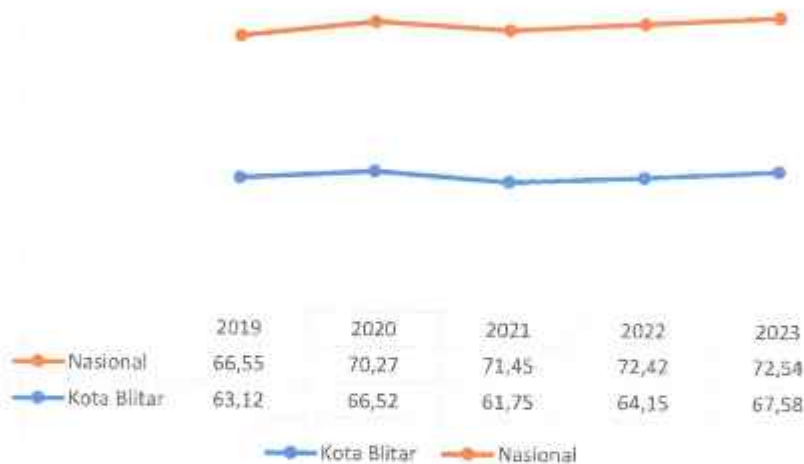
Indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu Indeks Lingkungan Hidup (IKLH). Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL).

Tabel 2.5
**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Blitar
Tahun 2019 - 2023**

No	Tahun	Kab/Kota	IKU	IKA	IKL	IKLH	RATING IKLH
1.	2019	Kota Blitar	82,77	55,33	54,23	63,12	Sedang
2.	2020	Kota Blitar	82,63	56,32	54,23	66,52	Sedang
3.	2021	Kota Blitar	83,76	51,58	38,52	61,75	Sedang
4.	2022	Kota Blitar	85,9	59,73	31,5	64,15	Sedang
5.	2023	Kota Blitar	85,83	67,78	33,51	67,58	Sedang

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar, 2023

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Blitar Tahun 2023 tercapai 67,58 dan termasuk ke dalam kategori sedang. Peringkat IKLH Kota Blitar secara nasional yaitu peringkat ke 252 dari 514 kabupaten/kota dan peringkat 12 dari 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur. Meski masih dalam kategori sedang, namun berdasarkan tabel diatas diperoleh informasi bahwa nilai Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Lahan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh ketaatan sektor industri, ternak dan sektor domestik serta upaya pembinaan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar. Sedangkan untuk meningkatkan nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) maka perlu dilakukan pengendalian terhadap faktor penghambat terwujudnya peningkatan IKL dengan menempuh langkah-langkah strategis antara lain melakukan penanaman pohon yang memiliki tajuk lebar di wilayah Kota Blitar.



Gambar 2.3
Perbandingan IKLH Kota Blitar dengan Nasional
Tahun 2019 – 2023

2.1.1.5.1 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Secara geografis, Kota Blitar terletak diujung selatan Provinsi Jawa Timur dengan ketinggian 156 m dari permukaan air laut dengan suhu udara cukup sejuk rata-rata 24°C- 34°C karena berada di kaki Gunung Kelud. Karena seluruh wilayahnya adalah wilayah perkotaan, yang berupa pemukiman, perdagangan, layanan publik, sawah pertanian, kebun campuran dan pekarangan, maka sebagai penggerak ekonomi Kota Blitar mengandalkan potensi diluar sumber daya alam, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Potensi tersebut didukung dengan kekuatan demografi Kota Blitar yang terus mengalami kenaikan cukup signifikan. Namun, peningkatan jumlah penduduk memberikan konsekuensi tersendiri bagi keberlangsungan lingkungan. Kualitas dan kondisi wilayah menjadi semakin menurun akibat adanya kegiatan manusia yang tidak memperhatikan aspek keberlanjutan dari fungsi lingkungan hidup. Hal lain yang menyebabkan penurunan kualitas lingkungan adalah terjadinya ketidaksesuaian penggunaan ruang, antara lain ditunjukkan dengan meningkatnya lahan kritis, bencana, dan pelanggaran peruntukan tata ruang, dimana banyak kawasan lindung yang berubah fungsi.

Kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lainnya dan keseimbangan antar keduanya (daya dukung lingkungan hidup) serta kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya (daya tampung lingkungan hidup) penting untuk diketahui, dipahami dan dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan dan perencanaan pemanfaatan ruang.

Kota Blitar, secara ecoregion didominasi dataran fluvial gunung api (proses sungai dan vulkanik) sehingga berpotensi tinggi dalam kemampuan daya dukung dan daya tampung

lingkungan hidup, khususnya aspek potensi air dan kualitas tanah. Kota Blitar merupakan ecoregion potensial karena masih terdukung dengan pemanfaatan ruang dan lahan yang cukup aman, yang ditandai dengan masih dominannya pemanfaatan sawah, pekarangan dan kebun (lebih dari separuh). Kondisi ini akan menyumbang kondisi kualitas lingkungan hidup dan daya dukung jasa ekosistem yang baik.

- a. Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Jasa Ekosistem fungsi penyedia.

Berpotensi tinggi sebagai penyedia pangan dan air bersih (khususnya air tanah), dimana lebih dari separuh wilayahnya memiliki kelas tinggi sampai sangat tinggi. Selain itu juga potensi serat dan sumber daya primer yang didukung masih banyaknya tanaman pekarangan dan kebun campuran.

- b. Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Jasa Ekosistem fungsi pengaturan.

Jasa ekosistem pengaturan iklim dan udara tergolong sedang, karena meningkat pemanfaatan ruang untuk areal terbangun. Sedangkan untuk jasa limpasan, banjir dan pencegahan bencana berpotensi tinggi untuk mengurangi risiko dikarenakan masih cukup dominannya liputan sawah, vegetasi disekitar sungai dan juga beberapa tanaman kebun (tahunan).

- c. Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Jasa Ekosistem fungsi budaya.

Kota Blitar memiliki jasa ekosistem tempat tinggal dan ruang hidup yang sangat tinggi. Hampir semua wilayah sesuai dikembangkan permukiman karena aspek ecoregion yang baik. Potensi wisata lebih berbasis budaya, sehingga potensi ekowisata alam rendah. Namun di beberapa bagian wilayah memiliki view (sajana) sawah dan hijauan yang menarik.

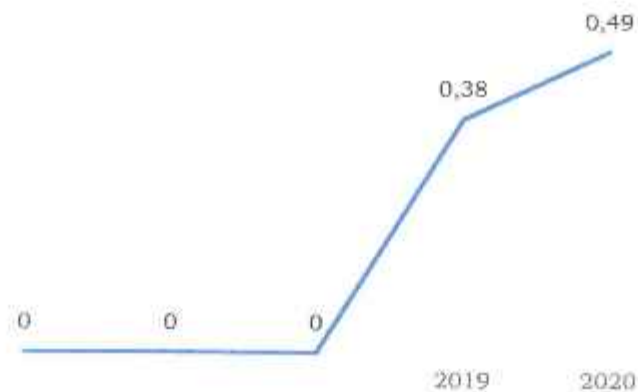
- d. Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Jasa Ekosistem fungsi pendukung.

Memiliki potensi besar dalam pembentukan tanah dan kesuburan serta biodiversitas. Hal ini dikarenakan tingginya jasa ekosistem akibat posisi ecoregion dan pemanfaatan lahan yang menguntungkan karena masih dominannya *open space* atau wilayah *green area* di kota Blitar.

2.1.1.6. Kebencanaan

Kota Blitar memiliki potensi risiko bencana yang perlu diperhatikan dalam upaya penanggulangan dan mitigasi. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan indikator daerah yang terkait dengan kebencanaan. IKD merupakan instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Dari IKD, setiap

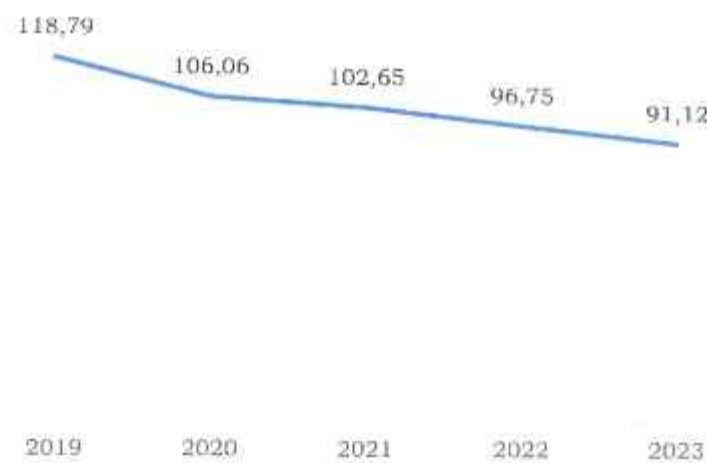
daerah mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan Langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko. Sedangkan IRB merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko bencana di suatu wilayah atau lokasi tertentu. Indeks ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi risiko bencana alam atau risiko terkait bencana manusia, serta untuk membantu pemangku kebijakan dan peneliti dalam perencanaan mitigasi bencana dan manajemen risiko. Adapun capaian untuk IKD dan IRB Kota Blitar adalah sebagai berikut :



Sumber: BPBD Kota Blitar, 2024

Gambar 2.4
**Indeks Ketahanan Daerah Kota Blitar
Tahun 2019 - 2023**

Capaian Indeks Ketahanan Daerah Kota Blitar tahun 2023 yaitu 0,43. Hal ini dikandung maksud bahwa kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan ancaman dan potensi kerugian akibat bencana secara terstruktur, terencana dan terpadu dikategorikan sedang.



Sumber: BPBD Kota Blitar, 2024

Gambar 2.5
**Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Blitar
Tahun 2019 - 2023**

Capaian Indeks Risiko Bencana Kota Blitar tahun 2023 yaitu 91,12, termasuk dalam kategori sedang. Untuk masa mendatang, kejadian, dampak, dan risiko bencana tidak bisa dihindari karena jumlah penduduk yang terus meningkat, urbanisasi, kemiskinan, pengaruh perubahan iklim global, dan pembangunan infrastruktur yang menimbulkan risiko bencana baru. Oleh sebab itu, setelah mengetahui risiko bencana di suatu wilayah, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan tata kelola upaya penanggulangan bencana yang lebih baik.

Kota Blitar memiliki potensi risiko bencana yang perlu diperhatikan dalam upaya penanggulangan dan mitigasi. Data kajian risiko bencana Kota Blitar menunjukkan adanya sembilan jenis bahaya yang berpotensi terjadi, dengan kelas risiko berdasarkan luas wilayah terdampak, yaitu tinggi, sedang dan rendah.

Tabel 2.6
Jenis Ancaman/Bahaya Bencana di Kota Blitar

JENIS BAHAYA	LUAS BAHAYA			TOTAL LUAS (Ha)	KELAS
	RENDAH	SEDANG	TINGGI		
Banjir Lahar Hujan	-	-	40,72	70,72	Tinggi
Cuaca Ekstrem	-	-	3394,07	3394,07	Tinggi
Gempa Bumi	-	3394,07	-	3394,07	Sedang
Kebakaran Gedung dan Pemukiman	20,25	99,14	40,49	159,89	Sedang
Letusan Gunung Api Kelud	3394,07	-	-	3394,07	Rendah
Kekeringan	3394,07	-	-	3394,07	Rendah
Banjir Genangan	20,25	99,14	40,49	159,89	Sedang
Tanah Longsor/Abrasi Sungai	-	40,72	-	40,72	Sedang
Covid-19	-	-	3394,07	3394,07	Tinggi

Sumber: KLHS Kota Blitar 2025-2045

Dari sembilan jenis bahaya tersebut, tiga di antaranya, yaitu banjir lahar hujan, cuaca ekstrem, dan Covid-19, masuk dalam kelas risiko tinggi dengan luas wilayah terdampak yang signifikan. Risiko tinggi menunjukkan potensi dampak yang besar terhadap kehidupan dan lingkungan di Kota Blitar. Empat jenis bahaya, termasuk gempa bumi, kebakaran gedung dan pemukiman, banjir genangan, dan tanah longsor/abrasi sungai, masuk dalam kelas risiko sedang dengan luas wilayah terdampak yang cukup signifikan.

Sementara itu, dua jenis bahaya, yaitu letusan gunung api Kelud dan kekeringan, memiliki risiko rendah dengan luas wilayah terdampak yang lebih terlokalisasi. Meskipun memiliki risiko rendah, keberadaan risiko tersebut tetap perlu diwaspadai dan dikelola dengan baik.

Tabel 2.7
Potensi Penduduk Terdampak di Kota Blitar

JENIS BENCANA	JUMLAH PENDUDUK TERPAKAR	JUMLAH KELOMPOK RENTAN	KELAS
Banjir Lahar Hujan	1.656	304	Sedang
Cuaca Ekstrem	132.097	23.794	Tinggi
Gempa Bumi	132.097	23.794	Tinggi
Kebakaran Gedung dan Pemukiman	132.097	23.794	Tinggi
Letusan Gunung Api Kelud	132.097	23.794	Tinggi
Kekeringan	132.097	23.794	Tinggi
Banjir Genangan	132.097	23.794	Tinggi
Tanah Longsor/Abrasi Sungai	1.656	304	Sedang
Covid-19	132.097	23.794	Tinggi

Sumber: KLHS Kota Blitar 2025-2045

Kota Blitar memiliki potensi dampak bencana yang signifikan terhadap penduduknya, seperti tergambar dalam data potensi penduduk terdampak pada berbagai jenis bencana. Data tersebut mencakup berbagai jenis bencana, mulai dari cuaca ekstrem, gempa bumi, kebakaran gedung dan pemukiman, letusan gunung api Kelud, kekeringan, banjir genangan, hingga pandemi Covid-19.

Dari data tersebut, terlihat bahwa sejumlah besar penduduk Kota Blitar dapat terpapar dan terdampak oleh bencana. Bencana seperti cuaca ekstrem, gempa bumi, kebakaran gedung dan pemukiman, letusan Gunung Api Kelud, kekeringan, banjir genangan, dan Covid-19 masuk dalam kategori tinggi dengan jumlah penduduk yang terpapar mencapai puluhan ribu hingga ratusan ribu orang.

Namun, perlu diperhatikan bahwa bencana banjir lahar hujan dan tanah longsor/abrasi sungai memiliki potensi dampak yang lebih terlokalisasi, sehingga kategori risiko terhadap penduduk terpapar berada pada tingkat sedang. Wilayah yang terpapar pada jenis bencana ini lebih terkonsentrasi di sekitar sungai-sungai besar yang menjadi jalur aliran bencana lahar hujan.

Tabel 2.8
Potensi Kerugian Bencana di Kota Blitar

JENIS BENCANA	KERUGIAN (MILYAR RUPIAH)			KELAS
	FISIK	EKONOMI	TOTAL	
Banjir Lahar Hujan	4.455	47.111	51.566	Sedang

JENIS BENCANA	KERUGIAN (MILYAR RUPIAH)			KELAS
	FISIK	EKONOMI	TOTAL	
Cuaca Ekstrim	2.044.725	6.156.825	8.201.550	Tinggi
Gempa Bumi	2.044.725	6.156.825	8.201.550	Tinggi
Kebakaran Gedung dan Pemukiman	2.044.725	6.156.825	8.201.550	Tinggi
Letusan Gunung Api Kelud	2.044.725	6.156.825	8.201.550	Tinggi
Kekeringan	2.044.725	6.156.825	8.201.550	Tinggi
Banjir Genangan	2.044.725	6.156.825	8.201.550	Tinggi
Tanah Longsor/Abrasi Sungai	4.455	47.111	51.566	Sedang
Covid-19	2.044.725	6.156.825	8.201.550	Tinggi

Sumber: KLHS Kota Blitar 2025-2045

Kota Blitar menghadapi potensi kerugian yang signifikan akibat berbagai jenis bencana yang mungkin terjadi. Data kerugian tersebut mencakup aspek fisik dan ekonomi, memberikan gambaran lebih jelas tentang dampak yang dapat terjadi pada berbagai sektor.

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa jenis bencana seperti cuaca ekstrem, gempa bumi, kebakaran gedung dan pemukiman, letusan gunung api Kelud, kekeringan, banjir genangan, dan Covid-19 dapat mengakibatkan tingkat kerugian yang tinggi, dengan total kerugian mencapai triliunan rupiah. Cuaca ekstrem menyebabkan kerugian terbesar dengan total mencapai 8.201.550 milyar rupiah, yang terdiri dari kerugian fisik dan ekonomi.

Yang juga menjadi catatan, bahwa bencana banjir lahar hujan dan tanah longsor/abrasi sungai memiliki tingkat kerugian dalam kategori sedang, meskipun kerugian yang dihasilkan juga cukup signifikan, mencapai 51.566 milyar rupiah untuk setiap bencana.

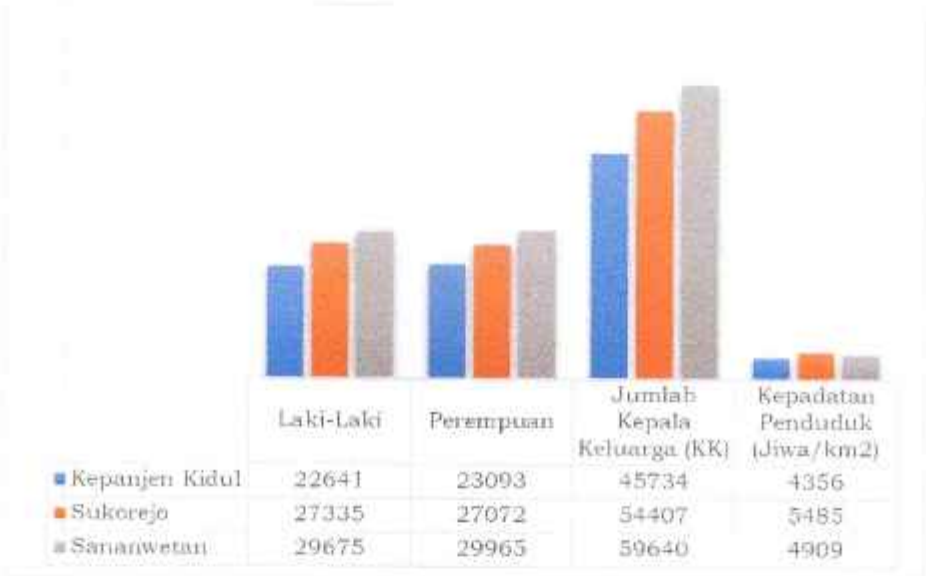
2.1.2 Demografi

Jumlah penduduk Kota Blitar tahun 2023 mencapai 159.781 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebesar 54.646 KK. Penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki dengan persentase penduduk perempuan sebesar 50,14 persen sedangkan persentase penduduk laki-laki sebanyak 49,85 persen. Rata-rata kepadatan penduduk Kota Blitar tahun 2023 sebesar 4.916 jiwa/km² yang termasuk kategori kepadatan penduduk rendah. Ditinjau per kecamatan, jumlah penduduk paling banyak terdapat di Kecamatan Sananwetan dengan persentase sebesar 37,33 persen, namun kepadatan penduduk paling tinggi berada di Kecamatan Sukorejo sebesar 5.485 jiwa/km².

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk Kota Blitar Menurut Jenis Kelamin,
Jumlah Kepala Keluarga dan Kepadatan Penduduk per
Kecamatan Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)
	Laki-laki	Perempuan	Total		
Kepanjen kidul	22.641	23.093	45.734	15.597	4.356
Sukorejo	27.335	27.072	54.407	18.726	5.485
Sananwet an	29.675	29.965	59.640	20.323	4.909
KOTA BLITAR	79.651	80.130	159.781	54.646	4.916

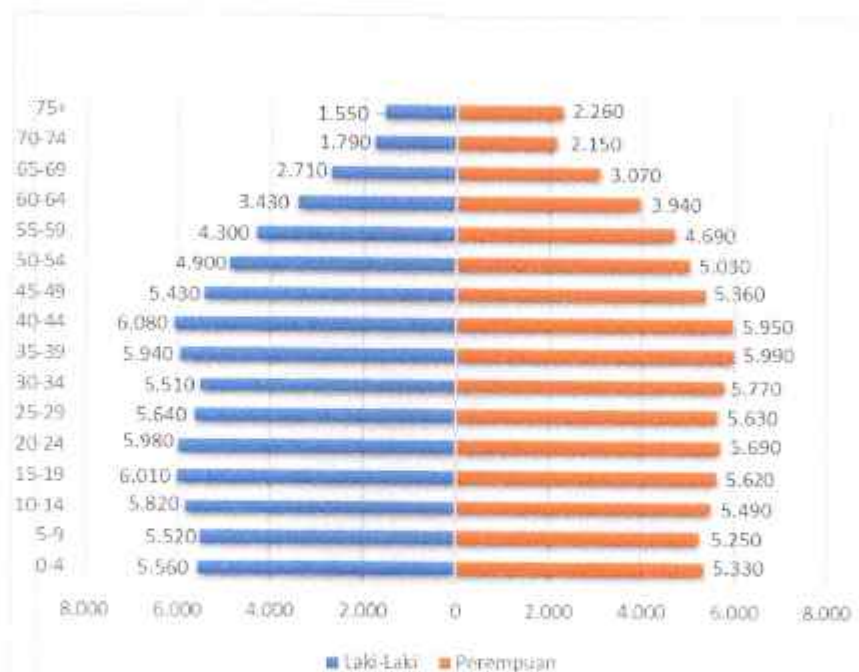
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Gambar 2.6
Data Penduduk Kota Blitar Menurut Jenis Kelamin, Jumlah
Kepala Keluarga dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan
Tahun 2023

Ditinjau dari data kelompok umur, penduduk Kota Blitar tahun 2023 didominasi oleh penduduk pada usia produktif dengan rentang usia 15 – 64 tahun sebanyak 106.890 jiwa atau 66,90 persen dari total jumlah penduduk.



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Gambar 2.7
Data Jumlah Penduduk Kota Blitar Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2023

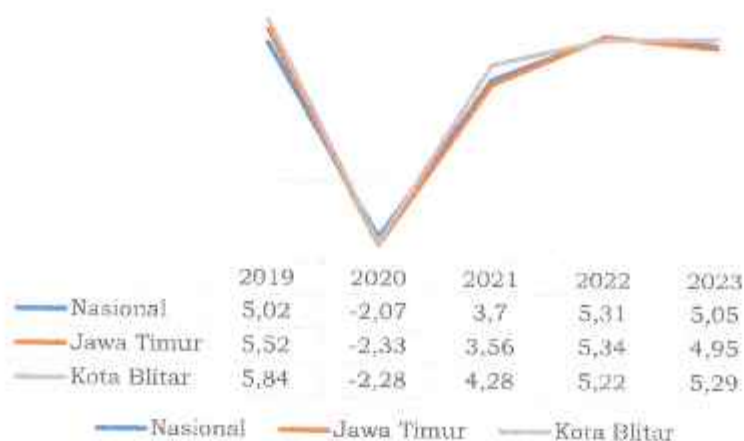
2.2. Aspek Kesejahteraan Sosial dan Budaya

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan konsep yang mengukur perubahan dalam nilai total produksi ekonomi suatu wilayah selama periode waktu tertentu. Analisis data pertumbuhan ekonomi penting untuk merancang kebijakan ekonomi dan pembangunan yang sesuai dengan kondisi aktual dan perubahan ekonomi, serta untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang mungkin perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi di masa mendatang.

Ekonomi Kota Blitar mulai pulih pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 4,28 persen. Hal ini mengindikasikan keberhasilan usaha Kota Blitar mengatasi dampak pandemi. Pada tahun 2022 ekonomi mengalami peningkatan pertumbuhan menjadi 5,22 persen dan terus meningkat sebesar 0,07 persen menjadi 5,29 persen pada tahun 2023. Angka ini masih lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan Provinsi Jawa Timur tahun 2023 yang sebesar 4,95 persen, juga diatas laju pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,05 persen. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kota Blitar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun tersaji pada tabel berikut.



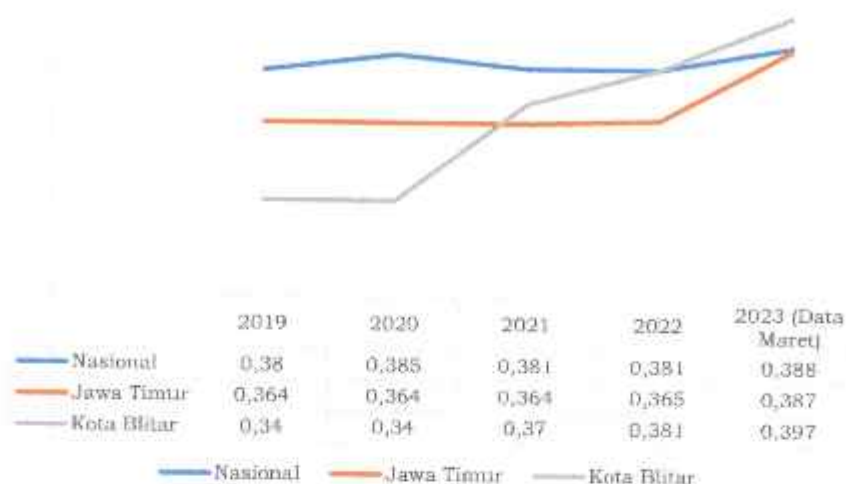
Sumber : Kota Blitar Dalam Angka,2024

Gambar 2.8
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Blitar Tahun 2019-2023

2.2.1.2. Indeks Gini

Indeks Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Semakin tinggi nilai Indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Jika nilai Indeks Gini adalah nol maka artinya terdapat pemerataan sempurna pada distribusi pendapatan, sedangkan jika bernilai satu berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna.

Pada tahun 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia secara Nasional yang diukur menggunakan Indeks Gini adalah sebesar 0,388, sedangkan Indeks Gini Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 0,387. Dibanding dengan Indeks Gini Nasional dan Provinsi Jawa Timur, Indeks Gini pada Kota Blitar sedikit lebih rendah daripada Nasional dan Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 0,397. Angka ini mengalami penurunan 0,016 dari tahun 2022 yaitu sebesar 0,381. Dari data tersebut menunjukkan bahwa Kota Blitar memiliki tingkat ketidaksetaraan pendapatan yang lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Timur dan Nasional.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024

Gambar 2.9
Indeks Gini Kota Blitar Tahun 2019 – 2023

2.2.1.3. Angka Kemiskinan

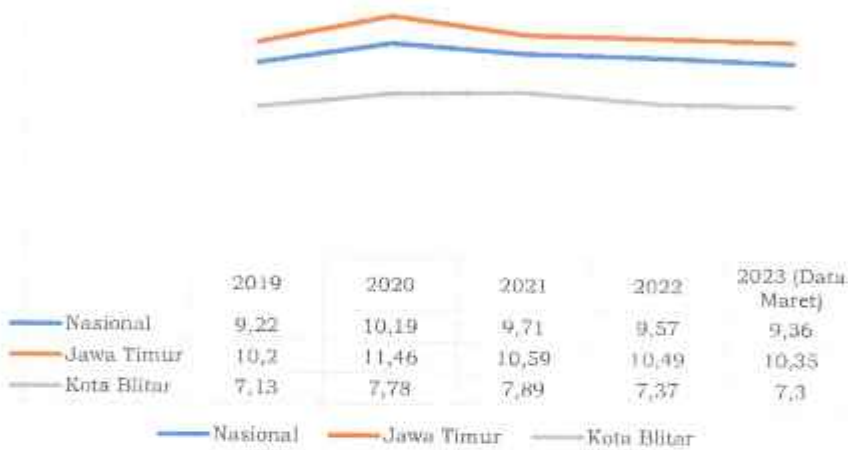
Kemiskinan dipandang sebagai keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan yang didefinisikan sebagai angka kemiskinan. Selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, angka kemiskinan di Kota Blitar terus mengalami penurunan.

Pada tahun 2021, angka kemiskinan di Kota Blitar mencapai 7,89. Pada tahun 2022 turun menjadi 7,37 atau turun sebesar 0,52 poin dari tahun 2021 dan terus turun menjadi 7,30 di tahun 2023 atau turun sebesar 0,07 poin dari tahun 2022. Kondisi ini juga diikuti oleh jumlah penduduk miskin di Kota Blitar yang berkurang sebanyak 0,68 ribu jiwa, dari 11,33 ribu jiwa pada 2021 menjadi 10,65 ribu jiwa di tahun 2022 atau turun sebesar 6 persen dan terus turun menjadi 10,61 ribu jiwa di tahun 2023 atau turun sebesar 0,38 persen dari tahun 2022. Berdasarkan grafik tren angka kemiskinan, dibandingkan dengan rata-rata kemiskinan Propinsi Jawa Timur dan Nasional, angka kemiskinan Kota Blitar masih dibawah rata-rata kemiskinan Propinsi Jawa Timur dan Nasional. Penurunan angka kemiskinan di Kota Blitar dari tahun 2022 ke 2023 sebesar 0,07 poin lebih tinggi daripada penurunan rata-rata kemiskinan Propinsi Jawa Timur dari 2022 ke 2023 sebesar 0,03 poin dan lebih rendah daripada penurunan rata-rata kemiskinan Nasional dari 2022 ke 2023 sebesar 0,21 poin.

Tabel. 2.10
Angka Kemiskinan Kota Blitar Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Angka kemiskinan	7,13	7,78	7,89	7,37	7,30
2.	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	10,10	11,10	11,33	10,65	10,61
3.	Garis Kemiskinan (per kapita per bulan)	456.778	465.868	481.229	517.363	568.280

Sumber: Berita Resmi Statistik, No. 5/10/3572 TH X/V, 23 Oktober 2023



Sumber: Berita Resmi Statistik, No. 5/10/3572 TH X/V, 23 Oktober 2023

Gambar 2.10
Angka Kemiskinan Kota Blitar Tahun 2019 sampai 2023

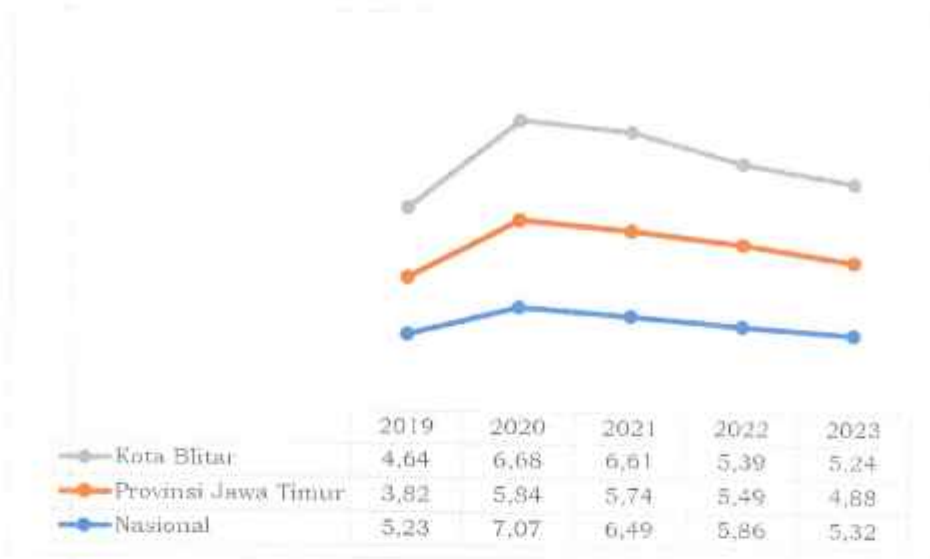
2.2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT hasil Sakernas (Survey Angkatan Kerja Nasional) bulan Agustus 2023 sebesar 5,24 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar lima orang pengangguran. Dibanding Agustus 2022 dimana TPT sebesar 5,39 persen, TPT pada Agustus 2023 mengalami penurunan sebesar 0,15 persen.

Tabel 2.11
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Blitar
Tahun 2019 - 2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	TPT	4,64	6,68	6,61	5,39	5,24
2.	Penduduk yang Bekerja (orang)	75.759	73.201	74.339	73.616	82.605
3.	Pengangguran (orang)	3.684	5.244	5.264	4.192	4.571

Sumber : Kota Blitar Dalam Angka, 2024

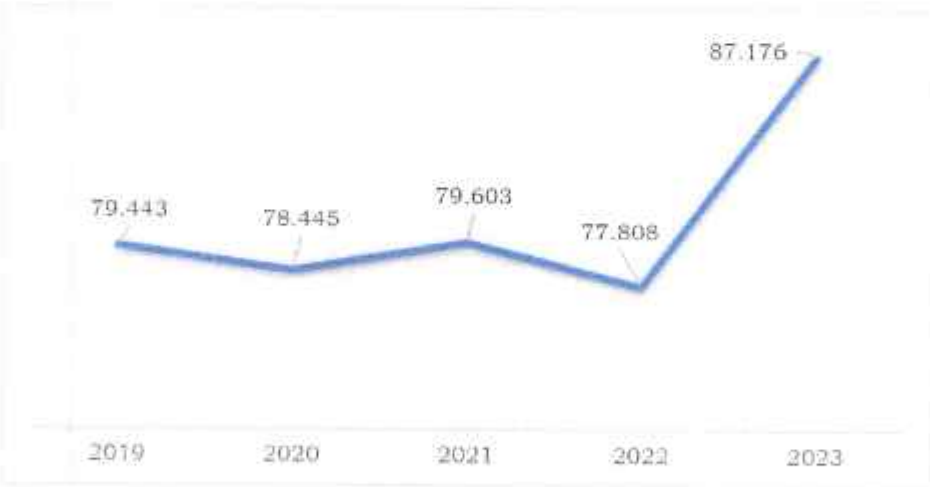


Sumber: Kota Blitar Dalam Angka, 2024

Gambar 2.11
**Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Blitar
Tahun 2019 – 2023**

2.2.1.5. Jumlah Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Data mengenai jumlah angkatan kerja di Kota Blitar dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi dan pertumbuhan yang berbeda-beda setiap tahun. Pada tahun 2023, jumlah Angkatan kerja di Kota Blitar mengalami kenaikan dari 77.808 pada tahun 2022 menjadi 87.176 pada tahun 2023.



Sumber: Kota Blitar Dalam Angka, 2024

Gambar 2.12
Jumlah Angkatan Kerja Kota Blitar Tahun 2019-2023

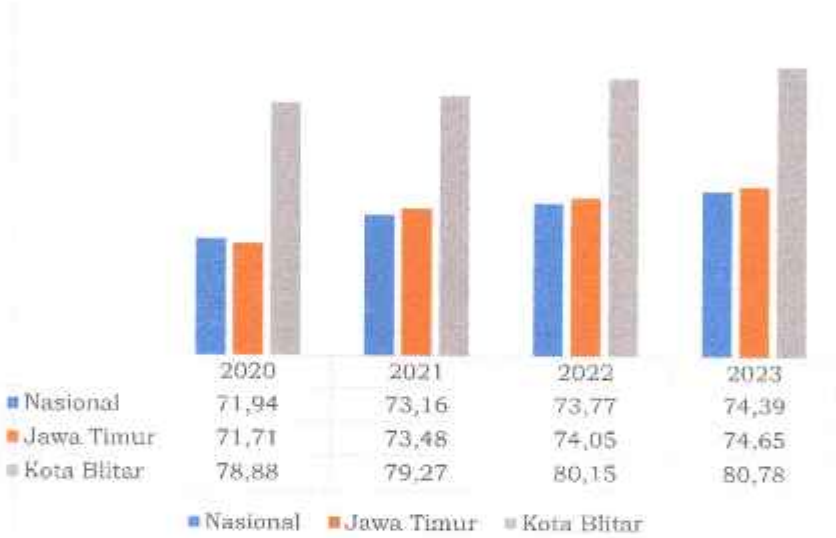
Dari data tersebut, dapat diambil beberapa insight. Pertama, fluktuasi tahunan jumlah angkatan kerja mencerminkan dinamika ekonomi lokal yang berubah-ubah, meliputi perubahan dalam peluang kerja dan iklim ekonomi. Kedua, pertumbuhan

angkatan kerja yang lebih signifikan terlihat pada tahun 2023 yang menunjukkan peningkatan partisipasi tenaga kerja. Namun, penurunan pada tahun 2020 dan 2022 menunjukkan adanya ketidakstabilan ekonomi yang dapat memengaruhi partisipasi angkatan kerja.

2.2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia

Kualitas hidup manusia di Kota Blitar terus mengalami kemajuan, hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kota Blitar tahun 2023 menempati peringkat tujuh di Jawa Timur dan termasuk status “sangat tinggi” dengan nilai 80,78 atau meningkat 0,63 poin dari tahun 2022.

Perkembangan IPM selama tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada Gambar berikut:



Sumber: Kota Blitar Dalam Angka, 2024

Gambar 2.13
IPM Kota Blitar Tahun 2019 – 2023

Peningkatan IPM tahun 2023 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, yang terdiri dari Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Pengeluaran Riil per Kapita. Berikut Tabel Indikator penyusun IPM dengan perkembangannya dari tahun 2019 – 2023:

Tabel 2.12
IPM Kota Blitar menurut Indikator Penyusunnya
Tahun 2019 – 2023

Indikator		Satuan	2020	2021	2022	2023
1		2	4	5	6	7
Umur Panjang dan Hidup Sehat						
Usia Harapan Hidup (UHH)	Hidup	Tahun	74,39	74,46	74,71	74,97

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	2	4	5	6	7
Pengetahuan					
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,32	14,33	14,56	14,57
Rata – Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,11	10,35	10,65	10,78
Standar Hidup Layak					
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	Ribu Rupiah	13.733	13.816	14.058	14.548
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	78,88	79,27	80,15	80,78

Sumber : Berita Resmi Statistik No. 07/12/3272/Th.IV, 13 Desember 2023

2.2.1.7. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB

Pajak daerah merupakan salah satu sumber Penerimaan Asli Daerah (PAD) yang paling potensial dalam memperbesar porsi PAD. Pajak memainkan peran yang penting dalam proses untuk menghasilkan penerimaan dan untuk menjalankan berbagai aktivitas dalam perekonomian. Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan di wilayah tersebut kepada pemerintah daerah tanpa adanya imbalan langsung yang seimbang yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan aturan perundangan yang berlaku.

Tabel 2.13

Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Tahun 2019 s.d 2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Penerimaan Pajak Daerah	44.650.054.610,03	37.530.670.035,90	38.279.290.179,35	45.120.805.461,10	56.381.185.255,00
PDRB (harga berlaku)	6.791.620.000,000,00	6.708.140.000,000,00	7.113.600.000,000,00	7.833.940.000,000,00	8.515.160.000,000,00
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,66	0,56	0,54	0,58	0,66

Sumber : BPKAD,2024

2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya

2.2.2.1. Sosial

2.2.2.1.1. Penyandang Masalah Sosial

Penyandang masalah sosial di Kota Blitar pada tahun 2023. Terdapat beberapa kategori penyandang masalah sosial yang mencakup keluarga fakir miskin, tuna susila, pengemis dan gelandangan dan gelandangan psikotik.

Jumlah keluarga fakir miskin terbesar yaitu berada di Kecamatan Sukorejo dengan jumlah 1.337 keluarga. Sementara itu di Kecamatan Kepanjenkidul jumlah keluarga fakir miskin yaitu 916 dan Kecamatan Sananwetan sejumlah 1.051 keluarga.

Jumlah tuna susila di Kecamatan Sukorejo yaitu 2 orang, Kecamatan Kepanjenkidul 1 orang sedangkan di Kecamatan Sananwetan tidak terdapat tua susila. Adanya 3 perempuan tuna susila ini menunjukkan perlu adanya perlindungan dan dukungan bagi perempuan di Kota Blitar.

Pengemis di Kota Blitar yang terdata sejumlah 10 orang pada tahun 2023 yang tersebar di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Sukorejo sebanyak 7 orang dan Kecamatan Kepanjenkidul sebanyak 3 orang. Sedangkan gelandangan dan gelandangan psikotik di Kota Blitar sejumlah 6 orang yang tersebar di Kecamatan Sukorejo sejumlah 4 orang dan di Kecamatan Kepanjenkidul sejumlah 2 orang.



Sumber: Kota Blitar Dalam Angka, 2024

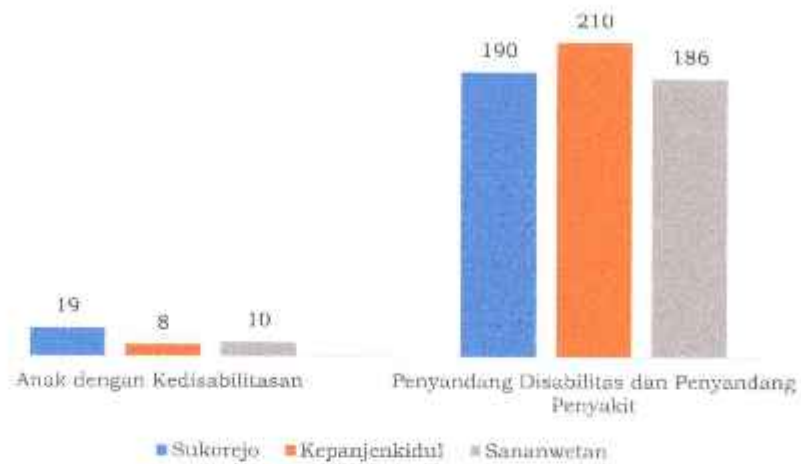
Gambar 2.14

Penyandang Masalah Sosial di Kota Blitar Tahun 2023

2.2.2.1.2. Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas & Penyandang Penyakit di tiga kecamatan jumlahnya cukup besar. Di Kecamatan Sukorejo jumlahnya yaitu 190 orang dengan 19 diantaranya adalah anak-anak, di Kecamatan Kepanjenkidul jumlahnya yaitu 210 orang dengan 8 diantaranya adalah anak-anak dan di Kecamatan Sananwetan jumlah penyandang disabilitas dan penyandang penyakit jumlahnya yaitu 186 orang dengan 10 diantaranya adalah anak-anak. Hal ini menunjukkan pentingnya perhatian terhadap penyandang cacat baik dalam hal aksesibilitas, layanan kesehatan, dan dukungan sosial. Upaya untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, termasuk penyandang penyakit kronis, harus menjadi prioritas.

Adanya 37 anak disabilitas menuntut kebijakan pendidikan inklusif yang lebih baik dan dukungan khusus untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus.



Sumber: Kota Blitar Dalam Angka, 2024

Gambar 2.15
Jumlah Penyandang Cacat di Kota Blitar Tahun 2023

Data ini memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai profil penyandang cacat di Kota Blitar dan akan menjadi landasan bagi upaya – upaya perbaikan dan pengembangan program yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Langkah-langkah konkrit diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesempatan bagi penyandang cacat dalam masyarakat.

2.2.2.1.3. Masalah Sosial Anak

Masalah sosial yang dihadapi anak-anak di Kota Blitar pada tahun 2023. Terdapat beragam kategori masalah yang mencakup anak jalanan sebanyak 1 kasus, balita terlantar sebanyak 3 kasus, anak terlantar sebanyak 24 kasus, dan anak yang berhadapan dengan hukum sejumlah 5 kasus.



Sumber: Kota Blitar Dalam Angka, 2024

Gambar 2.16
Masalah Sosial Anak di Kota Blitar Tahun 2023

2.2.2.2. Pendidikan

2.2.2.2.1. Jumlah Sarana Pendidikan, Jumlah Guru dan Jumlah Murid

Kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh proses Belajar Belajar, akan tetapi juga sangat terpengaruh pada kondisi dan jumlah sarana prasarana pendidikan yang ada, serta proporsi guru dan murid. Kondisi tersebut digambarkan dalam tabel berikut:

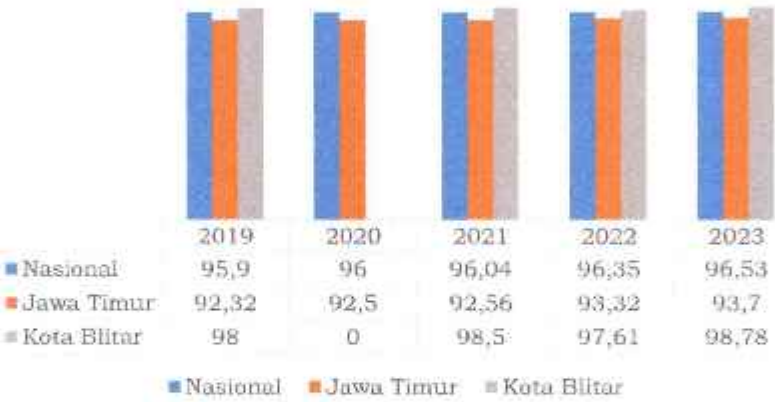
Tabel 2.14
Jumlah Sarana Pendidikan, Jumlah Guru, dan Jumlah Murid Kota Blitar Tahun Ajaran 2023/2024

JENIS SEKOLAH	JUMLAH SARANA	JUMLAH GURU	JUMLAH MURID
Sekolah RA	17	139	1.344
Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI)	10	270	3.916
Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs)	7	214	2.994
Sekolah Madrasah Aliyah (MA)	4	147	1.134
Sekolah TK	82	451	3.863
Sekolah SD	63	815	12.803
Sekolah SMP	20	548	8.454
Sekolah SMA	10	288	4.875
Sekolah SMK	17	686	10.990

Sumber : Kota Blitar Dalam Angka, 2024

2.2.2.2.2. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Angka Melek Huruf Kota Blitar tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 1,17 bila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 98,78. Artinya sampai kelompok umur tersebut dari 100 orang hanya 1 orang yang tidak bisa membaca.



Sumber : BPS Kota Blitar, 2024

Gambar 2.17
Angka Melek Huruf Kota Blitar Tahun 2019 – 2023

Tabel 2.15
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur di Kota Blitar Tahun 2021 - 2023

Kelompok Umur	2021	2022	2023
15 - 19	100,00	100,00	100
20 - 29	100,00	100,00	99,69
30 - 39	100,00	98,51	100
40 - 49	99,50	98,39	99,05
50-59	98,69	98,13	99,35
60-69	95,09	93,65	99,44
70+	91,30	91,44	90,28

Sumber: Kota Blitar Dalam Angka, 2024

2.2.2.2.3. **Angka Rata-Rata Lama Sekolah**

Rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk, sehingga indikator ini sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia. Rata-rata Lama Sekolah (RLS 25thn+) tahun 2023 mencapai 10,78, lebih tinggi 0,13 tahun dibanding tahun lalu. Rata lama sekolah di Kota Blitar setara dengan kelas 1 (satu) SMA.

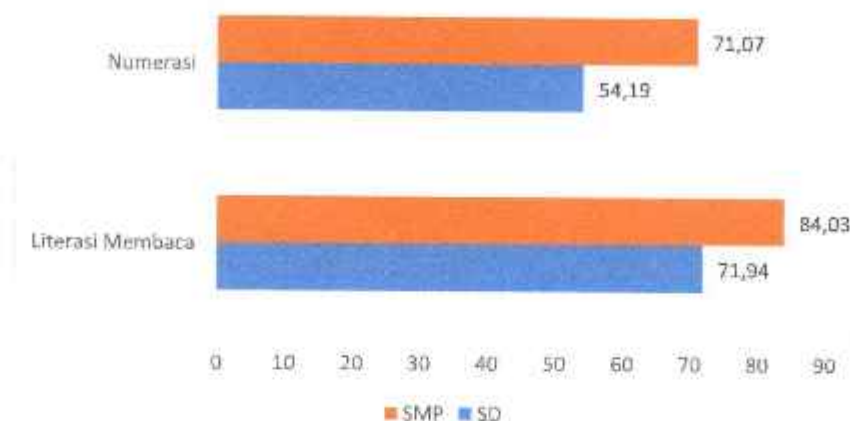


Sumber: BPS, 2024

Gambar 2.18
Angka Rata – Rata Lama Sekolah Kota Blitar Tahun 2019 – 2023

2.2.2.2.4. **Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Assessment Nasional**

Ukuran kualitas satuan Pendidikan adalah standart kompetensi minimum yang dilakukan berdasarkan assessment nasional. Standar kompetensi diukur oleh 2 faktor yaitu (1) Indeks Numerasi dan (2) Indeks Literasi membaca. Gambaran kedua indeks pada satuan Pendidikan SD dan SMP digambarkan sebagai berikut:

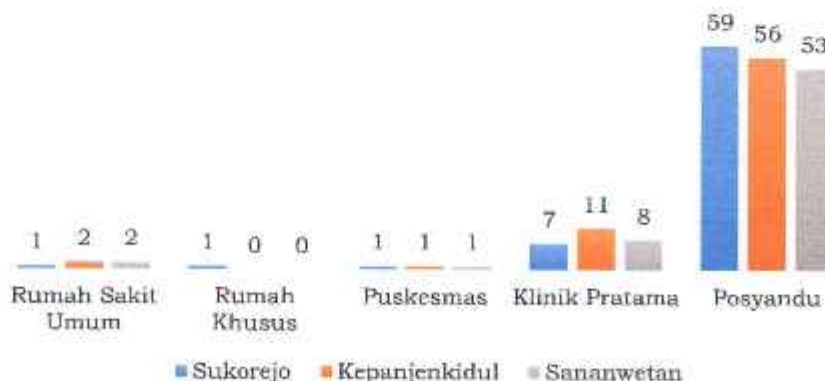


Sumber: Dinas Pendidikan Kota Blitar, 2024

Gambar 2.19
Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Assessment Nasional Tahun 2019 – 2023

2.2.2.3. Kesehatan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Blitar, di tahun 2023 jumlah Rumah Sakit Umum di Kota Blitar adalah sebanyak 5 buah. Rincian Rumah Sakit Umum per kecamatan adalah 1 buah Rumah Sakit Umum di Kecamatan Sukorejo, 2 buah Rumah Sakit Umum di Kecamatan Kepanjen Kidul, dan 2 buah Rumah Sakit Umum di Kecamatan Sananwetan. 1 unit Rumah Sakit Bersalin bertempat di Kecamatan Sukorejo. Jumlah puskesmas di Kota Blitar yaitu 3 puskesmas yang yang terdapat di setiap kecamatan. Sedangkan jumlah posyandu yaitu 168 posyandu dimana di Kecamatan Sukorejo terdapat 59 posyandu, di Kecamatan Kepanjenkidul terdapat 56 posyandu, sedangkan di Kecamatan Sananwetan terdapat 53 posyandu. Data Kondisi fasilitas kesehatan secara sederhana dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : Kota Blitar Dalam Angka, 2024

Gambar 2.20
Jumlah Fasilitas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2023

2.2.2.3.1. Angka Kelahiran Bayi

Pada tahun 2023, Kota Blitar mencatat data kelahiran pada Kecamatan Sukorejo sebanyak 709 bayi, dari jumlah tersebut terdapat 43 bayi (6,06 persen) dengan berat badan lahir rendah dan 19 bayi (2,7 persen) dengan kondisi gizi buruk. Sementara itu, Kecamatan Kepanjenkidul mencatat 596 kelahiran hidup, dengan 24 bayi (4 persen) berat badan lahir rendah dan hanya 1 bayi (0,1 persen) dengan kondisi gizi buruk. Di Kecamatan Sananwetan, terdapat 792 bayi lahir hidup, dengan 36 (4,5 persen) bayi berat badan lahir rendah dan tidak ada bayi yang mengalami gizi buruk. Sehingga di Kota Blitar dengan Jumlah Kelahiran 2.097 yang lahir dengan berat badan lahir rendah sebanyak 86 bayi (4,1 persen) dan lahir dalam gizi buruk sebanyak 20 bayi (0,95 persen). Angka kelahiran bayi digambarkan sebagai berikut:



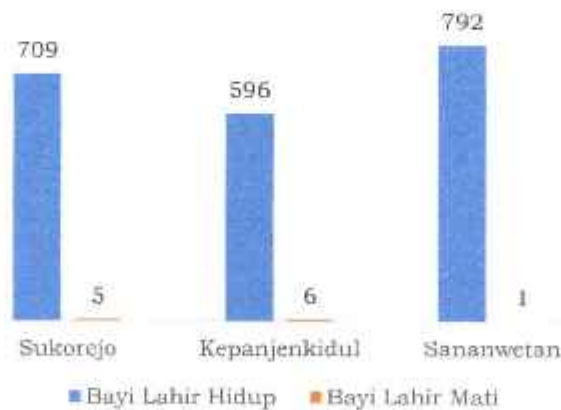
Sumber : Kota Blitar Dalam Angka, 2024

Gambar 2.21

Angka Kelahiran Bayi Kota Blitar 2023

2.2.2.3.2. Angka Bayi Lahir Hidup dan Bayi Lahir Mati

Angka Bayi lahir hidup dan bayi lahir mati adalah salah satu indikator kualitas kesehatan daerah. Semakin sedikit jumlah bayi lahir mati maka semakin baik kualitas kesehatan suatu daerah. Data angka bayi lahir hidup dan bayi lahir mati disampaikan dalam gambar di bawah ini:



Sumber : Kota Blitar Dalam Angka, 2024

Gambar 2.22

Angka Bayi Lahir Hidup Dan Bayi Lahir Mati Kota Blitar Tahun 2023

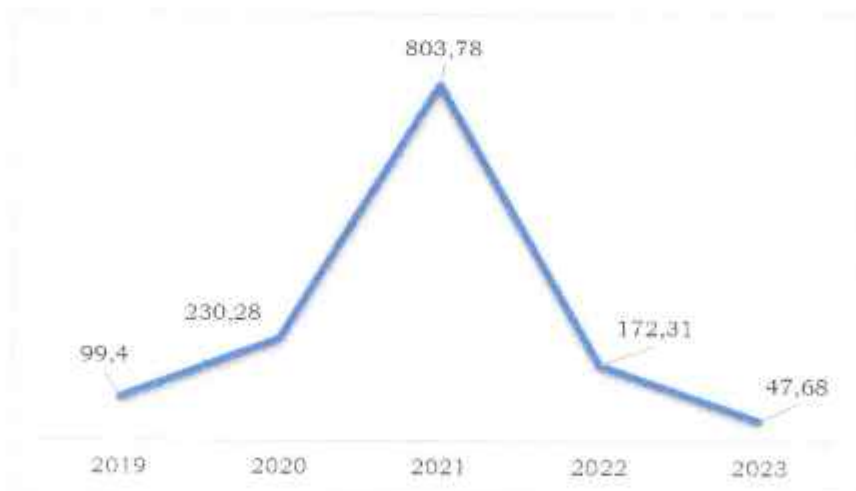
Data mengenai angka bayi lahir hidup dan bayi lahir mati di Kota Blitar pada tahun 2023 menunjukkan variasi yang signifikan antar kecamatan. Kecamatan Sukorejo mencatatkan bayi lahir mati sebanyak 5 bayi atau sebesar 0,7 persen. Di Kecamatan Kepanjenkidul angka bayi lahir mati mencapai 6 bayi atau 1 persen. Sementara itu, Kecamatan Sananwetan mencatat angka bayi lahir mati 1 atau 0,1 persen.

Dari data ini, dapat ditarik beberapa insight penting. Pertama, angka bayi lahir hidup tertinggi tercatat di Kecamatan Sananwetan, menunjukkan tingkat kelahiran yang tinggi di wilayah tersebut. Kedua, Kecamatan Sananwetan memiliki rasio bayi lahir mati yang rendah, menandakan kesehatan ibu dan bayi yang mungkin lebih terjaga dibandingkan kecamatan lainnya. Ketiga, perlu perhatian khusus terhadap Kecamatan Kepanjenkidul, yang meskipun memiliki jumlah bayi lahir hidup yang lebih rendah, namun rasio bayi lahir mati lebih tinggi, menandakan potensi masalah kesehatan maternal dan perinatal yang perlu ditangani.

2.2.2.3.3. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Ibu (AKI) masih merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan di suatu wilayah. Berbagai upaya telah diupayakan guna menurunkan angka kematian ibu ini. Upaya tersebut baik fasilitasi dari segi manajemen program KIA, sistem pencatatan dan pelaporan, peningkatan klinis keterampilan petugas di lapangan, serta keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan program KIA.

Berdasarkan data laporan pemantauan wilayah setempat ibu dan anak di Kota Blitar tahun 2023, sebesar 49 (1 kematian ibu) per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini menurun bila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 147 (13 kematian ibu) per 100.000 kelahiran hidup.

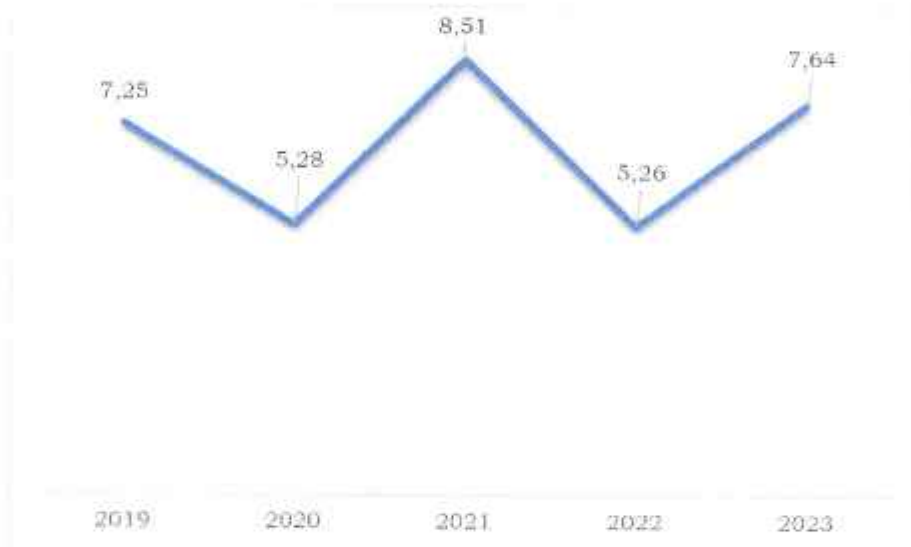


Sumber : Dinas Kesehatan Kota Blitar, 2024

Gambar 2.23
Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Kota Blitar Tahun 2019 – 2023

Keberhasilan percepatan penurunan kematian ibu dan bayi baru lahir tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pelayanan kesehatan, namun juga kemudahan masyarakat menjangkau pelayanan kesehatan di samping pola pencarian pertolongan kesehatan dari masyarakat. Perbaikan infrastruktur yang akan menunjang akses kepada pelayanan kesehatan seperti transportasi, ketersediaan listrik, ketersediaan air bersih dan sanitasi, serta pendidikan dan pemberdayaan masyarakat utamanya terkait kesehatan ibu dan anak yang menjadi tanggung jawab sektor lain memiliki peran sangat besar. Demikian pula keterlibatan masyarakat madani, lembaga swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan menggerakkan masyarakat sebagai pengguna serta organisasi profesi sebagai pemberi pelayanan kesehatan.

2.2.2.3.4. Prevalensi Stunting



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Blitar, 2024

Gambar 2.24

Prevalensi Stunting pada Balita Tahun 2019 - 2023

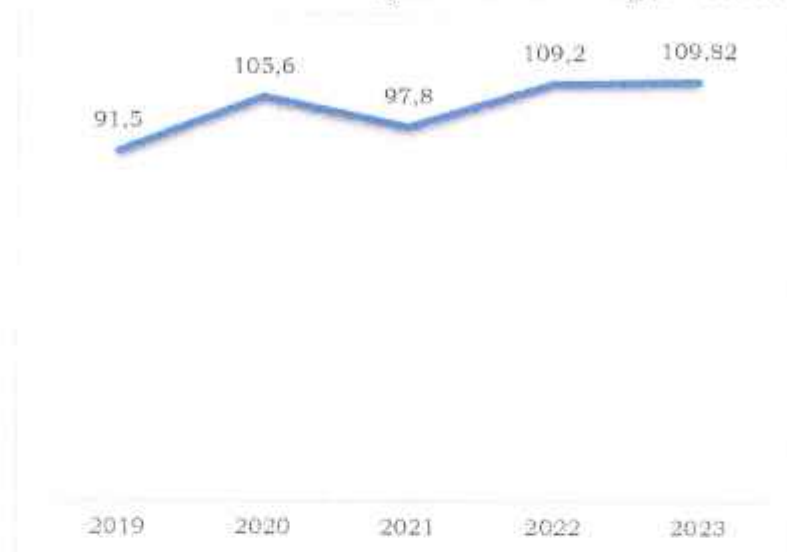
Dalam capaian prevalensi balita stunting ini mengikuti hasil perhitungan dari Kementerian Kesehatan RI untuk dipublikasikan. Indikator tersebut tercapai 90,86 persen yang berasal dari perhitungan target 7 persen dengan realisasi 7,64 persen.

Pemerintah Kota Blitar berupaya untuk menekan angka stunting melalui kegiatan Rembug Stunting yang melibatkan stakeholder terkait. Dalam penanganan stunting perlu adanya kerjasama dari semua sektor yang ada di Kota Blitar untuk menekan angka stunting sampai zero.

2.2.2.3.5. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan adalah besaran kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh warganya. Dengan adanya jaminan kesehatan itu diharapkan

semua penduduk dapat hidup sehat, produktif dan Sejahtera. Kepesertaan jaminan kesehatan bagi warga Kota Blitar diperoleh dengan pembayaran yang dilakukan sendiri bagi warga yang mempunyai penghasilan tertentu atau dibayar oleh Pemerintah Daerah bagi penduduk yang tidak mampu atau miskin. Persentase penduduk kota blitar yang mengikuti kepesertaan jaminan kesehatan nasional digambarkan sebagai berikut :



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Blitar, 2024

Gambar 2.25

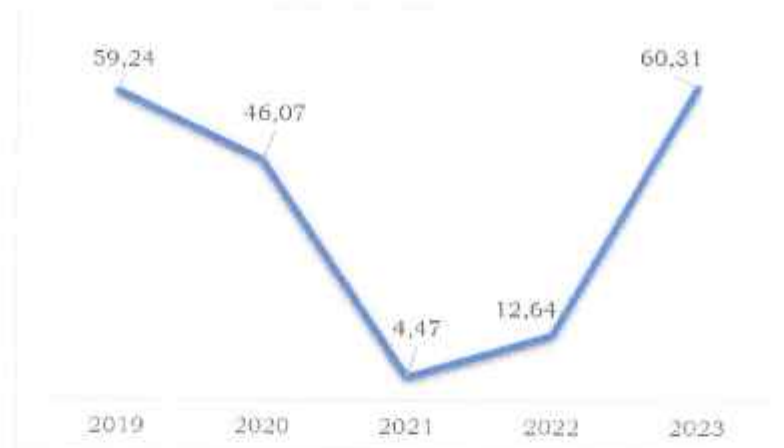
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2019 - 2023

Jika dilihat pada tabel untuk tahun 2022 dan 2023 kepesertaan Jaminan Kesehatan nasional Kota Blitar melebihi 100 persen, hal ini disebabkan karena kepesertaan melebihi dari target yang ditetapkan oleh BPJS Bidang Kesehatan.

2.2.2.3.6. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberculosis

Tuberculosis (TBC) adalah penyakit yang bersifat menular melalui udara, partikel dahak orang yang mengidap TBC aktif saat batuk, berbicara atau bersin. Penularan itu tidak langsung dapat dideteksi karena bakteri dapat bersifat laten (non aktif) pada saat seseorang mempunyai daya tahan tubuh yang baik. Akan tetapi saat daya tubuhnya menurun maka TBC akan menyerang orang tersebut. TBC perlu mendapat perhatian khusus, karena seseorang yang sakit TBC dapat menular pada 10 – 15 orang pertahun.

Penanganan TBC sangat tergantung pada tingkat temuan penderita TBC di wilayah untuk dapat diambil tindakan baik preventif agar tidak terjadi penularan dengan dampak luas dan represif dengan tindakan pengobatan tuntas pada yang bersangkutan. Selama 5 tahun kasus temuan TBC di Kota Blitar digambarkan dalam tabel berikut:

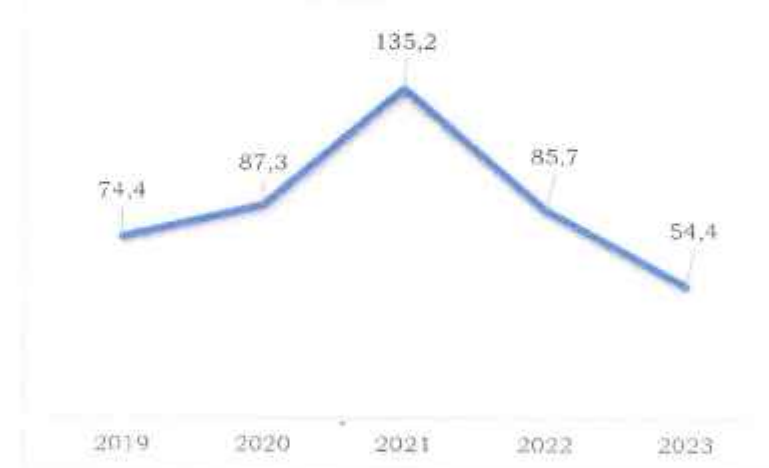


Sumber : Dinas Kesehatan Kota Blitar, 2024

Gambar 2.26

Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberculosis Tahun 2019 – 2023

Tingkat temuan tidak akan berhasil optimal jika tidak diikuti dengan tingkat kesadaran masyarakat yang baik. Dimana Masyarakat harus mampu menemu kenali TBC beserta pola Tindakan preventif dan represif. Tindakan preventifnya adalah selalu menjaga kesehatan pribadi, sedangkan tindakan represifnya adalah pengobatan secara tuntas. Gambaran angka keberhasilan pengobatan TBC di Kota Blitar tergambar pada tabel berikut:



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Blitar, 2024

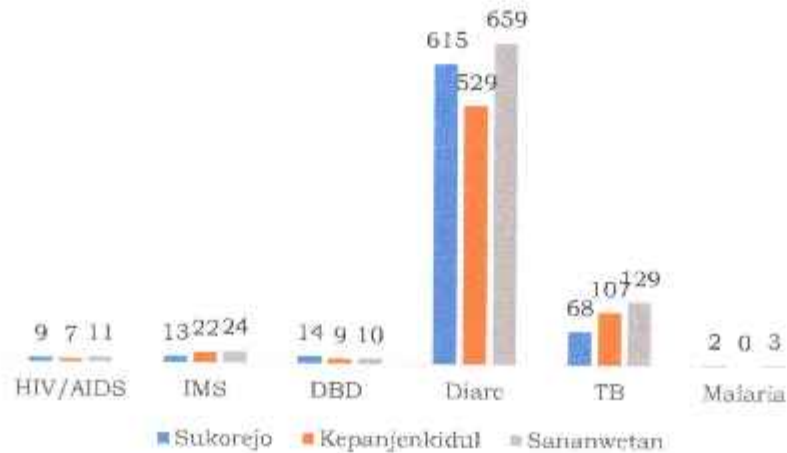
Gambar 2.27

Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberculosis Tahun 2019 - 2023

2.2.2.3.7. Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, TB, dan Malaria

Jumlah kasus HIV/AIDS, infeksi menular seksual (IMS), demam berdarah dengue (DBD), diare, tuberkulosis (TBC), dan malaria di Kota Blitar pada tahun 2023, terlihat adanya variasi yang signifikan antar kecamatan. Kecamatan Sukorejo mencatatkan jumlah kasus HIV/AIDS sebanyak 9, IMS 13 kasus, DBD 14 kasus, diare 615 kasus, TBC 68 kasus, dan malaria 2 kasus. Sementara itu, Kecamatan Kepanjenkidul memiliki 7 kasus HIV/AIDS, 22 kasus IMS, 9 kasus DBD, 529 kasus diare,

107 kasus TBC, dan tidak ada kasus malaria. Di Kecamatan Sananwetan, jumlah kasus HIV/AIDS mencapai 11 kasus, IMS 24 kasus, DBD 10 kasus, diare 659 kasus, TBC 129 kasus, dan 3 kasus malaria.



Sumber : Kota Blitar Dalam Angka, 2024

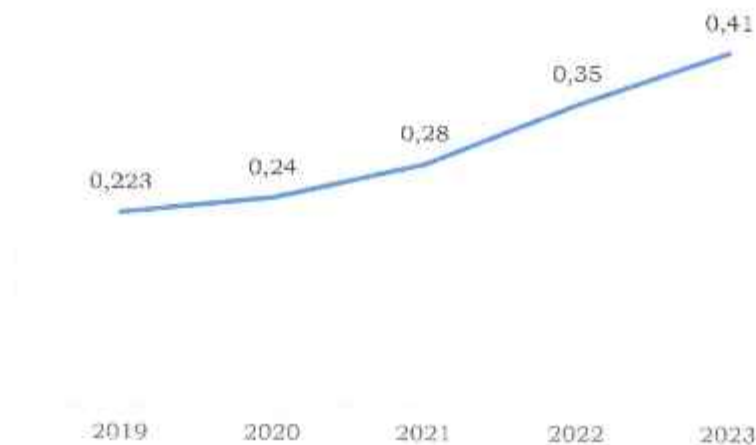
Gambar 2.28

Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, TB, Dan Malaria Menurut Kecamatan Di Kota Blitar Tahun 2023

Dari data tersebut, dapat ditarik beberapa insight. Pertama, tingkat keparahan penyakit diare di Kota Blitar terlihat cukup tinggi, terutama di Kecamatan Sukorejo dan Sananwetan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti sanitasi yang kurang memadai atau kontaminasi air. Kedua, Kecamatan Sukorejo memiliki jumlah kasus HIV/AIDS dan IMS yang lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan lain, menunjukkan adanya potensi penyebaran penyakit menular seksual di wilayah tersebut. Ketiga, keberadaan kasus TBC yang cukup signifikan di ketiga kecamatan menunjukkan perlunya upaya pencegahan dan pengobatan penyakit TBC.

2.2.2.3.8. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah perhitungan kedua belas indikator keluarga sehat dari setiap keluarga yang besarnya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Keluarga yang tergolong dalam keluarga sehat adalah keluarga dengan IKS $>0,8$ (Kementrian Kesehatan RI, 2016).



Sumber: DP3AP2KB, 2024

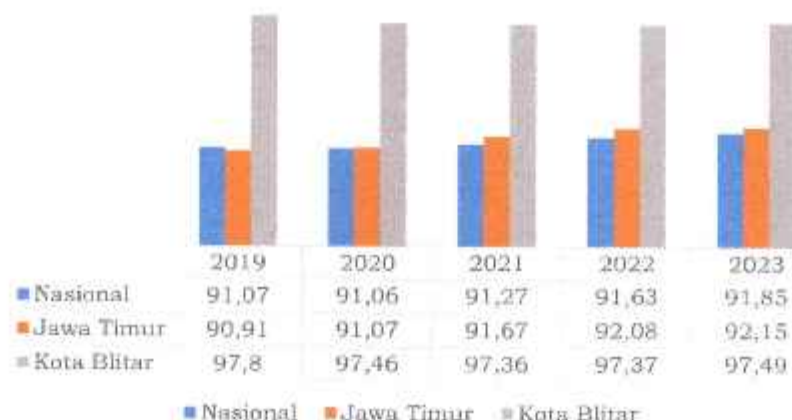
Gambar 2.29

Indeks Keluarga Sehat Kota Blitar Tahun 2019-2023

IKS Kota Blitar tahun 2023 sebesar 0,41 Permasalahan terkait IKS diantaranya disebabkan beberapa indikator IKS tidak tercapai yaitu indikator keluarga mengikuti program keluarga berencana, penderita tuberkulosis mendapat pengobatan sesuai standar, penderita hipertensi rutin menjalani pengobatan, penderita gangguan jiwa tidak terlantar dan mendapat pengobatan, serta anggota keluarga tidak ada yang merokok.

2.2.2.4. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan ukuran keberhasilan pembangunan kesetaraan gender dalam hal kualitas hidup laki-laki dan perempuan dari dimensi kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Capaian pembangunan manusia Kota Blitar di bidang kesetaraan gender semakin menunjukkan perbaikan. Hal ini tecermin dari data skor Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Blitar yang terus meningkat dari 97,36 pada tahun 2021 menjadi 97,49 pada tahun 2023. Angka ini jauh diatas provinsi dan nasional tahun 2023 yang sebesar 92,15 dan 91,85. Tingginya capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) menunjukkan semakin setaranya pembangunan antara laki – laki dan perempuan di Kota Blitar.



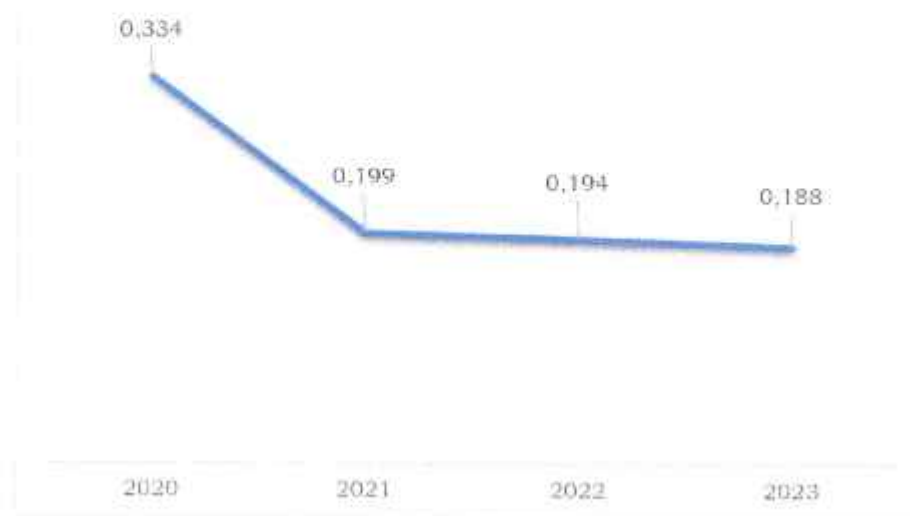
Sumber: Kota Blitar Dalam Angka, 2024

Gambar 2.30

Indeks Pembangunan Gender Kota Blitar Tahun 2019 – 2023

2.2.2.5. Indeks Ketimpangan Gender

Pada tahun 2023, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Blitar sebesar 0,188, turun 0,006 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 0,194. Penurunan sebesar 0,006 poin tahun ini sedikit lebih besar dibandingkan penurunan IKG pada tahun 2022, yaitu sebesar 0,005 poin. Selain itu, penurunan IKG Kota Blitar pada tahun 2023 ini melanjutkan perbaikan yang telah dicapai sejak tahun 2020.

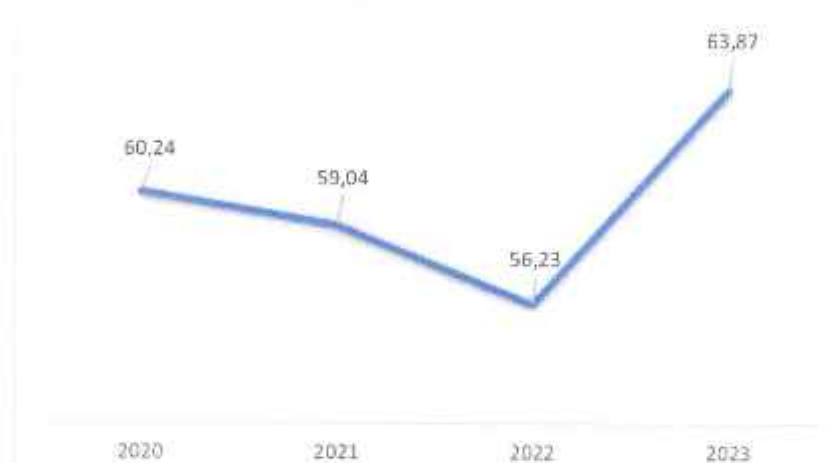


Sumber: Berita Resmi Statistik No. 03/06/3572/Th.I, 7 Juni 2024

Gambar 2.31

Indeks Ketimpangan Gender Kota Blitar Tahun 2020 – 2023

IKG Kota Blitar secara konsisten mengalami penurunan dari tahun ke tahun selama tiga tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender di Kota Blitar terus mengalami peningkatan. Penurunan IKG Kota Blitar tahun 2023 dipengaruhi oleh perbaikan indikator pada dimensi pasar tenaga kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat dari 56,23 persen pada tahun 2022 menjadi 63,87 persen pada tahun 2023.



Sumber: Berita Resmi Statistik No. 03/06/3572/Th.I, 7 Juni 2024

Gambar 2.32

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Blitar Tahun 2019 – 2023

2.2.2.6. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) menggambarkan capaian pembangunan perlindungan anak. IPA menjadi landasan dalam membuat program maupun kebijakan yang efektif dan efisien untuk menangani permasalahan khususnya terkait perlindungan anak, pemenuhan hak anak maupun perlindungan khusus anak.

Tabel 2.16

Capaian IPA Kota Blitar Tahun 2021 - 2022

	Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan		Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif		Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan		Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya		Klaster V Perlindungan Khusus		IPA	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Kota Blitar	57,71	49,99	65,59	92,70	87,63	86,55	35,54	48,90	74,47	82,08	NA	72,83
Jawa Timur	49,13	50,92	79,05	80,29	79,32	80,42	34,18	38,74	77,03	76,40	64,59	66,10
Nasional	46,74	49,04	76,68	78,64	76,47	77,15	30,99	33,96	71,89	73,61	61,38	63,30

Sumber: Indeks Perlindungan Anak, KemenPPA, 2021-2022

Capaian IPA Kota Blitar Tahun 2022 sebesar 72,83, yang merupakan capaian 8 tertinggi menurut kabupaten/kota se-Indonesia atau 3 tertinggi menurut kabupaten/kota se-Jawa Timur. Capaian setiap klaster penyusun IPA Kota Blitar Tahun 2022 yaitu pada Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan = 49,99; Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif = 92,70; Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan = 86,55; Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya = 48,90; dan Klaster V Perlindungan Khusus = 82,08. Melihat capaian tersebut, maka klaster dengan nilai terendah pada Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan; serta Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya.

Capaian indikator yang perlu diungkit adalah indikator Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA), yang tersedia di Kota Blitar berupa Perpustakaan Umum Daerah, Mobil Perpustakaan Keliling, Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah, Taman Baca dan Pojok Baca. Namun fasilitas ILA tersebut belum memenuhi standarisasi sebagai PISA yaitu Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sesuai Pedoman Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) Kementerian PPPA. Sedangkan pada Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya memuat beberapa indikator yaitu 1) Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun; 2) Sekolah Ramah Anak (SRA); dan 3) Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas dan Rekreatif yang Ramah Anak. Capaian indikator yang perlu diungkit adalah indikator Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas dan Rekreatif yang Ramah Anak, yang berupa pusat kreativitas dan budaya, serta rumah ibadah yang tersebar di 21 kelurahan se-Kota Blitar. Namun fasilitas tersebut belum mempunyai legalitas pada seluruh Pusat Kreatifitas Anak (PKA) dan belum memenuhi standarisasi sebagai Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA).



Sumber: Indeks Perlindungan Anak, KemenPPA, 2021-2022, diolah

Gambar 2.33
Klaster IPA Kota Blitar Tahun 2021 - 2022

Ditinjau dari delta pertumbuhan per klaster IPA Kota Blitar tahun 2022, klaster yang mengalami kenaikan capaian dibandingkan tahun 2021 adalah Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif yang naik 27,11; Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya yang naik 13,36; dan Klaster V Perlindungan Khusus yang naik 7,61. Sedangkan klaster yang mengalami penurunan capaian dibandingkan tahun 2021 adalah Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan turun sebesar (7,72); dan Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan turun sebesar (1,08).

2.2.2.7. Keagamaan

2.2.2.7.1. Jumlah Pemeluk Masing-Masing Agama

Di Kota Blitar terdapat pemeluk beberapa agama yang meliputi Hindu dengan 87 pemeluk, Budha dengan 494 pemeluk, Katolik dengan 5.215 pemeluk, Protestan dengan 6.185 pemeluk, dan Islam dengan 147.651 pemeluk. Selain itu, terdapat 149 pemeluk agama lainnya yang mungkin mencakup Khonghuchu atau penganut kepercayaan tertentu.



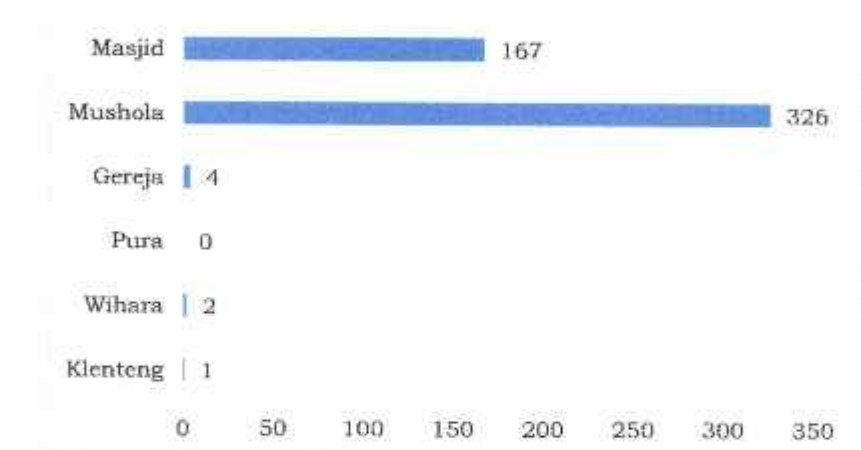
Sumber: Kota Blitar Dalam Angka, 2024

Gambar 2.34
Jumlah Masing-masing Pemeluk Agama di Kota Blitar Tahun 2023

Salah satu insight utama yang dapat diambil dari data tersebut adalah bahwa mayoritas penduduk Kota Blitar adalah pemeluk agama Islam, dengan jumlah yang signifikan, mencapai 147.651 orang. Namun, data tersebut juga menunjukkan keragaman dalam lanskap keagamaan, dengan beberapa agama seperti Katolik, Protestan, Budha, Hindu dan Konghuchu. Hal ini mencerminkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama yang kuat di Kota Blitar.

Data tersebut memberikan pandangan yang berharga tentang komposisi keagamaan di Kota Blitar dan dapat menjadi dasar untuk perencanaan dan kebijakan yang mempromosikan kerukunan beragama, toleransi, dan hak asasi manusia dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Selaras dengan data pemeluk agama di atas jumlah tempat peribadatan di Kota Blitar pada tahun 2023, terdapat tempat ibadah yang mencakup 167 Masjid, 326 Musholla, 4 Gereja, 2 Wihara dan 1 Klenteng sebagai mana tergambar dalam gambar berikut:



Sumber: Kota Blitar Dalam Angka, 2024

Gambar 2.35
Jumlah Tempat Peribadatan Kota Blitar Tahun 2023

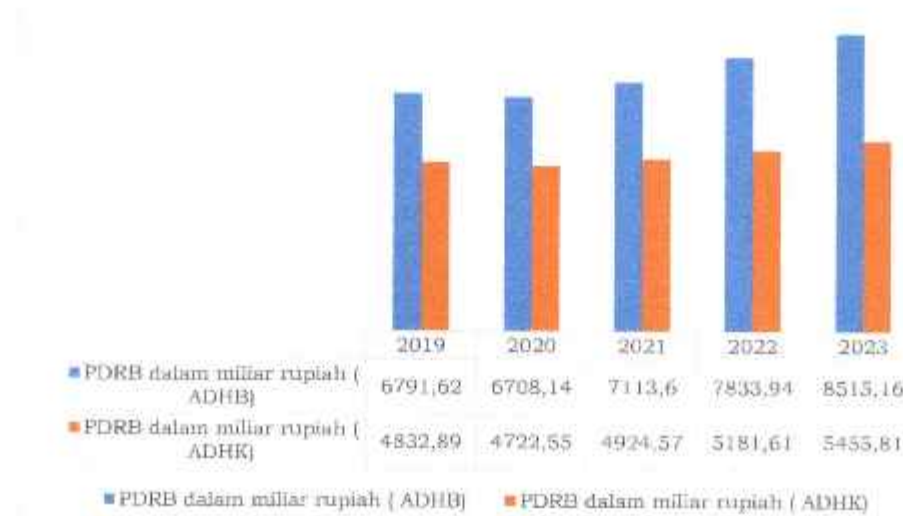
Dengan adanya berbagai tempat peribadatan ini, masyarakat memiliki akses yang luas untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka. Keberadaan tempat ibadah dari berbagai agama juga mencerminkan toleransi beragama yang kuat di Kota Blitar. Kondisi tersebut mengarahkan pada pentingnya pemerintah daerah dalam menjaga dan melindungi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Data tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk memastikan bahwa fasilitas peribadatan yang ada memadai dan aman bagi masyarakat yang menjalankan ibadah mereka.

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

2.3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Blitar tahun 2023 atas dasar harga berlaku mencapai Rp 8.515,16 milyar, kinerja ekonomi Kota Blitar mengalami peningkatan sebesar Rp. 681,22 milyar dari angka tahun 2022. Begitu pula dengan PDRB tahun 2023 atas dasar harga konstan (ADHK 2010) mencapai Rp. 5.455,81 milyar yang mengalami peningkatan sebesar 5,29 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp. 5.181,61 milyar.



Sumber: Kota Blitar Dalam Angka, 2024

Gambar 2.36

PDRB Kota Blitar tahun 2019 – 2023 (dalam Ribu Rupiah)

Nilai PDRB bermanfaat dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan, diantaranya:

- Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi, mencakup sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; perdagangan, restoran dan hotel; pengangkutan dan komunikasi; lembaga keuangan; dan jasa-jasa lainnya;

- b. Untuk mengetahui pergeseran dan struktur perekonomian;
- c. Untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran/kesejahteraan;
- d. Untuk mengetahui tingkat inflasi/deflasi, berdasarkan pertumbuhan/ perubahan harga produsen.

2.3.1.2. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha

Kondisi ekonomi Kota Blitar dapat pula dilihat dari distribusi PDRB menurut sektor-sektor yang menunjukkan struktur perekonomian suatu wilayah. Pengelompokan PDRB berdasarkan sektor, terdiri atas :

- **Sektor Primer**, yaitu sektor yang tidak mengolah bahan mentah atau bahan baku melainkan hanya mendayagunakan sumber-sumber alam seperti tanah dan deposit di dalamnya, yang termasuk kelompok ini adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalan.
- **Sektor Sekunder**, yaitu sektor yang mengolah bahan bahan mentah atau bahan baku baik berasal dari sektor Primer maupun dari sektor Sekunder menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Sektor ini mencakup Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik & Gas; Pengadaan Air; Konstruksi.
- **Sektor Tersier**, atau dikenal sebagai **sektor jasa**, yaitu yang tidak memproduksi dalam bentuk fisik melainkan dalam bentuk jasa. Sektor yang tercakup adalah Perdagangan Besar dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa Lainnya.

Ditinjau dari nilai dan kontribusi sektor/lapangan usaha dalam PDRB Kota Blitar Tahun 2023, maka 50 persen perekonomian Kota Blitar didominasi oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor sebesar 25,03 persen, diikuti oleh Informasi dan Komunikasi sebesar 10,63 persen, Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 10,42%, dan Industri Pengolahan sebesar 9,85 persen. Dominasi kontribusi tersebut tidak mengalami perubahan selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Tabel 2.17
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2021 – 2023 Atas Dasar Harga Berlaku Kota Blitar

No	Sektor / Lapangan Usaha	2021		2022		2023	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
1.	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	201.800	2,84	200.340	2,56	213.521	2,51

No	Sektor / Lapangan Usaha	2021		2022		2023	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
2.	Pertambangan & Penggalian	340	0,00	320	0,00	330	0,00
3.	Industri Pengolahan	712.620	10,02	791.270	10,1	839.088	9,85
4.	Pengadaan Listrik & Gas	4.600	0,06	5.050	0,06	5.419	0,06
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	10.320	0,15	11.230	0,14	12.107	0,14
6.	Konstruksi	494.870	6,96	554.040	7,07	610.296	7,17
7.	Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi mobil & Sepeda Motor	1.718.420	24,16	1.967.250	25,11	2.130.932	25,03
8.	Transportasi & Pergudangan	299.620	4,21	361.050	4,61	426.831	5,01
9.	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	376.590	5,29	429.550	5,48	486.119	5,71
10.	Informasi & Komunikasi	809.700	11,38	840.550	10,73	905.165	10,63
11.	Jasa Keuangan & Asuransi	745.600	10,48	835.000	10,73	887.432	10,42
12.	Real Estate	274.970	3,87	288.700	3,69	302.376	3,55
13.	Jasa Perusahaan	52.870	0,74	56.510	0,72	61.480	0,72
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan	450.570	6,33	467.340	5,97	492.126	5,78
15.	Jasa Pendidikan	495.110	6,96	504.670	6,44	548.348	6,44
16.	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	153.200	2,15	159.070	2,03	174.754	2,05
17.	Jasa Lainnya	312.400	4,39	362.000	4,62	418.825	4,92
KOTA BLITAR		7.113.600	100	7.833.940	100	8.515.157	100

Sumber : Kota Blitar Dalam Angka, 2024

2.3.1.3. PDRB per Kapita

Indikator yang sering dipakai untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro adalah pendapatan per kapita. Semakin tinggi pendapatan per kapita yang diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. Secara umum, nilai PDRB per kapita dapat menjadi ukuran kemakmuran penduduk di suatu wilayah. Nilai PDRB per kapita, merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Selama kurun waktu tahun 2021 - 2023, pendapatan perkapita Kota Blitar yang mengalami peningkatan sebesar 17,36 persen. Untuk melihat perkembangan PDRB perkapita Kota Blitar tahun 2021 - 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18
PDRB dan PDRB Per Kapita Tahun 2019 s.d 2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB dalam miliar rupiah (ADHK)	4.832,89	4.722,55	4.924,57	5.181,61	5.455,81
PDRB dalam miliar rupiah (ADHB)	6.791,62	6.708,14	7.113,60	7.833,94	8.515
PDRB Per Kapita, dalam juta rupiah (ADHB)	47,84	45,09	47,31	51,59	55,52

Sumber : Kota Blitar Dalam Angka, 2024

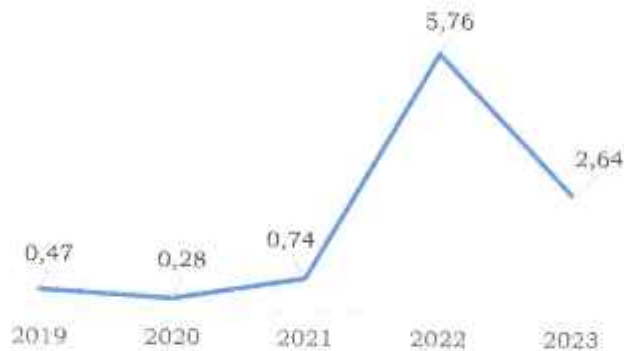
Tabel 2.19
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Jenis Pengeluaran Kota Blitar, 2019-2023

Jenis Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3.239,19	3.163,43	3.269,54	3.442,13	3.641,48
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	44,89	45,39	46,03	49,21	53,30
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	860,53	833,16	833,74	845,48	849,20
Pembentukan Modal Tetap Bruto	950,08	897,70	911,69	962,39	1.005,60
Perubahan Inventori	2,76	1,66	2,07	3,23	2,36
Ekspor	2.427,41	2.398,03	2.497,86	2.617,44	2.709,36
Impor	2.691,97	2.616,81	2.636,37	2.738,26	2.805,47
Net Ekspor Barang dan Jasa	-264,56	-218,79	-138,50	-120,82	-96,12
Produk Domestik Regional Bruto	4.832,89	4.722,55	4.924,57	5.181,61	5.455,81

Sumber : Kota Blitar Dalam Angka, 2024

2.3.1.4. **Tingkat Inflasi**

Tingkat inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum, dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Tingkat inflasi Kota Blitar pada akhir tahun 2023 mencapai 2,64.



Sumber : BPS Kota Blitar, 2024

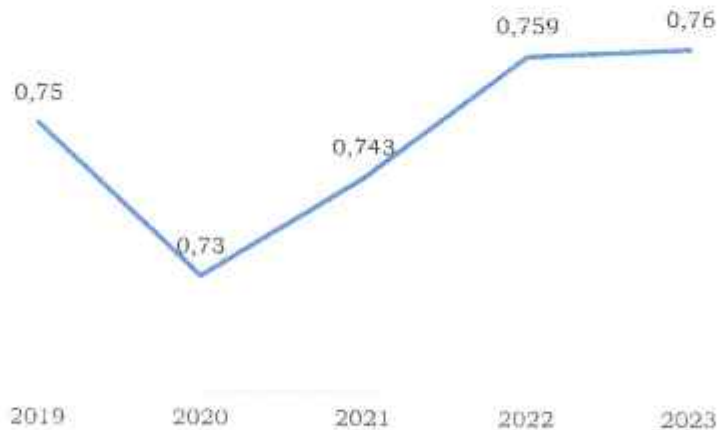
Gambar 2.37
Tingkat Inflasi Kota Blitar Tahun 2019 - 2023

2.3.2. **Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)**

2.3.2.1. **Indeks Pendidikan**

Capaian kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah adalah Indeks Pendidikan dan capaian SPM. Pengukuran Indeks Pendidikan ditujukan untuk meningkatkan pencapaian standar pelayanan minimal serta meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan dasar.

Indeks Pendidikan Kota Blitar dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Blitar, 2024

Gambar 2.38
Indeks Pendidikan Kota Blitar Tahun 2019 - 2023

Nilai Indeks Pendidikan mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Hal ini mencerminkan adanya kemajuan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, aksesibilitas, atau faktor-faktor lain yang mendukung peningkatan Indeks Pendidikan.

2.3.2.2. Angka Literasi dan Numerasi

Informasi capaian literasi sekolah diperoleh dari salah satu instrumen Asesmen Nasional, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM). Inti dari AKM adalah penilaian berdasarkan literasi membaca dan numerasi. Dengan mengukur literasi dan numerasi, asesmen nasional mendorong guru semua mata pelajaran untuk berfokus pada pengembangan kompetensi membaca dan berpikir logis-sistematis. Adapun data capaian persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen nasional untuk literasi membaca dan numerasi tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.20

Angka Literasi dan Numerasi Kota Blitar Tahun 2023

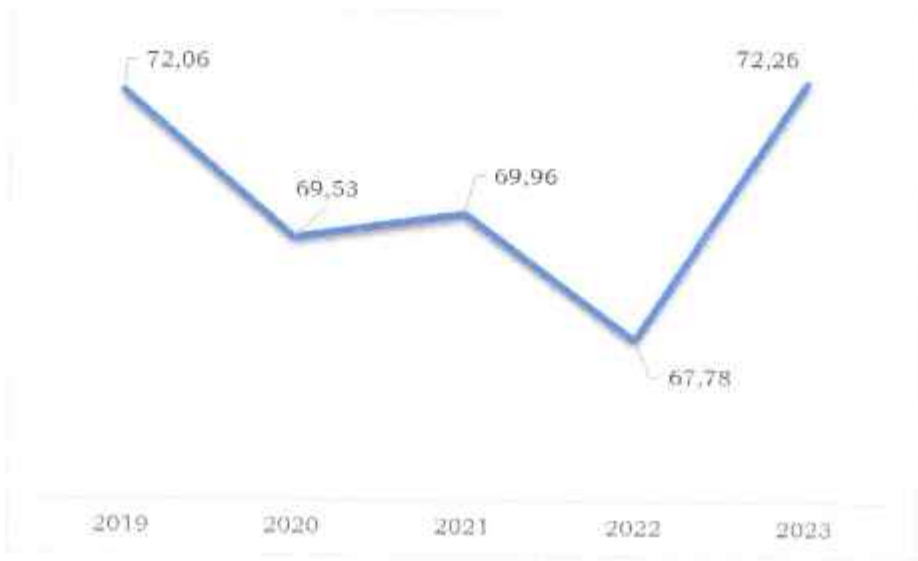
Indikator	Jenjang	Nilai
Skor Kemampuan literasi	SD	71,94
	SMP	84,03
Skor Kemampuan Numerasi	SD	54,19
	SMP	71,07

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Blitar, 2024

2.3.2.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, sering disebut sebagai TPAK, merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur sejauh mana angkatan kerja berkontribusi terhadap jumlah penduduk usia sepuluh tahun ke atas dalam suatu wilayah. TPAK adalah indikator yang berguna untuk menganalisis ketersediaan tenaga kerja dalam suatu daerah. Semakin tinggi nilai TPAK, semakin baik kondisi ketenagakerjaan wilayah tersebut. Semakin tinggi TPAK berarti semakin banyak tenaga kerja yang siap berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah.

Selama periode 2019-2022, TPAK di Kota Blitar mengalami penurunan yang berkelanjutan setiap tahun, namun pada tahun 2023 nilai TPAK mengalami kenaikan dari 67,78 menjadi 72,26 persen. Kurangnya tenaga kerja dapat menghambat pertumbuhan ekonomi wilayah. Oleh karena itu, diperlukan tindakan antisipatif, seperti migrasi tenaga kerja dari wilayah lain, untuk memastikan kebutuhan tenaga kerja dapat terpenuhi. Pemerintah Kota Blitar perlu memperhatikan hal ini, karena TPAK adalah indikator penting dalam upaya meningkatkan pembangunan wilayah.



Sumber: Kota Blitar Dalam Angka, 2024

Gambar 2.39

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Blitar Tahun 2019 - 2023

2.3.2.4. Angka Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*Dependency Ratio*) merupakan indikator yang secara kasar dapat digunakan untuk melihat keadaan ekonomi suatu daerah. Rasio ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif (kelompok umur 15-64 tahun) terhadap penduduk tidak produktif (kelompok umur <15 tahun dan >65 tahun).

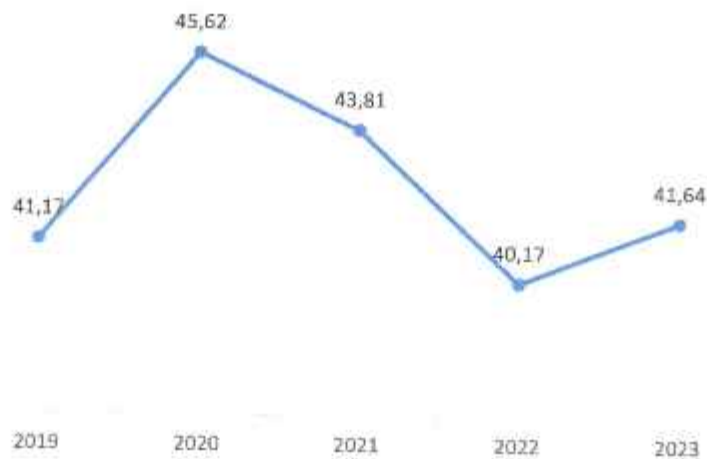
Angka Beban Ketergantungan yang semakin tinggi menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 2.21

Rasio Ketergantungan Kota Blitar Tahun 2019 - 2023

No	Kelompok Umur	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	0 - 14 - Umur Muda	33,343	25,114	37,594	32,448	34,716
2	15 - 64 - Umur Produktif	111,883	80,691	110,037	113,121	112,808
3	65 + - Umur Tua	12,719	11,701	10,613	12,989	12,257
4	Jumlah penduduk usia tidak produktif	46,062	36,815	48,207	45,437	46,973
5	Rasio ketergantungan	41,17	45,62	43,81	40,17	41,64

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, 2024

Gambar 2.40

Rasio Ketergantungan Kota Blitar Tahun 2019 – 2023

Berdasarkan grafik di atas, rasio ketergantungan di Kota Blitar selama kurun waktu 2019 - 2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, rasio ketergantungan naik menjadi 45,65 persen, kemudian turun pada tahun 2021 dan 2022 menjadi 40,17 persen. Pada tahun 2023, rasio ketergantungan mengalami kenaikan menjadi 41,64 persen. Hal ini menunjukkan bahwa selama kurun waktu 5 (lima) tahun setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 40 - 46 penduduk non produktif. Angka rasio ketergantungan salah satunya dipengaruhi oleh kondisi demografi Kota Blitar yang relatif menunjukkan perkembangan positif.

Jika melihat data Badan Pusat Statistik (BPS), rasio ketergantungan terhadap usia produktif di Indonesia tercatat sebesar 44,67 persen pada tahun 2022. Ini berarti ada sekitar 44-45 per 100 orang usia non-produktif di Indonesia bergantung kepada mereka yang berusia produktif.

2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Daerah

2.3.3.1. Sarana Perekonomian

Jumlah sarana perekonomian di Kota Blitar pada tahun 2021, dengan memperhatikan kelompok pertokoan, pasar dengan bangunan permanen, pasar dengan bangunan semi permanen, minimarket/swalayan, hotel, dan losmen di setiap kecamatan.

Tabel 2.22

Sarana Perekonomian di Kota Blitar Tahun 2021

Kecamatan	Kelompok Pertokoan	Pasar	Minimarket /Swalayan	Hotel	Losmen
Sukorejo	17	3	21	3	1
Kepanjen Kidul	34	3	19	11	4
Sananwetan	16	1	19	4	3
Jumlah	67	7	59	18	8

Sumber: RTRW Kota Blitar Tahun 2023-2043

Kecamatan Sukorejo memiliki 17 kelompok pertokoan, 3 pasar dengan bangunan permanen, 21 minimarket/swalayan, 3 hotel, dan 1 losmen. Tidak terdapat pasar dengan bangunan semi permanen di Kecamatan Sukorejo.

Kecamatan Kepanjenkidul mencatatkan 34 kelompok pertokoan, 4 pasar dengan bangunan permanen, 1 pasar dengan bangunan semi permanen, 19 minimarket/swalayan, 11 hotel, dan 4 losmen. Kecamatan Kepanjenkidul memiliki keberagaman sarana perekonomian yang cukup signifikan.

Kecamatan Sananwetan mencatatkan 16 kelompok pertokoan, 3 pasar dengan bangunan permanen, 19 minimarket/swalayan, 4 hotel, dan 3 losmen. Sama seperti Kecamatan Sukorejo, tidak terdapat pasar dengan bangunan semi permanen di Kecamatan Sananwetan.

Secara keseluruhan, Kota Blitar pada tahun 2021 memiliki 67 kelompok pertokoan, 10 pasar dengan bangunan permanen, 1 pasar dengan bangunan semi permanen, 59 minimarket/swalayan, 18 hotel, dan 8 losmen. Data tersebut mencerminkan keberagaman sarana perekonomian di berbagai kecamatan sehingga menciptakan lingkungan yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dengan berbagai kebutuhan.

2.3.3.2. Sarana Olahraga

Kota Blitar memiliki beberapa sarana olahraga yang mendukung aktivitas fisik dan kegiatan olahraga masyarakat. Di Kecamatan Sananwetan, terdapat Soekarno - Hatta Sport Complex dan GOR MINARNI (GLORA) yang dirancang khusus untuk keperluan olahraga. Sementara itu, di Kecamatan Kepanjen Kidul, terdapat Soepriadi Stadium dan Sport Center Kota Blitar. Soepriadi Stadium menjadi salah satu pusat kegiatan olahraga, terutama dalam bidang sepak bola.

Keberadaan sarana olahraga ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Blitar dalam menyediakan fasilitas yang mendukung gaya hidup sehat dan aktif. Selain itu, sarana ini juga berperan dalam mengembangkan potensi atletik lokal dan menciptakan lingkungan yang mendukung pembinaan bakat olahraga di Kota Blitar.

Tabel 2.23
Sarana Olahraga di Kota Blitar

KECAMATAN	NAMA SARANA	PERUNTUKAN
Sananwetan	Soekarno - Hatta Sport Complex	Olahraga
Sananwetan	GOR MINARNI (GLORA)	Olahraga
Kepanjen Kidul	Soepriadi Stadium	Olahraga
Kepanjen Kidul	Sport Center Kota Blitar	Olahraga

Sumber: RTRW Kota Blitar Tahun 2023-2043

2.3.3.4. Prasarana Jaringan Jalan

Tercatat pada tahun 2023, Kota Blitar memiliki prasarana jaringan jalan yang mencakup berbagai jenis untuk mendukung konektivitas dan mobilitas dalam kota. Jaringan jalan ini terdiri dari empat kategori utama, yaitu Jaringan Jalan Arteri Primer dengan panjang mencapai 7.789,79 meter, Jaringan Jalan Arteri Sekunder dengan panjang 23.180,48 meter, Jaringan Jalan Kolektor Primer dengan panjang 5.046,63 meter, dan Jaringan Jalan Kolektor Sekunder dengan panjang 10.003,77 meter.

Tabel 2.24
Jaringan Jalan di Kota Blitar Tahun 2023

Jenis Jalan	Panjang Jalan (m)
Jaringan Jalan Arteri Primer	7.789,79
Jaringan Jalan Arteri Sekunder	23.180,48
Jaringan Jalan Kolektor Primer	5.046,63
Jaringan Jalan Kolektor Sekunder	10.003,77

Sumber: RTRW Kota Blitar Tahun 2023-2043

Jaringan Jalan Arteri Primer dan Arteri Sekunder memiliki panjang yang signifikan, menunjukkan peran pentingnya sebagai jalur utama dalam mendukung arus lalu lintas di Kota Blitar. Sementara itu, Jaringan Jalan Kolektor Primer dan Kolektor Sekunder memberikan aksesibilitas lebih lanjut ke berbagai wilayah di Kota Blitar.

Tidak hanya terbatas pada jalan arteri dan kolektor, Kota Blitar juga membangun jaringan jalan lokal dengan cakupan yang luas. Jalan Lokal Primer, yang menghubungkan pusat kegiatan nasional dengan lingkungan, dan Jalan Lokal Sekunder, yang menghubungkan kawasan sekunder dengan

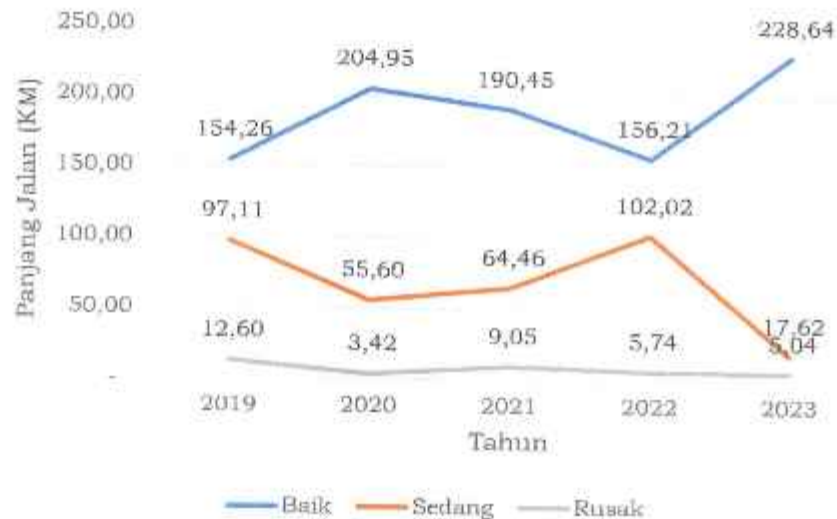
perumahan, tersebar di seluruh kelurahan di Kota Blitar.

Sementara itu, Jalan Lingkungan Primer dan Jalan Lingkungan Sekunder memberikan konektivitas di tingkat mikro, menghubungkan antara kawasan sekunder dan perumahan, serta antarpersil dalam kawasan perkotaan. Dengan demikian, jaringan jalan yang dirancang dengan baik ini memberikan dukungan integral bagi kehidupan sehari-hari dan perkembangan kota secara keseluruhan.

Tabel 2.25
Kondisi Jaringan Jalan di Kota Blitar Tahun 2019-2023

KONDISI JALAN	PANJANG JALAN (km)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Baik	154,26	204,95	190,45	156,21	228,64
Sedang	97,11	55,60	64,46	102,02	17,62
Rusak	12,60	3,42	9,05	5,74	5,04
Total	263,97	263,97	263,97	263,97	251,30

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, 2024



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, 2024

Gambar 2.41

Kondisi Jaringan Jalan Kota Blitar 2019 - 2023

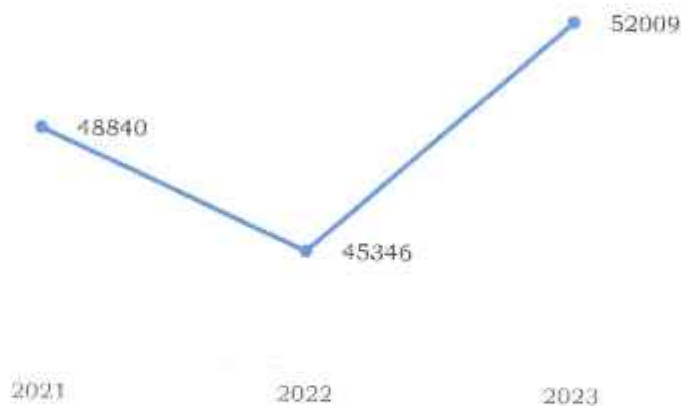
Total Panjang jalan di Kota Blitar pada tahun 2023 berkurang dibandingkan dengan Panjang jalan pada tahun 2022, hal ini diubah dengan SK Walikota Blitar Nomor: 100.3.3.3/143/HK/410.020.3/2024 dengan Panjang jalan di Kota Blitar sepanjang 251,30 kilometer. Kondisi prasarana jaringan jalan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa sebagian besar jaringan jalan di kota ini berada dalam kondisi baik, dengan panjang mencapai 228,64 kilometer. Selain itu, terdapat jalan-jalan dengan kondisi sedang sepanjang 17,62 kilometer, sementara yang mengalami kerusakan mencapai 5,04 kilometer.

Panjang jalan dalam kondisi baik yang dominan mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam pemeliharaan dan perawatan infrastruktur jalan. Kondisi baik ini menjadi faktor penting dalam memastikan kelancaran arus lalu lintas, mobilitas masyarakat, dan mendukung berbagai aktivitas ekonomi serta sosial di Kota Blitar.

Meskipun demikian, adanya sebagian jalan yang masih dalam kondisi sedang atau rusak menunjukkan perlunya perhatian lebih lanjut dalam upaya pemeliharaan dan peningkatan kualitas prasarana jalan. Evaluasi rutin terhadap kondisi jalan menjadi langkah penting untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan keberlanjutan infrastruktur jalan kota.

2.3.3.5. Prasarana Jaringan Energi

Ketersediaan jaringan energi menjadi syarat utama di wilayah perkotaan, karena semua kegiatan penduduknya membutuhkan sumber energi terutama jaringan listrik.



Sumber : BPS, 2024

Gambar 2.42
Pelanggan Listrik Kota Blitar 2021 - 2023

Jumlah pelanggan listrik yang memberikan gambaran tentang akses pelayanan listrik kepada masyarakat. Pada tahun 2023 jumlah pelanggan listrik mencapai 52.009 pelanggan, jumlah ini meningkat jika dibandingkan tahun 2021 dan 2022.

Tabel 2.26
Jumlah Daya dan Pemakaian Listrik di Kota Blitar Tahun 2023

KECAMATAN	PELANGGAN	DAYA TERPASANG (KW)	PEMAKAIAN (Kwh)
Sukorejo	17.144	25.032.091	161.306.058
Kepanjen Kidul	15.537	31.580.750	203.505.424
Sananwetan	19.328	31.831.645	205.122.184
	52.009	88.444.486	569.933.666

Sumber: RTRW Kota Blitar Tahun 2023-2043

Dari sisi jumlah daya yang terpasang dan pemakaian listrik di setiap kecamatan, di Kecamatan Sukorejo, total daya listrik yang terpasang mencapai 25.032.091 KW, dengan pemakaian listrik sebesar 161.306.058 (Kwh). Kecamatan Kepanjen Kidul mencatat total daya terpasang 31.580.750 KW dan pemakaian sebesar 203.505.424 Kwh. Sementara itu, di Kecamatan Sananwetan, total daya listrik terpasang mencapai 31.831.645 KW, dengan pemakaian sebesar 205.122.184 Kwh.

Data tersebut memberikan informasi yang penting terkait dengan kebutuhan energi listrik di masing-masing kecamatan. Adanya perbedaan dalam total daya dan pemakaian listrik antar kecamatan dapat menjadi dasar untuk merancang strategi distribusi dan pengelolaan daya listrik yang lebih efisien. Selain itu, data ini juga mencerminkan tingkat kebutuhan listrik oleh masyarakat setempat dan sejauh mana infrastruktur listrik telah mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

2.3.3.6. Prasarana Jaringan Air Minum

Pelayanan air minum oleh Pemerintah Kota Blitar dilakukan dalam bentuk pembentukan Perusahaan Daerah, yaitu Perusahaan Umum Daerah Tirta Patria. Jumlah pelanggan air minum pada Perumda Tirta Patria masih terhitung sangat sedikit dibanding dengan jumlah keluarga di Kota Blitar. Hal ini disebabkan karena faktor kemudahan mendapatkan air bersih di masing masing rumah dengan menggunakan sumur pompa. Faktor yang kedua adalah image Masyarakat Kota Blitar masih kurang baik pada pelayanan Perumda Tirta Patria. Hal ini disebabkan kekecewaan pelanggan yang tersampaikan pada Masyarakat tentang pelayanan PDAM pada jaman dulu berkaitan dengan kualitas, kuantitasn dan kontinuitas air yang disediakan PDAM. Meskipun sejak tahun 2019 kondisi manajemen Perumda Tirta Patria sudah dinyatakan sehat dengan pola pelayanan yang mampu menjamin kualitas, kuantitas dan kontinuitas air yang baik pada pelanggan, akan tetapi Masyarakat masih belum mampu mengubah pendapat Masyarakat secara signifikan. Dampaknya adalah jumlah pelanggan yang sedikit dan perkembangan sambungan baru sangat juga sangat sedikit. Adapun jumlah pelanggan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.27
Jumlah Pelanggan Aktif dan Air yang Disalurkan Menurut Kecamatan di Kota Blitar

No.	Kecamatan	Jumlah Pelanggan	Air Disalurkan	Nilai (Rp.)
1.	Sukorejo	2.431	345.243	1.206.926.200
2.	Kepanjenkidul	2.034	277.673	1.043.438.750
3.	Sananwetan	2.159	308.519	1.196.989.800
4.	Kota Blitar	6.624	931.435	3.447.354.750

Sumber: PDAM Kota Blitar, 2024

2.3.3.7. Prasarana Jaringan Telekomunikasi

Pada tahun 2021, Kota Blitar memiliki beragam jenis sarana telekomunikasi yang mendukung konektivitas dan akses komunikasi masyarakat di setiap kecamatan, sebagai infrastruktur jaringan tetap yang terdiri dari menara BTS (Base Transceiver Station), MH (Manhole), dan ODC (Optical Distribution Cabinet).

Tabel 2.28
Jenis Sarana Telekomunikasi Kota Blitar Tahun 2021

Jenis Sarana Telekomunikasi	Unit
Kecamatan Kepanjenkidul	
Infrastruktur Jaringan Tetap	62
Menara BTS (Base Transceiver Station)	23
MH	30

Jenis Sarana Telekomunikasi	Unit
ODC	5
Kecamatan Sananwetan	
Infrastruktur Jaringan Tetap	65
Menara BTS (Base Transceiver Station)	16
MH	36
ODC	3
Kecamatan Sukorejo	
Infrastruktur Jaringan Tetap	41
Jumlah Eksisting	
Menara BTS (Base Transceiver Station)	13
MH	18
ODC	1

Sumber: RTRW Kota Blitar Tahun 2023-2043

Secara keseluruhan, jumlah eksisting sarana telekomunikasi di Kota Blitar mencakup 13 menara BTS, 18 MH, dan 1 ODC. Menara BTS berfungsi sebagai pusat transmisi sinyal telekomunikasi untuk menjamin cakupan jaringan yang luas, sedangkan MH dan ODC berperan dalam mendukung infrastruktur kabel optik yang membantu pengiriman data secara efisien.

2.3.3.8. Jaringan Transportasi

Terminal Patria merupakan terminal penumpang tipe A dan terminal induk terbesar yang terdapat di kawasan Blitar Raya. Terminal ini beralamat di Jalan Kenari Nomor 110, Kelurahan Rembang, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur (tepat di selatan ujung kota Blitar). Selama lima tahun terakhir, Terminal Patria di Kota Blitar tercatat data jumlah keberangkatan dan kedatangan bus sebagai indikator aktivitas transportasi di wilayah Kota Blitar. Pada tahun 2019, terdapat 363.338 keberangkatan bus dari Terminal Patria, sementara jumlah kedatangan bus mencapai 344.802. Terjadi fluktuasi pada tahun 2020, dengan penurunan keberangkatan menjadi 254.973 dan kedatangan menjadi 227.753. Tren penurunan keberangkatan bus berlanjut pada tahun 2021 menjadi 250.073 sedangkan kedatangan menjadi 238.366. Meskipun demikian, pada tahun 2022 dan 2023, terjadi peningkatan jumlah keberangkatan dan kedatangan.



Sumber: Kota Blitar Dalam Angka, 2024

Gambar 2.43

Keberangkatan dan Kedatangan Bus di Terminal Patria

Selain Terminal Patria, Kota Blitar juga memiliki Stasiun Blitar sebagai stasiun kereta api kelas besar tipe B yang terletak di Kepanjenkidul, Kepanjenkidul, Blitar; pada ketinggian +167 meter; dan termasuk dalam Daerah Operasi VII Madiun. Stasiun ini melayani semua layanan kereta api penumpang yang melintasi jalur Malang-Kertosono/lintas selatan-tengah Jawa.

Data keberangkatan dan kedatangan kereta di Stasiun Blitar selama lima tahun terakhir memberikan gambaran aktivitas transportasi kereta api di wilayah tersebut. Terjadi fluktuasi jumlah keberangkatan dan kedatangan kereta selama lima tahun terakhir. Tren peningkatan keberangkatan dan kedatangan kereta terjadi tahun 2021 sampai 2023 dimana jumlah kedatangan kereta tertinggi yaitu 745.836 dan jumlah keberangkatan kereta tertinggi yaitu 700.549 pada tahun 2023.



Sumber: Kota Blitar Dalam Angka, 2024

Gambar 2.44

Jumlah Keberangkatan dan Kedatangan Kereta di Stasiun Kota Blitar

2.3.3.9. Persampahan

Perkiraan jumlah timbulan sampah per hari di Kota Blitar menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Kota Blitar . Data tersebut mencerminkan masalah yang berkaitan dengan manajemen sampah di wilayah perkotaan, yang umumnya dihadapi oleh banyak kota di Indonesia.

Perkiraan jumlah timbulan sampah per hari di Kota Blitar menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Kota Blitar . Data tersebut mencerminkan masalah yang berkaitan dengan manajemen sampah di wilayah perkotaan, yang umumnya dihadapi oleh banyak kota di Indonesia.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar, 2024

Gambar 2.45
Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah Per Hari

Berdasarkan data di atas perlu adanya perhatian lebih dalam pengelolaan sampah secara berkelanjutan, termasuk upaya untuk mengurangi timbulan sampah, meningkatkan daur ulang, dan memperkuat sistem pengelolaan sampah yang efisien dan ramah lingkungan.

Salah satu strategi untuk mengurangi timbulan sampah adalah pemilahan dari hulu sebelum TPS. Strategi ini ditempuh dengan cara membangun kesadaran masyarakat untuk membentuk Bank Sampah yang bertugas mengumpulkan sampah anorganik seperti plastik dan kertas yang memiliki nilai ekonomis untuk dimanfaatkan. Semakin banyaknya bank sampah yang aktif dapat mengurangi jumlah volume sampah yang terbuang ke TPA. Perkembangan jumlah bank sampah dari tahun ke tahun selalu meningkat, seperti yang tergambar dalam data tabel berikut:

Tabel 2.29
Jumlah Bank Sampah Kota Blitar

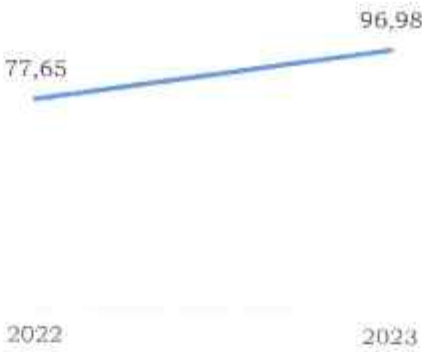
Tahun	Jumlah Bank Sampah
2018	31
2019	46
2020	52
2021	52
2022	72
2023	93

Sumber: DLH Kota Blitar, 2024

2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

2.3.4.1. Indeks Reformasi Hukum

Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Indeks Reformasi Hukum adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.



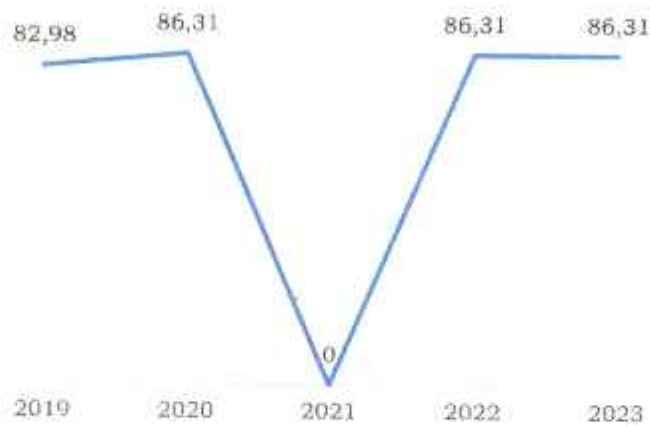
Sumber: Bagian Hukum Setda Kota Blitar , 2024

Gambar 2.46
Indeks Reformasi Hukum Kota Blitar Tahun 2019 – 2023

Capaian Indeks Reformasi Hukum Kota Blitar tahun 2023 mengalami peningkatan 19,33 persen jika dibandingkan tahun 2022. Hal ini disebabkan pada tahun 2023 telah terbangun aplikasi JDIH yang terintegrasi dengan portal JDIHN dan meningkatnya keterlibatan pejabat fungsional analis hukum dalam melakukan evaluasi produk hukum di daerah.

2.3.4.2. Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Indikator ini didapatkan melalui kompilasi berbagai fenomena terkait demokrasi yang terjadi di suatu daerah.



Sumber: Bakesbangpol Kota Blitar , 2024

Gambar 2.47

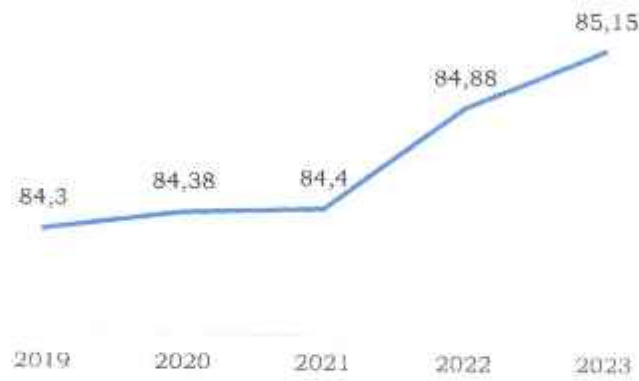
Indeks Demokrasi Indonesia Kota Blitar Tahun 2019 – 2023

Berdasarkan data di atas, diperoleh informasi bahwa pada tahun 2021 capaian IDI Kota Blitar yaitu 0. Kondisi tersebut karena adanya kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Nomor 200/2202/SJ tentang Penyesuaian Pokja IDI Provinsi dan Sosialisasi IDI Metode terbaru. Adanya aturan tersebut membuat penilaian IDI di daerah ditarik oleh Provinsi, sehingga pada tahun 2021 Kota Blitar tidak melakukan penilaian IDI. Sedangkan tahun 2022 dan 2023 capaian IDI Daerah Kota Blitar menggunakan capaian tahun 2020. Hal tersebut diakibatkan masih proses dalam penyesuaian metode perhitungan baru IDI yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Adapun kebijakan dan strategi Pemerintah Kota Blitar dalam mempertahankan ketercapaian Indeks Demokrasi Indonesia yaitu tingginya komitmen pemerintah untuk menjaga proses pemilu dan pluralisme, menjaga nilai-nilai demokrasi, partisipasi politik masyarakat, budaya politik masyarakat dan kebebasan sipil. Selain itu pemerintah juga melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan atau membiasakan untuk berbeda pendapat dan saling menerima serta tenggang rasa.

2.3.4.3. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) merupakan ruang diseminasi riset kebijakan berupa pemetaan kondisi kerukunan umat beragama. Adanya Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) diharapkan dapat membuat berbagai rumusan atau kebijakan yang dapat membantu mencari solusi yang tepat bagi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan keagamaan di masyarakat.



Sumber: Bakesbangpol Kota Blitar , 2024

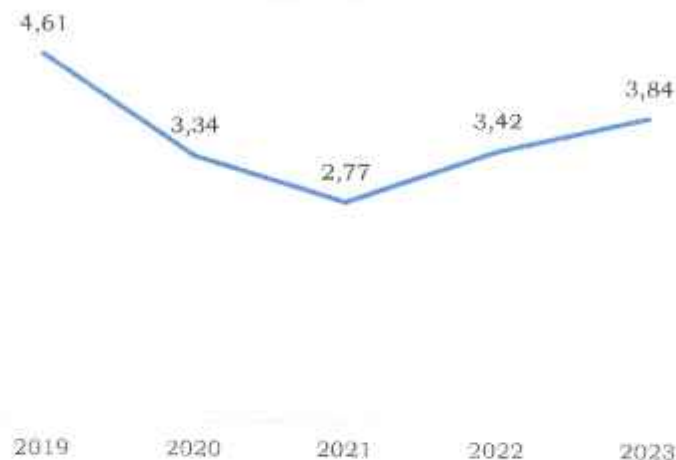
Gambar 2.48

Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Blitar Tahun 2019 – 2023

Berdasarkan data di atas, capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Blitar menunjukkan adanya tren kenaikan dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Hal tersebut menggambarkan bahwa meskipun pada tahun 2019 dilaksanakan Pemilu serentak yang bisa mempengaruhi kondisi kerukunan umat beragama di Kota Blitar dan pada tahun 2020 juga terdapat pesta demokrasi Pilkada, serta Covid 19 yang bisa berpengaruh juga terhadap kondisi kerukunan umat beragama di Kota Blitar, namun IKUB Kota Blitar justru mengalami kenaikan. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kerukunan umat beragama di wilayah Kota Blitar dapat terjaga dengan baik dan stabil meskipun harus melewati berbagai tantangan ditahun-tahun sebelumnya.

2.3.4.4. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Adapun capaian Indeks Daya Saing Daerah Kota Blitar tahun 2019 samapai 2023 adalah sebagai berikut :



Sumber: BRIN, 2024

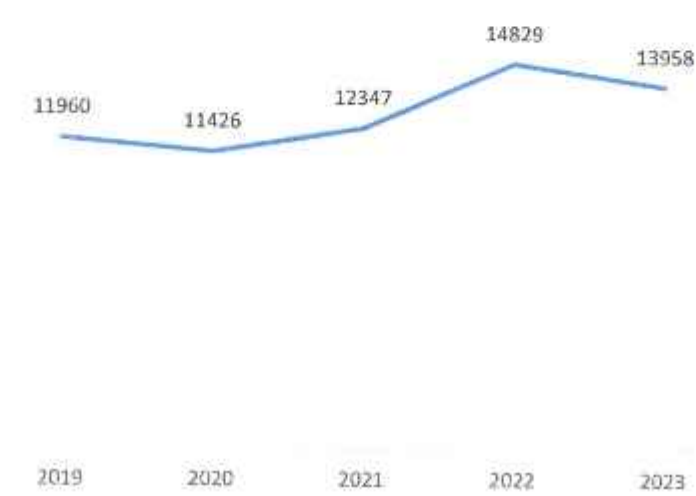
Gambar 2.49

Indeks Daya Saing Daerah Kota Blitar Tahun 2019 – 2023

Pada pengukuran IDSD tahun 2023 dilakukan perubahan terhadap beberapa indikator dan penyesuaian cara penghitungan skor sehingga diharapkan lebih merepresentasikan kondisi nyata daya saing daerah. Capaian Indeks Daya Saing Daerah Kota Blitar tahun 2023 adalah 3,84. dan menempati peringkat ketiga se-Jawa Timur.

2.3.4.5. Koperasi, Usaha Mikro Kecil

Koperasi dan Usaha Mikro merupakan sektor/lapangan usaha yang telah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Blitar. Hal ini terlihat dari peran UMKM dalam struktur perekonomian Kota Blitar, terbukti dengan kontribusi K-UMKM dalam memberikan nilai tambah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Blitar.



Sumber : Kota Blitar Dalam Angka, 2024

Gambar 2.50

Jumlah Usaha Mikro Kota Blitar Tahun 2019-2023

Jumlah usaha mikro di Kota Blitar tahun 2023 sebanyak 13.958 unit usaha dengan kategori usaha yang paling dominan adalah usaha dibidang perdagangan sebanyak 5.850 unit usaha atau 41,9 persen dari total jumlah usaha mikro.

Tabel 2.30

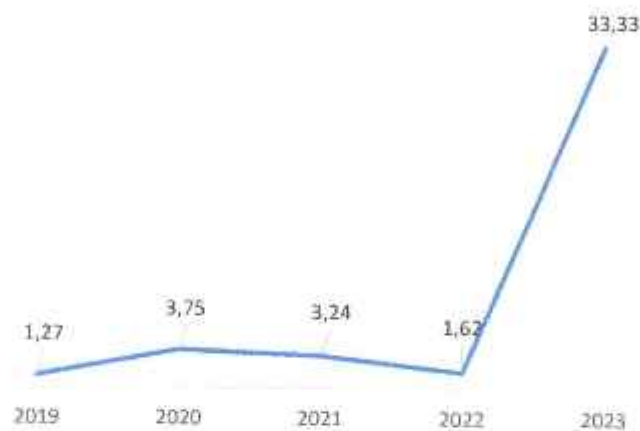
Data Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar Tahun 2019 - 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Koperasi yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)	-	-	-	23	45
Koperasi Sehat	107	99	107	111	136
Usaha Mikro yang Dibina (pemasaran)	-	285	196	326	2380

Sumber : Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan, 2024

2.3.4.6. Kewirausahaan Daerah

Melihat roda perputaran perekonomian di Kota Blitar, tidak dapat dipungkiri bahwa peran koperasi dan usaha mikro di Kota Blitar cukup signifikan bagi perekonomian daerah. Di samping perannya bagi penggerak perekonomian daerah, koperasi dan usaha mikro juga terbukti merupakan pelaku usaha yang cukup mandiri, kukuh, fleksibel yang sudah teruji terutama di saat krisis berlangsung.



Sumber : Dinkop UKM Naker Kota Blitar, 2024

Gambar 2.51

Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru Kota Blitar Tahun 2019-2023

Persentase pertumbuhan wirausaha baru mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2024 menjadi 33,33 persen. Hal ini menunjukkan perkembangan positif atas kondisi ekonomi di Kota Blitar.

2.3.4.7. Perpustakaan

Perpustakaan memegang peran penting dalam meningkatkan literasi masyarakat dan berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) dalam pilar pendidikan berkualitas. Perpustakaan menyediakan akses yang demokratis ke pengetahuan dan bahan bacaan yang mendukung pembelajaran sepanjang kehidupan. Dalam era digital, literasi digital menjadi semakin penting. Perpustakaan harus memainkan peran dalam meningkatkan literasi digital sehingga dapat membantu membangun masyarakat yang lebih terdidik, sadar isu global, dan berkelanjutan.

Dengan demikian urusan perpustakaan menjadi urusan wajib non pelayanan dasar yang memiliki fungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Adapun capaian penyelenggaraan urusan perpustakaan yaitu pada tahun 2023 dilakukan pengukuran tingkat kegemaran membaca masyarakat dengan hasil 51,43 persen mengalami peningkatan 3,94 persen dari tahun 2022. Aktivitas membaca masyarakat Kota Blitar diukur melalui 5 indikator yaitu frekuensi membaca, durasi membaca, jumlah bacaan, frekuensi akses internet dan durasi akses internet.

Jika dilihat dari perhitungan indeks pembangunan literasi masyarakat, saat ini Kota Blitar berada pada angka 41,54, mengalami peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya yaitu 11,37. Indeks pembangunan literasi masyarakat menjadi indikator kinerja kunci yang terus mengalami kenaikan selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Layanan perpustakaan terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan literasi masyarakat di Kota Blitar berbagai kalangan. Sampai dengan tahun 2023 jumlah buku yang tersedia di perpustakaan sebanyak 147.966 judul buku yang terdiri atas buku anak, buku arsitektur, buku biografi, buku ensiklopedi, buku filsafat dan psikologi, buku ilmu pengetahuan, buku ilmu terapan, novel/fiksi, buku sejarah, buku pendidikan, buku seni budaya, dan buku teknologi informasi. Koleksi buku yang semakin beragam diharapkan dapat meningkatkan minat baca masyarakat.

Tabel 2.31
Jumlah Buku di Perpustakaan

No.	Perpustakaan	Judul	Eksemplar
1.	Dinperpusip	12.999	26.825
2.	SD/MI	104.881	436.800
3.	SMP/MTs	30.086	69.172
Jumlah Buku		147.966	532.797

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2024

Seiring dengan pengaruh teknologi informasi yang semakin berkembang, layanan perpustakaan juga ditingkatkan melalui layanan digital bertajuk “Layada” atau Layanan Anak dalam jaringan yang dapat diakses online melalui website Perpustakaan Daerah (dinperpusip.blitarkota.go.id). Selain itu, tersedia juga e-library di e-library.blitarkota.go.id, Layanan PETA (Pesan Antar) dan Tali Pusaka (Data Literasi Perpustakaan Kota Blitar) sebagai pendukung layanan perpustakaan digital.

2.3.4.7.1. Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar melaksanakan peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan sekolah setiap tahun.

Adapun data tenaga pengelola perpustakaan serta pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.32
Tenaga Pengelola Perpustakaan dan Pustakawan Kota Blitar

No.	Perpustakaan	Jumlah	
		Perpustakaan	Petugas
1	SD/MI	72	67 orang
2	SMP/MTs	26	51 orang
3	Dinperpusip	1	14 orang
JUMLAH		98	132 orang

Sumber: Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar tahun 2023

Dari tabel diatas, diperoleh Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk tahun 2023 sebesar:

Jumlah tenaga perpustakaan: Jumlah penduduk Kota Blitar
x 100%

$$132 : 159.781 = 1 : 1.210$$

Dari data tersebut diperoleh kesimpulan, 1 orang tenaga perpustakaan melayani 1.210 orang penduduk (belum mencukupi).

Dalam Renstra dan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota memiliki indikator Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.33
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan Kota Blitar

Uraian	Realisasi Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan	95 orang	95 orang	95 orang	95 orang	98 orang

Sumber : Dinkop UKM Naker Kota Blitar, 2024

Sasaran kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan adalah pengelola perpustakaan tingkat SD/MI dan SLTP/MTs se-Kota Blitar dan masing-masing perpustakaan sekolah mengirimkan 1 (satu) orang perwakilan.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi tenaga perpustakaan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan sekolah antara lain sebagai berikut:

1. Sebagian besar perpustakaan sekolah belum memiliki pustakawan. Perpustakaan sekolah masih dikelola oleh pengelola perpustakaan, dimana sebagian masih dilimpahkan kepada guru atau staf Tata Usaha.
2. Masih kurangnya pengetahuan pengelola perpustakaan sekolah mengenai prosedur dan sistem pengelolaan perpustakaan.
3. Belum adanya kebijakan pergantian pengelola perpustakaan sekolah ketika pengelola perpustakaan sekolah dimutasi ke sekolah yang lain.

2.3.4.7.2. Peningkatan Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Budaya Baca

Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang diselenggarakan di sekolah sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar dan pengembangan gemar membaca serta literasi guru dan siswa. Dalam menjalankan fungsi tersebut, perpustakaan sekolah memiliki standar yang harus dipenuhi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, sekaligus Perwali Kota Blitar Nomor 90 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar memiliki kewajiban membina dan memantau perpustakaan sekolah dengan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Perpustakaan Sekolah.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perpustakaan Sekolah berfokus pada 6 hal yang menjadi Standar Nasional Perpustakaan (SNP) yaitu : standar koleksi, standar sarana dan prasarana, standar layanan, standar tenaga (SDM), dan standar penyelenggaraan. Melalui Monitoring dan Evaluasi tersebut, dapat mengetahui secara langsung bagaimana kondisi perpustakaan secara data dan fakta.

Dalam Renstra dan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar pada Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan memiliki indikator Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan dengan realisasi sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.34
Pembinaan Perpustakaan di Kota Blitar

Uraian	Realisasi Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah pembinaan perpustakaan	95 perpustakaan	95 perpustakaan	95 perpustakaan	95 perpustakaan	98 perpustakaan

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2024

Sasaran kegiatan pembinaan perpustakaan sekolah adalah perpustakaan tingkat SD/MI dan SLTP/MTs se-Kota Blitar. Setelah dilakukan monitoring dan evaluasi perpustakaan sekolah, dilaksanakan Lomba Perpustakaan Sekolah setiap tahun. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mewujudkan perpustakaan sekolah sesuai standar, meningkatkan mutu dan peran perpustakaan sekolah dalam mengembangkan kegemaran membaca masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi dalam pembinaan perpustakaan sekolah yaitu:

1. Masih kurangnya sarana prasarana perpustakaan sekolah.
2. Masih kurangnya koleksi perpustakaan sekolah.
3. Seluruh perpustakaan SD dan SMP yang telah terakreditasi C melalui Program Relaksasi Akreditasi Perpustakaan yang diadakan oleh Perpustakaan Nasional RI tahun 2021, telah habis masa berlakunya pada akhir tahun 2024 (masa berlaku akreditasi perpustakaan sekolah adalah 3 tahun). Perpustakaan yang mengikuti akreditasi tahun 2021 mendapatkan predikat akreditasi perpustakaan C tanpa melalui proses penilaian akreditasi secara reguler.

Adapun perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar terakreditasi B pada tahun 2023. Berikut data perpustakaan di Kota Blitar sesuai SNP (Standar Nasional Perpustakaan) tahun 2023:

Tabel 2.35
Data Perpustakaan di Kota Blitar sesuai SNP

No.	Perpustakaan	Jumlah	
		Memenuhi SNP	Belum SNP
1	72 SD	50	22
2	26 SMP	13	13
3	Dinperpusip	1	0
Jumlah		64	35

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,2024

Selain melakukan pembinaan pada perpustakaan sekolah tingkat SD dan SMP, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar juga melakukan pembinaan pada perpustakaan kelurahan mulai tahun 2023.

Kegiatan ini merupakan upaya memperkuat peran perpustakaan dalam meningkatkan kualitas SDM yang unggul melalui peningkatan kemampuan literasi untuk mewujudkan Indonesia Maju dan Blitar Cerdas, dengan tagline **Literasi untuk Kesejahteraan** melalui Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar melakukan pembinaan terhadap 10 (sepuluh) perpustakaan kelurahan yang menjadi mitra dan mendapat bantuan dari Perpustakaan Nasional RI yaitu :

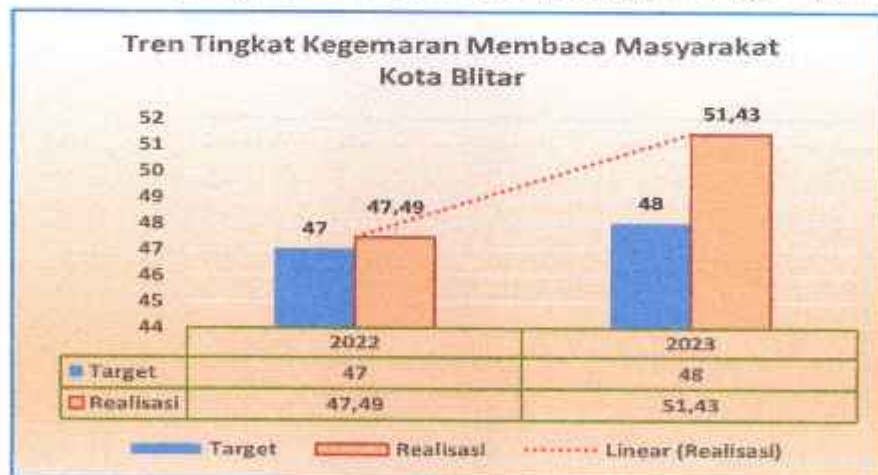
1. Perpustakaan Kelurahan yang mendapat bantuan dari Perpustakaan tahun 2023 : Perpustakaan Kelurahan Kauman, Rembang dan Pakunden.
2. Perpustakaan Kelurahan yang mendapat bantuan dari Perpustakaan tahun 2024 : Perpustakaan Kelurahan Bendo, Gedog, Karang Sari, Tlumpu, Karangtengah, Kepanjenlor, dan Plosokerep.

Terkait dengan pengembangan budaya baca, pada Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar tahun 2021-2026 dilakukan pengukuran Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Kota Blitar. Hasil penghitungan mandiri Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Kota Blitar tahun 2023 adalah sebesar 51,43 (kategori sedang).

Permasalahan yang harus diselesaikan dalam meningkatkan kegemaran membaca masyarakat salah satunya karena belum adanya Perda yang mengatur regulasi, strategi, kebijakan, inovasi, serta optimalisasi peningkatan kegemaran membaca dan budaya baca masyarakat.

Adapun hal-hal yang telah dilakukan untuk meningkatkan Kegemaran Membaca Masyarakat Kota Blitar sebagai berikut :

- a. Mengusulkan Perda Perpustakaan serta optimalisasi Program Pembinaan Perpustakaan berkerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan dan Perangkat Daerah terkait.
- b. Mengoptimalkan promosi literasi dan meningkatkan kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mempermudah akses dan penyediaan sarana prasarana membaca yang memadai di seluruh wilayah Kota Blitar.



Gambar 2.52
Tingkat Kegemaran Membaca masyarakat Kota Blitar Tahun 2022 – 2023

Berbagai kegiatan pengembangan budaya baca telah dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar sebagai upaya untuk meningkatkan kegemaran membaca masyarakat Kota Blitar dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain :

1. Layanan di tempat : layanan umum, layanan Blitar Corner (buku-buku lokal konten dan buku-buku karya penulis *mBlitar*), layanan referensi dan literasi ceria (ruang layanan anak).

Mulai bulan Maret 2024 Perpustakaan Kota Blitar membuka layanan sampai pukul 20.00 WIB (8 malam) setiap hari Senin hingga Jumat, sedangkan hari Sabtu dan Minggu buka mulai pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB.

2. Layanan teknis : pengembangan, pengolahan, penyimpanan, perawatan koleksi perpustakaan serta otomasi dan kerjasama perpustakaan.
3. Layanan ekstensi : LTPS (Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah), layanan mobil perpustakaan keliling ke sekolah, layanan Bulk Loan (paket pinjam buku) pada Pojok Baca Kelurahan/Kecamatan/OPD layanan publik dan taman baca yang dikelola oleh kelompok masyarakat.

Masyarakat juga dapat membaca dan meminjam buku melalui Mobil Perpustakaan Keliling pada hari Sabtu dan Minggu di Sport Center mulai pukul 06.00 s.d. 09.00 WIB dan di Kebon Rojo mulai pukul 09.30 s.d. 12.00 WIB. Mobil Perpustakaan Keliling juga membuka layanan setiap hari di jam kerja pada saat liburan sekolah bertempat di Sport Center, Kebon Rojo dan Taman Sentul.

4. Layanan online : keanggotaan online, katalog online, e-book, layanan pesan antar (PETA), CEDAR (Cerita Anak Dalam Jaringan) yang ditayangkan melalui akun Instagram serta Youtube Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar.

Mulai tahun 2024 terdapat inovasi kegiatan berupa webinar kepenulisan untuk masyarakat umum berseri yaitu KEMAS BLITAR (KEpenulisan online untuk MASyarakat Kota Blitar) yang menghadirkan narasumber dari berbagai genre kepenulisan.

5. Pembudayaan gemar membaca : Wisata Buku untuk siswa TK/RA dan SD/MI, Parenting Literasi yang dilaksanakan pada beberapa TK dengan peserta wali murid, Lomba Bercerita untuk siswa SD/MI, Lomba Implementasi Budaya Baca untuk siswa SMP/MTs, Bimbingan Pemustaka untuk siswa SMP/MTs, Kafe Literasi (KAngen Fokus ngobrol-nE Literasi).
6. Pada bulan November 2024 akan dilaksanakan inovasi kegiatan berupa Kelurahan Bercerita Seback Paras Elok (SEjarah BudayA EKonomi PARIwiSata kEarifan LOKal) yang akan mengangkat potensi sejarah, budaya, ekonomi, pariwisata dan kearifan lokal dari 21 Kelurahan se Kota Blitar.

7. Pengembangan kekhasan koleksi (Lokal Konten) : Bedah Buku Lokal Konten, Workshop Kepenulisan, dan Lomba Kepenulisan tentang Kota Blitar dalam rangka menggali potensi menulis tentang kearifan lokal Kota Blitar sekaligus menambah koleksi Lokal Konten pada ruang Blitar Corner.
8. Pembinaan Perpustakaan : sosialisasi kepastakawanan, peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan sekolah, monev perpustakaan sekolah dan lomba perpustakaan sekolah. Juga dilaksanakan pembinaan perpustakaan kelurahan.
9. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial : transformasi literasi dengan tema berbeda-beda antara lain : Transformasi Literasi Ecoprint, Transformasi Literasi Minuman Yoghurt, Transformasi Literasi Digital Konten Edukatif, Transformasi Literasi Daur Ulang Sampah menjadi Rupiah.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar juga diwajibkan melakukan replikasi transformasi perpustakaan terhadap perpustakaan kelurahan, supaya perpustakaan kelurahan menjadi pusat kegiatan masyarakat dalam meningkatkan ilmu dan wawasan serta bertujuan memberikan dampak dalam peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
10. Peningkatan sarana prasarana perpustakaan : pembangunan Gedung Perpustakaan Kota Blitar, penyediaan perabot layanan perpustakaan, penyediaan TIK layanan perpustakaan dan penyediaan bahan pustaka untuk mempermudah akses perpustakaan serta memenuhi Standar Nasional Perpustakaan.

2.3.4.8. Pariwisata

Industri Pariwisata Kota Blitar selama ini digerakkan oleh keberadaan Makam Proklamator dan presiden pertama Indonesia Ir Sukarno atau yang disebut dengan Bung Karno, makamnya terkenal dengan sebutan Makam Bung Karno (MBK). MBK menjadi sebagai magnet penarik wisatawan untuk datang ke Wilayah Blitar Raya (Kota dan Kabupaten Blitar). Oleh karena itu, MBK menjadi ikon dari pertumbuhan kepariwisataan Kota Blitar, sehingga wisata yang dikembangkan di Kota Blitar adalah wisata Kebangsaan, dimana Kota Blitar mengembangkan wisata yang berbasis pada nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme. Ada idiom yang dikembangkan Pemerintah Kota Blitar untuk menarik wisatawan dari daerah lain yaitu "Jangan sekali kali mengaku menjadi orang Indonesia seutuhnya, apabila belum berterima kasih pada Sang Proklamator Bung Karno dengan cara mendoakannya langsung dari pusaranya". Artinya orang Indonesia harus datang dan berdoa di pusara Sang Proklamator sebagai rasa terima kasihnya, kesadaran tentang jiwa Merdeka tentang kemerdekaan bangsa dan mengingat Kembali pada Sejarah kemerdekaan bangsa yang di picu dari proklamasi adalah nilai nilai nasionalisme dan patritisme yang ingin dikembangkan oleh Kota Blitar sebagai basis dari pariwisata di Kota Blitar.

Meskipun senyatanya diperkirakan 60 persen wisatawan nusantara yang datang dan berkunjung ke Kota Blitar adalah para peziarah atau biasa kita kenal dengan wisata religi. Setelah peristiwa *zero tourism* karena ada larangan dan pembatasan pergerakan antar kota, antar negara yang disebabkan berkembangnya virus CORONA, pariwisata Kota Blitar bergerak yang dimulai dari penetapan Kota Blitar sebagai Kota Terbaik menanggulangi Corona pada tahun 2021. Kota Blitar yang dipercaya pemerintah pusat untuk pertama kali menerapkan kunjungan wisata terbatas pada Kawasan Wisata MBK. Sejak itu, pariwisata bergerak naik perlahan.

2.3.4.8.1. Kunjungan wisata

Kunjungan wisata di Kota Blitar sangat dipengaruhi oleh perkembangan destinasi wisata baik dalam Kota maupun di wilayah Kabupaten. Kunjungan wisata di Kota Blitar Kembali menguat secara signifikan setelah dibukanya Masjid Ar Rahman di Wilayah Kelurahan Kepanjenlor. Basis wisatawan religi yang datang ke Kota Blitar menguat secara signifikan karena daya Tarik masjid Ar Rahman. Karena ledakan kunjungan wisata ke Masjid tersebut, maka kunjungan ke Makam Bung Karno menjadi terangkat dan berkembang mengalami peningkatan yang cukup besar. Hal tersebut dapat dilihat pada perkembangan wisatawan di makam Bung Karno yang mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2022 dan tahun 2023. Kunjungan wisata selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.36

Jumlah Pengunjung Destinasi Kepariwisata di Kota Blitar

No	Objek Wisata	Jumlah				
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Makam Bung Karno	699.246	98.121	96.528	228.019	264.845
2	Istana Gebang	241.394	22.804	4.128	16.449	16.244
3	Perpustakaan Bung Karno	626.399	149.238	89.375	1.180.897	424.011
4	Kebon Rojo	1.331.464	128.520	42.378	291.100	511.866
5	Greenpark Bendogerit	37.398	4.738	2.372	13.853	21.158
6	Greenpark Sentul	37.258	6.040	3.695	12.408	17.740
7	Agro Belimbing	22.259	8.415	7.023	23.635	21.657
8	Telaga Nirmala	6.388	2.360	2.065	2.494	2.266
9	Sumber Udel	37.526	-	10.745	8.410	5.776
10	Taman Herlingga Jaya	25.487	2.329	-	-	-
11	Makam Aryo Blitar	730	454	275	1.550	2.444

No	Objek Wisata	Jumlah				
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
12	Kampung Bathok	3.700	297	-	90	-
13	Fish Garden	79.800	24.766	2.506	1.687	1.934
14	Goa Maria Sendangrejo	11.261	2.035	3.933	9.556	11.168
15	Kampung Kendang Sentul	-	17	44	20	216
16	Kampung 3d Bongares	-	-	-	-	216
17	Masjid Ar Rahman	-	-	-	-	1.355.178
18	Kolam Renang Letesa	-	-	-	-	13.888
Jumlah		3.160.310	450.134	250.067	1.999.868	2.650.182

Sumber data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar, 2024

Adapun data rata-rata lama tinggal wisatawan di Kota Blitar adalah sebagai berikut :

Tabel 2.37
Rata-rata lama tinggal wisatawan di Kota Blitar

No.	Tahun	Lama Tinggal (hari)
1	2019	0.14
2	2020	0.61
3	2021	1.12
4	2022	0.22
5	2023	0.15

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,2024

Dalam rangka meningkatkan daya tarik wisatawan terpadu, Pemerintah Kota Blitar melaksanakan berbagai upaya peningkatan kapasitas seniman dan budayawan diantaranya melalui :

1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang digunakan sebagai tempat latihan berbagai kelompok kesenian pada Gedung Kesenian, Pendopo Istana Gebang, Pendopo Makam Aryo Blitar, kompleks Museum PETA dan kompleks Makam Bung Karno
2. Meningkatkan peralatan kesenian seperti :
 - a. Seperangkat Gamelan lengkap yang berada di berada Gedung Kesenian, Pendopo Istana Gebang, Pendopo Kesenian Makam Aryo Blitar, Komplek Museum PETA.

- b. Seperangkat Wayang kulit lengkap yang berada di Aula Museum PETA.
- c. Peralatan musik modern dan tradisional.
- 3. Penampilan kesenian baik kesenian tradisional maupun modern melalui event event daerah baik di tingkat daerah/kota maupun tingkat propinsi.
- 4. Pemeliharaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengembangan dan pemajuan kesenian dan budaya seperti pemeliharaan situs candi Gedog sebagai tempat pelaksanaan ritual budaya masyarakat lokal.

2.3.4.8.2. PDRB Lapangan Usaha Penyediaan akomodasi dan makan minum

Aktifitas Pariwisata yang terlihat kongkrit berpengaruh pada perekonomian Kota Blitar serta dihitung secara resmi menjadi bagian dari Produk Domestik Bruto adalah Lapangan Usaha Penyediaan akomodasi dan makan minum. Penyediaan akomodasi dan makan minum pada 3 tahun terakhir mengalami peningkatan baik ditinjau dari harga konstasn maupun harga berlaku. Hal ini linier dengan peningkatan jumlah kunjungan wisata ke Kota Blitar. Akan tetapi jika dilihat dari sisi besaran kontribusi Usaha Akomodasi dan makan minum terhadap PDRB, tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan sementara pada tahun 2023 tingkat kontribusi Usaha Akomodasi dan makan minum terhadap PDRB mengalami penurunan. Perkembangan PDRB lapangan usaha akomodasi dan makan minum dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.38
Nilai PDRB Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan makan minum Kota Blitar

PDRB lapangan usaha		2021	2022	2023
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	ADHK	244 654,07	266 864,02	288 747,89
	ADHB	376 589,46	429 549,51	486 119,02
	Kontribusi (%)	6,3	9,08	8,2

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024

2.3.4.9. Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif terdiri dari 17 sektor, periklanan, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, fotografi, penerbiatn, kriya, kuliner, music, pengembangan permainan, seni pertunjukan, seni rupa, aplikasi, televisi dan radio serta film, animasi dan video. Dari 17 sektor tersebut ada sektor sektor yang mengalami peningkatan yang cukup baik tetapi ada pula sektor yang tidak mengalami peningkatan. Yang mengalami peningkatan yang cukup besar seperti pada sektor kuliner dan kriya, sementara yang tidak mengalami peningkatan

pada sektor radio dan televisi. Adapun secara detail perkembangan sektor ekonomi kreatif dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.39
Perkembangan Ekonomi Kreatif Kota Blitar

No	Sub Sektor	Tahun 2022				Tahun 2023			
		Kecamatan			Kota	Kecamatan			Kota
		Kep. Kidul	Sanan wetan	Sukorejo		Kep. Kidul	Sanan wetan	Sukorejo	
1	Periklanan	-	3	6	9	-	3	6	9
2	Arsitektur	1	-	2	3	1	-	2	3
3	Desain Interior	2	10	3	15	2	14	3	19
4	Desain Komunikasi Visual	3	6	3	12	3	6	3	12
5	Desain Produk	6	3	16	25	6	4	16	26
6	Fashion	20	28	17	65	20	33	17	70
7	Fotografi	4	4	3	11	4	4	4	12
8	Penerbitan	1	11	-	12	1	11	-	12
9	Kriya	25	35	29	89	33	40	29	102
10	Kuliner	65	62	29	156	80	73	31	184
11	Musik	8	4	2	14	8	4	2	14
12	Pengembangan Permainan	2	3	1	6	2	3	1	6
13	Seni Pertunjukan	5	23	18	46	5	28	23	56
14	Seni Rupa	1	7	11	19	1	8	18	27
15	Aplikasi	1	3	-	4	1	3	-	4
16	Televisi Dan Radio	3	1	-	4	3	1	-	4
17	Film, Animasi Dan Video	1	4	-	5	1	4	-	5
Total		168	234	149	495	171	239	155	565

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar, 2024

2.3.4.10. Kebudayaan

Urusan kebudayaan menangani warisan budaya dan pengembangan kesenian. Warisan Budaya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Warisan Busaya Benda dan Warisan Budaya tak benda. Warisan Budaya Benda salah satunya berwujud sebagai bangunan bangunan cagar budaya, seperti Musum PETA, Istana

Gebang, Alun – alun, kawasan Rumah di sepanjang jalan merdeka, Kawasan Masjid Agung yang teridri dari Pendopo Kabupaten, Alun Alun, Penjara dan Masjid Agung Kota Blitar. Selain itu ada bangunan candi yang diketemukan di kelurahan Gedog dan Karangtengah, akan tetapi belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya, secara legal formal status temuan candi gedog dan karang tengah masih dalam Obyek Yang diduga Cagar Budaya (ODCB), hal ini disebabkan penetapan Cagar Budaya harus melalui proses kurasi dan secara formal ditetapkan oleh Tim Ahli Cagar Budaya.

Tabel 2.40
Data Situs dan Cagar Budaya Kota Blitar

No	Nama Cagar Budaya	Alamat/Lokasi
1.	Arca Dwarapala	Kel.Kepanjenlor
2.	Prasasti	Kel.Kepanjenlor
3.	Arca Dwarapala	Kel.Kepanjenlor
4.	Makam Kyai Imam Suwangsa	Kel. Bendogerit
5.	Lumpang Batu	Kel. Bendogerit
6.	Umpak	Kel. Bendogerit
7.	Kala	Kel. Gedog
8.	Kala	Kel. Gedog
9.	Yoni	Kel. Gedog
10.	Fr. Relief	Kel. Gedog
11.	Batu Relief	Kel. Gedog
12.	Antefik	Kel. Gedog
13.	Prasasti Karang Tengah	Kel. Karangtengah
14.	Unsur bangunan	Kel. Karangtengah
15.	Klenteng Poo An Kiong	Jl. Merdeka, No. 194 Kota Blitar
16.	Makam Bung Karno	Jl. Ir. Soekarno, Kota Blitar
17.	Istana Gebang	Jl. Sultan Agung, No. 59 Kota Blitar
18.	SMKN 3 Kota Blitar	Jl. Sudanco Supriadi, Kota Blitar
19.	Kompleks Induk SMKN 3 Kota Blitar	Jl. Sudanco Supriadi, Kota Blitar
20.	SMPN 3 Kota Blitar	Jl. Sudanco Supriadi, Kota Blitar
21.	Paroki Santo Yusup	Jl. Diponegoro, No. 34 Kota Blitar
22.	Rumah Dinas Bupati	Jl. Semeru, No. 40 Kota Blitar
23.	SMPN 5 Kota Blitar	Jl. Sudanco Supriyadi, No. 31 Kota Blitar
24.	SMPN 6 Kota Blitar	Jl. Sudanco Supriyadi, No. 34 Kota Blitar

No	Nama Cagar Budaya	Alamat/Lokasi
25.	Pesanggrahan Djoyodigdan	Jl. Melati, No. 43 Kota Blitar
26.	Hotel Tugu Lestari	Jl. Merdeka, No. 173 Kota Blitar
27.	Aloon-Aloon Kota Blitar	Jl. Semeru Kota Blitar
28.	Kebon Rojo	Jl. Diponegoro Kota Blitar
29.	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Katolik Santo Yusup	Jl. Jenderal Sudirman, No. 35 Kota Blitar
30.	Sekolah Menengah Atas (SMA) Yayasan Pendidikan (YP) Kotamadya	Jl. Tanjung, No. 1 Kota Blitar
31.	Biara Roh Kudus Santa Maria	Jl. Sudanco Supriyadi, No. 19 Kota Blitar
32.	Taman Kanak-Kanak (TK) Santa Maria	Jl. Sudanco Supriyadi, No. 17 Kota Blitar
33.	Sekolah Dasar (SD) Santa Maria	Jl. Sudanco Supriyadi, No. 21 Kota Blitar
34.	Pengadilan Negeri Blitar (Kantor Lama)	Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, No. 1 Kota Blitar
35.	Rumah Ibu Wardoyo	Jl. Sultan Agung
36.	Taman Makam Pahlawan Raden Wijaya	Jl. Sudanco Supriyadi
37.	Kompleks Monumen PETA	Jl. Sudanco Supriyadi
38.	Kompleks Makam Pangeranan	Jl. Sultan Agung
39.	Komplek Pendopo Kabupaten Blitar Dan Aloon-Aloon	Jl. Semeru
40.	Rumah Dinas Walikota Blitar	Jl. Sudanco Supriyadi
41.	Rumah Dinas Dan Yon 511	Jl. Panglima Sudirman
42.	Kompleks Bangunan PGSD	Jl. Ir Soekarno
43.	Candi Gedog	Jl. Brigjen Katamso
44.	Markas Tentara Belanda	Jl. Tanjung
45.	Langgar Gantung	Jl. Kemuning
46.	Pengadilan Negri Blitar (Kota Lama)	Jl. Dr Wahidin
47.	BNI	Jl. Kenanga
48.	Rumah Potong Babi	Jl. Kacapiring
49.	STIEKEN	Jl. Mastrip

No	Nama Cagar Budaya	Alamat/Lokasi
50.	Rumah Dinas Kir Master	Jl. Kacapiring
51.	Makam Aryo Blitar	Jl. Pamungkur

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar, 2024

Pengembangan kesenian yang ada di Kota Blitar dibagi menjadi 5 kelompok besar yaitu Seni Theater, Seni Tari, Seni Rupa, Seni Musik dan Seni Sastra. Semua kelompok kesenian berkembang cukup baik karena konsistensi dan perhatian pemerintah daerah yang besar terhadap kesenian. Kebijakan Pemerintah Daerah untuk menggunakan sanggar-sanggar Kota Blitar dalam setiap perhelatan kegiatan pemerintah daerah, sangat membantu perkembangan sanggar kesenian. Kebijakan untuk pengembangan event daerah seperti 5 ritus proses Grebek Pancasila, Blitar Djadul, Blitar Etnic Nasional Carnival, Soekarno Coffee Fest, Festival Batik Blitar Keren dan sebagainya membuat para pegiat seni di Kota Blitar dapat selalu berkreasi mengembangkan bakat seni masyarakat kota blitar. Adapun jumlah sanggar seni berdasarkan 5 kelompok besar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.41
Jumlah Sanggar Kesenian Kota Blitar

No	Sub Sektor	Jumlah yang ada	Terdaftar/ Aktif
1.	Seni Teater		
	Teater modern	14	14
	Film	4	4
	Teater Tradisional	6	6
	Wayang Kulit	22	16
	Total	46	40
2.	Seni Tari		
	Tari Tradisional	14	13
	Tari Kreasi Baru	58	50
	Total	72	63
3.	Seni Rupa		
	Seni Lukis	10	10
	Seni Kriya	8	8
	Seni Ukir/patung	2	2
	Tosan Aji	1	1
	Batu Mulia/Suseki	2	2
	Bonsai	1	1
	Total	24	24
4.	Seni Musik		
	Keroncong/Tradisional	16	12

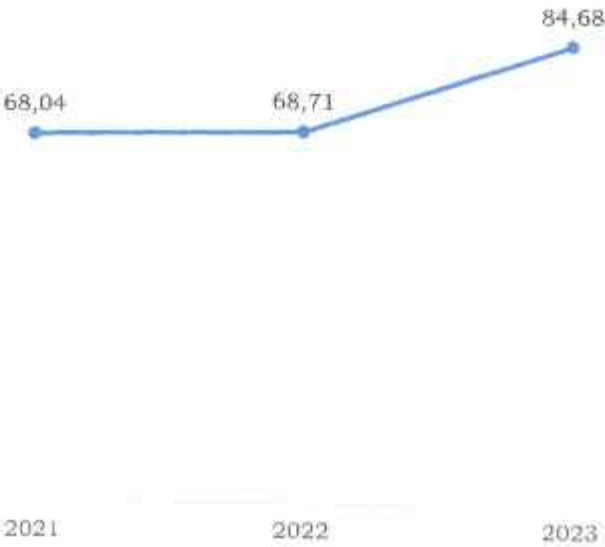
No	Sub Sektor	Jumlah yang ada	Terdaftar/ Aktif
	Modern/Pop/ Rock	20	19
	Orkes Melayu/Dangdut/Akustik	9	5
	Sholawat	2	2
	Karawitan	2	2
	Total	49	40
5.	Sastra		
	Macapat	7	6
	Puisi	1	1
	Total	8	7
Total		199	174

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2024

2.4. Aspek Pelayanan Umum

2.4.1. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi atau IRB, Kota Blitar berhasil meraih kenaikan IRB tahun 2023 menjadi 84,68 dengan predikat A- dan masuk 35 besar Kabupaten/Kota predikat tertinggi se-Indonesia. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang tercapai 68,71, kenaikan nilai IRB tahun 2023 tergolong tinggi.



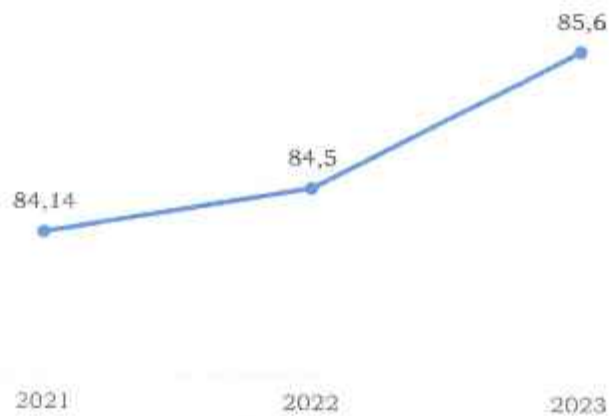
Sumber: Sekretariat Daerah Kota Blitar, 2024

Gambar 2.53
Indeks Reformasi Birokrasi Kota Blitar

2.4.2. Survey Kepuasan Masyarakat

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kota Blitar diperoleh dari hasil survey IKM/SKM pada tahun berkenaan, dimana capaian pada tahun 2023 termasuk kategori Sangat Berhasil, yang berasal dari target Baik (84,50) terealisasi sebesar

Baik (85,60) meningkat sebesar 1,10 poin dari realisasi tahun 2022 sebesar 84,50. Dari 30 Perangkat Daerah yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat melalui aplikasi sukma-e Jatim pada tahun 2023 menghasilkan nilai konversi 2568,02 dengan rata-rata 85,60 masuk kategori Baik. Capaian tersebut sudah melampaui target akhir RPJMD 2026 yaitu 85 (Baik) sesuai Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Keberhasilan ini didukung oleh komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui perbaikan Standar Pelayanan sesuai dengan aturan yang berlaku, adanya standarisasi penggunaan tools pengukuran SKM, terdapat sarana Aspek Daya Saing Daerah

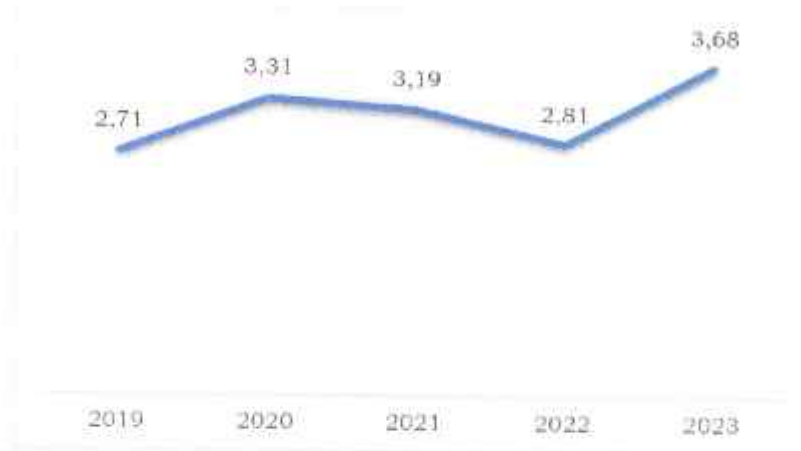


Sumber: Sekretariat Daerah, 2024

Gambar 2.54
**Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Blitar
Tahun 2021 - 2023**

2.4.3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indeks SPBE merupakan nilai hasil pelaksanaan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE (Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).



Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, 2024

Gambar 2.55

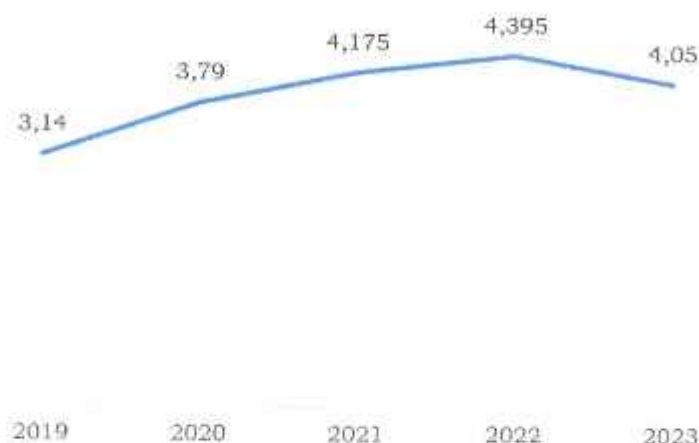
Indeks SPBE Kota Blitar Tahun 2019 - 2023

Capaian Indeks SPBE Kota Blitar Tahun 2023 yaitu 3,68, mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2022 sebesar 2,81. Kenaikan nilai tersebut disebabkan adanya kenaikan pada domain yang terdiri dari 47 indikator SPBE. Keberhasilan Kota Blitar dalam meningkatkan Indeks SPBE tidak lepas dari kerjasama dari pihak internal maupun eksternal Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung capaian Indeks SPBE diantaranya yaitu Asistensi Kegiatan Persiapan Penilaian SPBE dan pelaksanaan reuview Peta Rencana SPBE sebagai upaya akselerasi capaian Indeks SPBE Kota Blitar.

2.4.4. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan indikator untuk mengukur kinerja pelayanan publik di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Terdapat enam aspek yang menjadi dasar penilaian berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 17/2017. Enam aspek tersebut adalah kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan publik dengan kategori terdiri dari A, A-, B, B-, C, C-, D, E dan F.



Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Blitar, 2024

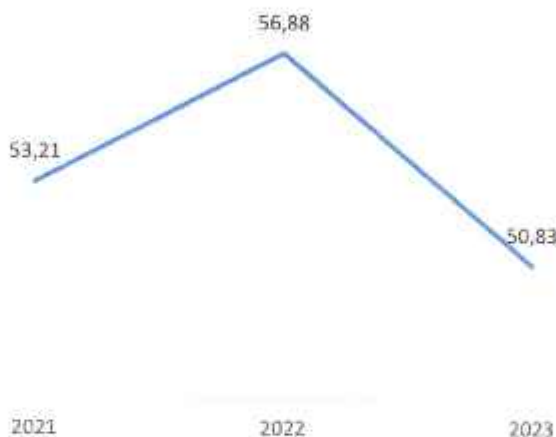
Gambar 2.56

Indeks Pelayanan Publik Kota Blitar Tahun 2019 – 2023

Capaian IPP Kota Blitar tahun 2023 yaitu 4,05 dengan kategori sangat baik (A-). Dengan capaian kategori A- tersebut, Kota Blitar dinilai sangat baik dalam menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi masih ada kekurangan di beberapa indikator.

2.4.5. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) merupakan sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Penilaian Inovasi Daerah adalah proses penilaian terhadap semua bentuk Inovasi Daerah menggunakan indikator indeks Inovasi Daerah. Data Indeks Inovasi Daerah merupakan dokumen yang memberikan informasi dan data terkait pelaksanaan Inovasi Daerah yang telah berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun. Capaian IID Kota Blitar Tahun 2021 sampai tahun 2023 adalah sebagai berikut :



Sumber: Bappeda Kota Blitar, 2024

Gambar 2.57

Indeks Inovasi Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2023

Indeks Inovasi Daerah Kota Blitar tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan capaian tahun 2022. Hal ini disebabkan karena menurunnya jumlah inovasi daerah yang dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri.

2.4.6. Ketenagakerjaan

Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam maupun luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja. Adapun capaian urusan tenaga kerja adalah sebagai berikut:

- 1. Capaian kinerja tenaga kerja bersertifikat kompetensi mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2023 mencapai 87,97 persen sedangkan pada tahun 2022 mencapai 87,74 persen dan tahun 2021 mencapai 88,63 persen. Sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 capaian indikator ini belum mencapai 10 persen.
- 2. Tingkat produktivitas tenaga kerja mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir, dimana capaian tertinggi pada tahun 2023 sebesar 25.278.788,78.

Tabel 2.42
Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kota Blitar
Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,31	8,68	88,63	87,74	87,97
2	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	4.833.361	45.179,13	10.863.609,29	23.277.195,07	25.278.788,78

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM dan Tenaga Kerja, 2024

2.4.7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Adapun capaian kinerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut :

- 1. Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan selama lima tahun berturut-turut yaitu sebesar 100 persen. Dalam Upaya melakukan perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan Pemerintah Kota Blitar telah membentuk pusat pelayanan terpadu perlindungan Perempuan dan anak P2TP2A memberikan pelayanan dan pendampingan serta pencegahan korban kekerasan perempuan dan anak, melakukan jejaring dengan

- stakeholder terkait serta melakukan sosialisasi rapat koordinasi dan workshop terkait undang-undang perlindungan anak, undang-undang KDRT, undang-undang trafficking, undang-undang narkoba dan bahaya pornografi. Pada tahun 2023 jumlah Perempuan yang
2. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) tahun 2023 mencapai 22,46. Nilai ini naik sebesar 8,64 poin jika dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 13,82.

Tabel 2.43
Capaian Indikator urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Blitar Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	100	100	100	100	100
2	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	100	100	100	100	100
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,55	16,36	22,66	13,82	22,46

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, 2024

2.4.8. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Dalam upaya pemenuhan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan tugas pelayanan yang dibutuhkan masyarakat secara profesional dan sesuai standar. Capaian kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2019 sampai 2023 adalah sebagai berikut:

1. Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk tahun 2023 sebesar 98,20. Capaian pada tahun 2023 ini merupakan capaian tertinggi selama lima tahun terakhir.
2. Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen catatan sipil selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 capaian indikator ini yaitu 96,81, naik 1,31 poin jika dibandingkan tahun 2022.
3. Capaian kinerja perekaman KTP elektronik mengalami kenaikan pada tahun 2021. Nilai ini mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 97,30 dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 99,63.

4. Persentase anak usia 1-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2023 terus mengalami peningkatan. Capaian tertinggi pada tahun 2023 sebesar 94,97.
5. Kepemilikan akta kelahiran mengalami peningkatan selama lima tahun berturut-turut dengan capaian tertinggi pada tahun 2023 sebesar 99,42.

Tabel 2.44

Realisasi Capaian Indikator Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	93,07	93,07	96,64	96,15	98,20
2	Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen catatan sipil	92,485	93,47	94,13	95,50	96,81
3	Perekaman KTP elektronik	Tidak dihitung	97,72	97,88	97,30	99,63
4	Persentase anak usia 1-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Tidak dihitung	79,70	90,64	91,14	94,97
5	Kepemilikan akta kelahiran	95,43	97,04	98,02	98,91	99,42

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

2.4.9. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bertujuan agar laju pertumbuhan penduduk tetap terjaga sehingga dapat memastikan terwujudnya keselarasan dan keseimbangan antara jumlah penduduk dan lingkungan hidup, baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya. Capaian kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana tahun 2019 sampai 2023 adalah sebagai berikut:

1. Laju pertumbuhan penduduk selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Capaian indikator ini pada tahun 2023 mencapai 0,66. Angka ini meningkat 0,043 poin jika dibandingkan tahun 2022 sebesar 0,617.
2. Total Fertility Rate (TFR) merupakan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh wanita usia subur. Pada tahun 2021 nilai TFR yaitu 2,14, sedangkan pada tahun 2022 dan 2023 nilai TFR di Kota Blitar sama yaitu 1,92. Nilai TFR ini digunakan untuk merencanakan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak serta pengembangan program penurunan tingkat kelahiran.

3. Capaian Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) tertinggi selama tiga tahun terakhir yaitu 74,56.
4. Pada tahun 2023, persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) memiliki capaian terendah selama empat tahun terakhir yaitu 9,04 persen.

Tabel 2.45

Capaian Indikator urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Tahun 2019 - 2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Laju pertumbuhan penduduk	0,64	0,67	0,67	0,617	0,66
2	Total Fertility Rate (TFR) rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh wanita usia subur	2,03	2,03	2,14	1,92	1,92
3	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	72,04	74,31	74,17	72,75	74,56
4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8,09	9,09	9,36	9,69	9,04

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, 2024

2.4.10. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pekerjaan umum dan penataan ruang diselenggarakan untuk mewujudkan tersedianya infrastruktur yang berkualitas dengan melalui pembangunan, pemeliharaan rutin dan berkala sarana prasarana infrastruktur kota yang meliputi pembangunan dan pemeliharaan/rehabilitasi jalan, jembatan, saluran drainase, peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi, pembangunan sarpras air bersih dan air limbah. Perkembangan dan capaian indikator kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut :

1. Indeks Infrastruktur Daerah menilai kinerja berdasarkan Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Level of Service. Indeks Infrastruktur Daerah Kota Blitar tahun 2021 mencapai angka 62,23 poin. Sedangkan pada tahun 2022 turun sebesar 1,05 poin bila dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu menjadi 61,18 poin. Namun pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan sebesar 0,87 menjadi 62,05 poin. Keberhasilan kenaikan Indeks Infrastruktur Daerah tidak lepas dari adanya peran serta aktif stakeholder terkait dan masyarakat dalam Musrenbang serta adanya manajemen rekayasa lalu lintas dengan melakukan penataan parkir, dan pemeliharaan sarpras perhubungan dalam upaya menciptakan kelancaran arus lalu lintas.

- 2. Berkaitan dengan sanitasi, jumlah rumah yang tidak memiliki jamban 0,79 persen. Ini berarti sebanyak 99,21 persen rumah tangga di Kota Blitar pada tahun 2023 telah memiliki sanitasi yang baik. Hal ini tidak lepas dari bantuan pemerintah untuk membangunkan fasilitas tempat buang air besar bagi rumah tangga miskin. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak mengalami kenaikan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Peningkatan tersebut ditunjang oleh tingkat kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap pentingnya akses sanitasi layak dan sinergitas program kegiatan lintas sektor salah satunya dengan tercapainya ODF (*Open Defecation Free*) di tiga kecamatan wilayah Kota Blitar.
- 3. Persentase rumah tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Faktor pendukung keberhasilan indikator ini yaitu adanya peran serta BUMD (PDAM) dalam pengelolaan air minum, peran serta masyarakat melalui penyediaan lahan untuk air minum berbasis masyarakat (SPAM Masyarakat) serta adanya peran aktif Pemerintah dalam memberikan alokasi anggaran untuk pencapaian air minum yang layak.

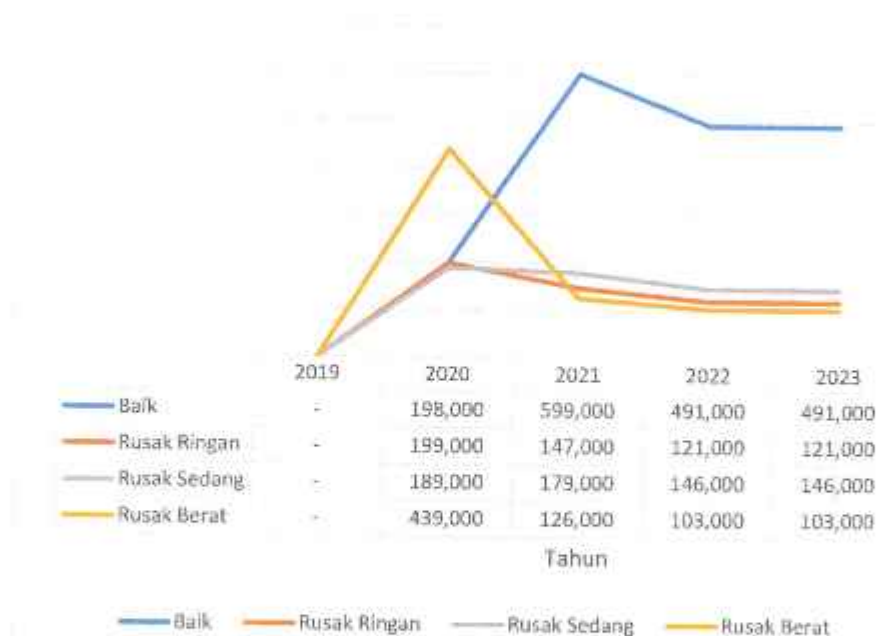
Tabel 2.46
Capaian Indikator urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Indeks Infrastruktur Daerah	62,23	61,18	62,05
2.	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan	96,42	98,27	99,21
3.	Persentase rumah tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan	98,35	98,38	98,70

Sumber: Dinas PUPR Kota Blitar, 2024

2.4.10.1. Jaringan Infrastruktur Sumber Daya Air

Infrastruktur jaringan irigasi di Kota Blitar memberikan dampak ke persawahan seluas 1.051 Ha. Pemenuhan kebutuhan area persawahan tersebut membutuhkan kondisi jaringan irigasi yang berfungsi dengan baik. Kondisi ini bisa dicapai dengan pembangunan maupun pemeliharaan jaringan oleh Pemerintah Kota Blitar melalui dinas teknis. Kondisi infratraktur irigasi tersebut bisa dilihat pada tabel berikut:



Gambar 2.58
Areal Terdampak Kondisi Jaringan (Ha)

2.4.11. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman salah satunya adalah untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan. Berikut capaian indikator kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman :

1. Rasio Rumah Layak Huni Rasio dihitung dengan membandingkan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk di Kota Blitar pada tahun tertentu. Faktor pendorong tercapainya target yang direncanakan adalah karena adanya dukungan partisipasi masyarakat untuk berswadaya membangun atau meningkatkan rumah sendiri. Selain itu adanya kebijakan pemerintah untuk memberikan fasilitasi dana subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu (MBR) untuk mengikuti program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni baik melalui peningkatan kualitas maupun pembangunan rumah baru berswadaya.

Pada tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melalui Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh melakukan peningkatan kualitas RTLH sebanyak 277 unit, pembangunan rumah swadaya untuk MBR sebanyak 16 unit dan memfasilitasi jaringan listrik untuk MBR sebanyak 10 unit. Sehingga menghasilkan capaian rasio rumah layak huni di Kota Blitar sebesar 0,251 dari jumlah seluruh penduduk di Kota Blitar. Artinya sampai pada akhir tahun 2023 jumlah rumah layak huni di Kota Blitar sejumlah 40.144 unit dibandingkan dengan jumlah penduduk sebanyak 159.781.

2. Persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak dihitung dengan membandingkan jumlah perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak dengan jumlah perumahan dan kawasan permukiman.

Persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak pada tahun 2022 mencapai 72,30 persen atau ada 136 jumlah perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak dari total 188. Kondisi ini meningkat menjadi 77,13 persen pada tahun 2023 dimana terdapat 145 jumlah perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak dari total 188.

Peningkatan persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak ini karena adanya Program Kawasan Permukiman serta Program Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang digunakan untuk penataan kawasan permukiman pendukung wisata, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan drainase lingkungan di Kawasan kumuh, pembangunan dan pemeliharaan di kawasan permukiman untuk mencegah kumuh, program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh).

Tabel 2.47
Capaian Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rasio Rumah Layak Huni	0,209	0,242	0,248	0,251	0,251
2.	Persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak	62,23	63,30	67,02	72,30	77,13

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2024

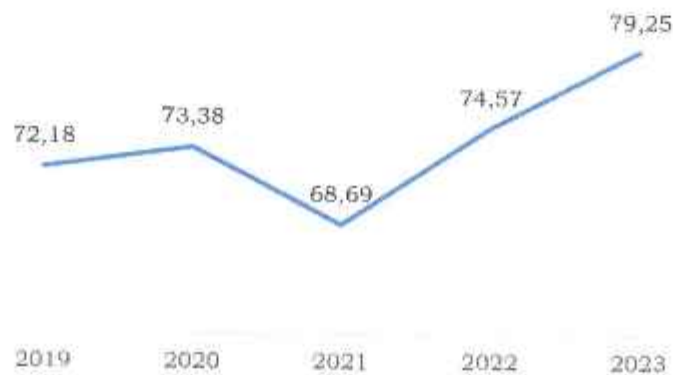
2.4.12. Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan, tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro, tercukupinya kualitas (keragaman dan

keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan.

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu system penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP didasarkan pada hasil review terhadap indeks ketahanan pangan global, tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi, keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan, dan ketersediaan data secara rutin untuk periode tertentu (tahunan) serta mencakup seluruh kabupaten/kota dan provinsi.



Sumber : Badan Pangan Nasional, 2023

Gambar 2.59

Indeks Ketahanan Pangan Kota Blitar Tahun 2019 – 2023

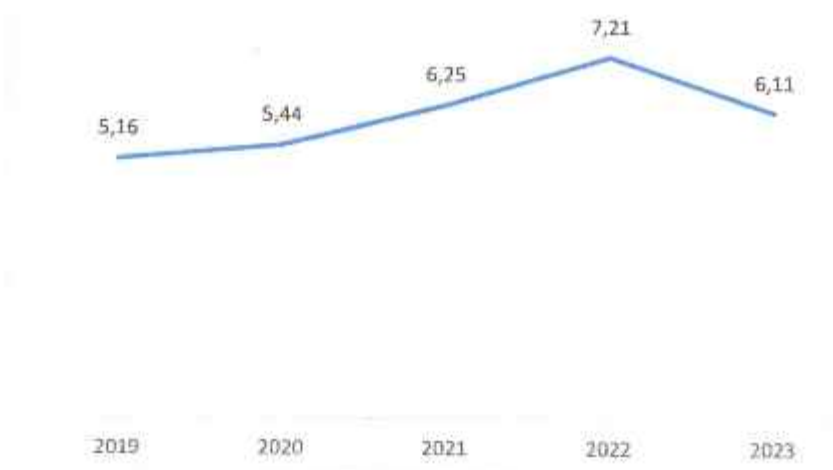
Pada tahun 2023 semua kota di Indonesia (98 Kota atau 100 persen) mengalami peningkatan skor dimana IKP Kota Blitar meningkat menjadi 79,25 dan menempatkan Kota Blitar pada urutan ke 70. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan rasio konsumsi, penurunan persentase penduduk di bawah garis kemiskinan, peningkatan pangsa pengeluaran pangan, penurunan rumah tangga tanpa akses listrik, peningkatan rata-rata lama sekolah perempuan berusia di atas 15 tahun, peningkatan persentase rumah tangga dengan akses terhadap air bersih dan penurunan presentase balita stunting.

Dalam rangka meningkatkan Indeks Ketahanan Pangan, kedepan Pemerintah Kota Blitar akan mengeluarkan kebijakan teknis melalui pemantauan secara rutin harga pasar dan stok pangan di gudang toko pangan serta melakukan koordinasi intensif antar Perangkat Daerah terkait integrasi program dan kegiatan yang mendukung ketahanan pangan daerah melalui Rakor Tribulanan. Disamping itu perlu untuk mempertahankan

lahan pertanian dalam LP2B sebagai wilayah untuk ketersediaan produksi pangan masa depan dan wilayah resapan air karena semakin tingginya pertumbuhan populasi perkotaan dan urbanisasi yang menyebabkan konversi lahan pertanian.

2.4.13. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Ketidacukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat sesuai dengan standar energi minimum yang dibutuhkan menurut umur, jenis kelamin dan tinggi badan. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan atau dikenal dengan istilah Prevalence of Undernourishment (PoU) dapat digunakan sebagai alat untuk melihat kondisi kerawanan pangan dan gizi.



Sumber : BPS Kota Blitar, 2024

Gambar 2.60

Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kota Blitar Tahun 2019-2023

Angka PoU Kota Blitar mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 1,1 poin jika dibandingkan capaian tahun 2022 menjadi 6,11. Angka ini masih dibawah target dari amanat Perpres 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebesar 5 persen pada tahun 2024.

2.4.14. Penanaman Modal

Pasca pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi di Kota Blitar berangsur membaik dan menunjukkan peningkatan. Hal ini juga berlaku pada kinerja penanaman modal yang berkembang cukup baik dengan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 2.48

Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal Kota Blitar Tahun 2019 - 2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah (%)	-20,94	-37,15	54,67	33,57	11,54

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
2.	Jumlah Realisasi Investasi (Milyar Rp.)	265,86	167,10	258,46	345,22	385,06
3.	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)	79,06	-37,15	54,67	33,56	11,5

Sumber : DPMPTSP Kota Blitar, 2024

Realisasi investasi bersifat fluktuatif. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 258,46 M, menjadi sebesar 345,22 M di tahun 2022 dan 385,06 M pada tahun 2023. Realisasi investasi mengalami penurunan pada tahun 2020 karena adanya pandemi covid-19, namun setelah pandemi berakhir, muncul kegairahan dalam menjalankan usaha yang mengakibatkan lonjakan realisasi investasi. Tahun berikutnya cenderung stagnan karena tidak ada pemantik yang menyebabkan kenaikan yg drastis.

Pemerintah Kota Blitar perlu tetap menjaga upaya untuk meningkatkan iklim investasi dengan melibatkan regulasi yang mendukung dan upaya diversifikasi investasi. Strategi Pemerintah Kota Blitar dalam meningkatkan nilai investasi diantaranya yaitu:

- 1) Identifikasi potensi ekonomi
- 2) Restrukturisasi Organisasi Pemerintah Daerah
- 3) Peningkatan pelayanan investasi dan perizinan
- 4) Pengembangan situs potensi daerah
- 5) Pelibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan
- 6) Menggali peluang dan potensi unggulan daerah
- 7) Mensinergikan peluang dan kebijakan antar daerah
- 8) Meningkatkan pembangunan sarana, prasarana dan SDM
- 9) Meningkatkan efektivitas promosi, pelayanan dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal
- 10) Menyinkronisasikan regulasi pusat dan daerah
- 11) Kesiadaan meninjau ulang Perda yang bermasalah dan deregulasi atas Perda yang membatasi peningkatan investasi daerah

2.4.15. Perdagangan

Sektor perdagangan sangat berperan dalam perekonomian Kota Blitar. Utamanya pada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang berkontribusi besar pada PDRB Kota Blitar yaitu di atas 25 persen dan menjadi sektor paling dominan dalam struktur perekonomian Kota Blitar selama 5 (lima) tahun terakhir. Data perkembangan kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menunjukkan peningkatan yang cukup baik dilihat dari yang semula tahun 2019 sebesar 24,66 persen meningkat menjadi 25,03 persen di akhir tahun 2023.

Persentase peningkatan volume usaha perdagangan selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi akibat pandemi Covid 19 yang berpengaruh besar pada aktivitas perdagangan di Kota Blitar, data terakhir tahun 2023 sebesar 2,22 persen.

Data tahun 2023 pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan tercatat sebanyak 39,25%, meningkat signifikan dari tahun 2022 yang hanya mencapai 5,7 persen. Sedangkan pada alat ukur, takar timbang dan perlengkapan yang digunakan dalam aktivitas perdagangan, sebanyak 42,61 persen telah bertanda tera sah yang berlaku.

Tabel 2.49
**Perkembangan Urusan Perdagangan
Kota Blitar Tahun 2019 – 2023**

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB (%)	24,66	23,55	24,16	25,11	25,03
2.	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	7,5	-36,3	21,59	1,85	2,22
3.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	34,50	3,46	100	5,27	39,25
4.	Persentase alat & ndash; alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	15,62	15,38	62,28	56,27	42,61

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar, 2024

2.4.16. Perindustrian

Sektor industri pengolahan menjadi salah satu penggerak perekonomian di Kota Blitar. Total jumlah industri di Kota Blitar tahun 2023 sebanyak 4.891 industri meliputi 214 unit industri formal dan 4.677 unit industri non formal. Tiga sub sektor industri yang paling dominan secara jumlah usaha dan tenaga kerjanya adalah industri makanan, minuman, dan tembakau dengan jumlah tahun 2022 sebanyak 9.460 unit dan serapan tenaga kerja sebanyak 9.543 unit; industri kayu, bambu, dan peralatan rumah tangga sebanyak 1.476 unit dengan serapan tenaga kerja 1.492 orang; serta industri tekstil, pakaian jadi, dan kulit sebanyak 992 unit dengan serapan tenaga kerja 1.040 orang. Ditinjau dari data industri komoditi andalan tahun 2022 paling banyak pada industri kendang tradisional sebanyak 287 unit, industri tempe dan tahu 187 unit, industri bubutan kayu 171 unit, industri sambel pecel sebanyak 26 unit, industri olahan belimbing 5 unit, industri opak gambir 5 unit dan industri wajik kletik sebanyak 4 unit.

Tabel 2.50
Capaian Indikator Urusan Perindustrian
Kota Blitar Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB (%)	9,71	9,75	10,02	10,10	9,85
2.	Persentase peningkatan produktifitas industri (%)	-4,7	29,55	0,83	110,6	1,075
3.	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota (%)	0,69	-1,05	0,37	1,45	6,4
4.	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (%)	100	100	30	30	100
5.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)	100	100	100	100	100
6.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)	Tidak dihitung	Tidak dihitung	0	100	100
7.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota (%)	Tidak dihitung	Tidak dihitung	0	100	100
8.	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (%)	Tidak dihitung	Tidak dihitung	100	100	125

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar, 2024

2.5 Hasil Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005 – 2025

2.5.1 Capaian Kinerja RPJPD Tahun 2005 – 2025

2.5.1.1 Penilaian Capaian Indikator Kinerja RPJPD Kota Blitar

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005- 2025 memiliki target capaian yang harus dinilai pada 69 indikator yang di tetapkan. Penilaian capaian 69 indikator RPJPD dilihat dari hasil realisasi 69 indikator tersebut pada setiap RPJMD sejak 2010 s/d 2025.

Pada RPJPD Kota Blitar Tahun 2005-2025 mengandung visi pembangunan yaitu “Kota Blitar Sebagai Kota Pariwisata, Pusat Pelayanan Perdagangan Dan Jasa Yang Berwawasan Kebangsaan Dan Lingkungan Hidup“. Visi tersebut dijabarkan kedalam 4 misi, sebagai berikut:

- 1) Memperkuat predikat Kota Blitar sebagai Kota Pariwisata Sejarah, dengan mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal.
- 2) Mewujudkan Kota Blitar yang memiliki daya saing dalam pelayanan perdagangan dan jasa, melalui peningkatan pembangunan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan, penyediaan infrastruktur yang memadai dan pengembangan SDM yang berkualitas sekaligus beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) Mewujudkan good governance di Kota Blitar, dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, memperkuat peran masyarakat sipil, meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, melakukan pembenahan struktur kelembagaan dan meningkatkan budaya tertib hukum.
- 4) Mewujudkan Kota Blitar yang aman, tertib, dan nyaman, melalui penciptaan lingkungan yang kondusif

Sebagai ukuran pencapaian Kota Blitar sebagai Kota Wisata Sejarah, dan Pusat Pelayanan Perdagangan dan Jasa, yang Berwawasan Kebangsaan dan Lingkungan Hidup maka pembangunan jangka panjang dalam 20 tahun telah ditetapkan sasaran-sasaran pokok sebagai berikut:

a. Sasaran pokok yang terkandung pada misi ke-1:

- 1) Berkembangnya obyek wisata potensial sebagai bagian dari paket wisata terutama obyek wisata yang berhubungan dengan sejarah perjuangan bangsa dan obyek wisata pendukung lainnya.
- 2) Meningkatnya sarana dan prasarana layanan wisata.
- 3) Berkembangnya budaya secara berkesinambungan yang berbasis pada nilai-nilai kebangsaan.
- 4) Meningkatnya jumlah wisatawan dan lama kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara.

b. Sasaran pokok yang terkandung pada misi ke-2:

- 1) Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dengan tingkat pertumbuhan antara 7 sampai dengan 8 persen setiap tahunnya sehingga mampu menggenjot pendapatan perkapita pada tahun 2025 sekitar 23 juta rupiah per tahun (atas dasar harga berlaku) dan angka gini ratio sampai 0,1 yang menunjukkan pemerataan pendapatan masyarakat.
- 2) Terbangunnya struktur perekonomian kota yang kokoh dan lebih mengedepankan sektor tersier terutama perdagangan barang dan jasa yang dalam pelaksanaannya didukung oleh sektor sekunder dalam bentuk ketersediaan listrik, gas dan air minum.
- 3) Terkendalinya pertumbuhan penduduk kota sampai dengan dibawah 1 persen setiap tahunnya.

- 4) Terwujudnya peningkatan kualitas hidup yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sampai dengan 85 pada tahun 2025, tingkat pengangguran 4 persen dan jumlah penduduk miskin kurang dari 3 persen.
 - 5) Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat khususnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang ditandai dengan semakin banyaknya perempuan yang berperan aktif dalam kegiatan pemerintahan, politik, sosial dan ekonomi serta rendahnya angka tindak kekerasan kepada anak sampai dengan dibawah 0,50 persen dari seluruh kasus tindak pidana kekerasan setiap tahunnya.
 - 6) Rendahnya tingkat penyalahgunaan Narkotika dan zat Psikotropika (NAPZA) yang ditandai dengan menurunnya tingkat perkembangan kasus pelanggaran penggunaan NAPZA sampai dengan 1 persen dari jumlah kasus pidana setiap tahunnya.
 - 7) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya Angka Harapan Hidup sampai dengan 75,07 tahun pada akhir tahun 2025.
 - 8) Meningkatnya kualitas pendidikan pada tingkat dasar hingga menengah yang secara umum ditunjukkan dengan angka partisipasi sekolah 90 persen, angka buta aksara 0 persen dan angka putus sekolah dibawah 0,7 persen pada tahun 2025 serta tercapainya program wajib belajar 12 tahun 100 persen sehingga pendidikan minimal masyarakat Kota Blitar adalah setara SMU dan tidak ada anak usia didik yang putus sekolah.
 - 9) Meningkatnya ketersediaan dan aksesibilitas sarana dan prasarana publik yang berkualitas. Sarana dan prasarana publik meliputi sarana pendidikan, sarana komunikasi, sarana kesehatan, ketersediaan pasokan listrik dan jaringan jalan.
- c. Sasaran pokok yang terkandung pada misi ke-3:
- 1) Terciptanya supremasi hukum, demokrasi dan penegakan HAM yang bersumber pada peraturan perundangan yang berlaku yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif dan aspiratif.
 - 2) Meningkatnya profesionalisme dan kualitas SDM aparatur pemerintah kota untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, bebas KKN, berwibawa, bertanggung jawab, profesional dan mempunyai kompetensi tinggi sehingga mampu mendukung pembangunan Kota Blitar.
 - 3) Terwujudnya pelayanan umum berkualitas yang diwujudkan dengan lembaga pelayanan publik yang menerapkan Citizen Charter dan yang mempunyai sertifikasi ISO.
- d. Sasaran pokok yang terkandung pada misi ke-4:

- 1) Meningkatnya keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat yang ditandai dengan semakin menurunnya tingkat kriminalitas dan konflik sosial di tengah masyarakat baik yang timbul akibat isu SARA maupun kesenjangan sosial ekonomi.
- 2) Semakin tingginya partisipasi masyarakat dalam setiap upaya peningkatan keamanan, ketertiban dan ketentraman serta penanggulangan bencana alam dan bencana kebakaran.
- 3) Terwujudnya lingkungan hidup dan kehidupan kota yang bersih, sehat dan berkelanjutan.

2.5.1.1.1 Capaian Kinerja Indikator pada Misi Ke-1

Pada misi pertama terdapat 4 sasaran pokok dengan 13 indikator. Dari keseluruhan indikator yang ditetapkan pada misi pertama, dapat dijabarkan hasil penilaian dengan capaian sebagai berikut:

- sangat tinggi : 8 indikator (61,54 %)
- tinggi : 2 indikator (15,38 %)
- rendah : 1 indikator (7, 69%)
- sangat rendah : 2 indikator (15,38 %)

Tabel 2.51

Capaian Indikator RPJPD Kota Blitar pada Misi ke 1

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2008)	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota			Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota			Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota		
					(6)			(7)			(8)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Periode I (2015)	Periode II (2020)	Periode III (2025)	Periode I (2015)	Periode II (2020)	Periode III (2022)	Periode I	Periode II	Periode III
MEMPERTAHANKAN PREDIKAT KOTA BLITAR SEBAGAI KOTA PARIWISATA SEJARAH	Berkembangnya obyek wisata potensial sebagai bagian dari paket wisata terutama obyek wisata yang berhubungan dengan sejarah perjuangan bangsa dan obyek wisata pendukung lainnya.	Relokasi SMP 5 dan SMP 6		1 paket	1	1	1	0	1	1	0.0%	100.0%	100.0%
		Pembangunan Museum PETA		1 paket	1	1	1	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
		Pembangunan objek-objek wisata pendukung lainnya		6 unit	3	6	6	5	12	12	100.0%	100.0%	100.0%
	Meningkatnya sarana dan prasarana layanan wisata	Jumlah biro wisata	2	5	3	4	5	NA	6	13	NA	100.0%	100.0%
		Jumlah restoran/ rumah	48	77	58	67	77	NA	211	321	NA	100.0%	100.0%

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2008)	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota	Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)			(8)			
					Periode I (2015)	Periode II (2020)	Periode III (2025)	Periode I (2015)	Periode II (2020)	Periode III (2022)	Periode I	Periode II	Periode III	
		Kapasitas kamar hotel	561	631	595	613	631	NA	774	846	NA	100.0%	100.0%	
		Jumlah regulasi yang mengatur aset wisata dan jasa wisata	2	4	2	3	4	NA	3	3	3	NA	100.0%	75.0%
		Berkembangnya a budaya secara berkesinambun gan yang berbasis pada nilai-nilai kebangsaan	5	10	5	10	10	11.59	11.59	11.59	11.59	100.0%	100.0%	100.0%
	nilai-nilai kebangsaan	Jumlah even budaya/ atraksi seni budaya	75	155	108	129	155	37	130	60	34.3%	100.0%	38.7%	
		Kelompok / insan budaya	25	29	26	27	29	26	27	27	29	100.0%	100.0%	100.0%
		Jumlah wisatawan (orang)	446.466	1,685,366	946865	1316111	1685366	2804244	4525528	1790168	100.0%	34.4%	100.0%	

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2008)	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota			Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota			Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)			(8)		
					Periode I (2015)	Periode II (2020)	Periode III (2025)	Periode I (2015)	Periode II (2020)	Periode III (2022)	Periode I	Periode II	Periode III
	dan lama kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara.	Lama inap tamu/wisatawan	1,87	3	2	2,5	3	NA	1,15	0,89	NA	46,0%	29,7%
		Tingkat hunian hotel	15,45%	31%	25%	28%	31%	NA	23,8%	30,7%	NA	84,9%	99,0%

Sumber: Evaluasi RPJPD Kota Elitar 2005-2025, 2023

2.5.1.1.1



Ketercapaian Kinerja Sangat Tinggi
Ketercapaian Kinerja Tinggi
Ketercapaian Kinerja Sedang
Ketercapaian Kinerja Rendah
Ketercapaian Kinerja Sangat Rendah

2.5.1.1.2. Capaian Kinerja Indikator pada Misi Ke-2

Pada misi pertama terdapat 9 sasaran pokok dengan 32 indikator. Dari keseluruhan indikator yang ditetapkan pada misi kedua, dari hasil penilaian didapatkan pencapaian sebagai berikut :

- sangat tinggi : 20 indikator (62,5%)
- tinggi : 4 indikator (12,5%)
- sedang : 1 indikator (3,125%)
- rendah : 3 indikator (9,375%)
- sangat rendah : 4 indikator (12,5%)

Secara lebih detail, Capaian indikator pada misi pertama dapat dilihat pada Tabel 2.52

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Data Awal Tahun Perencanaan (2008)	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota			Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota			Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)			(8)		
					Periode I (2015)	Periode II (2020)	Periode III (2025)	Periode I (2015)	Periode II (2020)	Periode III (2022)	Periode I	Periode II	Periode III
	yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif	Jumlah industri (unit)	1.932	2.187	2.037	2.112	2.187	4745	4783	4891	100.0%	100.0%	100.0%
		Jumlah koperasi (unit)	273	373	313	343	373	315	340	343	100.0%	99.1%	92.0%
	Terkendalanya pertumbuhan penduduk kota sampai dengan dibawah 1 % setiap tahunnya	Penurunan angka pertumbuhan penduduk	1.3	0.8	1.1	0.9	0.8	0.72	1.19	1.07	100.0%	75.6%	74.8%
		IPM	74.92	85	80.2	82.46	85	76	78.57	79.93	94.8%	95.3%	94.0%
	Terwujudnya peningkatan kualitas hidup	Tingkat pengangguran	6.97	4	4.84	4.14	4	3.8	6.68	5.39	100.0%	62.0%	74.2%
		% Penduduk miskin	9.89	3.00	5.00	4.00	3.00	7.29	7.78	7.37	68.6%	51.4%	40.7%

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Data Awal Tahun Perencanaan (2008)	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota				Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				(7)				(8)			
					Periode I (2015)	Periode II (2020)	Periode III (2025)	Periode I (2015)	Periode II (2020)	Periode III (2022)	Periode I	Periode II	Periode III			
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat khususnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Rasio pekerja perempuan di lembaga pemerintahan	50.07	50.15	50.1	50.12	50.15	52.59	55.76	55.58	95.3%	89.9%	90.2%			
		Rasio tindak kekerasan kepada anak	0.50%	0.30%	0.50%	0.40%	0.30%	0.64%	0.58%	0.54%	78.1%	69.0%	55.6%			
	Rendahnya tingkat Penyalahgunaan NAPZA	Juniah kasus pelanggaran penggunaan NAPZA	6	75	45	63	75	42	NA	69	93.3%	NA	92.0%			
		Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	5.6	2.05	3.81	2.94	2.05	8.3	11.82	9.19	45.9%	34.9%	22.3%			
		Angka kematian ibu melahirkan per 10.000	124.15	75.07	73.29	74.18	75.07	48.8	189.13	172.31	100.0%	39.2%	43.6%			

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Data Awal Tahun Perencanaan (2008)	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota			Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota			Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)			(8)		
					Periode I (2015)	Periode II (2020)	Periode III (2025)	Periode I (2015)	Periode II (2020)	Periode III (2025)	Periode I	Periode II	Periode III
	Meningkatnya kualitas pendidikan pada tingkat dasar hingga menengah	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	6.2	3.12	4.66	3.89	3.12	0.98	13.24	9.19	100.0%	29.4%	33.9%
		Angka Harapan Hidup	71.52	75.07	73.29	74.18	75.07	73	73.75	73.86	99.6%	99.4%	98.4%
		Persentase guru layak/guru sesuai	60.78%	97.75	88.75	92.5	97.75	90	98.56	88.72	100.0%	100.0%	90.8%
		Angka putus sekolah	91.03%	96.25%	94.50%	95%	96.25%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%
		Angka lama pendidikan masyarakat	1.31%	0.70%	0.90%	0.80%	0.70%	0	0	0	100.0%	100.0%	100.0%
	Meningkatnya ketersediaan	Angka lama pendidikan masyarakat	9.4 th	12	10.5	11	12	9.87	10.11	10.65	89.7%	84.3%	88.8%
		Angka Partisipasi Sekolah	42.59%	85%	65%	75%	85%	85.53	95.6	98.45	100.0%	100.0%	100.0%
		Angka buta aksara	2%	0%	0.50%	0%	0%	0	0	0	100.0%	100.0%	100.0%
		Rasio luas jalan aspal dengan luas wilayah	2.39%	5%	3%	4%	5%	NA	95.23	97.82	NA	100.0%	100.0%

Miel Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Data Awal Tahun Perencanaan (2008)	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota			Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota			Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)			(8)		
					Periode I (2015)	Periode II (2020)	Periode III (2025)	Periode I (2015)	Periode II (2020)	Periode III (2022)	Periode I	Periode II	Periode III
	aun dan aksesibilitas sarana dan prasarana publik yang berkualitas	Rasio jumlah angkutan dengan jumlah penduduk	0.1823 %	2.5%	0.5%	1%	2.5%	1.16%	1.19%	0.86%	100.0%	100.0%	34.2%
		Rasio panjang jalan yang diterangi PJU dengan panjang jalan keseluruhan	29.37%	97%	75%	90%	97%	NA	NA	95%	NA	NA	97.4%
		Jumlah sarana komunikasi umum yang dapat diakses masyarakat	1813	2281	1985	2128	2281	54	202	933	2.7%	9.5%	40.9%
		Rasio sarana Pendidikan (TK, SD, SMP, SMA dan SMK yang sederajat) terhadap penduduk usia rasio sarana pelayanan kesehatan dengan jumlah penduduk	0.47 0.17	0.54 0.2	0.5 0.18	0.52 0.19	0.54 0.2	0.99 NA	1.8 0.01	1.46 0.0014	100.0%	100.0%	100.0% 0.7%

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Data Awal Tahun Perencanaan (2008)	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota			Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota			Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)			(8)		
					Periode I (2015)	Periode II (2020)	Periode III (2025)	Periode I (2015)	Periode II (2020)	Periode III (2022)	Periode I	Periode II	Periode III
		Rasio daya terpasang listrik dengan kebutuhan listrik	116%	108%	111%	109%	108%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%
		Ketersediaan tempat pemakaman umum (TPU) di setiap kecamatan	0	3	3	3	3	3	3	3	100.0%	100.0%	100.0%

Sumber: Hasil Analisa 2023



2.5.1.1.3. Capaian Kinerja Indikator pada Misi Ke-3

Pada misi ketiga terdapat 3 sasaran pokok dengan 7 indikator. Dari keseluruhan indikator yang ditetapkan pada misi ketiga, hasil penilaian menunjukkan pencapaian sebagai berikut :

- sangat tinggi : 3 indikator (42,86%)
- sedang : 2 indikator (28,57%)
- rendah : 1 indikator (14,29%)
- sangat rendah : 1 indikator (14,29%)

Secara lebih detail, Capaian indikator pada misi pertama dapat dilihat pada Tabel 2.53

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2008)	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota	Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)			(8)		
					Periode I (2015)	Periode II (2020)	Periode III (2025)	Periode I (2015)	Periode II (2020)	Periode III (2022)	Periode I (2015)	Periode II (2020)	Periode III (2022)
	pemerintah kota	Jumlah aparat yang telah mengikuti diklat teknis dan fungsional	378	1,104	504	804	1,104	537	282	NA	100.0%	35.1%	NA
		Tingkat kedisiplinan aparatur pemerintah terhadap peraturan	0.22%	0.10%	0.21%	0.15%	0.10%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%
	Terwujudnya pelayanan umum berkualitas	Lembaga pelayanan publik yang menerapkan Citizen Charter	50%	100%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2008)	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota			Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota			Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)			(8)		
					Periode I (2015)	Periode II (2020)	Periode III (2025)	Periode I (2015)	Periode II (2020)	Periode III (2022)	Periode I (2015)	Periode II (2020)	Periode III (2022)
		Lembaga pemerintah mempunyai sertifikasi ISO	3	10	5	8	10	1	4	5	20.0%	50.0%	50.0%

Sumber: Evaluasi RPJPD Kota Bliitar Tahun 2005-2025, 2023



Ketercapaian Kinerja Sangat Tinggi
Ketercapaian Kinerja Tinggi
Ketercapaian Kinerja Sedang
Ketercapaian Kinerja Rendah
Ketercapaian Kinerja Sangat Rendah

2.5.1.1.4. Capaian Kinerja Indikator pada Misi Ke-4

Pada misi keempat terdapat 3 sasaran pokok dengan 17 indikator. Dari keseluruhan indikator yang ditetapkan pada misi keempat, dari hasil penilaian didapatkan pencapaian sebagai berikut

- sangat tinggi : 8 indikator (47,06 %)
- tinggi : 2 indikator (11,76%)
- sedang : 3 indikator (17,65%)
- sangat rendah : 4 indikator (23,5 %)

Secara lebih detail, Capaian indikator pada misi pertama dapat dilihat pada Tabel 2.54

Tabel 2.54

Capaian Indikator RPJPD Kota Blitar pada Misi ke 4

Sasaran Pokok	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2008)	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota			Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota			Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota		
				Periode I (2015)	Periode II (2020)	Periode III (2025)	Periode I (2015)	Periode II (2020)	Periode III (2022)	Periode I	Periode II	Periode III
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)			(8)		
Meningkatnya keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat yang ditandai dengan semakin menurunnya tingkat kriminalitas dan konflik sosial	Angka kriminalitas berdasarkan laporan masuk dalam 1 tahun	14	10	12	10	10	366	147	190	3.3%	6.8%	5.3%
	Jumlah konflik SARA yang terjadi dalam 1 tahun	0	0	0	0	0	0	0	na	100%	100%	NA
	Jumlah pelanggaran lalu lintas jalan raya	5,242	2,500	4,000	3,000	2,500	NA	11224	6628	NA	22.3%	37.7%
	Ketersediaan fasilitas beribadah untuk umat muslim(Masjid)	99	116	106	111	116	112	140	142	100.0%	100.0%	100.0%
	Ketersediaan fasilitas beribadah untuk	28	35	31	33	35	29	4	32	93.5%	12.1%	91.4%

Sasaran Pokok	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2008)	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota			Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota			Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)			(8)		
				Periode I (2015)	Periode II (2020)	Periode III (2025)	Periode I (2015)	Periode II (2020)	Periode III (2022)	Periode I	Periode II	Periode III
	agama nasrani (gereja)											
	Ketersediaan fasilitas beribadah untuk agama budha (vihara)	2	2	2	2	2	2	1	1	100.0%	50.0%	50.0%
	Ketersediaan fasilitas beribadah untuk agama hindu (pura)	0	1	1	1	1	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
	Ketersediaan fasilitas beribadah untuk agama konghuchu (klenteng)	1	1	1	1	1	1	1	1	100.0%	100.0%	100.0%
	Ketersediaan sanggar untuk penganut aliran kepercayaan	1	1	1	1	1	1	1	1	100.0%	100.0%	100.0%

Sasaran Pokok	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2008)	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota			Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota			Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)			(8)		
				Periode I (2015)	Periode II (2020)	Periode III (2025)	Periode I (2015)	Periode II (2020)	Periode III (2022)	Periode I	Periode II	Periode III
Semakin tingginya partisipasi masyarakat dalam setiap upaya peningkatan keamanan, ketertiban dan ketentrangan serta penanggulangan bencana alam.	Persentase poskamling aktif	60%	75%	65%	70%	75%	70.8%	NA	NA	100.0%	NA	NA
	Jumlah potensi Linmas yang mempunyai keterampilan	650	850	650	650	850	882	1157	1157	100.0%	100.0%	100.0%
	Jumlah anggota TAGANA (Taruna Siaga Bencana)	22	100	60	85	100	32	32	25	53.3%	37.6%	25.0%
	Pemahaman dan ketrampilan masyarakat dalam penanggulangan bencana alam	70%	90%	80%	85%	90%	NA	80.9%	NA	NA	95.2%	NA
Terwujudnya lingkungan hidup dan kehidupan	Rasio permukiman dengan sarana sanitasi yang sehat	60%	100%	80%	100%	100%	na	100%	NA	NA	99.7%	NA

Sasaran Pokok	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2008)	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota	Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota						
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)			(8)		
				Periode I (2015)	Periode II (2020)	Periode III (2025)	Periode I (2015)	Periode II (2020)	Periode III (2022)	Periode I	Periode II	Periode III
kota yang bersih, sehat dan berkelanjutan.	% Ruang Terbuka Hijau Publik	13%	23%	17%	20%	23%	10.42% (2015)	15.89% (2020)	NA (2022)	61.3%	79.5%	NA
	% Ruang Terbuka Hijau Privat	10%	10%	10%	10%	10%	5.50%	18.69%	NA	55.0%	100.0%	NA
	Jumlah sekolah yang menerapkan kurikulum berbasis lingkungan hidup (lingkungan hidup masuk dalam muatan lokal)	1	50	20	35	50	13	47	66	37.1%	94%	100%

Sumber: Evaluasi RPJPD Kota Blitar Tahun 2005-2025, 2023



2.5.1.2 . Penilaian Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan RPJPD Kota Blitar

Indikator Makro dalam RPJPD Kota Blitar menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka Panjang. Indikator makro pembangunan yang dimaksud meliputi Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Indeks Gini. Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak (Impact) dari pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lokal, regional dan nasional sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pelaku pembangunan lainnya.

Tabel 2.55

Capaian Indikator Makro Pembangunan Kota Blitar

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (2008)	Capaian Pada Tahun Berjalan (2022)	Pertumbuhan / Penurunan (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Pembangunan Manusia	74.92	79.93	6.69 %	Baik (IPM semakin tinggi menandakan kualitas SDM yang semakin baik pula)
2	Angka Kemiskinan	9.89	7.37	-25.48 %	Baik (Angka kemiskinan semakin kecil, menandakan keberhasilan menekan jumlah penduduk miskin)
3	Angka Pengangguran	6.97	5.39	-22.67 %	Baik (Angka pengangguran yang menurun menandakan keberhasilan dalam menekan jumlah pengangguran di Kota Blitar)

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (2008)	Capaian Pada Tahun Berjalan (2022)	Pertumbuhan / Penurunan (%)	Keterangan
4	Pertumbuhan Ekonomi	6.12	5.22	-14.71 %	Kurang Baik (Terjadi perlambatan laju pertumbuhan ekonomi)
5	Ketimpangan Pendapatan	0.234	0.344	47.01 %	Kurang baik (Semakin tinggi indeks gini Semakin tinggi kesenjangan pendapatan antar penduduk)
6	PDRB Per Kapita	Rp8,653,897.00	Rp51,552,642.14	495.72 %	Baik (PDRB per Kapita semakin tinggi semakin baik, terjadi peningkatan pendapatan penduduk)

Sumber: Evaluasi RPJPD Kota Blitar Tahun 2005-2025, 2023

Capaian indikator makro RPJPD Kota Blitar pada Tahun 2023 menunjukkan 4 Indikator (66,67 persen) telah menunjukkan hasil kinerja yang baik dan sisanya 2 indikator (33,33 persen) belum mencapai target. Adapun penjelasan masing-masing indikator makro tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Kualitas hidup manusia di Kota Blitar terus mengalami kemajuan, hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Blitar. Pada Tahun 2022, IPM Kota Blitar telah mencapai 79,93. Angka ini meningkat 5 poin dibandingkan dengan tahun awal perencanaan (2008) 72,92 Saat ini sudah diatas IPM Nasional yang sebesar 71,92. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian IPM Tahun 2023 telah melampaui target yang dicanangkan pada dokumen RPJPD.
- b. Angka kemiskinan Kota Blitar Tahun 2022 sebesar 7,37 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menekan angka kemiskinan sekitar 2% dalam kurun waktu 14 tahun. Capaian Persentase penduduk miskin Kota Blitar melampaui target di RPJPD Kota Blitar.

- c. Angka pengangguran Kota Blitar pada tahun 2022 adalah 5,39 persen. Hal ini menunjukkan penurunan angka pengangguran bila dibandingkan dengan kondisi pada awal tahun perencanaan. Pemerintah daerah telah berhasil menekan angka pengangguran hinggaturun 22,69 persen. Hal ini menjadikan kinerja indikator angka pengangguran telah memenuhi target RPJPD.
- d. Laju pertumbuhan ekonomi Tahun 2023 mencapai 5,32 persen, kondisi ini dikategorikan lebih rendah dengan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun awal perencanaan. Akan tetapi sudah cenderung naik apabila di bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021. Sebagaimana diketahui bersama bahwa ekonomi semat melemah dikarenakan terjadinya pandemi COVID 19 pada tahun 2020 yang berdampak pada seluruh sektor ekonomi mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif.
- e. Gambaran ketimpangan pendapatan di Kota blitar diwakili oleh indikator indeks gini. Berdasarkan data Tahun 2022, indeks gini Kota Blitar mencapai 0,344. Angka ini melebihi kondisi pada wal perencanaan yaitu 0,234. Nilai Gini Ratio yang mengalami peningkatan menandakan adanya ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi dari sebelumnya sehingga kondisi ini kurang baik dan belum memenuhi target dari RPJPD.
- f. PDRB Perkapita Kota Blitar mengalami peningkatan yang signifikan hampir 4 lipat jika dibandingkan dengan kondisi pada awal tahun perencanaan (2008). Pencapaian ini sangat baik dan telah memenuhi target yang dicanangkan pada RPJPD Kota Blitar.

2.5.2. Rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 untuk penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045

Berdasarkan evaluasi RPJPD Kota Blitar tahun 2005 – 2025 rekomendasi tindak lanjut untuk RPJPD Kota Blitar Periode 2025 - 2045 adalah:

Tabel 2.56

Rekomendasi Tindak Lanjut

Temuan Masalah dari RPJPD Kota Bllitar 2005-2025	Rekomendasi untuk RPJPD Kota Blitar Periode Selanjutnya
Adanya sebagian indikator RPJPD tidak menjadi indikator di RPJMD, sehingga ada perlu upaya menghitung capaian kinerja indikator RPJPD melalui dukungan data dari masing-masing OPD	Memastikan bahwa indikator yang ditetapkan dalam RPJPD, harus menjadi indikator pada setiap tahap RPJMD yang akan disusun sebagai operasionalisasi RPJPD

Temuan Masalah dari RPJPD Kota Blitar 2005-2025	Rekomendasi untuk RPJPD Kota Blitar Periode Selanjutnya
Ada beberapa target kinerja dari indikator RPJPD yang tidak dihitung datanya oleh OPD	Penetapan target dari setiap indikator, perlu disesuaikan dengan kemampuan OPD dalam pelaksanaannya serta perkiraan perubahan dalam bentuk nomenklatur terbaru.
<p>Terdapat 11 Indikator mikro yang memperoleh capaian kinerja sangat rendah, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Museum PETA • Lama inap wisatawan • Laju Pertumbuhan ekonomi • Gini ratio • Angka kematian bayi • Jumlah sarana komunikasi • Lembaga pemerintah mempunyai sertifikat ISO • Angka Kriminalitas • Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas • Ketersediaan fasilitas ibadah agama hindu (Pura) • Jumlah anggota Tagana 	Pada indikator yang memperoleh capaian sangat rendah, perlu dilanjutkan pelaksanaannya dan memperoleh perhatian khusus agar dapat tercapai pada Pembangunan Jangka Panjang 2025 -2045.
<p>Ada indikator yang tidak menjadi kewenangan pemerintah Kota Blitar dan ditetapkan sebagai indicator pencapaian, sehingga sampai akhir pelaksanaan target tidak tercapai yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angka Kriminalitas 	Indikator yang akan dicapai dalam RPJPD 2025 – 2045 harus merupakan bagian kewenangan Pemerintah Kota Blitar, sehingga dapat
Temuan Masalah dari RPJPD Kota Blitar 2005-2025	Rekomendasi untuk RPJPD Kota Blitar Periode Selanjutnya
<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas • Ketersediaan fasilitas ibadah agama hindu (Pura) 	Melakukan intervensi secara langsung

Sumber : *Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar 2005-2025*

Sedangkan Rekomendasi atas Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPJPD Kota Blitar 2005 – 2025 dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan pengembangan sektoral Kota Blitar kedepan diarahkan pada akselerasi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; serta Transportasi dan Pergudangan secara berkelanjutan;
2. Kebijakan pembangunan spasial Kota Blitar kedepan agar diselaraskan dengan kebijakan kewilayahan Provinsi Jawa Timur yaitu diarahkan pada pengembangan sektor unggulan daerah dan kerjasama lintas daerah untuk mendukung pemerataan ekonomi dan penataan kota;
3. Dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, Pemerintah Kota Blitar agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tata cara penyusunan RPJPD tahun 2025-2045 sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Perumusan visi, misi dan sasaran pokok RPJPD tahun 2025- 2045 agar mengacu pada Visi Indonesia Emas tahun 2025-2045, 8 misi pembangunan, 17 arah pembangunan dan 45 indikator utama pembangunan, yang bersumber dari dokumen narasi rancangan awal RPJPN 2025-2045;
 - c. Penyelarasan periodisasi, target dan sasaran RPJPN 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
 - d. Penyelarasan dengan struktur ruang dan pola ruang sebagaimana tertuang dalam RTRW Kota Blitar, RTRW Provinsi Jawa Timur dan RTRW Nasional;
 - e. Menyusun KLHS RPJPD yang secara substansi mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (TPB), utamanya mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan daerah hingga tahun 2045.

2.6. Analisa Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1. Proyeksi Kependudukan

2.6.1.1. Proyeksi Penduduk Kota Blitar Tahun 2045

Proyeksi demografi adalah perkiraan atau ramalan mengenai perkembangan jumlah penduduk suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Proyeksi ini biasanya didasarkan pada data demografi masa lalu, tren pertumbuhan, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi perubahan jumlah penduduk, seperti tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi.

Pada tahun 2045, proyeksi demografi Kota Blitar akan mencakup estimasi jumlah penduduk kota tersebut berdasarkan asumsi-asumsi tertentu. Asumsi-asumsi ini melibatkan faktor-faktor seperti tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan arus migrasi penduduk. Juga, faktor-faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, perubahan ekonomi, dan perubahan sosial dapat memengaruhi proyeksi demografi.

Berikut ini adalah proyeksi penduduk Kota Blitar Tahun 2045 berdasarkan Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020 dan Surat Bappeda Provinsi Jawa Timur Nomor : 500.14.1/15.772/201.2/2014 tanggal 25 Juli 2024 Perihal Penyampaian Data Proyeksi Penduduk Tahun 2040 dan 2045

Tabel 2.57
Proyeksi Penduduk Kota Blitar Tahun 2045

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023 (Ribu)	Proyeksi Penduduk Kota Blitar (Jiwa)				
		2025 (Ribu)	2030 (Ribu)	2035 (Ribu)	2040 (Ribu)	2045 (Ribu)
Laki-laki	79,26	77,50	80,63	83,27	85,310	86,722
Perempuan	80,52	78,83	82,71	86,19	89,098	91,342
Kota Blitar	159,78	156,33	163,34	169,46	174,408	178,064

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur dan Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2024

Proyeksi penduduk Kota Blitar untuk periode tahun 2025 hingga 2045 menunjukkan tren pertumbuhan positif dimana diperkirakan jumlah penduduk Kota Blitar akan terus mengalami peningkatan, mencapai 178,064 ribu jiwa pada tahun 2045.

Dengan proyeksi pertumbuhan penduduk yang cenderung positif, Pemerintah Kota Blitar perlu terus memperhatikan aspek pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sektor lainnya guna menjaga keseimbangan perkembangan di setiap wilayah di Kota Blitar. Proyeksi ini menjadi dasar penting bagi perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya dalam rangka mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.

2.6.1.2. Proyeksi Penduduk Kota Blitar Tahun 2045 Berdasarkan Kelompok Umur

Informasi mengenai proyeksi penduduk berdasarkan kelompok usia menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai kebijakan sosial lainnya. Pemerintah Kota Blitar perlu mempertimbangkan distribusi usia penduduk ini untuk menciptakan strategi pembangunan yang berkelanjutan dan responsif terhadap dinamika demografi masyarakat.

Berikut ini adalah proyeksi penduduk Kota Blitar Tahun 2045 berdasarkan kelompok umur berdasarkan Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020 dan Surat Bappeda Provinsi Jawa Timur Nomor : 500.14.1/15.772/201.2/2014 tanggal 25 Juli 2024 Perihal Penyampaian Data Proyeksi Penduduk Tahun 2040 dan 2045 :

Tabel 2.58
**Proyeksi Penduduk Kota Blitar Tahun 2045
Berdasarkan Kelompok Usia**

Kelompok Umur (tahun)	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Penduduk Kota Blitar (Ribu)				
		2025	2030	2035	2040	2045
0-4	9,74	10,88	10,94	10,91	10,740	10,553
5-9	11,88	10,80	11,02	11,08	11,054	10,880
10-14	13,10	11,19	10,91	11,13	11,186	11,162
15-19	12,95	11,52	11,25	10,97	11,192	11,246
20-24	12,68	11,80	11,63	11,37	11,081	11,305
25-29	12,07	11,55	12,09	11,92	11,648	11,355
30-34	11,16	11,30	11,90	12,44	12,267	11,988
35-39	12,24	11,60	11,39	11,99	12,542	12,366
40-44	13,60	12,21	11,50	11,30	11,897	12,440
45-49	11,08	11,25	12,14	11,44	11,240	11,834
50-54	10,56	10,13	11,14	12,03	11,344	11,153
55-59	8,99	9,39	9,92	10,91	11,791	11,130
60-64	7,47	7,85	8,98	9,50	10,477	11,329
65-69	5,29	6,15	7,26	8,32	8,829	9,751
70-74	3,27	4,45	5,33	6,35	7,305	7,769
75+	3,70	4,27	5,94	7,80	9,815	11,803
Jumlah	159,78	156,33	163,34	169,46	174,408	178,064

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur dan Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2024

Proyeksi penduduk Kota Blitar untuk periode tahun 2025 hingga 2045 menunjukkan gambaran distribusi penduduk berdasarkan kelompok usia yang memberikan informasi penting terkait dengan struktur demografi masyarakat.

Dengan melihat proyeksi ke depan, diperkirakan jumlah penduduk usia di bawah 15 tahun akan mengalami peningkatan yang moderat, mencapai 32.595 jiwa pada tahun 2045. Sementara itu, jumlah penduduk usia di atas 64 tahun juga menunjukkan kecenderungan peningkatan, diperkirakan mencapai 29.323 jiwa pada tahun yang sama.

Dalam konteks ketergantungan penduduk, yang diukur dengan rasio ketergantungan, terlihat bahwa persentase ketergantungan diperkirakan akan tetap relatif stabil

sepanjang periode proyeksi, yaitu sekitar 53,31%. Ini mengindikasikan bahwa ada sekitar 53-54 per 100 orang usia non produktif di Kota Blitar yang bergantung pada mereka yang berusia produktif.

2.6.2. **Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana**

2.6.2.1. **Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal**

Kebutuhan rumah di Kota Blitar dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang. Persyaratan lokasi dan komposisi yang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu jumlah rumah dan luas lahan. Komposisi berdasarkan jumlah rumah merupakan perbandingan jumlah rumah sederhana, jumlah rumah menengah, dan jumlah rumah mewah, dengan skala 3:2:1 yaitu 3 (tiga) atau lebih rumah sederhana berbanding 2 (dua) rumah menengah berbanding 1 (satu) rumah mewah. Komposisi berdasarkan luas lahan merupakan perbandingan luas lahan untuk rumah sederhana terhadap luas lahan keseluruhan.

Tabel 2.59
Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kota Blitar Tahun 2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (ribu)	159,78	156,33	163,34	169,46	174,408	178,064
Proyeksi Kebutuhan Rumah Mewah	6.658	6.512	6.805	7.061	7.265	7.482
Proyeksi Kebutuhan Rumah Sedang	13.315	13.024	13.611	14.120	14.529	14.962
Proyeksi Kebutuhan Rumah Sederhana	19.973	19.536	20.416	21.181	21.794	22.445

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Dengan pertumbuhan penduduk yang terus berlangsung, proyeksi kebutuhan rumah atau tempat tinggal di Kota Blitar untuk tahun 2045 telah diestimasi dengan mempertimbangkan berbagai kategori. Pada tahun 2023, jumlah penduduk Kota Blitar mencapai 159,78 juta jiwa, dan proyeksi ke depan menunjukkan peningkatan menjadi 178,064 ribu jiwa pada tahun 2045.

Adapun proyeksi kebutuhan rumah/ tempat tinggal untuk kategori mewah, sedang, dan sederhana juga telah dihitung. Proyeksi kebutuhan rumah mewah diperkirakan mencapai 7.482 unit pada tahun 2045, sementara proyeksi kebutuhan rumah sedang mencapai 14.962 unit, dan proyeksi kebutuhan rumah sederhana mencapai 22.445 unit pada tahun yang sama.

2.6.2.2. Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan

Proyeksi pendudukan berdasarkan usia sekolah TK (4 – 6 tahun), SD (7-12 tahun), SMP (13-15 tahun) dan SMA/K (16-18 tahun) adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.60

Proyeksi Penduduk Berdasarkan Usia Sekolah

Tahun	Jumlah Penduduk			
	4 - 6 tahun	7 - 12 tahun	13 - 15 tahun	16 - 18 tahun
2025	2.246	6.694	3.505	3.574
2029	2.241	6.705	3.389	3.490
2034	2.256	6.780	3.417	3.327
2039	2.239	6.815	3.421	3.420
2045	2.201	6.745	3.436	3.442

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah ditentukan rombongan belajar SD, SMP dan SMA/K sebagai berikut:

- SD per rombel maksimal 28 siswa
- SMP per rombel maksimal 32 siswa
- SMA/SMK, per rombel maksimal 36 siswa
- SD Minimal 6 Rombel, maksimal 24 rombel
- SMP Minimal 3 Rombel maksimal 33 rombel
- SMA Minimal 3 Rombel maksimal 36 rombel
- SMK Minimal 3 Rombel maksimal 72 rombel

Berdasarkan standar tersebut maka diproyeksikan kebutuhan sarana sekolah pada tingkat TK, SD, SMP dan SMA/K dengan hitungan maksimal dan minimal sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.61
Proyeksi Kebutuhan Sarana Sekolah

Jenjang Pendidikan		Kebutuhan Sarana Sekolah					
		2023	2025	2029	2034	2039	2045
TK	Maksimal	82	45	45	45	45	44
	Minimal		15	15	15	15	15
SD	Maksimal	99	80	80	81	81	80
	Minimal		10	10	10	10	10
SMP	Maksimal	18	37	35	36	36	36
	Minimal		5	4	4	4	4
SMA	Maksimal	5	33	32	31	32	32
	Minimal		3	3	3	3	3
SMK	Maksimal	5	33	32	31	32	32
	Minimal		1	1	1	1	1

Sumber: Hasil Analisis, 2024

2.6.2.3. Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan

Ketersediaan fasilitas kesehatan di Kota Blitar, mengacu pada SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan di Perkotaan, terbagi menjadi beberapa jenis:

- a. Fasilitas kesehatan Puskesmas, memiliki standar jumlah penduduk pendukung 120.000 jiwa/unit dengan luas lahan 1.000 m²/unit.
- b. Fasilitas kesehatan Rumah Sakit, memiliki standar jumlah penduduk pendukung sebesar 120.000 jiwa/unit dengan luas lahan sebesar 1.000 m²/unit.
- c. Fasilitas Kesehatan Apotek, memiliki standar jumlah penduduk pendukung sebesar 30.000 jiwa/unit dengan luas lahan sebesar 250 m²/unit.

Jumlah Puskesmas pada tahun 2023 adalah 3 unit, dan proyeksi kebutuhan hingga tahun 2045 menunjukkan bahwa sarana Puskesmas yang ada sudah mencukupi. Kondisi ini menegaskan bahwa penambahan Puskesmas tidak diperlukan karena ketersediaan sarana yang ada dapat melayani penduduk hingga tahun 2045. Dengan demikian, secara keseluruhan, pelayanan Puskesmas di Kota Blitar sudah mencukupi dan tidak memerlukan penambahan fasilitas.

Sarana rumah sakit pada tahun 2023 mencapai 5 unit. Berdasarkan proyeksi kebutuhan hingga tahun 2045, sarana rumah sakit yang ada sudah mencukupi, dan penambahan fasilitas tidak diperlukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa rumah sakit yang tersedia dapat melayani penduduk hingga tahun 2045, sehingga secara keseluruhan, pelayanan rumah sakit di Kota Blitar sudah mencukupi dan tidak memerlukan penambahan fasilitas.

Jumlah apotek pada tahun 2023 mencapai 44 unit. Proyeksi kebutuhan hingga tahun 2045 menunjukkan bahwa jumlah apotek terus mengalami peningkatan hingga berjumlah 47 unit.

Tabel 2.62

Proyeksi Sarana Kesehatan Kota Blitar Tahun 2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Sarana Kesehatan (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	159,78	156,33	163,34	169,46	174,408	178,064
Jumlah Fasilitas Kesehatan Puskesmas	3	3	3	3	3	3
Jumlah Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	5	5	5	5	5	5
Jumlah Fasilitas Kesehatan Apotek	44	43	44	46	46	47

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.6.2.4. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih

Air merupakan hal penting bagi setiap aktivitas manusia, untuk itu diperlukan adanya penyediaan air bersih dengan kualitas yang sesuai dengan standar air baku yang berlaku (tidak berbau, tidak berwarna dan tidak berasa). Masyarakat biasanya memanfaatkan air sumur atau air dangkal dengan kualitas yang cukup baik untuk diminum (jernih, tidak ada endapan lumpur dan kapur) namun air tetap harus diolah sehingga kualitasnya memenuhi standar air bersih/air minum. Analisis ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi kondisi dan permasalahan jaringan air minum eksisting, system penyediaan air minum eksisting, pihak penyedia, sumber air, tingkat kebocoran eksisting, kebutuhan dan sistem penyediaan air minum dimasa yang akan datang. Kebutuhan air domestik dibagi menjadi dua yaitu kebutuhan air untuk sambungan rumah dan hidran umum.

Pada analisis proyeksi kebutuhan air bersih total ini dihitung berdasarkan penjumlahan kebutuhan air domestik, kebutuhan air non- domestik, kehilangan air, dan kebutuhan hidran umum pada setiap desa di Kota Blitar.

Perhitungan pada analisis kebutuhan air domestik dilakukan dengan dasar proyeksi jumlah penduduk di Kota Blitar dikalikan dengan standar kebutuhan air bersih berdasarkan kategori jumlah penduduk kota yaitu 190 Lt/Hari, karena jumlah penduduk Kota Blitar adalah 159,78 juta jiwa pada tahun 2023. Kebutuhan air domestik di Kota Blitar mengikuti standar kebutuhan dari Kriteria Perencanaan Ditjen Cipta Karya Dinas PU, 2000.

Perhitungan kebutuhan untuk hidran umum dilakukan dengan proyeksi jumlah penduduk dikalikan standar tingkat pelayanan untuk kategori Kota Kecil dengan jumlah 30%. Berikut adalah hasil perhitungan yang mengacu pada standar Kriteria Perencanaan Ditjen Cipta Karya Dinas PU, 2000.

Sedangkan kebutuhan air non-domestik dihitung berdasarkan 3 (tiga) kategori yaitu perdagangan jasa dan perkantoran diasumsikan 10 persen dari kebutuhan air domestik, pariwisata diasumsikan 20 persen dari kebutuhan air domestik, dan fasilitas umum diasumsikan 10 persen dari kebutuhan air domestik. Adapun perhitungan kehilangan air berdasarkan standar kehilangan air Ditjen Cipta Karya, 2000 untuk kota kecil yaitu 20 persen. Perhitungan ini diperoleh dari penjumlahan kebutuhan air bersih domestik dan non-domestik dikalikan dengan 20 persen.

Dengan mempertimbangkan pertumbuhan penduduk Kota Blitar hingga tahun 2045, proyeksi kebutuhan air bersih menjadi aspek krusial dalam perencanaan perkotaan. Pada tahun 2023, jumlah penduduk Kota Blitar mencapai 159,78 ribu jiwa, dan proyeksi penduduk untuk tahun 2045 mencapai 178,064 ribu jiwa.

Pada tahun 2045, proyeksi kebutuhan air minum mencapai sekitar 67.091.331,23 liter per hari. Angka ini mencerminkan tantangan yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kota Blitar seiring dengan pertumbuhan penduduk yang terus berlangsung.

Tabel 2.63
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kota Blitar Tahun 2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kota Blitar (Liter/Hari)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	159,78	156,33	163,34	169,46	174,408	178,064
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih	33.218.250,54	34.971.293,39	42.907.014,73	50.944.311,68	58.867.315,67	67.091.331,23

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.6.2.5. **Proyeksi Energi/Listrik**

Perhitungan proyeksi kebutuhan jaringan energi atau listrik untuk menentukan konsumsi listrik di Kota Blitar hingga tahun 2043 melibatkan analisis berbagai aspek, termasuk kebutuhan listrik untuk rumah tangga, fasilitas umum, penerangan jalan, cadangan listrik, dan gardu listrik guna memastikan pemenuhan seluruh kebutuhan listrik di kota tersebut.

Kebutuhan listrik rumah tangga dibagi menjadi tiga kelas berdasarkan SNI 03-1733-2004, dengan asumsi proporsi 1:2:3 untuk tipe rumah mewah, rumah sedang, dan rumah sederhana. Perhitungan kebutuhan listrik domestik ini juga tunduk pada ketentuan yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.28 Tahun 2016.

Sementara itu, kebutuhan listrik non-domestik melibatkan sektor perumahan dan lingkungan dengan pembagian sesuai SNI 03-1733-2004. Industri diasumsikan membutuhkan 25 persen dari kebutuhan listrik domestik, fasilitas sosial 25 persen, penerangan jalan 10 persen, kepariwisataan 20 persen, dan cadangan listrik domestik sebesar 1 persen. Total kebutuhan listrik di Kota Blitar dihitung dengan menggabungkan kebutuhan listrik domestik dan non- domestik.

Dari hasil perhitungan, terlihat bahwa kebutuhan listrik total di Kota Blitar meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2045, proyeksi kebutuhan listrik total di Kota Blitar mencapai 33.549,12 KV.

Tabel 2.64
Proyeksi Kebutuhan Listrik Kota Blitar Tahun 2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Listrik Kota Blitar (Kv)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	159,78	156,33	163,34	169,46	174,408	178,064
Jumlah Rumah	39.946	39.074	40.832	42.360	43.588	44.889
Proyeksi Kebutuhan Listrik Domestik	14.853,24	14.528,77	15.183	15.751	16.207	16.691,10
Proyeksi Kebutuhan Listrik Non- Domestik	15.001,78	14.674,06	15.335	15.909	16.370	16.858,02
Proyeksi Kebutuhan Listrik Total (Domestik+Non-Domestik)	29.855,01	29.202,83	30.517	31.660	32.577	33.549,12

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.6.2.6. Proyeksi Timbunan Sampah

Jumlah sampah yang dihasilkan setiap kecamatan diklasifikasikan berdasarkan komposisi, yang umumnya diukur dalam persentase berat atau volume. Dengan mengetahui komposisi sampah, kita dapat memahami pola konsumsi masyarakat di suatu kawasan atau kota. Menurut SNI 19-3964- 1994, timbunan sampah dibagi menjadi volume dan berat. Timbunan sampah domestik di Kota Blitar, yang termasuk dalam kategori rumah permanen, memiliki standar berat sebesar 0,4 kg/org/hari.

Timbunan sampah domestik berasal dari aktivitas domestik atau perumahan. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa timbunan sampah domestik di Kota Blitar mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2045, proyeksi timbunan sampah domestik di Kota Blitar mencapai 71.820,60 kg/hari.

Sementara itu, timbunan sampah non-domestik di Kota Blitar berasal dari berbagai kegiatan, seperti kegiatan sosial dan umum (5 persen dari sampah domestik), kegiatan perdagangan dan jasa (10 persen dari sampah domestik), sampah jalan raya (3 persen dari sampah domestik), dan sampah kepariwisataan (20 persen dari sampah domestik). Jumlah total sampah dihitung dengan menjumlahkan timbunan sampah domestik dan non-domestik. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa produksi total sampah di Kota Blitar terus meningkat hingga tahun 2045, mencapai 99.112,43 kg/hari.

Tabel 2.65
Proyeksi Timbunan Sampah Kota Blitar Tahun 2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Timbunan Sampah Kota Blitar (Kg/Hari)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	159,78	156,33	163,34	169,46	174,408	178,064
Proyeksi Timbunan Sampah Domestik	63.912,40	62.516,23	65.330,10	67.775,74	69.739,38	71.820,60
Proyeksi Timbunan Sampah Non- Domestik	24.286,71	23.756,17	24.825,43	25.754,78	26.500,97	27.291,83
Proyeksi Timbunan Sampah Total (Domestik+ Non-Domestik)	88.199,11	86.272,40	90.155,54	93.530,53	96.240,34	99.112,43

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

2.7.1. Rencana Proyek Strategis Nasional dan Rencana Induk Perkeretapihan Nasional

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, pembangunan double track kereta

api di jalur Jawa Selatan termasuk melewati Kota Blitar ditetapkan menjadi salah satu proyek strategis nasional. Hal itu juga didukung dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Pembangunan tersebut dimaksudkan sebagai akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dan mengutamakan penciptaan lapangan kerja secara luas dan intensif.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 2128 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional menetapkan rencana induk perkeretaapian nasional sampai tahun 2030. Sesuai rencana induk tersebut, sasaran pengembangan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa adalah “Mengoptimalkan jaringan eksisting melalui program peningkatan, rehabilitasi, reaktivasi lintas non-operasi serta peningkatan kapasitas lintas melalui pembangunan jalur ganda dan shortcut”.

Sampai dengan tahun 2030 direncanakan akan dibangun secara bertahap prasarana perkeretaapian meliputi jalur, stasiun dan fasilitas operasi kereta api. Salah satu jalur yang menjadi tujuan pengembangan berkaitan dengan Kota Blitar adalah jalur ganda Surabaya – Jember – Banyuwangi dan Bangil – Malang – Blitar – Kertosono.

Di Kota Blitar terdapat 14 perlintasan kereta api dengan kondisi hampir semua sudah berpalang pintu. Pembangunan palang pintu tersebut menggunakan anggaran dari provinsi dan APBD. Data tersebut bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.66
**Perlintasan Berpalang Pintu di Kota Blitar
Tahun 2019-2023**

Uraian	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2023
Jumlah perlintasan berpalang pintu	7 palang pintu	7 palang pintu	12 palang pintu	12 palang pintu	13 palang pintu	14 palang pintu

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Blitar

2.7.2. Kebijakan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan konsep RPJPD Provinsi Jawa Timur ada beberapa kebijakan yang terkait dengan Kota Blitar sebagai bagian wilayah dari Provinsi Jawa Timur antara lain:

- Kota Blitar ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Blitar
- Pembangunan jalan tols trans jawa pada wilayah jawa timur khususnya pada ruas Tulungagung - Blitar
- Percepatan pembangunan Jalan Lintas Pantai Selatan pada ruas Malang – Blitar - Tulungagung

2.7.3. Rencana Pengembangan Kabupaten Blitar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penetapan Kecamatan Kanigoro sebagai Ibukota Kabupaten Blitar, maka pengembangan Kabupaten Blitar berpusat pada Ibukota Kabupaten. Selain itu arah pengembangan Kawasan wisata diarahkan pada Kawasan wilayah Pantai dan pegunungan. Kawasan wilayah Pantai mengikuti garis Jalur Lintas Selatan, sedangkan Kawasan pegunungan merupakan pengembangan dari Kawasan Perkebunan di sekitar kaki Gunung Kelud.

2.7.4. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kota Blitar

Kawasan permukiman kumuh di Kota Blitar mengacu pada Surat Keputusan (SK) Walikota Blitar No. 18/260/HK/410.010.2/2017 tentang Penetapan Kawasan Permukiman Prioritas di Kota Blitar. Kawasan permukiman prioritas yang dimaksud adalah kawasan permukiman yang membutuhkan penanganan dan penataan terutama terkait dengan permasalahan beberapa indikator kumuh yang ada, sehingga perlu untuk diprioritaskan. Berdasarkan surat keputusan tersebut, permukiman prioritas di Kota Blitar meliputi 3 (tiga) kawasan yang tersebar di tiga kecamatan dengan luas kawasan 53,44 Ha.

Tabel 2.67

Sebaran Kawasan Permukiman Kumuh Kota Blitar

Kawasan	Kelurahan	Luas (Ha)
Kawasan permukiman industri kerajinan kendang dan papan catur	Kelurahan Sentul	12,74
Kawasan konservasi sekitar Istana Gebang	Kelurahan Bendogerit dan Kelurahan Sananwetan	33
Kawasan permukiman perbaikan lingkungan di Krantil	Kelurahan Sukorejo	7,7
TOTAL		53,44

Sumber: RTRW Kota Blitar Tahun 2023-2043

Berdasarkan hasil verifikasi dari dokumen RP2KPKP Kota Blitar, diperoleh penambahan maupun perubahan deliniasi kawasan permukiman kumuh hingga batasan RT (Rukun Tetangga) dengan luasan yang juga mengalami perubahan. Berdasarkan hasil verifikasi diperoleh bahwa seluruh luasan kawasan permukiman kumuh adalah 66,21 Ha. Hasil verifikasi ini berdasarkan data Baseline 100-0-100 terupdate tahun 2017 yang dilakukan Bersama masyarakat kawasan permukiman tersebut.

Tabel 2.68
Hasil Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Kota Blitar

Kawasan	Kelurahan	Luas (Ha)
Kawasan permukiman industri kerajinan kendang dan papan catur	Kelurahan Sentul	9,00
Kawasan permukiman pinggiran kota sekitar Cut Mutia		0,70
Kawasan permukiman sempadan sungai dan berdekatan dengan istana gebang	Kelurahan Bendogerit	4,90
Kawasan permukiman sempadan sungai, sempadan rel KA, dan berdekatan dengan istana gebang	Kelurahan Sananwetan	2,10
Kawasan permukiman sempadan sungai Lahar, sempada rel KA, dan sekitar Pasar Legi	Kelurahan Sukorejo	15,64
Kawasan permukiman rawan genangan Jl. Anggrek		0,90
Kawasan permukiman sempadan Sungai Lahar	Kelurahan Kauman	11,57
Kawasan permukiman sempadan sungai, sempadan rel KA, dan sekitar Pasar Templek	Kelurahan Kepanjen Kidul	10,25
Kawasan permukiman sempadan Sungai Lahar	Kelurahan Kepanjen Lor	11,15
TOTAL		66,21

Sumber: RTRW Kota Blitar Tahun 2023-2024

Cluster penanganan ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan tingkat prioritas penanganan dengan mempertimbangkan beberapa faktor pada kawasan permukiman kumuh di perkotaan. Beberapa pertimbangan tersebut melibatkan:

- a. Kesamaan karakteristik atau tipologi kumuh;
- b. Lokasi yang berdekatan secara geografis;
- c. Pembentukan sistem atau jaringan infrastruktur yang tidak dapat diatasi melalui penanganan titik-titik kumuh secara terpisah;
- d. Pertimbangan terkait integrasi penanganan kawasan dan kemudahan pelaksanaan penanganan kawasan;
- e. Arah pengembangan kota.

Tabel 2.69
Cluster Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Blitar

CLUSTER	KELURAHAN	KETERANGAN
1	Sukorejo	Kawasan permukiman kumuh pada tiga

CLUSTER	KELURAHAN	KETERANGAN
	Kauman	kelurahan ini memiliki kesamaan yaitu dilalui oleh Sungai Lahar, dan keberadaannya yang bersebelahan. Selain itu, memiliki karakteristik permasalahan kumuh yang kompleks dan sama-sama berpusat pada area sempadan Sungai Lahar.
	Kepanjenlor	
2	Kepanjenkidul	Kawasan permukiman kumuh pada kelurahan ini memiliki permasalahan kumuh cukup kompleks di area sempadan sungai dan sempadan rel KA, dengan keberadaannya di tengah kota dan tidak memiliki kedekatan dengan kawasan pemukiman kumuh lainnya.
3	Bendogerit	Kawasan permukiman kumuh pada dua kelurahan ini memiliki kesamaan yaitu berdekatan dengan kawasan prioritas Kota Blitar (Wisata Gebang), serta permasalahan yang sama yaitu berada di area sempadan.
	Sananwetan	
4	Sentul	Kawasan permukiman kumuh kelurahan ini memiliki permasalahan di area home industri dengan keberadaannya di pinggiran kota dan tidak memiliki kedekatan dengan kawasan permukiman kumuh lainnya. Dimana kawasan ini merupakan salah satu kawasan yang akan diarahkan sebagai kawasan ekonomi unggulan di Kota Blitar.

Sumber: RTRW Kota Blitar Tahun 2023-2024

Kawasan permukiman kumuh di Kota Blitar terbagi menjadi 4 (empat) cluster penanganan. Urutan cluster ini juga mencerminkan tahapan penanganan kawasan permukiman kumuh yang akan dieksekusi lebih dulu. Penetapan cluster penanganan pertama atau kawasan permukiman kumuh prioritas ini mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.2/PRT/M/2016 mengenai Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, dan hasil kesepakatan dari diskusi dengan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penanganan awal akan difokuskan pada 3 (tiga) kawasan permukiman kumuh yang dianggap prioritas, terutama yang memenuhi kriteria kesiapan (seperti ketersediaan lahan, dukungan pemerintah daerah, dan partisipasi masyarakat) untuk diimplementasikan.

2.7.5. Arah Pusat Pertumbuhan Wilayah

Berdasarkan rencana pengembangan wilayah yang baik tingkat Nasional, Provinsi, Daerah Kabupaten serta pertimbangan wilayah maka arah pusat pertumbuhan dirumuskan sebagai berikut:

- a. Kawasan pengembangan ekonomi diprioritaskan koridor penghubung Ibukota Kota Blitar dan Ibukota Kabupaten Blitar yaitu sekitar Jalan Kalimantan dan Jalan Bali.
- b. Kawasan pengembangan destinasi, wisata sejarah, budaya dan wisata kebangsaan diprioritaskan pada Kelurahan Bendogerit, Gedog dan Karang Tengah Kecamatan Sananwetan, Kelurahan Blitar Kecamatan Sukorejo, Kelurahan Kepanjenkidul dan Sentul Kecamatan Kepanjenkidul.
- c. Kawasan pengembangan perumahan diprioritaskan pada koridor barat yaitu Kelurahan Blitar, Turi, Sukorejo dan Pakunden Kecamatan Sukorejo, Kelurahan Rembang dan Klampok Kecamatan Sananwetan.
- d. Kawasan pengembangan akomodasi dan penguatan daya tarik kota diprioritaskan pada Kelurahan Kauman, Kepanjenlor dan Kepanjenkidul Kecamatan Kepanjenkidul.
- e. Kawasan penangkap air untuk peningkatan peningkatan sumber daya air diprioritaskan pada Kelurahan Ngadirejo dan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul dan Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo.
- f. Kawasan pendukung wisata diprioritaskan pada kelurahan-kelurahan yang menjadi akses kendaraan wisata, seperti Kelurahan Pakunden, Tanjungsari Plosokerep dan Karangsari Kecamatan Sukorejo, Kelurahan Kauman, Bendo dan Kepanjenlor Kecamatan Sananwetan, Kelurahan Bendogerit, Gedog, Sananwetan, Karangtengah dan Klampok Kecamatan Sananwetan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Permasalahan

Penyelenggaraan pembangunan Kota Blitar telah membuahkan hasil sesuai dengan yang diharapkan, tetapi masih terdapat permasalahan dan tantangan yang perlu diantisipasi dari berbagai dimensi pembangunan. Permasalahan – permasalahan tersebut timbul karena kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, adanya kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Berdasarkan hasil evaluasi gambaran umum kondisi di Kota Blitar sebagaimana telah disajikan pada bab 2 (dua), terdapat berbagai bidang pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan. Namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi yang diselesaikan melalui serangkaian kebijakan secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Permasalahan pembangunan daerah yang ada di Kota Blitar adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya tingkat pendidikan dan tingginya angka pengangguran Kota Blitar

Rata – rata lama sekolah penduduk Kota Blitar masih 10,78 tahun artinya rata – rata lama sekolah penduduk Kota Blitar masih pada level kelas 11 atau kelas 2 Sekolah Menengah Atas. Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah dibandingkan kebutuhan dunia kerja akan mengakibatkan pengangguran. Jika dibandingkan dengan kondisi saat ini, dunia kerja formal sudah menyaratkan ijazah minimal SMA atau SMK. Maka apabila pendidikan penduduk Kota Blitar rata rata masih belum tamat sekolah menengah atas, dapat dipastikan tingkat penganggurannya masih tinggi.

Berdasarkan data tahun 2023, pengangguran terbuka di Kota Blitar adalah 5,4% atau sebanyak 4.571 orang. Jika dilihat dari data penduduk yang bekerja sebanyak 82,605 orang atau sama dengan 51,7% penduduk tahun 2023. Sementara rasio angka ketergantungan sebesar 42% artinya sebenarnya angka pengangguran di Kota Blitar bisa mencapai sebesar 6,7%.

2. Masih tingginya angka prevalensi stunting dan Tuberculosis (TBC)

Angka prevalensi stunting di Kota Blitar pada tahun 2023 masih pada angka 7,6% padahal target yang ditetapkan adalah maksimal 7%. Artinya angka prevalensi stunting akan tetap menjadi masalah Kota Blitar.

Selain itu di Kota Blitar masih terdapat kasus Tuberculosis sebanyak 304 orang, hal ini bisa menjadi potensi masalah di Kota Blitar. Karena berdasarkan teori 1 orang TBC aktif dapat menulari 10 s/d 15 orang dalam 1 tahun. Oleh karena itu, masalah TBC harus menjadi perhatian khusus untuk masalah kesehatan di Kota Blitar.

3. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat

Meskipun tingkat kemiskinan Kota Blitar menunjukkan tren penurunan dari tahun 2021 sampai dengan 2023, dari 7,89% tahun 2021 menjadi 7,30% (10,61 ribu jiwa) pada tahun 2023, Kota Blitar masih mempunyai masalah kesejahteraan selama masih ada penduduknya yang berstatus miskin. Apalagi jika dikaitkan dengan kebijakan nasional yang menargetkan kemiskinan bisa menurun maksimal sampai dengan angka 0%, maka Kota Blitar masih menghadapi masalah untuk dapat menurunkan tingkat kemiskinan semaksimal mungkin yaitu sampai dengan 1% - 0% pada tahun 2045.

Selain itu, masalah ketimpangan pendapatan secara nyata sudah dihadapi, hal ini dapat dilihat dari nilai Indeks Gini Kota Blitar yang mengalami kenaikan berturut-turut dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sebesar 0,03, 0,011 dan 0,016 poin. Dimana pada Tahun 2023, indeks Gini Kota Blitar pada angka 0,397 artinya terjadi ketimpangan yang cukup besar.

Jika dikaitkan keduanya antara penurunan kemiskinan dan peningkatan ketimpangan pendapatan, maka Kota Blitar selama ini hanya mengurangi beban pengeluaran. Sehingga ketika dihitung tingkat kemampuan penduduk memenuhi kebutuhannya, penduduk Kota Blitar 92,7 % dapat mencukup kebutuhannya. Kondisi tersebut disebabkan adanya bantuan natura dari pemerintah pusat maupun daerah. Akan tetapi jika dilihat dari ketimpangan pendapatan penduduk maka kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Kota Blitar belum menyentuh pada peningkatan pendapatan masyarakat.

4. Rendahnya daya tarik Kota Blitar sebagai wisata kebangsaan.

Kota Blitar yang mempunyai karakteristik kekuatan pada nilai patriotisme dan nasionalisme dengan ikon Wisata Makam Bung Karno belum mampu menarik minat wisatawan dalam konteks wisata kebangsaan. Pergerakan pariwisata di Kota Blitar saat ini persentase besarnya adalah wisata religi. Hampir 80% wisatawan yang datang ke Kota Blitar adalah berziarah ke Makam Bung Karno dengan tujuan religius. Dan hanya sekitar 20% wisatawan yang berkunjung dalam rangka menelusuri jejak perjuangan Bung Karno atau menelusuri ide dan karya besar Bung Karno.

Padahal selain Makam Bung Karno ada destinasi kebangsaan yang tidak kalah heroiknya yaitu destinasi heroik pemberontakan PETA Jepang yang dicetuskan oleh Sudanco Supriadi, yaitu Kawasan Eks Daidan PETA Blitar. Dan kisah heroik pengibaran Bendera Merah Putih selama 6 Jam di Kota Blitar pada tanggal 14 Pebruari 1945, yang kemudian pada tahun 2023 ditetapkan sebagai Hari Cinta Tanah Air oleh Pemerintah Kota Blitar. Akan tetapi masalahnya adalah kisah heroik itu hanya berputar - putar di wilayah Kota Blitar saja, belum menjadi konsumsi regional bahkan nasional.

Cita-cita Kota Blitar untuk menjadi Kota Wisata Kebangsaan masih terkendala oleh masalah kurang kuatnya daya tarik Kota Blitar sebagai Kota Wisata Kebangsaan.

5. Turunnya investasi di Kota Blitar

Data yang tersaji adalah pertumbuhan ekonomi Kota Blitar sudah mengalami peningkatan setelah dilanda krisis karena Covid 19 dimana terjadi pertumbuhan -2,28 pada tahun 2020, lalu beranjak naik menjadi 4,28 tahun 2021, dan 5,22 pada tahun 2022 serta 5,29 pada tahun 2023. Kota Blitar ke depan akan menghadapi masalah apabila tidak melakukan penyiapan secara baik pada ekosistem ekonominya. Hal ini lebih disebabkan perpindahan Ibukota Kabupaten Blitar ke Kanigoro.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2010 Ibukota Kabupaten Blitar berpindah ke Kecamatan Kanigoro. Kondisi ini pasti akan membuat permasalahan di Kota Blitar apabila Kota Blitar tidak siap. Dengan berpindahnya ibukota kabupaten sudah pasti akan mengubah komposisi dan konstruksi perekonomian di wilayah Blitar. Yang semula berpusat pada Kota Blitar sehingga investasi, transaksi ekonomi, konsumsi Blitar berpusat pada Kota Blitar, sekarang menjadi terbagi dengan Kanigoro sebagai ibukota Kabupaten Blitar.

Pergeseran sebagian nilai investasi, transaksi ekonomi dan tingkat konsumsi pasti akan merubah konstruksi perekonomian di Kota Blitar. Apabila Kota Blitar tidak bisa mempertahankan kondisi Kota Blitar yang menarik maka kutub pertumbuhan akan bergeser ke Kanigoro, kondisi ini akan menjadi masalah perekonomian yang cukup signifikan di masa yang akan datang. Masalah ini sudah mulai dapat dirasakan dengan data investasi yang menurun sekitar 100 Milyar pada tahun 2023 dibanding tahun 2022.

6. Belum tersedianya data yang terintegrasi

Data merupakan bahan pokok untuk proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Data yang sama dapat menjamin keselarasan perencanaan sampai dengan evaluasi pembangunan. Sebaliknya perbedaan data akan membuat perbedaan perencanaan dan perbedaan standart hasil pembangunan. Kondisi data Kota Blitar, masing masing Perangkat Daerah sudah mempunyai data sesuai dengan urusan masing masing. Masalahnya adalah data yang dimiliki bisa berbeda antar Perangkat Daerah.

Misalnya data tentang kemiskinan yang dimiliki oleh Dinas Sosial berbeda dengan data kemiskinan yang dimiliki oleh Bappeda, sebab data Dinas sosial bersumber dari Kementerian Sosial dalam bentuk DTKS. Sedangkan Bappeda memperoleh data dari Kemenko PMK dalam bentuk P3KE. Sehingga dalam proses perencanaan kemiskinan antara Dinsos dan Bappeda pasti akan berbeda karena datanya berbeda, sehingga pada saat evaluasi penurunan kemiskinan hanya bisa dihitung jumlahnya, akan tetapi tidak dapat mengetahui perubahan status kesejahteraan individual atau keluarga tertentu. Sehingga data masih menjadi masalah yang harus diselesaikan pada sistem Pemerintah Kota Blitar.

7. Tingginya potensi kerusakan jalan kota

Jika dilihat dari Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum Kota Blitar tahun 2023 pada level 88,02. Sedangkan kemantapan jalan pada level 98%. Akan tetapi kondisi yang terjadi, sepanjang jalan Ciliwung, Jalan Brantas, Jalan Mahakam, Jalan Bengawan Solo dan Jalan Kalimas sering terjadi kerusakan jalan yang disebabkan dilewati truk pengangkut pasir dengan tonase berlebih. Beberapa ruas jalan kota tersebut menjalankan fungsi jalan provinsi bahkan jalan nasional, karena berfungsi sebagai jalan penghubung antar daerah bahkan antar provinsi. Sebab meskipun levelnya jalan kota, akan tetapi berfungsi menjadi jalan utama mobilisasi material pembangunan berupa pasir bangunan yang berasal dari Gunung Kelud untuk dibawa dari Kabupaten Blitar ke kabupaten yang lain bahkan ke Provinsi Jawa Tengah dengan jalur utama melewati Kota Blitar.

Dengan beban fungsi distribusi material pembangunan berupa pasir bangunan tersebut, beberapa ruas jalan Kota Blitar lebih cepat mengalami kerusakan dibanding ruas jalan yang lain. Padahal pada sisi lain, Jalan Kalimas, Jalan Mahakam dan Jalan Brantas merupakan jalan masuk kendaraan pariwisata ke Kota Blitar melalui pintu masuk barat. Jika jalan sering mengalami kerusakan akan membuat tidak nyaman kendaraan pariwisata yang melewatinya, hal tersebut bisa mengurangi kuantitas kunjungan ke Kota Blitar.

8. Rendahnya kualitas air minum dan sanitasi Kota Blitar

Kondisi air minum dan sanitasi Kota Blitar sebetulnya sudah pada status layak di atas 98%, akan tetapi masalahnya belum aman. Sanitasi yang aman adalah septik yang tidak mencemari sumur masyarakat dan air buangan rumah tangga (*Grey Water*) tidak mencemari air permukaan. Pada saat ini, berdasarkan hasil penelitian dengan sampling di seluruh wilayah Kota Blitar, air sumur warga Kota Blitar 70% tercemar bakteri *E. coli*. Bakteri *E. coli* berasal dari bocornya septik tank. Atas hasil penelitian tersebut maka sudah ditemukan 2 masalah yaitu sanitasi dalam hal ini septik tank yang tidak aman dan air minum yang berasal dari sumur warga tidak aman.

Selanjutnya, hampir 90% air buangan rumah tangga baik air dari kamar mandi maupun dari dapur di buang pada drainase atau saluran irigasi. Hal ini jelas akan mencemari air permukaan, sebab air yang dibuang dari rumah tangga bisa mengandung sabun atau bahkan mengandung minyak. Jadi pengelolaan *grey water* di Kota Blitar tidak aman.

9. Rendahnya kemandirian pangan dan rendahnya Indeks Kualitas Lahan

Dilihat dari indikator luas panen Kota Blitar selama dua tahun terakhir yang mengalami penurunan yaitu dari 884,95 Ha menjadi 734,37 Ha dan tingkat produksi juga menurun dari 5.793 ton menjadi 5.259 ton, maka potensi masalah yang dihadapi Kota Blitar yaitu menurunnya ketersediaan pangan. Jika hal ini terjadi secara berkelanjutan, maka pada tahun

2045 dimungkinkan Kota Blitar akan sepenuhnya bergantung pada daerah lain untuk ketersediaan bahan pangan.

Kondisi tersebut digambarkan pula dengan rendahnya Indeks Kualitas Lahan yang pada tahun 2023 hanya pada level 33,51. Rendahnya kualitas lahan akan berpengaruh pada kualitas keberlanjutan lingkungan hidup.

3.2. Isu Strategis

3.2.1. Isu Strategis Internasional

Isu strategis Internasional didasarkan pada megatren global yang tertuang dalam Rancangan Akhir RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dan isu yang berkembang pada KTT G-20 di Bali.

1. Isu Strategis dan Tantangan Megatren Global penting dalam 20 (dua puluh) tahun kedepan yang akan merubah paradigma pembangunan global, meliputi:

- a. Perkembangan Demografi Global

Populasi dunia diperkirakan akan tumbuh dari 7,6 miliar saat ini menjadi 9,8 miliar pada Tahun 2050 (PBB, 2017). Pertumbuhan ini akan didistribusikan secara tidak merata antarwilayah dan masing – masing negara. Jumlah penduduk berusia 60 tahun ke atas diperkirakan akan meningkat di seluruh dunia karena menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir.

- b. Geo politik dan geo ekonomi

Adanya dinamika geopolitik global kedepan akan menjadi tantangan bagi setiap negara tak terkecuali Indonesia. Perang antara Rusia dan Ukraina meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik kedepan dikawasan lainnya. Persaingan geopolitik terutama di kawasan Indo – Pasifik yang dekat dengan Indonesia semakin meningkat dan meluas. Pada Tahun 2050, kontribusi ekonomi negara - negara berkembang diperkirakan meningkat mencapai 71%. Sektor komoditas tidak lagi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Dengan kebijakan yang tepat, negara berkembang mempunyai peluang mengejar ketertinggalan teknologi dan ekonomi dari negara maju.

- c. Perkembangan Teknologi

Pandemi Covid-19 telah mendorong akselerasi disrupsi teknologi di berbagai sektor. Perkembangan teknologi menyebabkan jenis pekerjaan tergantikan oleh teknologi dan berdampak pada sektor yang tidak mampu beradaptasi sehingga perkembangan teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat.

- d. Peningkatan Urbanisasi Dunia

Menurut *United Nations Department of Economic and Social Affairs* (UN-DESA), dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada Tahun 2050. Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan

dan ukuran kota. Tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan yang tidak memadai dan kurang terencana dengan baik dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh sehingga perlu dibarengi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat untuk memacu inovasi di kawasan perkotaan, khususnya dalam mengatasi masalah yang timbul sehari - hari.

e. Konstelasi Perdagangan Global

Pertumbuhan perdagangan negara berkembang akan didorong oleh perdagangan Intra-Asia yang menunjukkan tren yang berlanjut terutama dari Tiongkok, India, dan negara-negara ASEAN. Selain itu, peningkatan pendapatan serta proyeksi peningkatan demografi penduduk di Kawasan Afrika, Nigeria, dan beberapa negara di Afrika Selatan, mendorong perdagangan internasional bergerak ke kawasan tersebut untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang tinggi.

Kerja sama kawasan negara-negara dengan kekuatan ekonomi yang signifikan, sumber daya alam yang melimpah, dan posisi geografis yang strategis, akan menciptakan peluang perdagangan yang lebih besar di kawasan Asia Pasifik yang mendorong ketersediaan rantai pasok global, investasi, serta inovasi dan teknologi. Dengan demikian, perdagangan internasional akan berpusat di Asia terutama Kawasan Indo-Pasifik.

f. Pertumbuhan Kelas Menengah (*Middle Class*)

Jumlah kelas menengah dunia pada 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90% terhadap populasi dunia.

g. Peningkatan Persaingan Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Bertambahnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi yang menyebabkan peningkatan kebutuhan SDA di antaranya air, pangan, energi, mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah.

h. Perubahan Iklim

Dengan adanya krisis peningkatan suhu global disertai cuaca ekstrem dan bencana akan mendorong perubahan tren dalam dinamika pembangunan global, seperti meningkatnya urgensi untuk meninggalkan paradigma pembangunan lama secara *business-as-usual* (BaU) menuju ke praktik yang lebih berkelanjutan. Melalui penerapan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon merupakan arah pembangunan global di masa mendatang. Stimulus hijau dan paket-paket stimulus lainnya menjadi tren kebijakan global ke depan.

i. Pemanfaatan Luar Angkasa (*Space Economy*)

Perekonomian antariksa secara global akan tumbuh secara signifikan untuk jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, negara-negara diharapkan dapat meningkatkan kapasitas

untuk mengeksplorasi luar angkasa secara khusus dalam hal pengembangan teknologi mutakhir dan kompetensi SDM.

2. Isu utama yang diusung Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G 20 2020 adalah :

a. Transisi Energi Berkelanjutan

Memberikan akses energi yang terjangkau dan dapat diandalkan untuk semua tujuan.

b. Transformasi Digital

Tujuan dari transformasi digital adalah menciptakan pemulihan ekonomi global yang lebih inklusif terutama melalui integrasi digital Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

c. Arsitektur Kesehatan Global

Tema penguatan arsitektur global itu dibagi lagi ke dalam tiga subtema terdiri dari (1) membangun ketahanan sistem kesehatan global, (2) harmonisasi standar protokol kesehatan global, dan (3) memperluas manufaktur global serta pusat pengetahuan untuk pencegahan pandemi, mitigasi, dan respons. Saat ini akses terhadap solusi medis masih tidak setara, utamanya di negara - negara berkembang, sehingga diperlukan mekanisme permanen untuk mendorong akses setara terhadap solusi medis.



Gambar 3. 1 Megatren Global 2045
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022

3.2.2. Isu Strategis Nasional

Isu strategis dan tantangan pembangunan nasional terhadap upaya pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rancangan Akhir RPJP Nasional Tahun 2025-2045, antara lain :

a. Rendahnya Tingkat Produktivitas Di Tengah Persaingan Global Yang Semakin Meningkat

Kondisi produktivitas yang rendah dibandingkan negara-negara

yang menuju negara maju lainnya di antaranya disebabkan oleh kualitas SDM yang jauh tertinggal terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi yang tertinggal, dan kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah.

- b. Lemahnya Kapasitas Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi (IPTEKIN)

Kapasitas IPTEKIN untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 sangat penting untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui peningkatan efisiensi dan penciptaan produk-produk berkualitas dan berteknologi tinggi.

- c. Deindustrialisasi Dini dan Produktivitas Sektor Pertanian yang Masih Rendah

Beberapa faktor penyebab kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB terus mengalami penurunan antara lain adalah karena terjadinya pelemahan sektor manufaktur (*dutch diseases*), rendahnya produktivitas faktor-faktor produksi, terbatasnya kemampuan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi, keterbatasan dukungan ekosistem industri di luar Jawa, dan terjadinya ekonomi biaya tinggi akibat biaya logistik dan tingkat suku bunga. Selain itu, produktivitas sektor pertanian yang rendah disebabkan oleh lambatnya regenerasi petani dan nelayan, kurangnya tingkat keterampilan petani dan nelayan, terbatasnya adopsi teknologi dan akses keuangan, belum adanya standar proses, semakin berkurangnya daya dukung lahan pertanian, serta masih lemahnya kelembagaan ekonomi petani dan nelayan yang berbadan hukum.

- d. Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata

Kinerja pariwisata masih berada di bawah potensinya disebabkan terutama oleh masih terbatasnya atraksi, aksesibilitas, dan amenitas, serta kapasitas pengelolaan dan penerapan pariwisata berkelanjutan cenderung masih rendah serta belum optimalnya inovasi dan akses ke pasar internasional.

- e. Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Ekonomi Laut

Indonesia memiliki potensi ekonomi laut yang tinggi, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal untuk penciptaan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan juga peningkatan kesejahteraan secara inklusif dan berkelanjutan.

- f. Rendahnya Kontribusi UMKM dan Koperasi Pada Penciptaan Nilai Tambah Ekonomi

UMKM dan koperasi berkontribusi tinggi pada penyerapan tenaga kerja, tetapi kontribusinya terhadap perekonomian relatif rendah. Hal ini disebabkan karena sebagian besar UMKM memiliki pekerja berkeahlian rendah (*low-skilled workers*) dan juga banyak bergerak di sektor bernilai tambah rendah, rendahnya penggunaan teknologi, inovasi, dan investasi untuk pengembangan usaha, rendahnya kapasitas pengelolaan, rendahnya partisipasi UMKM dalam rantai nilai produksi, dan rendahnya jumlah koperasi yang bergerak di sektor riil.

- g. Di Tengah Kecepatan Perkembangan Teknologi Digital, Infrastruktur dan Literasi Digital Masih Terbatas
Kapasitas dan kapabilitas TIK yang dimiliki Indonesia saat ini belum memadai baik dari sisi penawaran maupun permintaan dalam mempercepat pemanfaatannya secara optimal untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
- h. Pembangunan Belum Sepenuhnya Menerapkan Prinsip – Prinsip Berkelanjutan
Untuk menjaga keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan, pembangunan perlu menerapkan ekonomi hijau secara menyeluruh. Hambatan dalam penerapan ekonomi hijau salah satunya yaitu penggunaan energi fosil yang masih tinggi. Di samping itu, pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau.
- i. Belum Optimalnya Integrasi Ekonomi Domestik Sehingga Keterkaitan Ekonomi Antarwilayah Masih Relatif Terbatas
Pusat – pusat pertumbuhan lebih berkembang di Pulau Jawa, infrastruktur konektivitas yang belum memadai dan belum terintegrasi sepenuhnya menyebabkan tingginya biaya logistik, masih banyaknya regulasi yang menghambat, serta kuantitas dan kualitas SDM yang belum merata, terutama di luar Pulau Jawa.
- j. Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia Selama Kurun Waktu 2010-2022 Masih Relatif Tertinggal
Ketertinggalan produktivitas terjadi pada tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh lulusan SMP ke bawah, ketidaksesuaian keahlian (*mismatch*) antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, informasi pasar tenaga kerja belum mampu menjadi intelijen pasar kerja yang baik, dan pasar kerja Indonesia belum mampu merespons perubahan cepat jenis lapangan kerja, kebutuhan keahlian, struktur penduduk, serta pola budaya kerja.
- k. Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal
Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif karena proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif.
- l. Kepastian dan Penegakan Hukum Masih Lemah
Regulasi yang berlebih (*hyper regulation*) dan kualitas regulasi yang rendah telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi, baik di pusat maupun daerah. Selain itu, sistem hukum belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan.
- m. Demoktratisasi Belum Optimal
Demokrasi masih terbatas pada hal-hal prosedural seperti teknis pemilihan dan hubungan formal kelembagaan. Selain itu Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal dan prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terarus utamakan dalam pelaksanaan pembangunan.

n. Ketimpangan antar Jawa dan Luar Jawa Masih Cukup Tinggi

Secara umum dikarenakan masih kurangnya ketersediaan SDM yang berkualitas dan penyebarannya belum merata di seluruh wilayah Indonesia, belum memadainya ketersediaan infrastruktur di wilayah yang tertinggal khususnya di bagian timur Indonesia, serta masih terbatasnya anggaran pemerintah daerah dan belum optimalnya pemanfaatan anggaran. Kondisi tersebut telah menyebabkan rendahnya minat investasi di luar Pulau Jawa terutama di KTI.

3.2.3. Isu Strategis Provinsi Jawa Timur

Berikut adalah identifikasi isu strategis Provinsi Jawa Timur tahun 2025 – 2045 sebagai berikut :

1. Penguatan Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Produktivitas, Daya Saing dan Nilai Tambah Sumber Daya Lokal

Isu strategis mengenai penguatan ekonomi daerah meliputi peningkatan produktivitas dan nilai tambah sumber daya lokal dalam rangka menggerakkan perekonomian regional, memanfaatkan potensi lokal secara maksimal, serta mengoptimalkan sumber daya ekonomi melalui peningkatan akses pembiayaan, kapasitas sumber daya manusia, dan perluasan akses pasar.

Langkah-langkah holistik dan berkelanjutan diperlukan untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang kuat, inklusif, dan berdaya saing, serta memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi regional dan nasional secara keseluruhan.

2. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur yang Berkelanjutan

Ketersediaan Infrastruktur di Jawa Timur masih memerlukan peningkatan dari aspek kualitas maupun pemerataan. Infrastruktur pelayanan dasar, sumber daya air, maupun transportasi yang terintegrasi dengan penataan ruang termasuk mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengurangan risiko bencana dan krisis iklim dibutuhkan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sumber daya lokal guna mendukung penguatan ekonomi daerah.

3. Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Sosial Dasar

Pemenuhan kebutuhan sosial dasar, khususnya pemenuhan layanan pendidikan, kesehatan, perumahan serta peningkatan lapangan kerja, penanganan *stunting*, dan penanggulangan kemiskinan, menjadi isu strategis karena memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan suatu masyarakat.

4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya Saing, Kepedulian Sosial dan Nilai – Nilai Budaya Lokal

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dengan menciptakan insan yang berkualitas dimulai dari usia dini hingga usia kerja dengan peningkatan relevansi serta daya saing

pendidikan dan pelatihan, pelibatan dunia Industri dan dunia usaha dalam pengembangan vokasi, serta penguasaan adopsi teknologi dan penciptaan inovasi.

Kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal mencerminkan pentingnya memahami, menghargai, dan memelihara identitas budaya suatu masyarakat dalam konteks globalisasi dan perubahan sosial. Kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal membentuk fondasi kuat untuk membangun masyarakat yang beragam namun tetap kokoh dalam solidaritas, menciptakan keseimbangan antara globalisasi dan keberlanjutan budaya lokal.

5. Pemerataan Kemandirian Pangan dan Pemanfaatan Potensi Energi Baru Terbarukan

Pemerataan kemandirian pangan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan diperlukan untuk mendukung ketahanan nasional dan daerah serta menjawab tantangan krisis pangan global dan perubahan iklim. Pemerataan kemandirian pangan mengacu pada upaya untuk menyediakan akses yang merata terhadap pangan yang cukup, bergizi, dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Kemandirian dan ketahanan pangan ditopang oleh 3 (tiga) pilar: ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Hilirisasi produksi pangan dari pertanian dan perikanan menjadi kebutuhan Jawa Timur ke depan, terutama mengingat bahwa Jawa Timur merupakan provinsi lumbung pangan nasional. Produksi pangan Jawa Timur dikembangkan dengan melakukan hilirisasi melalui penguatan kelembagaan (korporasi) dan diversifikasi usaha petani-nelayan, dan penguatan *linkage* dan logistik (*supply-value chain*) dan hub pangan (*food hub*). Ke depan diperlukan *upgrading* PIA Puspa Agro menjadi Jatim *Food Hub* dengan didukung oleh pengembangan kelembagaan sesuai kebutuhan ke depan (BUMD Pangan atau kelembagaan usaha lain yang relevan). Selain hilirisasi pangan lokal, upaya diversifikasi pangan lokal harus terus dilakukan dalam mewujudkan kemandirian pangan. Upaya-upaya dalam mencegah dan mengurangi timbunan susut dan sisa Pangan/ *Food Loss and Waste* (FLW) harus terus dilakukan mengingat masih tingginya tingkat FLW.

Pemerataan kemandirian pangan juga perlu diupayakan melalui pengembangan kawasan sentra produksi agro (hulu) dan pengembangan SDM agro. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan dan meningkatkan produksi pangan, serta mengoptimalkan input hilirisasi pangan/agro yang akan meningkatkan kesejahteraan petani.

Pemanfaatan potensi energi mencakup optimalisasi penggunaan sumber daya energi yang tersedia, termasuk energi terbarukan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa merusak lingkungan. Untuk itu dalam rangka mendukung komitmen antisipasi perubahan iklim dan Pembangunan berkelanjutan, maka ketahanan energi, transisi energi serta penguatan Kerjasama untuk pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) menjadi perhatian khusus di Jawa Timur.

Penting untuk menciptakan kebijakan dan strategi pembangunan yang mempertimbangkan interkoneksi antara produksi pangan dan sumber daya energi. Dengan demikian, dapat tercipta lingkungan yang berkelanjutan, mandiri, dan berdaya saing mendunia bagi masyarakat lokal dan wilayah secara keseluruhan.

6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Penanggulangan Bencana

Ancaman terhadap penurunan daya dukung dan daya tampung cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya tekanan terhadap lingkungan yang berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk serta aktivitas perekonomian termasuk pertumbuhan kawasan perumahan dan permukiman, serta industri dan perdagangan. Hal ini tidak terlepas bahwa setiap aktivitas perekonomian akan menghasilkan limbah baik yang bersifat B3 maupun non B3 yang berpotensi menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup baik air, tanah, maupun udara. Di sisi lain, peningkatan aktivitas perekonomian merupakan penyumbang peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagai salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim yang perlu diantisipasi. Indikasi terjadinya perubahan iklim saat ini secara langsung mulai terasa dan ditandai dengan adanya kenaikan temperatur serta curah hujan yang ekstrem. Perubahan iklim merupakan ancaman besar bagi keberlangsungan berbagai sektor kehidupan termasuk sektor perekonomian, kesehatan, sosial, dan sebagainya. Laju emisi Gas Rumah Kaca (GRK) akan terus meningkat secara eksponensial jika intervensi kebijakan terhadap perubahan iklim tidak dilakukan atau *Business As Usual* (BAU). Empat sektor prioritas diperkirakan bisa mengalami kerugian yang cukup signifikan akibat perubahan iklim adalah yaitu sektor pesisir dan laut, sektor pertanian, sektor kesehatan, serta sektor sumber daya air. Kejadian bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, gelombang pasang, dan puting beliung sebagai ancaman dari perubahan iklim mendominasi kejadian bencana di Indonesia termasuk di Jawa Timur. Peningkatan kapasitas dalam hal kesiapsiagaan dengan melibatkan pengembangan sistem peringatan dini yang efektif dan merata, pelatihan masyarakat untuk merespon cepat ketika bencana terjadi, serta simulasi dan latihan evakuasi sangat dibutuhkan. Peningkatan kapasitas ketangguhan terhadap bencana dan kesiapsiagaan dalam pengurangan risiko bencana pada pembangunan berkelanjutan juga perlu dilaksanakan dengan mengintegrasikan rencana penanggulangan bencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

7. Optimalisasi Penanganan Gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Isu ini menitik beratkan upaya untuk meningkatkan pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan pada saat yang sama memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik. Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan pelayanan publik difokuskan untuk perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan dengan

meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan serta menyederhanakan prosedur administratif dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Proses birokrasi yang rumit dapat menjadi sumber ketidakpuasan masyarakat, sehingga penyederhanaan prosedur, pemantauan dan evaluasi regulasi dan pelayanan yang efisien menjadi sangat penting. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pengembangan SDM di sektor publik juga menjadi sangat penting. Pendidikan, pelatihan, dan bentuk pengembangan kompetensi lainnya bagi pegawai pemerintah dapat meningkatkan kapasitas dan profesionalisme sehingga dapat memberikan pelayanan yang berkualitas. Optimalisasi penanganan gangguan Trantibumlinmas sejalan dengan penguatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik merupakan langkah esensial untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman dan adil agar tidak terjadi konflik sosial.

Penguatan Trantibumlinmas tentunya terfokus pada pemusatan data gangguan dan kegiatan dengan menggunakan sistem informasi, serta melibatkan peran serta masyarakat dalam memberikan informasi melalui saluran pengaduan, sehingga integrasi data dan penanganan gangguan Trantibumlinmas di Jawa Timur dapat dioptimalkan. Potensi terjadinya gangguan Trantibumlinmas juga menjadi perhatian khususnya dalam proses demokrasi sehingga peran pemerintah dalam hal peningkatan kelembagaan dan pembudayaan nilai - nilai Pancasila.

3.2.4. Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Blitar

Isu strategis lingkungan dalam perencanaan pembangunan kota menjadi hal yang esensial dan imperatif untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, kehidupan yang sehat, dan layak bagi penduduk kota serta generasi mendatang. Dengan mengintegrasikan aspek lingkungan dalam rencana pembangunan kota dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, meningkatkan ketahanan terhadap perubahan lingkungan, dan memberikan dampak positif jangka panjang bagi kehidupan kota dan masyarakatnya. Berikut disajikan isu strategis lingkungan Kota Blitar:

1. Kualitas Kesehatan Masyarakat

Kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan wilayah. Kualitas kesehatan berdampak kualitas sumberdaya manusia. semakin sehat dan berumur panjang maka produktivitas masyarakat semakin tinggi. Kondisi tersebut dapat meningkat perekonomian suatu daerah. Usia Harapan Hidup, Prevalensi Balita Stunting, Angka Kematian Ibu dan persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan merupakan indikator yang mencerminkan kondisi kesehatan masyarakat.

Peningkatan usia harapan hidup Kota Blitar Tahun 2013-2022 menunjukkan bahwa terjadi perkembangan di Kota Blitar dengan adanya peningkatan pembangunan di Kota Blitar yang harus dipertahankan melalui peningkatan penyediaan berbagai fasilitas kesehatan dan kesadaran masyarakat akan PHBS (Pola Hidup

Bersih dan Sehat) merupakan faktor yang berpengaruh pada tingkat kesehatan seseorang.

Kondisi prevalensi balita stunting di Kota Blitar Tahun 2017 hingga 2021 mengalami perubahan secara dinamis sehingga perlu adanya langkah strategis dan komprehensif untuk menangani stunting karena stunting akan memberikan dampak yang buruk bagi masa depan generasi muda dan tentunya dapat berpengaruh dalam perkembangan sumber daya manusia.

Angka kematian Ibu di Kota Blitar menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dari tahun 2017-2021 yang disebabkan oleh gangguan kehamilan atau penanggannya sehingga perlu adanya peningkatan pengembangan peningkatan kesehatan reproduksi, peningkatan pelayanan kesehatan dalam berbagai kondisi dan situasi, serta perlunya kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan wabah dan bencana melalui upaya yang preventif dan promotif agar perlindungan kesehatan ibu berjalan optimal.

Persentase Ibu bersalin yang mendapatkan layanan Kesehatan dan juga angka kematian bayi mengalami perkembangan yang fluktuatif juga sehingga perlu adanya upaya untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan bermutu serta sarana prasarana kesehatan lainnya.

2. Kualitas Pendidikan

Pendidikan menjadi bagian penting dalam pembangunan manusia dan pengembangan kapasitas penduduk di Kota Blitar. Pendidikan erat kaitannya dengan memajukan bangsa, seiring pengetahuan yang banyak didapat oleh masyarakat maka akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas pula sehingga diharapkan dapat memberi peran kepada pembangunan wilayah di masa yang akan datang. Selama 10 tahun terakhir, angka Harapan Lama Sekolah (HLS) maupun Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kota Blitar terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2013, HLS di Kota Blitar berada di angka 13,15 tahun, kemudian pada tahun 2022 angka ini telah mencapai nilai 14,56. Ini mengindikasikan bahwa secara rata-rata penduduk yang masuk ke jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 14,56 tahun atau setara dengan Diploma III. Harapan lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Selanjutnya, RLS Kota Blitar pada tahun 2013 berada di angka 9,53 atau setara kelas 3 SMP. 10 tahun kemudian, nilai RLS telah mencapai angka 10,65. Hal ini berarti rata-rata penduduk di Kota Blitar menempuh pendidikan sampai setara kelas 1 SMA.

3. Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan pembangunan di tingkat global, nasional maupun regional. Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan

alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Persentase kemiskinan di Kota Blitar mengalami fluktuatif selama periode 2017-2019. Selama 2017-2021 mengalami penurunan dari 8,03 menjadi 7,1 sedangkan 2020 meningkat menjadi 7,28 % dan 7,89 % pada tahun 2021. Pemerintah Kota Blitar perlu menerapkan strategi percepatan pengentasan kemiskinan agar persentasenya kembali menurun.

4. Peran Perempuan dan Kesetaraan Gender

Peran Perempuan Dan Kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Seiring dengan pentingnya peran serta perempuan dan anak dalam pembangunan daerah, maka Pemerintah Kota Blitar memberikan perhatian yang besar terhadap pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

5. Kasus Kerawanan Sosial

Perkembangan perkotaan menyebabkan berbagai permasalahan salah satunya peningkatan potensi kriminalitas, seperti kerawanan sosial. Kerawanan sosial adalah realitas sosial yang menggambarkan adanya keresahan berkepanjangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sebagai akibat proses sosial dan interaksi sosial hingga menimbulkan konflik atas perbedaan individu dan kelompok dalam memenuhi arti kebutuhannya. Kejahatan yang dilaporkan di Kota Blitar selama 2018-2022 mengalami tren penurunan sedangkan jumlah kejahatan yang diselesaikan semakin bertambah. Isu keamanan merupakan aspek penting karena terkait dengan kondusifitas untuk pengembangan ekonomi.

6. Daya Saing Tenaga Kerja atau Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu modal dalam pembangunan suatu wilayah ketersediaan sumberdaya manusia tidak hanya dilihat dari kuantitas tetapi kualitas. Kualitas SDM akan menentukan kemampuan SDM untuk bersaing dalam dunia kerja. Salah satu indikator yang mampu mencerminkan adalah Angka Pengangguran Terbuka. Angka Pengangguran Terbuka mengalami kecenderungan meningkat selama 2018- 2022. Persentase Penganggura pada tahun 2018 di Kota Blitar mencapai 3,98 %, kemudian meningkat menjadi 4,54 % kemudian bertambah 6,64 % pada tahun 2020. Peningkatan angka pengangguran terbuka tahun 2020 meningkat akibat pandemi COVID-19. Periode 2021-2022 mengalami penurunan menjadi 6,61 % dan 5,38 %. Hal ini perlu menjadi perhatian agar SDM di Kota Blitar mempunyai skill yang mumpuni agar dapat bersaing dalam dunia kerja.

7. Pengembangan Ekonomi Lokal

Secara umum, penggerak ekonomi Kota Blitar bukan berasal dari sektor primer, namun dari sektor tersier sehingga pengembangan wilayah diarahkan pada pengembangan beberapa sektor, salah satunya pengembangan kawasan wisata. Potensi pengembangan pariwisata Kota Blitar relatif besar dengan status kota ini sebagai

kota kelahiran sekaligus tempat disemayamkannya proklamator Indonesia, Ir. Soekarno atau Bung Karno.

Jumlah pengunjung pariwisata Kota Blitar pada tahun 2022 adalah sebanyak 1.883.224 pengunjung terbagi ke dalam berbagai tempat wisata dengan rincian Makam Bung Karno sebanyak 228.019 pengunjung, Perpustakaan Bung Karno sebanyak 270.607 pengunjung, dan Istana Gebang dengan 16.449 pengunjung. Sementara itu jumlah pengunjung di tempat wisata tiap kecamatan cukup beragam

8. Sarana dan Prasarana Permukiman

Salah satu kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia adalah adanya rumah tinggal. Selain merupakan kebutuhan yang mendasar, rumah tinggal juga merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah sebagai tempat tinggal juga mempunyai pengaruh terhadap produktivitas kerja seseorang karena selain sebagai tempat tinggal atau hunian juga berfungsi sebagai tempat pusat pendidikan, pembinaan keluarga dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Keadaan perumahan yang baik dapat menunjang usaha pembangunan ekonomi, karena dengan kualitas kehidupan yang layak melalui pemenuhan kebutuhan tempat tinggal maka akan terwujud kesejahteraan rakyat. Salah satu indikator adalah persentase rumah tangga dengan akses air limbah. Pada tahun 2021, persentasenya mencapai 96,42 %, menurun dibandingkan tahun 2017 sebesar 99.02 %. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah Kota Blitar.

9. Infrastruktur Perkotaan

Pembangunan infrastruktur memberikan peranan yang sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah, serta mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Secara umum dari segi infrastruktur, persentase infrastruktur yang mencapai rasio ketercapaian diatas 100% pada tahun 2020 terdapat pada 3 indikator, yakni gedung pemerintah, saluran drainase, dan kesesuaian pemanfaatan ruang. Sementara itu, indikator jalan dalam kondisi baik, jaringan irigasi dalam kondisi baik, rumah tangga dengan akses air bersih, serta rumah tangga dengan akses air limbah masih belum memenuhi target capaian.

10. Alih Fungsi Lahan Pertanian serta Lahan Hijau Lain

Alih fungsi lahan pertanian merupakan salah satu isu utama di Kota Blitar. Tekanan terhadap sawah dan kawasan lindung sangat tinggi akibat perkembangan jumlah penduduk. Pertambahan tersebut akan memicu kebutuhan lahan untuk permukiman atau kegiatan ekonomi.

Peningkatan jumlah penduduk di Kota Blitar setiap tahunnya di Kota Blitar menyebabkan alih fungsi lahan pertanian untuk memenuhi peningkatan kebutuhan papan atau tempat tinggal sehingga penurunan luas lahan pertanian memberikan dampak terhadap produksi sector pertanian. Luas lahan baku sawah

terjadi perubahan pada tahun 2022 yaitu 987 Ha dari tahun sebelumnya 1.026 Ha. Lahan baku sawah setiap tahun mengalami perubahan naik turun, akan tetapi mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2022 mengalami penurunan signifikan. Berikut perubahan penggunaan lahan baku sawah setiap tahunnya.

11. Pencemaran Udara

Pencemaran udara adalah kondisi di mana udara di lingkungan menjadi terkontaminasi oleh zat-zat berbahaya atau polutan yang dapat berdampak negatif pada manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan secara keseluruhan. Meskipun Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Blitar tergolong sangat baik (84,82) akan tetapi isu pencemaran udara di Kota Blitar tidak boleh diabaikan. Mengingat pemanasan global yang terus terjadi secara masif dan pentingnya udara bagi kehidupan makhluk hidup. Di sisi lain, udara di Kota Blitar memiliki suhu rata-rata mencapai 29°C yang tergolong ke dalam udara panas.

12. Ketersediaan Air Bersih

Ketersediaan air bersih khususnya di wilayah perkotaan merupakan masalah yang signifikan yang disebabkan karena pertumbuhan populasi yang pesat, urbanisasi, dan permintaan akan air yang meningkat. Jumlah penduduk Kota Blitar yang selalu meningkat dari tahun ke tahun menyebabkan ketersediaan air bersih di Kota Blitar perlu menjadi perhatian. Selain itu, semakin banyaknya lahan terbangun menyebabkan serapan air ke tanah menjadi semakin rendah yang mengakibatkan cadangan air bersih semakin berkurang dari tahun-ke tahun. Disisi lain, terdapat banyak sumber air berupa sumur yang telah terkontaminasi Bakteri Coliform. Sehingga kualitas air di Kota Blitar yang semakin menurun dari tahun ke tahun.

13. Pencemaran Air dan Limbah Rumah Tangga

Pencemaran air terjadi ketika zat-zat berbahaya atau kontaminan masuk ke dalam sumber air dan mengubah kualitasnya. Limbah rumah tangga seperti air limbah dari toilet, dapur, dan kamar mandi dapat menjadi bahan pencemar sumber air lokal. Limbah rumah tangga yang dibuang ke sungai, danau, atau badan air lainnya tanpa pengolahan yang memadai dapat mengandung bakteri, virus, dan bahan kimia berbahaya yang menurunkan kualitas air yang ada. Pencemaran air di Kota Blitar yang disebabkan limbah rumah tangga semakin tahun semakin meningkat. Terlebih pencemaran pada badan air seperti sungai. Pencemaran tersebut disebabkan karena banyaknya rumah tangga yang membuang limbah yang dihasilkan langsung ke sungai tanpa pengolahan yang memadai. Hal ini terlihat dari nilai indeks kualitas air sungai di Kota Blitar yang tergolong kurang baik. Selain pada sungai, pencemaran air juga terjadi pada sumber air lokal seperti sumur. Pencemaran air pada sumur umumnya disebabkan karena pembangunan septic tank yang tidak memenuhi kualifikasi kesehatan. Isu terkait pencemaran penting untuk diperhatikan. Mengingat dampak yang ditimbulkan bukan hanya dampak bagi lingkungan, akan tetapi juga berdampak pada kondisi kesehatan masyarakat di Kota Blitar

14. Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan

Pemenuhan ruang terbuka hijau perkotaan penting untuk menciptakan kota yang lebih sehat, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh penduduknya. Ruang terbuka hijau berperan penting dalam penyaringan gas emisi dan juga dalam penyerapan air hujan. Proporsi Ruang Terbuka Hijau Kota Blitar yang sebesar 29,21% belum memenuhi proporsi RTH minimal kota yang sebesar 30%. Meski hampir memenuhi, isu pemenuhan Ruang Terbuka Hijau tetaplah menjadi isu strategis. Mengingat peran RTH yang cukup besar bagi masyarakat (khususnya dalam bidang lingkungan), maka pemenuhan RTH di Kota Blitar tetap harus menjadi isu strategis dalam pembangunan. Di sisi lain, alih fungsi lahan (dari non-terbangun menjadi terbangun) yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dan meningkatnya jumlah penduduk maka dibutuhkan peran RTH khususnya untuk penyediaan udara yang berkualitas dan sebagai sarana penyerapan air hujan.

15. Pengelolaan Sampah dan Limbah

Isu pengelolaan sampah kota merupakan masalah yang sering dihadapi oleh banyak kota di seluruh dunia. Proses pengelolaan sampah melibatkan proses pengumpulan, transportasi, pengolahan, dan pembuangan akhir sampah yang dihasilkan oleh penduduk perkotaan. Kondisi timbunan sampah di Kota Blitar yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dan kapasitas yang mulai penuh pada TPA Gedog yang merupakan TPA satu-satunya di Kota Blitar (sudah terpenuhi sekitar 85% dari daya tampung) menjadikan isu pengelolaan sampah di Kota Blitar menjadi salah satu isu strategis yang harus segera diatasi. Mengingat dampak yang ditimbulkan dari timbunan sampah yang cukup serius utamanya bagi kondisi lingkungan dan sosial Kota Blitar.

Salah satu permasalahan terkait isu limbah yang masih menjadi perhatian dari berbagai tingkat kepentingan baik dari Provinsi Jawa Timur maupun Kota Blitar dan sekitarnya yaitu terkait limbah domestik industri tahu. Permasalahan limbah tahu diduga berasal dari aktivitas industri tahu yang mencemari Kali Tempur di dua desa di Kecamatan Sanankulon. Pada tahun 2022 Kelurahan Pakunden Kota Blitar memiliki kurang lebih 11 industri tahu yang berskala menengah – keatas. Industri tahu tersebut menghasilkan limbah organik berupa limbah cair hasil produksi tahu yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan dan dapat mengganggu masyarakat Kelurahan Pakunden. Limbah cair tahu mengandung zat berbahaya seperti BOD, dan TSS, serta mengandung unsur hara yang baik bagi tanaman yaitu P, N, K, Mg, Ca, dan Fe. Salah satu usaha yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar yaitu dengan pengadaan berupa pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Saat ini di Kota Blitar sudah tersedia sebanyak 74 unit IPAL domestik komunal. Pada Tahun 2021 telah dilakukan pembangunan 1 unit IPAL domestik komunal di Kelurahan Gedog dan 1 unit tangki septik Sumber Sehat di Kelurahan Karangtengah.

Pemerintah Kota Blitar melalui dinas lingkungan hidup (DLH) juga sudah berkali-kali melayangkan surat teguran kepada pelaku industri tahu untuk mengelola limbah secara benar. DLH juga telah memberikan pembinaan terhadap pelaku-pelaku industri tahu. Pembinaan itu berupa bimbingan teknis pengelolaan air limbah pabrik yang benar. Namun masih banyak industri yang tidak taat terhadap pengelolaan lingkungan. Berdasarkan data pengawasan lingkungan yang dilakukan oleh DLH Kota Blitar pada tahun 2022 diketahui terdapat 11 industri tahu yang tidak taat terhadap pengelolaan lingkungan.

16. Risiko Bencana Perkotaan dan Banjir

Isu bencana perkotaan merujuk pada ancaman dan tantangan yang terkait dengan bencana yang terjadi di lingkungan perkotaan. Perkembangan perkotaan yang pesat dan padat penduduk menjadi faktor utama yang memperburuk dampak bencana di kawasan perkotaan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Inarisk diketahui bahwa Kota Blitar memiliki Indeks Risiko Bencana sebesar 108,28 pada tahun 2021 dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 114,33. Selain Banjir, isu bencana perkotaan berupa puting beliung dan kebakaran menjadi ancaman tersendiri di Kota Blitar. Puting beliung yang terjadi karena efek perubahan iklim dapat menimbulkan dampak yang serius seperti kerugian materiil dan timbulnya korban jiwa jika tidak ditangani secara serius. Kemudian kondisi Kota Blitar sebagai kawasan perkotaan yang cukup padat penduduk, menjadikan Kota Blitar memiliki risiko bencana kebakaran yang cukup besar. Selain itu, kondisi jalan lingkungan terlebih pada Kawasan perdagangan dan jasa yang padat akan hunian sehingga sulit diakses mobil pemadam kebakaran menyebabkan kerawanan kebakaran di Kota Blitar semakin besar. Kondisi ini tentu perlu ditangani lebih serius agar keselamatan masyarakat dari ancaman bencana kebakaran lebih terjamin.

17. Tata Kelola Pemerintahan (*Good Governance*)

Isu tata kelola pemerintah merujuk pada terciptanya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel. Permasalahan tata kelola di Kota Blitar seperti masih adanya fasilitas public yang belum menerapkan SPM, rendahnya penggunaan e-procurement dalam belanja pengadaan, dan indeks reformasi birokrasi yang masih dibawah standar nasional menjadikan isu tata kelola pemerintahan menjadi isu strategis dalam pembangunan Kota Blitar. Mengingat penyelenggaraan tata kelola pemerintah merupakan aspek penting dalam proses pembangunan suatu wilayah.

3.2.5. Isu Strategis Kota Blitar

Berdasarkan permasalahan di Kota Blitar mulai dari urusan dan aspek, serta isu strategis di level internasional, nasional, dan Jawa Timur maka isu strategis yang dirumuskan di Kota Blitar adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas didasari moral dan kekuatan religius

Sumber daya manusia adalah faktor utama dan unsur penting dalam pembangunan daerah. Manusia tidak hanya menjadi objek akan tetapi menjadi subjek atau mesin utama pembangunan semua sektor. Karena berfungsi sebagai penggerak utama maka dibutuhkan kualitas manusia yang unggul baik dari sisi pendidikan dan kesehatannya untuk mencapai tingkat kesejahteraan.

Tingkat kesehatan yang baik akan melahirkan manusia yang mampu mengikuti semua proses kehidupan termasuk peningkatan diri dalam bidang pendidikan dan ketrampilan yang dibutuhkan jaman. Tingkat kesehatan dan pendidikan yang baik akan memberikan peluang terbaik untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang dapat menjamin kesejahteraannya.

Peningkatan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan penduduk suatu wilayah yang utama adalah ditentukan oleh kualitas penduduk itu sendiri untuk mampu dan mau meraih kualitas terbaik. Selanjutnya faktor intervensi pemerintah daerah yang mampu memberikan peluang baik melalui fasilitasi sampai dengan subsidi terhadap kasus kasus yang bersifat spesifik spesifik. Misalnya subsidi terhadap penduduk yang miskin, disabilitas atau penduduk yang sudah tidak produktif dan bergantung pada lingkungan.

2. Antisipasi tenaga kerja, alih dari Sumber Daya Manusia ke teknologi

Kemajuan teknologi tidak bisa dihindari. Perkembangan penciptaan robot – robot yang mampu mengganti peran manusia dalam industri maupun pekerjaan sehari – hari. Selain itu kemajuan teknologi juga telah merambah pada proses kerja yang berubah dari konvensional menjadi digital. Semua perubahan itu secara perlahan atau cepat akan mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia.

Jika semua serba mesin atau bersifat otomatisasi, robotik dan digitalisasi maka tenaga kerja manusia pasti akan berkurang. Tenaga kerja yang dibutuhkan adalah tenaga kerja trampil yang menguasai teknologi otomatisasi, robotik dan digitalisasi. Dari sisi kualitas, tenaga kerja yang dibutuhkan adalah kualitas tinggi menguasai teknologi. Dari sisi kuantitas, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan proses mekanis atau konvensional.

Pergeseran ini mengharuskan adanya upaya strategis dalam meningkatkan literasi digital dan keterampilan teknologi di kalangan masyarakat. Pendidikan dan pelatihan teknologi yang terjangkau dan mudah diakses perlu didorong untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat mengikuti perkembangan teknologi dan memanfaatkannya secara produktif. Selain itu, inisiatif Pemerintah Kota Blitar dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja yang memerlukan keterampilan manusia yang unik dan sulit

digantikan oleh otomatisasi dapat membantu memitigasi dampak negatif pada tenaga kerja.

Pentingnya pengembangan keterampilan baru harus menjadi kesadaran setiap penduduk untuk dapat bertahan pada arus perkembangan teknologi di masa yang akan datang. Selain itu peran Pemerintah Kota Blitar dan pelaku bisnis diperkuat dalam menciptakan ekosistem yang mendukung peralihan ini. Kebijakan dukungan bagi pelatihan dan pendidikan teknologi, serta insentif bagi perusahaan untuk mempekerjakan tenaga kerja manusia, dapat menjadi langkah-langkah strategis yang diimplementasikan.

3. Transformasi pasar dari konvensional menuju digital

Perkembangan digitalisasi dalam sektor ekonomi isu yang mengemuka. Proses pemasaran melalui media sosial dan aplikasi *market place* telah merubah secara perlahan budaya manusia dalam bertransaksi. Transaksi ekonomi tidak lagi konvensional yaitu konsumen harus datang untuk belanja kebutuhannya, tetapi cukup dari rumah semua kebutuhannya akan datang diantar melalui transaksi digital. Pedagang tidak lagi harus punya toko atau tempat berjualan secara fisik, cukup mempunyai tempat dalam pasar digital. Pedagang tidak harus memproduksi barang sendiri atau punya barang bahkan gudang penyimpanan barang, sebab barang sudah tersedia oleh produsen dan pedagang hanya menjadi penjual saja di pasar online.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Kota Blitar untuk memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai dalam memahami dan memanfaatkan ekosistem ekonomi digital. Pendidikan dan pelatihan mengenai teknologi dan *e-commerce* menjadi krusial agar masyarakat dapat bersaing dan beradaptasi secara efektif dalam lingkungan ekonomi digital.

Keterlibatan pelaku usaha lokal, terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perlu didorong untuk melakukan percepatan adaptasi dalam platform digital. Dukungan Pemerintah Kota Blitar dalam hal ini adalah memberikan akses dan fasilitasi pelatihan untuk membantu UMKM bertransformasi secara digital. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM di pasar digital, membantu mereka mengatasi hambatan teknologi, dan meraih peluang baru.

4. Ekonomi yang harus tumbuh dari waktu ke waktu

Ekosistem ekonomi akan hidup, tumbuh dan berkembang apabila ekonomi daerah bergerak stabil atau bergerak mengalami peningkatan. Pergerakan ekonomi daerah ditentukan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang terbentuk dalam kota sendiri antara lain produsen, pasar dan konsumen didukung oleh kebijakan pemerintah daerah yang mampu menjaga roda ekonomi bergerak stabil mengarah pada pertumbuhan positif. Menjaga agar tidak terjadi inflasi dalam tingkat tinggi, menjaga agar daya beli masyarakat sebagai konsumen. Menjaga persaingan sehat dalam pasar. Kesemua itu

harus dilakukan bersama sama baik oleh entitas ekosistem ekonomi dengan pemerintah daerah.

Faktor eksternal adalah faktor dukungan dunia luar dalam roda ekonomi Kota Blitar, yaitu investasi. Investasi berupa tambahan modal yang masuk Kota Blitar dan akan memperbesar jumlah modal yang bergerak dalam roda perekonomian Kota Blitar. Investasi akan masuk apabila para investor melihat ada peluang yang menguntungkan bagi investor. Faktor – faktor yang menjadi perhatian investor adalah kebutuhan konsumen, besar kebutuhan dan tingkat daya belinya, stabilitas keamanan suatu daerah, kebijakan yang diterapkan daerah. Selain itu juga faktor pendekat pada bahan baku, ketersediaan tenaga kerja dan tinggi rendahnya upah serta kemudahan mobilisasi atau pergerakan bahan baku maupun hasil produksi. Maka untuk dapat menarik investasi secara berkelanjutan maka ekosistem ekonomi dan suasana kebijakan yang kondusif terhadap investor dan investasi harus selalu dijaga dengan baik.

5. Dua kutub pertumbuhan ekonomi di Blitar Raya

Menapaki sejarah sejak era Kerajaan sampai dengan era penjajahan, Kota Blitar adalah pusat pemerintahan sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi di Kawasan Blitar. Hal ini disebabkan pusat pemerintahan dan ekonomi 2 (dua) wilayah administratif yaitu Kota Blitar dan Kabupaten Blitar berada di Kota Blitar. Tetapi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2010 Ibukota Kabupaten Blitar berpindah ke Kecamatan Kanigoro. Sehingga Kota Blitar yang awalnya menjadi ibukota 2 wilayah administrasi sejak tahun 2010 secara administratif hanya menjadi ibukota Pemerintah Kota Blitar saja. Magnet ekonomi yang semula terpusat di Kota Blitar secara perlahan akan terbagi menjadi 2 antara Kota Blitar dengan Kanigoro yang menjadi Ibukota Kabupaten Blitar.

Pemisahan kutub pertumbuhan ekonomi akan sangat berdampak pada Kota Blitar jika tidak disikapi dengan melaksanakan strategi yang baik, terencana, bertahap dan terstruktur. Dampak terburuknya adalah Kota Blitar menjadi Kota yang ditinggalkan sehingga yang akan tumbuh berkembang adalah spot-spot daerah kumuh dan bisa berkembang menjadi wilayah-wilayah kumuh.

Ada amanat besar dalam kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Timur yaitu Kota Blitar ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Blitar yaitu Pemerintah Kota dan Kabupaten Blitar. Untuk dapat menjalankan tugas itu maka Kota Blitar harus terus berbenah, terus membuat Kota Blitar yang kondusif dan menarik untuk tempat tinggal, kunjungan wisata dan tempat investasi. Sehingga Kota Blitar tetap menjadi kutub pusat pertumbuhan di Blitar dengan menjadi pusat transaksi ekonomi dengan diperkuat pelayanan jasa, pelayanan akomodasi dan makan minum di wilayah Blitar.

6. Ancaman kemiskinan dan kawasan kumuh

Ancaman kemiskinan dan kawasan kumuh menjadi isu strategis yang membutuhkan perhatian khusus di Kota Blitar pada tahun 2045. Meskipun karakteristik wilayah pembangunan relatif seragam, perluasan ancaman kemiskinan dan kawasan kumuh perlu ditangani dengan kebijakan khusus untuk mencegah dampak yang meluas. Fokus utama kebijakan ini melibatkan penanggulangan masalah-masalah minor kewilayahan yang dapat berkembang menjadi masalah mayor, meliputi kawasan kumuh, kantong kemiskinan, serta masalah kebutuhan air dan sanitasi yang aman.

Daerah kumuh seringkali menjadi tempat berkembangnya masalah sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, perlu adanya strategi rehabilitasi dan revitalisasi kawasan kumuh yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat. Pembangunan infrastruktur fisik dan sosial, seperti perumahan layak huni, fasilitas pendidikan, dan pusat kesehatan, dapat membantu meningkatkan kualitas hidup penduduk kawasan kumuh.

Kantong kemiskinan juga memerlukan perhatian khusus dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Kota Blitar. Pemberdayaan ekonomi lokal, pelatihan keterampilan, dan akses yang lebih baik terhadap pekerjaan dapat menjadi langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan penduduk di kantong kemiskinan.

Keterpaduan antar pihak mulai dari Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menangani kemiskinan adalah faktor paling krusial dalam pengurangan kemiskinan. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi yang berbasis pada data yang sama adalah faktor utama penentu keberhasilannya. Data yang dibutuhkan adalah data *By Name By Address By Case* yaitu data yang memuat identitas individu dan keluarga miskin mulai dari alamat, umur, status pekerjaan, status dan kondisi tempat tinggal serta keterangan-keterangan lain yang menjadi indikator seseorang atau keluarga ditetapkan sebagai miskin. Berdasarkan data itu tingkatan pemerintah dan masyarakat dapat berbagi peran dalam akses pengurangan kemiskinan.

7. Tuntutan pelayanan PEMDA secara digital terintegrasi

Isu strategis Kota Blitar pada tahun 2045 mencakup tuntutan pelayanan Pemerintah Daerah (PEMDA) secara digital terintegrasi dalam konteks tata kelola yang efisien dan modern. Dalam hal ini, tata kelola pelayanan pemerintah dihadapkan pada kebutuhan untuk mengadopsi teknologi secara holistik, memastikan interoperabilitas sistem, dan menciptakan integrasi data yang menyeluruh.

Perubahan ini mencerminkan transformasi menuju pemerintahan yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital. Tuntutan akan pelayanan pemerintah daerah yang terintegrasi mencakup berbagai sektor,

mulai dari pelayanan publik hingga proses perizinan dan regulasi. Integrasi data yang baik akan memungkinkan berbagai unit kementerian dan unit perangkat daerah provinsi yang ada di Kota Blitar saling berkolaborasi, meminimalkan redundansi, dan meningkatkan koordinasi dengan pelayanan dan penyediaan data Pemerintah Kota Blitar.

Interoperabilitas teknologi menjadi kunci dalam menjawab isu ini. Hal ini memerlukan penyesuaian berbagai sistem dan platform yang digunakan oleh berbagai lembaga pemerintah. Standarisasi protokol dan format data perlu dirancang sedemikian rupa agar informasi dapat diakses dan dipertukarkan dengan mudah antar berbagai bagian pemerintah sehingga menciptakan ekosistem digital yang terpadu.

Selain itu, transparansi dan keamanan data juga menjadi faktor penting dalam penerapan sistem terintegrasi. Dalam pembuatan sistem perlu dipastikan bahwa data yang disimpan dan dipertukarkan dijamin keamanannya, sambil tetap memberikan akses yang tepat kepada pihak-pihak yang berwenang. Teknologi keamanan data terkini dapat menjadi solusi untuk memperkuat keamanan dan integritas data.

8. Pembangunan karakter nasional dari Bumi Bung Karno

Kota Blitar memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia. Kota ini merupakan tempat kelahiran dan perjuangan Bung Karno, presiden pertama Republik Indonesia. Oleh karena itu, Kota Blitar dikenal sebagai Bumi Bung Karno dan Bumi Perjuangan Bangsa.

Namun, kebanggaan sebagai Bumi Bung Karno dan Bumi Perjuangan Bangsa dapat memudar jika masyarakat tidak memiliki karakter nasionalisme dan patriotisme yang kuat. Nasionalisme adalah rasa cinta tanah air dan bangsa, sedangkan patriotisme adalah sikap rela berkorban demi tanah air dan bangsa.

Pentingnya nasionalisme dan patriotisme tidak hanya sebagai identitas kota, tetapi juga sebagai fondasi untuk membangun persatuan dan semangat kebangsaan di tengah keragaman masyarakat. Untuk itu, Pemerintah Kota Blitar perlu menyuarakan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme dan memastikan bahwa pendidikan dan budaya lokal mencerminkan dan mendorong rasa cinta tanah air.

Mengintegrasikan sejarah perjuangan nasional, khususnya peran Bung Karno dalam kemerdekaan Indonesia, ke dalam kurikulum pendidikan dapat menjadi langkah strategis. Program-program pendidikan dan kegiatan budaya yang memperkuat identitas nasional dapat membentuk karakter masyarakat Kota Blitar agar tetap terhubung dengan nilai-nilai perjuangan bangsa.

Selain itu, Pemerintah Kota Blitar perlu berperan aktif dalam mengorganisir acara-acara dan kegiatan yang memperingati peristiwa sejarah penting, merayakan kebudayaan lokal, dan memupuk semangat persatuan. Partisipasi

masyarakat dalam upacara-upacara tersebut dapat menjadi sarana untuk memperkuat rasa nasionalisme dan patriotisme.

Nasionalisme dan patriotism tidak hanya penting untuk internal Kota Blitar, akan tetapi juga sangat penting untuk Indonesia sebagai *Nation and Character Building* atau Pembangunan Karakter Bangsa. Yaitu kepribadian yang menghormati bangsanya sendiri dan mempunyai kepercayaan dan kehormatan atas bangsanya sendiri, sehingga memberikan kepercayaan diri dan bangsa untuk maju dan menjadi terdepan di dunia internasional. Dengan semangat Bung Karno dan semangat Sudancho Supriadi dengan pasukan Peta Blitar, Kota Blitar dapat menjadi barometer sekaligus menjadi tempat tujuan penguatan nilai nilai patriotisme dan nasionalisme sebagai dasar-dasar pembangunan karakter bangsa.

9. Ancaman menurunnya kualitas lingkungan hidup, perubahan iklim dan bencana alam

Ancaman menurunnya kualitas lingkungan hidup, perubahan iklim dan bencana alam menjadi isu strategis yang memerlukan perhatian serius di Kota Blitar pada tahun 2045. Dampak perubahan lingkungan dan perubahan iklim telah dirasakan secara signifikan, seperti kondisi cuaca yang tidak lagi dapat diprediksi dengan pasti, kekeringan yang mulai melanda wilayah tertentu, dan peningkatan suhu udara yang dapat mengakibatkan dampak serius pada ekosistem dan kehidupan manusia.

Kondisi musim yang tidak menentu dan kekeringan merupakan ancaman serius terhadap sektor pertanian dan sumber daya air di Kota Blitar. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan strategi mitigasi dan adaptasi yang efektif. Strategi mitigasi yang dapat diterapkan antara lain penerapan praktik pertanian yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya air yang lebih efisien, dan diversifikasi mata pencaharian masyarakat untuk mengurangi risiko ekonomi yang terkait dengan perubahan iklim.

Perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan global berawal dari penggunaan energi yang berlebihan dan berkurangnya produksi oksigen. Untuk dapat berperan mengurangi peningkatan suhu global, maka kebijakan penggunaan energi baru terbarukan menjadi sangat penting. Selain itu kebijakan kebijakan yang terkait memelihara ruang terbuka hijau, peningkatan daya tampung tanah untuk menyimpan air, pemanfaatan lahan lahan pekarangan untuk tanaman produktif dan konsumtif, pembangunan gedung dengan system *green building* serta kebijakan kebijakan lain yang pro terhadap lingkungan harus menjadi budaya baru yang dilaksanakan secara konsisten.

Selain itu, ancaman bencana alam di Kota Blitar juga harus mendapatkan perhatian serius. Potensi bencana alam dalam bentuk Letusan Gunung Kelud, banjir lahar hujan, gempa bumi, angin puting beliung dimungkinkan dapat terjadi. Kebijakan antisipasi apabila bencana alam terjadi harus selalu dilakukan.

Penyiapan jalur jalur evakuasi, kesiapan Masyarakat apabila terjadi bencana, sampai dengan kesiapan pemerintah Kota Blitar menghadapi bencana dan pemulihan pasca bencana harus menjadi perhatian serius secara terus menerus.

10. Pentingnya pembangunan daerah yang berkelanjutan

Untuk mencapai keberlanjutan pembangunan jangka panjang, Pemerintah Kota Blitar harus berfokus pada pelaksanaan tahapan jangka menengah yang matang dan terencana. Kunci utama dalam mencapai keberlanjutan ini adalah memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang diambil tidak hanya memberikan dampak positif dalam jangka pendek, tetapi juga menjadi modal berharga untuk tahap-tahap berikutnya. Yang dimaksud keberlanjutan pembangunan daerah adalah terlaksananya pembangunan daerah yang berkesinambungan antar tahapan dalam kurun waktu perencanaan 2025 – 2045. Keberlanjutan juga harus dapat diwujudkan dalam pembangunan semua aspek, baik sosial, ekonomi maupun lingkungan hidup.

Dalam konteks sosial, pembangunan harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat, memastikan inklusivitas, dan menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan. Pendidikan dan kesehatan masyarakat juga perlu menjadi perhatian utama agar sumber daya manusia Kota Blitar dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan perlu ditingkatkan untuk menciptakan kesadaran kolektif tentang arah pembangunan yang diinginkan.

Dari segi ekonomi, pembangunan harus mendorong diversifikasi ekonomi dan meningkatkan daya saing kota. Investasi dalam sektor-sektor yang berkelanjutan, seperti teknologi hijau, pertanian berkelanjutan, dan pariwisata berkelanjutan, dapat menjadi pilihan strategis. Keterlibatan sektor swasta dan pengembangan kewirausahaan lokal juga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Pentingnya keberlanjutan lingkungan tidak boleh diabaikan. Perencanaan pembangunan harus memperhitungkan dampak terhadap lingkungan, mengurangi jejak karbon, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Konservasi sumber daya alam dan implementasi praktik ramah lingkungan harus menjadi bagian integral dari setiap kebijakan pembangunan.

11. Pelayanan sanitasi, air minum yang aman

Kebijakan Nasional yang menetapkan pelayanan sanitasi aman dan air minum aman menuntut perubahan target dalam Pembangunan daerah dari layak menjadi aman. Sanitasi aman dan air minum aman memang sudah seharusnya menjadi standart pelayanan minimal, sebab faktor ketersediaan sanitasi dan air minum yang aman sangat berpengaruh pada Kesehatan dasar Masyarakat.

Kondisi sanitasi aman secara sederhana adalah untuk tempat penampungan Tinja atau Septik Tanknya terdaftar dalam Layanan Lumpur Tinja Terdaftar (LLTT) dan secara berkala dilakukan penyedotan atas lumpur tinjanya. Sedangkan air bersih aman standart paling sederhana adalah air minum yang di dapat dari jaringan perpipaan, artinya air minum yang diperoleh dari PDAM atau Saluran perpipaan Air Minum yang dikelola oleh kelompok Masyarakat. Untuk itu harus ada kebijakan untuk memperkuat Upaya pelayanan sanitasi aman dan air minum yang aman.

Kondisi yang agak sulit dan harus segera ditangani adalah pembuang air limbah rumah tangga baik dari dapur maupun kamar mandi yang dibuang ke drainase penampung air hujan. Untuk ini perlu ada kebijakan *extra ordinary* yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mengolah limbah ini dengan baik dengan basis lingkungan semacam septik komunal untuk air limbah rumah tangga (*Grey Water*).

Pemerintah Kota Blitar harus secara konsisten dan berkesinambungan melakukan pemicuan melalui kampanye dan sosialisasi tentang penyediaan air minum dan sanitasi yang aman. Upaya pelayanan penyediaan air perpipaan dan layanan lumpur tinja terjadwal harus dilakukan secara terus menerus sampai pengelolaan air minum dan sanitasi aman di Kota Blitar terwujud secara menyeluruh.

12. Pelayanan persampahan dan pengurangan sampah dari hulu

Pelayanan sampah oleh Pemerintah Kota Blitar dengan model saat ini hanya akan bertahan maksimal 4 tahun yang akan datang jika tidak ada penambahan Cell Penampungan sampah. Kondisi itu dapat diatasi jika dilakukan pengolahan sampah dengan pemilahan mulai dari hulu yaitu rumah tangga atau usaha penghasil sampah. Kebijakan penambahan Cell di TPA sifatnya hanya seperti Bom Waktu, yaitu mengulur waktu untuk menjadi masalah besar lagi. Kebijakan penambahan Cell di TPA sulit dilakukan karena lahan yang tersedia di TPA tidak ada, artinya jika kebijakan penambahan Cell yang dipilih maka harus membuka TPA baru.

Kebijakan pengaturan pengolahan sampah mulai dari hulu perlu dilakukan segera untuk mengurangi timbulan sampah yang terbuang ke TPA. Kebijakan itu mengatur sampah yang di produksi Rumah Tangga dan tempat usaha yang dibuang secara terpisah antara sampah organik dan sampah anorganik. Untuk efektifitas pelaksanaan Pemerintah Kota Blitar dapat mengoptimalkan tugas pengirit sampah dan kelompok-kelompok Bank Sampah.

3.2.6. Keterkaitan Obyek Strategis dengan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

1. Prasarana dan Sarana Umum Kota Blitar : Membangun Masa Depan Berkelanjutan

Sebagai langkah progresif menuju cita-cita pembangunan berkelanjutan Kota Blitar 2025-2045, fokus terhadap keberlanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*) menjadi imperatif. Salah satu komponen kunci yang mendukung pencapaian tujuan tersebut adalah pengembangan prasarana dan sarana umum yang ramah dan berkesinambungan.

SDG 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan



Prasana dan Sarana Umum memainkan peran strategis dalam mendukung tujuan kota dan permukiman berkelanjutan (SDG 11). Melalui perencanaan dan pengembangan taman bermain yang berkelanjutan, kita menciptakan ruang terbuka yang ramah lingkungan, mengurangi kepadatan permukiman, dan meningkatkan kualitas hidup warga kota.

SDG 3: Kesehatan dan Kesejahteraan

Pentingnya Prasana dan Sarana Umum juga terwujud dalam dampak positifnya terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat (SDG 3). Dengan menyediakan Prasana dan Sarana Umum yang aman dan nyaman, kita mendorong gaya hidup aktif dan kesehatan masyarakat, serta mempromosikan interaksi sosial yang mendukung aspek kesejahteraan mental.

SDG 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Dari segi ekonomi (SDG 8), investasi dalam pengembangan Prasana dan Sarana Umum menciptakan peluang pekerjaan baru, terutama di sektor desain, konstruksi, dan pemeliharaan. Inisiatif ini membuka pintu bagi inklusi ekonomi, memberikan manfaat nyata bagi warga kota.

SDG 5: Kesetaraan Gender

Tidak kalah penting, Prasana dan Sarana Umum berperan dalam mendorong kesetaraan gender (SDG 5). Dengan mendesain taman bermain yang inklusif, kita menciptakan lingkungan yang ramah gender, memberikan kesempatan yang setara bagi anak perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi dan berkembang.

2. Creative Hub Kota Blitar: Menyulam Inovasi untuk Masa Depan yang Berkelanjutan



Sebagai pilar utama dalam merancang masa depan Kota Blitar yang berkelanjutan, konsep Creative Hub atau pusat kreatif muncul sebagai inovasi strategis yang tidak hanya memajukan sektor seni dan kreativitas, tetapi juga mendukung pencapaian Sustainable Development

Goals (SDGs).

SDG 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Creative Hub menjadi pusat kegiatan kreatif yang mendukung pertumbuhan ekonomi (SDG 8) dengan memberdayakan para seniman, pelaku kreatif, dan pekerja di sektor kreatif. Melalui fasilitas ini, Kota Blitar dapat menjadi motor inovasi, menciptakan lapangan kerja baru, dan memberikan dukungan bagi pengembangan industri kreatif setempat.

SDG 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur

Selaras dengan SDG 9, Creative Hub menciptakan ekosistem inovasi yang merangsang pertumbuhan industri dan teknologi. Pusat ini menjadi tempat kolaborasi antar berbagai sektor, memfasilitasi pertukaran ide, pengetahuan, dan teknologi, yang pada gilirannya, mempercepat kemajuan industri dan infrastruktur kota.

SDG 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan



Pentingnya Creative Hub juga terlihat dalam kontribusinya terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan untuk kota dan permukiman (SDG 11). Dengan menyediakan ruang kerja kreatif dan atraktif, kota ini menjadi lebih menarik bagi talenta dan investasi,

menciptakan komunitas yang berinovasi dan berkelanjutan.

Sebagai bagian terintegral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2025-2045, penciptaan Creative Hub bukan hanya tentang memajukan seni dan kreativitas, melainkan juga sebagai investasi cerdas dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Creative Hub membuka peluang baru, mengeksplorasi potensi yang belum tergali, dan membawa Kota Blitar ke panggung global sebagai kota yang dinamis, inovatif, dan berdaya saing.

3. **Museum Kota Blitar: Merajut Sejarah, Membangun Masa Depan**

Museum merupakan salah satu sarana penting dalam pembangunan suatu bangsa. Museum berperan sebagai penjaga, pelestari, dan penyalur nilai-nilai budaya dan sejarah. Di dalam museum, tersimpan berbagai koleksi benda bersejarah yang dapat menjadi sumber pengetahuan dan pembelajaran bagi masyarakat.



Kota Blitar memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Kota Blitar yang dikenal dengan Bumi Bung Karno merupakan kota dimana disemayamkannya Sang Proklamator Indonesia Ir. Sukarno atau lebih tenar dengan sebutan Bung Karno.

Selain itu jejak jejak perjuangan terukir jelas pada Asrama Daidan PETA Blitar. Bahwa Sang Merah Putih telah berkibar pada tanggal 14 Pebrurari 1945 atau 6 bulan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, sebagai salah satu bukti perlawanan Daidan PETA Blitar yang diinisiasi oleh Soedancho Soepriadi. Sejarah panjang dan kaya tersebut menjadi modal penting bagi pembangunan Kota Blitar di masa depan.

Sebagai bagian dari upaya membangun masa depan Kota Blitar yang berkelanjutan, Museum Kota Blitar muncul sebagai pilar penting yang tidak hanya menyimpan warisan sejarah, tetapi juga berkontribusi besar terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

SDG 4: Pendidikan Berkualitas

Museum Kota Blitar berperan krusial dalam mewujudkan tujuan pendidikan berkualitas (SDG 4) dengan menjadi pusat pembelajaran sejarah dan budaya bagi masyarakat. Melalui pameran interaktif dan program edukasi, museum menjadi sumber pengetahuan yang memperkaya kehidupan warga, mendorong pemahaman akan sejarah lokal, dan membangun kesadaran akan warisan budaya.

SDG 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan

Dalam konteks pembangunan kota yang berkelanjutan (SDG 11), Museum Kota Blitar tidak hanya menjadi penjaga sejarah, tetapi juga pusat kegiatan budaya yang dapat meningkatkan daya tarik dan identitas kota. Dengan merawat dan mempromosikan aspek sejarah, museum menciptakan

keterhubungan antara masa lalu, kini, dan masa depan, membangun fondasi yang kokoh bagi perkembangan kota yang berkelanjutan.

SDG 16: Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Kuat

Keberadaan Museum Kota Blitar juga mendukung terwujudnya perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat (SDG 16). Dengan menjadi tempat refleksi dan dialog, museum menciptakan pemahaman bersama tentang sejarah dan identitas, yang pada gilirannya memperkuat integrasi sosial dan kedamaian dalam masyarakat.

Sebagai salah satu unsur utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2025-2045, Museum di Kota Blitar merupakan investasi berkelanjutan dalam pembangunan intelektual dan budaya kota. Dengan merajut sejarah, museum ini bukan hanya menjadi penjaga warisan, melainkan juga motor penggerak pembangunan masa depan Kota Blitar yang berlandaskan nilai-nilai patriotisme, nasionalisme yang didasari semangat kearifan lokal secara berkelanjutan.

4. Energi untuk Masa Depan: Menggiring Kota Blitar ke Jalur Berkelanjutan



Penerapan kebijakan pengembangan penggunaan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan merupakan langkah strategis dalam mewujudkan Kota Blitar sebagai kota yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Hal ini dikarenakan penggunaan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi lingkungan, ekonomi, dan sosial.

SDG 7: Energi Terjangkau dan Bersih

Pentingnya transisi menuju energi yang lebih efisien dan bersih diwujudkan melalui SDG 7, yang menekankan pada akses universal terhadap energi terjangkau, aman, berkelanjutan, dan modern. Dalam konteks ini, Kota Blitar perlu berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi di seluruh sektor, mulai dari rumah tangga hingga industri.

SDG 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur

Melalui pengembangan infrastruktur yang inovatif (SDG 9), Kota Blitar memperkuat fondasi untuk adopsi teknologi terkini dalam pengelolaan energi. Implementasi sistem energi terbarukan dan proyek smart city yang terintegrasi menjadi langkah strategis dalam memastikan penggunaan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan.

SDG 13: Mitigasi Perubahan Iklim

Selain itu, upaya pengurangan emisi karbon dan mitigasi dampak perubahan iklim menjadi tujuan utama dalam mencapai SDG 13. Dengan memprioritaskan sumber energi bersih dan ramah lingkungan, Kota Blitar berkontribusi pada perjuangan global untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan merespons tantangan perubahan iklim.

5. Green and Smart Inovation: Merintis Masa Depan Berkelanjutan Kota Blitar

Dalam perjalanan menuju masa depan yang berkelanjutan, Kota Blitar memandang Inovasi Hijau dan Cerdas sebagai katalisator utama dalam mewujudkan visi pembangunan yang berdaya saing, inklusif, dan ramah lingkungan. Konsep ini akan menjadi landasan utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2025-2045.

SDG 7: Energi Terjangkau dan Bersih

Melalui Inovasi Hijau, Kota Blitar perlu berkomitmen untuk mencapai SDG 7 dengan meningkatkan akses dan pemanfaatan



energi terjangkau dan bersih. Penggunaan sumber energi terbarukan, seperti tenaga surya dan e-mobilitas, menjadi langkah strategis dalam mengurangi jejak karbon dan mendorong transisi menuju sistem energi yang berkelanjutan.

SDG 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur

Inovasi Cerdas, seiring dengan SDG 9, memainkan peran utama dalam menghubungkan industri, teknologi, dan infrastruktur. Pemerintah Kota Blitar perlu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menciptakan lingkungan kota yang pintar, dengan solusi cerdas seperti manajemen transportasi, pengelolaan limbah, dan penerapan IoT (Internet of Things) untuk meningkatkan efisiensi.

SDG 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan

Keterkaitan antara inovasi hijau dan cerdas dengan pembangunan kota dan permukiman berkelanjutan (SDG 11) sangat nyata. Dengan infrastruktur cerdas, Pemerintah Kota Blitar akan menciptakan ruang kota yang efisien, aman, dan berkelanjutan. Penggunaan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup warga, serta ketersediaan ruang terbuka hijau, menjadikan kota ini sebagai tempat tinggal yang nyaman dan ramah lingkungan.

6. Pedestrian dan Jalur Sepeda: Solusi untuk Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan

Pembangunan Kota Blitar di masa depan harus berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Hal ini berarti pembangunan yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Salah satu aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan adalah aspek transportasi.



Pedestrian dan jalur sepeda merupakan moda transportasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Penggunaan pedestrian dan jalur sepeda dapat mengurangi emisi gas rumah kaca, polusi udara, dan kemacetan. Selain itu, pedestrian dan jalur sepeda juga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti meningkatkan kesehatan, mengurangi stres, dan meningkatkan rasa kebersamaan.

Pembangunan pedestrian dan jalur sepeda di Kota Blitar dapat mendukung tercapainya berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu:

SDG 3: Kesehatan dan Kesejahteraan

Pedestrian dan jalur sepeda mendukung SDG 3 dengan menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memberikan akses mudah ke jalur sepeda dan area pejalan kaki yang aman, akan merangsang aktivitas fisik, mengurangi polusi udara, dan menciptakan ruang terbuka untuk kegiatan olahraga dan rekreasi.

SDG 11: Kota dan Pemukiman yang Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan

Pedestrian dan jalur sepeda dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat, terutama bagi kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas dan lansia. Selain itu, pedestrian dan jalur sepeda juga dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat.

SDG 13: Tindakan Iklim yang Mendesak

Pedestrian dan jalur sepeda dapat mengurangi emisi gas rumah kaca, yang merupakan salah satu penyebab perubahan iklim.

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

4.1. Visi dan Sasaran Visi

Visi pembangunan pada adalah cita-cita yang ingin diwujudkan bersama oleh seluruh entitas pelaku pembangunan. Demikian pula Visi Pembangunan Daerah Kota Blitar adalah cita-cita atau harapan yang akan diwujudkan dari pembangunan daerah Kota Blitar yang dilakukan oleh seluruh entitas Kota Blitar mulai dari masyarakat dunia usaha maupun pemerintahan daerahnya. Harapan utama dari hasil pembangunan daerah adalah peningkatan kesejahteraan, sejahtera secara ekonomi, sosial dan lingkungannya.

Sejahtera secara ekonomi diharapkan adanya pertumbuhan ekonomi yang positif sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang disertai dengan rendahnya tingkat ketimpangan pendapatan. Harapan dari kesejahteraan secara sosial yang terwujud adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, yaitu peningkatan taraf pendidikan, peningkatan tingkat kesehatan dan peningkatan perlindungan dan jaminan sosial masyarakatnya. Terhadap kesejahteraan lingkungannya diharapkan pembangunan Kota Blitar mampu mewujudkan lingkungan yang terpelihara dengan baik diantara gencarnya pembangunan infrastruktur pendukung pencapaian kesejahteraan ekonomi dan sosial.

Sebagai bagian dari sistem pembangunan nasional, cita - cita mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah bagian dari cita - cita provinsi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cita - cita pembangunan Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Keberhasilan pembangunan daerah Kota Blitar mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya pasti akan berkontribusi positif pada pencapaian tujuan provinsi dan NKRI.

Berdasarkan hasil penjaringan aspirasi, proses politik, penyelarasan dengan Visi RPJPN dan Visi RPJPD Provinsi Jawa Timur, maka cita cita Pembangunan Daerah Kota Blitar tahun 2025 -2045 ditetapkan sebagai berikut:

“KOTA CERDAS, INKLUSIF, MAJU DAN BERKELANJUTAN”

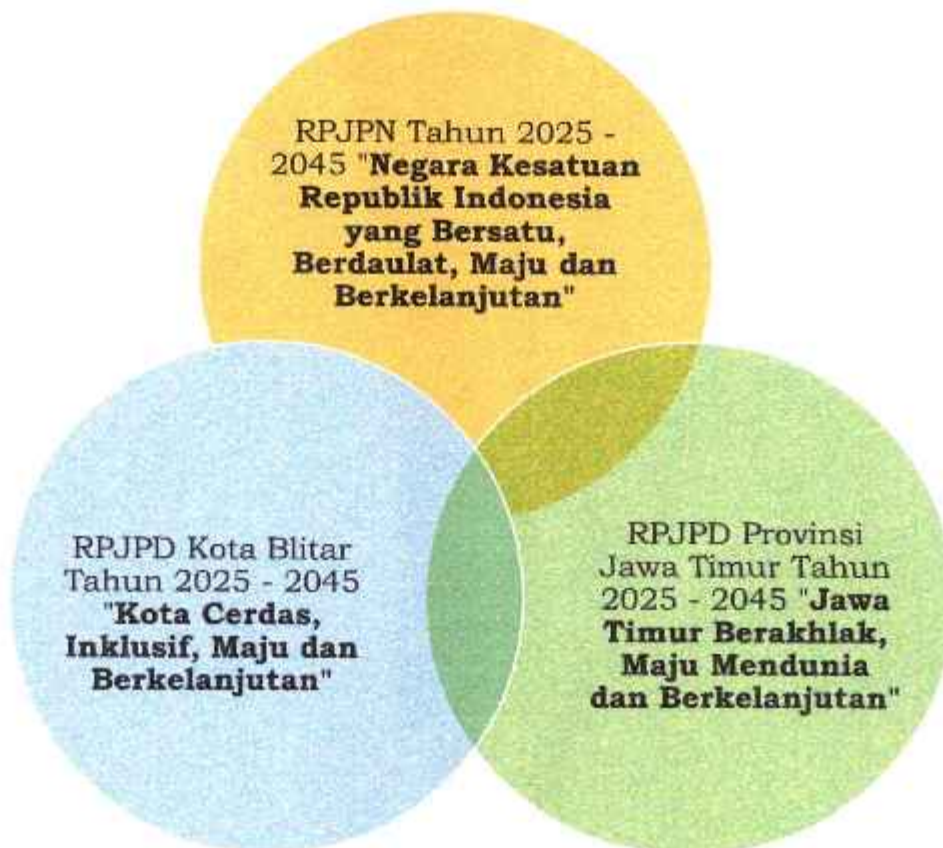
“**Cerdas**”, dimaksudkan Kota Blitar menjadi Kota Cerdas yakni cerdas sosial, cerdas ekonomi, cerdas pemerintah daerah, cerdas infrastruktur dan cerdas lingkungan dalam bentuk transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola yang didukung dengan ketahanan lingkungan.

“**Inklusif**”, yaitu pembangunan Kota Blitar dibangun atas dasar kesetaraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Kesetaraan dan keadilan atas semua sektor pembangunan pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar, pelayanan umum dan juga sektor ekonomi yang meliputi kesempatan berusaha dan kesempatan mendapatkan penghasilan.

“**Maju**”, yaitu selalu bergerak terdepan dalam setiap perkembangan, meraih kondisi yang selalu lebih baik dari waktu ke waktu dengan pandangan jauh ke depan.

“Berkelanjutan”, yaitu baik dari sisi manajemen pemerintahan maupun sisi pengelolaan ruang. Dari sisi manajemen pemerintahan berkelanjutan dimaksudkan adanya keberlanjutan manajemen pemerintahan daerah dalam 4 tahapan suksesi, mengingat RPJPD ini meliputi 4 tahapan perodesasi. Sedangkan dari sisi pengelolaan ruang adalah pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup. Pembangunan yang dilakukan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPD) Tahun 2025-2045, dan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), perumusan Visi RPJPD harus diselaraskan dengan Visi RPJP Nasional. Keselarasan Visi RPJPD Kota Blitar Tahun 2025 – 2045 dengan Visi RPJP Nasional dan Visi RPJPD Provinsi Jawa Timur adalah sebagaimana pada gambar berikut :



Gambar 4.1

Keterkaitan Visi RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Timur, dan RPJPD Kota Blitar Tahun 2025 – 2045

Keterkaitan antara Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jawa Timur, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar membentuk pola pembangunan bertingkat mulai dari Tingkat Kota, Provinsi dan Pusat. Sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional, salah satu pendekatan perencanaan adalah atas bawah dan bawah atas. Dalam hubungan atas bawah RPJPN dan RPJPD Provinsi harus diacu oleh RPJPD Kota Blitar. Pada pendekatan bawah atas, RPJPD Kota Blitar menjadi bagian tak terpisahkan dari pencapaian RPJPD Provinsi dan RPJPN dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Visi RPJPN, RPJPD Provinsi dan RPJPD Kota Blitar terhubung pada Maju dan Berkelanjutan. Secara bertingkat menetapkan Visi Maju dan Berkelanjutan dengan harapan semua daerah maju maka Indonesia akan maju dan semua daerah melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan maka Indonesia akan terbangun secara berkelanjutan. Sebaliknya Indonesia maju di dunia internasional maka semua daerah di Indonesia akan ikut terbawa maju sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kota Blitar, ditetapkan empat sasaran dengan lima indikator tercapainya visi Kota Blitar 2045 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Sasaran Visi Kota Blitar 2045

VISI	SASARAN	INDIKATOR	Baseline 2025	Target 2045
Kota Cerdas, Inklusif, Maju Dan Berkelanjutan	Peningkatan pendapatan per kapita	PDRB per kapita (Rp Juta)	63,13-65,22	145-147
		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)	5,18 – 5,80	5,89 – 7,41
	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Tingkat kemiskinan (%)	5,70 - 4,45	0,32 – 0,15
		Rasio Gini (indeks)	0,37 – 0,36	0,25-0,24
	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	80,79 – 80,84	84-85
	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67,02 – 67,05	68,50 - 68,59

4.2. Misi Daerah

Agar tingkat keberhasilan Visi Pembangunan Kota Blitar dapat terukur maka visi dioperasionalkan dalam misi dan arah kebijakan 4 (empat) tahap pembangunan 5 (lima) tahunan atau pembangunan

jangka menengah daerah. Misi pembangunan jangka panjang ditetapkan dalam 5 misi sebagai berikut:

1. **Membangun SDM Kota Blitar yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing (Transformasi Sosial)**, dengan mewujudkan masyarakat yang sehat, berpendidikan, serta memiliki kompetensi sehingga mempunyai daya saing di dunia kerja didampingi kebijakan perlindungan sosial yang proporsional dan berkeadilan.
2. **Mengembangkan Ekosistem Ekonomi dan Inovasi Kota Blitar Secara Berkelanjutan (Transformasi Ekonomi)**, dengan membangun ekosistem ekonomi yang bertransformasi dari konvensional menuju digital didukung oleh riset dan inovasi secara berkelanjutan.
3. **Digitalisasi Pelayanan Publik Kota Blitar (Transformasi Tata Kelola)**, melalui penyelenggaraan pelayanan pemerintah pada semua bidang dengan berbasis digital yang mengintegrasikan semua bidang pelayanan dengan pola interoperabilitas sehingga mewujudkan pelayanan pemerintahan yang prima cepat, inklusif dan berkeadilan.
4. **Mewujudkan Kota Blitar yang Nyaman, Damai, Berketahanan Sosial dan Budaya Didasari Kekuatan Religius serta Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme**, dengan pengembangan dan peningkatan tertib sosial dalam semua sektor kehidupan masyarakat dan pengembangan demokratisasi yang dinamis didasari nasionalisme, patriotisme serta kerukunan beragama masyarakat Kota Blitar mewujudkan Kota Blitar yang nyaman, damai disertai berketahanan sosial dan budaya.
5. **Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar Berkelanjutan, Berwawasan Lingkungan dan Berketahanan Ekologi**, dengan menciptakan kekuatan beradaptasi secara terus menerus melalui pembangunan berkelanjutan mewujudkan Kota Blitar peduli terhadap lingkungan dan berketahanan menghadapi bencana ekologi.

Hubungan dan keselarasan misi RPJPD Kota Blitar Tahun 2025 – 2045 dengan RPJPN 2025 – 2045 dan Misi RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025 – 2045, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2
Penyelarasan Misi RPJP Daerah Kota Blitar Tahun 2025 – 2045 dengan RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2045

No	RPJPN		RPJPD Provinsi Jawa Timur	RPJPD Kota Blitar
	Kelompok Agenda / Misi	Agenda / Misi	Agenda / Misi	Misi
1	Transformasi Indonesia	Transformasi Sosial	Mewujudkan Transformasi Sosial dalam Menunjang SDM Berkualitas	Membangun SDM Kota Blitar yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing
2		Transformasi Ekonomi	Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah	Mengembangkan Ekosistem Ekonomi dan Inovasi Kota

No	RPJPN		RPJPD Provinsi Jawa Timur	RPJPD Kota Blitar
	Kelompok Agenda / Misi	Agenda / Misi	Agenda / Misi	Misi
3			yang Berkelanjutan	Blitar Secara Berkelanjutan
		Transformasi Tata Kelola	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Pelayanan Publik Inovatif	Digitalisasi Pelayanan Publik Kota Blitar
4	Landasan Transformasi	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Mewujudkan Kota Blitar yang Nyaman, Damai, Berketahanan Sosial dan Budaya Didasari Kekuatan Religius serta Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme
5		Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Mewujudkan Kota Blitar yang Nyaman, Damai, Berketahanan Sosial dan Budaya Didasari Kekuatan Religius serta Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme
6	Kerangka Implementasi Transformasi	Pembangunan Kewilayahan yang Merata & Berkeadilan	Memantapkan Pembangunan Kewilayahan yang Mendorong Titik Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Memperkuat Pemerataan Pembangunan	Mengembangkan Ekosistem Ekonomi dan Inovasi Kota Blitar Secara Berkelanjutan
7		Sarana dan Prasarana yang Berkualitas & Ramah Lingkungan	Mewujudkan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar Berkelanjutan, Berwawasan Lingkungan dan Berketahanan Ekologi
8		Kesinambungan Pembangunan	Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan	Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar Berkelanjutan, Berwawasan Lingkungan dan Berketahanan Ekologi

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1. Arah Kebijakan

Misi pembangunan jangka panjang Kota Blitar tahun 2025 – 2045 dioperasionalisasikan dalam arah kebijakan, yang ditetapkan dalam 4 tahapan dengan periodisasi 5 tahunan. Periodisasi ditetapkan secara imperatif oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan tujuan agar terjadi harmonisasi dan sinkronisasi pembangunan nasional dengan pembangunan daerah. Periodisasi 4 tahapan ditetapkan sebagai berikut:

Tahap I (Pertama) adalah tahun 2025 – 2029

Tahap II (Kedua) adalah tahun 2030 – 2034

Tahap III (Ketiga) adalah tahun 2035 – 2039

Tahap IV (Keempat) adalah tahun 2040 – 2045

Tahap pertama (RPJMD 2025 – 2029) diarahkan untuk Penguatan Pondasi Transformasi sebagai dasar pembangunan melalui transformasi ekonomi, sosial, lingkungan, dan pemerintahan.

Tahap kedua (RPJMD 2030 - 2034) diarahkan untuk Akselerasi Transformasi. Tahap akselerasi di mana Kota Blitar akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan teknologi, mendorong inovasi, serta memperluas akses layanan kesehatan dan pendidikan.

Tahap ketiga (RPJMD 2035 - 2039) diarahkan untuk Penguatan Transformasi yang menitikberatkan pada upaya menjaga keberlanjutan lingkungan, pemerataan kesejahteraan, serta pemberdayaan masyarakat.

Tahap keempat (Periode IV RPJMD 2040 - 2045) yaitu Kota Blitar Maju, Cerdas, dan Inklusif Mendukung Indonesia Emas Tahun 2045, di mana Kota Blitar berupaya maksimal untuk berperan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, memperkuat ekonomi, meningkatkan kualitas hidup warga, dan memberdayakan seluruh lapisan masyarakat. Tahapan ini diharapkan masyarakat Kota Blitar sudah mencapai masyarakat yang cerdas dan inklusif didasari kekuatan budaya, religius dan nasionalisme.

Arah kebijakan tiap-tiap tahap 5 tahunan berdasarkan visi dan misi pembangunan disajikan dalam tabel arah kebijakan Kota Blitar dalam empat periode, sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Arah Kebijakan

ARAH KEBIJAKAN					
VISI	MISI	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
		(Penguatan Fondasi Transformasi)	(Akselerasi Transformasi)	(Penguatan Transformasi)	Kota Blitar Cerdas, Inklusif dan Berkelanjutan mendukung Indonesia Emas Tahun 2045
Kota Cerdas, Inklusif Maju Dan Berkelanjutan	Membangun SDM Kota Blitar yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing (Transformasi Sosial)	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial	Percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif	Penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan	Pendayagunaan SDM Kota Blitar yang unggul dan berkarakter
	Mengembangkan Ekosistem Ekonomi dan Inovasi Kota Blitar Secara Berkelanjutan (Transformasi Ekonomi)	Pengembangan Ekonomi inklusif serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi	<i>Economic power house</i> yang terintegrasi dengan jaringan rantai global dan domestik, serta ekspor yang kokoh	Kota dengan pendapatan tinggi
	Digitalisasi Pelayanan Publik Kota Blitar (Transformasi Tata Kelola)	Tata kelola pemerintahan yang tepat fungsi dan penyederhanaan regulasi	Kelembagaan adaptif dengan ditunjang SDM aparatur berkompeten dan berintegritas	Kelembagaan kolaboratif dalam pemenuhan pelayanan publik	Tata kelola pemerintahan yang handal dan bersih (<i>Good and Clean Governance</i>) dan pelayanan publik inovatif
	Mewujudkan Kota Blitar yang Nyaman, Damai, Berketahanan Sosial dan Budaya Didasari Kekuatan Religius serta Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme	Memperkuat ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, kelembagaan demokrasi dan penataan kebijakan pendukung stabilitas ekonomi daerah	Memantapkan keterlibatan masyarakat dalam ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, proses demokrasi dan peningkatan cakupan layanan pendukung stabilitas ekonomi daerah	Penguatan partisipasi masyarakat dalam penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam mendukung kebebasan sipil dan kesetaraan serta penguatan sinergi multi stakeholder pendukung stabilitas ekonomi daerah	Kota Blitar yang aman, nyaman dan berkeadilan sebagai perwujudan Indonesia yang berdaulat, aman, damai, dan terciptanya stabilitas ekonomi makro
	Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar Berkelanjutan, Berwawasan Lingkungan dan Berketahanan Ekologi	Penyediaan infrastruktur berkualitas dan berwawasan lingkungan hidup	Penyediaan sarana dan prasarana umum perumahan dan permukiman	Peningkatan lingkungan berketahanan ekologi	Pelayanan sanitasi dan air minum yang aman

5.2. Sasaran Pokok

Cita-cita yang akan dicapai harus diterjemahkan dalam langkah-langkah kongkrit dengan sasaran yang terarah dengan mempertimbangkan segala aspek pendukungnya. Visi adalah cita-cita dan misi adalah langkah kongkrit yang akan ditempuh dalam mewujudkan visi dalam kerangka makro. Oleh karena itu maka misi perlu lebih dipertegas dengan sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam periode tertentu.

Agar lebih fokus dalam penetapan sasaran maka dipilihlah sasaran-sasaran utama atau pokok yang akan dicapai. Pemilihan sasaran didasarkan pada potensi dan kondisi saat ini dan asumsi kondisi hasil prediksi di masa yang akan datang. Harapan kondisi yang diinginkan terwujud di akhir tahun perencanaan dan dalam periodisasi tertentu juga menjadi bahan pertimbangan penetapan sasaran pokok. Pencapaian sasaran pokok pada akhir tahun perencanaan adalah pencapaian kongkrit dari visi yang masih bersifat general.

Rumusan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Kota Blitar adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kesehatan yang merata di Kota Blitar.
2. Terwujudnya pendidikan yang merata di Kota Blitar.
3. Terwujudnya perlindungan sosial masyarakat Kota Blitar yang adaptif.
4. Terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif Kota Blitar.
5. Terwujudnya peningkatan tenaga kerja yang berkompetensi.
6. Terwujudnya perkembangan iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi Kota Blitar.
7. Terwujudnya transformasi ekonomi digital dan ekonomi hijau.
8. Terwujudnya perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
9. Terwujudnya stabilitas ekonomi daerah.
10. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif.
11. Terwujudnya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
12. Terwujudnya pelayanan publik terpadu satu data berbasis teknologi informasi.
13. Terwujudnya hukum yang berkeadilan, ketentraman dan ketertiban daerah yang mantap dan kehidupan demokrasi yang dinamis.
14. Terwujudnya kota yang religius dan berkebudayaan maju.
15. Terwujudnya lingkungan hidup kota yang berkualitas dan berkelanjutan.
16. Terwujudnya kota yang berketahanan energi, air, sanitasi dan berketahanan ekologi.
17. Terwujudnya Kota Blitar yang berketahanan bencana.

5.2.1. Arah Pembangunan

Arah pembangunan daerah memiliki peran sentral dalam menentukan langkah-langkah strategis guna mencapai target pembangunan daerah. Arah pembangunan daerah merupakan strategi yang dirancang untuk memberikan kontribusi yang positif terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam jangka panjang. Pada hakikatnya, arah pembangunan daerah harus mampu menyesuaikan diri dengan karakteristik unik dan potensi yang dimiliki oleh wilayah tertentu, sehingga kebijakan yang diimplementasikan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang berkelanjutan.

Langkah-langkah strategis yang direncanakan melalui arah pembangunan daerah bukan hanya sebatas kebijakan pembangunan daerah, tetapi juga menjadi bagian penting dari strategi nasional. Pemerintah Kota Blitar akan mengeksplorasi potensi wilayahnya dengan mendalam, memahami kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, dan merumuskan kebijakan yang mampu memberikan solusi konkret terhadap tantangan dan peluang yang dihadapi. Keberhasilan pelaksanaan arah pembangunan daerah akan mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan setempat serta sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam upaya mencapai target pembangunan daerah, arah pembangunan daerah harus mempertimbangkan aspek-aspek kunci seperti pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pembangunan sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur, dan perlindungan lingkungan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif menjadi fokus penting, dengan mengedepankan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan akses terhadap peluang bisnis. Pentingnya pembangunan sumber daya manusia juga tidak dapat diabaikan dalam perencanaan arah pembangunan daerah. Peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan tenaga kerja lokal menjadi strategi penting dalam mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi tuntutan pasar kerja yang terus berubah. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang merata dan berkesinambungan akan memberikan dasar yang kokoh untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Perlindungan lingkungan juga menjadi aspek penting dalam arah pembangunan daerah. Dalam mengambil langkah-langkah pembangunan, perlu dipertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan upaya untuk memastikan keberlanjutan ekosistem. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, pengelolaan limbah yang efektif, dan perlindungan terhadap area-area kritis untuk konservasi biodiversitas. Dengan demikian, arah pembangunan daerah bukan hanya merumuskan langkah-langkah konkret untuk pengembangan ekonomi, tetapi juga menjamin peningkatan kualitas hidup, lingkungan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Arah pembangunan daerah dapat disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan dalam lingkup daerah maupun nasional. Evaluasi yang berkala dan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan adalah langkah-langkah penting untuk memastikan kesuksesan arah pembangunan daerah. Dengan demikian, arah pembangunan daerah bukan hanya menjadi panduan bagi pemerintah daerah, tetapi juga menjadi instrumen partisipatif yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Arah Pembangunan Kota Blitar Tahun 2025-2045 disajikan dalam tabel 5.2. berikut meliputi:

Tabel 5.2
Arah Pembangunan Kota Blitar tahun 2025 – 2045

Transformasi	Arah Pembangunan
Transformasi Sosial	Meratanya kesehatan di Kota Blitar
	Meratanya pendidikan di Kota Blitar
	Perlindungan sosial masyarakat Kota Blitar yang adaptif
	Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif Kota Blitar
	Meningkatnya tenaga kerja yang berkompetensi
Transformasi Ekonomi	Berkembangnya iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi Kota Blitar
	Transformasi ekonomi digital dan ekonomi hijau
	Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
	Stabilitas ekonomi daerah
	Iklim investasi yang kondusif
Transformasi Tata Kelola	Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif
	Terwujudnya pelayanan publik terpadu satu data berbasis teknologi informasi
Nyaman, Damai, Berketahanan Sosial dan Budaya	Hukum yang berkeadilan, ketentraman dan ketertiban daerah yang mantap dan kehidupan demokrasi yang dinamis
	Kota yang religius dan berkebudayaan maju
Berkelanjutan, Berwawasan Lingkungan dan Berketahanan Ekologi	Lingkungan hidup kota yang berkualitas dan berkelanjutan
	Kota yang berketahanan energi, air, sanitasi dan berketahanan ekologi
	Kota Blitar yang berketahanan bencana

5.2.2. Arah Kebijakan Transformasi

Berdasarkan arah kebijakan maka ditetapkan arah transformasi sebagai respons terhadap rencana pembangunan

nasional yang telah ditetapkan untuk periode 2025-2045. Dalam hal ini, upaya transformasi diarahkan untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan nasional dengan kondisi nyata masyarakat, potensi daerah, serta dinamika sosial-ekonomi yang mungkin berubah sepanjang waktu. Adanya tujuan yang terukur dan terperinci memungkinkan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengevaluasi dampak kebijakan secara lebih akurat, mengukur kemajuan, dan memastikan keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

Arah kebijakan menunjukkan inisiatif transformasi yang secara spesifik disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik unik tiap daerah, dalam hal ini adalah Kota Blitar. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, penting untuk memahami bahwa setiap daerah memiliki ciri khas dan tantangan tersendiri. Oleh karena itu, arah kebijakan bertujuan untuk memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Kota Blitar dalam menyesuaikan strategi pembangunan yang lebih relevan sesuai daerahnya. Inisiatif transformasi yang bersifat kontekstual ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan, mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah, dan merangsang pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Arah kebijakan mendorong tercapainya visi daerah masing-masing. Setiap daerah memiliki aspirasi dan cita-cita unik yang mencerminkan nilai-nilai lokal dan keinginan masyarakatnya. Melalui arah kebijakan, pemerintah berkomitmen untuk mendukung realisasi visi daerah tersebut dengan memberikan dukungan optimal, baik dari segi kebijakan maupun alokasi sumber daya. Dengan cara ini, arah kebijakan menjadi instrumen penting dalam membangun sinergi antara agenda pembangunan nasional dan impian lokal, menciptakan sinar harapan bagi masyarakat daerah untuk mengambil peran aktif dalam proses pembangunan.

Dalam hal ini, implementasi arah kebijakan dapat diarahkan melalui sektor-sektor kunci yang memainkan peran sentral dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan pemberdayaan ekonomi lokal. Penguatan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi lokal menjadi fokus utama dalam rangka mendukung transformasi yang holistik. Langkah-langkah konkret seperti peningkatan akses pendidikan, pengembangan infrastruktur yang inklusif, dan pemberdayaan pelaku ekonomi lokal diharapkan dapat membawa dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam menghadapi dinamika perubahan yang tak terhindarkan, arah kebijakan perlu bersifat responsif terhadap perkembangan terkini. Pemantauan secara berkala, evaluasi kebijakan, dan perbaikan berkelanjutan harus menjadi bagian integral dari proses perencanaan dan implementasi arah kebijakan. Dengan demikian, arah kebijakan bukan hanya menjadi dokumen statis, tetapi juga instrumen yang dapat beradaptasi dengan perubahan kontekstual, mengoptimalkan hasil pembangunan, dan menjawab tantangan-tantangan baru yang mungkin muncul seiring waktu.

Gambar 5.1
Arah Kebijakan Transformasi Nasional



Arah kebijakan dalam perencanaan pembangunan nasional untuk periode 2025-2045 merupakan panduan strategis yang esensial untuk mencapai sasaran pembangunan nasional. Dengan mengintegrasikan transformasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik setiap daerah, arah kebijakan memungkinkan terciptanya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, melalui arah kebijakan yang terarah dengan baik diharapkan terbentuknya suatu visi pembangunan yang holistik, menggambarkan masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Arah kebijakan transformasi nasional terdiri dari: (1) Transformasi Sosial, (2) Transformasi Ekonomi, (3) Transformasi Tata Kelola, (4) Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia, (5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, (6) Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan, (7) Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, (8) Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan.

Sejalan dengan arah kebijakan transformasi nasional, arah kebijakan transformasi Provinsi Jawa Timur terdiri dari 6 aspek. Keenam aspek tersebut adalah: (1) Transformasi Sosial, (2) Transformasi Ekonomi, (3) Transformasi Tata Kelola, (4) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, (5) Pembangunan Kewilayahan, Penyediaan Sarana dan Prasarana Berwawasan Lingkungan, (6) Pembangunan yang Berkelanjutan.



Gambar 5. 2
Arah Kebijakan Transformasi Provinsi Jawa Timur

Sedangkan arah kebijakan transformasi Kota Blitar adalah sebagai berikut:

5.2.2.1. Arah Kebijakan Transformasi Sosial

Arah Kebijakan Transformasi Sosial Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Blitar 2025 – 2045 dijabarkan sebagai berikut:

1. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat.
2. Peningkatan pemicuan kesadaran penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.
3. Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan dan jaminan kesehatan universal dengan penguatan dan optimalisasi fasilitas layanan kesehatan.
4. Pemerataan, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan tenaga kesehatan.
5. Peningkatan pencegahan kematian ibu dan anak disertai pencegahan dan pengurangan angka anak tidak sehat.
6. Percepatan penurunan angka kesakitan, penurunan penyakit menular dan tidak menular.
7. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.

8. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan berbasis kondisi dan budaya lokal, potensi, dan keunggulan daerah.
9. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik menuju generasi berkompeten dan berdaya saing tinggi.
10. Peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.
11. Peningkatan akses pendidikan sekolah menengah dan perguruan tinggi.
12. Pemberian beasiswa untuk sekolah menengah dan perguruan tinggi berbasis keluarga miskin.
13. Penuntasan kemiskinan secara terpadu dengan perlindungan sosial terintegrasi.
14. Penguatan pengarusutamaan gender dan keluarga berkualitas
15. Pengendalian penduduk yang proporsional dan produktif.
16. Percepatan penuntasan pendataan penduduk sebagai data dasar pelayanan masyarakat yang didukung peningkatan tertib lapor dan catat mutasi / perubahan status kependudukan.
17. Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan pengurangan pengangguran terbuka dan terselubung.
18. Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja menghadapi transformasi industrialisasi.
19. Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan pemberian jaminan kesejahteraan tenaga kerja non produktif.

5.2.2.2. Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi

Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Blitar 2025 – 2045 dijabarkan sebagai berikut :

1. Pembangunan kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur, UMKM dan pariwisata.
2. Penguatan dan pengembangan inovasi dan riset daerah sebagai dasar kebijakan daerah.
3. Sertifikasi seniman dan budayawan agar mampu bersaing secara global.
4. Sertifikasi SDM pelaku/pengelola wisata dalam rangka peningkatan SDM profesional.
5. Peningkatan transformasi digitalisasi perdagangan.
6. Transformasi pasar tradisional dengan digitalisasi.
7. Optimalisasi pasar modern untuk meningkatkan pemasaran produk lokal yang mendunia.

8. Peningkatan koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.
9. Peningkatan peran UMKM pada rantai industri melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif melalui penerapan teknologi dan kemitraan usaha.
10. Penguatan serapan produk UMKM berbasis digital dan pengembangan inkubator bisnis didukung dengan peningkatan ke sumber daya produktif.
11. Optimalisasi pemasaran UMKM melalui kerjasama antar pelaku UMKM dan pelaku industri dan sumber bahan baku.
12. Standarisasi UMKM berbasis industri dan klaster pengelompokan jenis usaha berbasis kewilayahan.
13. Standarisasi dan sertifikasi produk barang dan jasa UMKM dalam rangka meningkatkan daya saing menuju persaingan global.
14. Peningkatan hasil pemasaran produk UMKM secara global dan nasional berbasis standar nasional.
15. Pengembangan kota sebagai pusat layanan kota sebagai pusat layanan regional.
16. Pengembangan pusat layanan kota, sub pusat layanan kota dan pusat layanan lingkungan yang terintegrasi dan saling melengkapi.
17. Memantapkan peran pusat layanan kota yang mampu melayani skala internal kota dan regional.
18. Peningkatan produktivitas BUMD.
19. Peningkatan citra, karakter, dan daya saing kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata dengan urban tourism.
20. Penataan dan penguatan wisata sejarah khususnya terkait PETA dan Proklamator Bung Karno yang didukung penguatan peran kampung wisata dan wisata hutan kota.
21. Penataan dan penguatan daya tarik wisata yang berbasis wisata kebangsaan dan kultural dengan urban tourism.
22. Peningkatan kerjasama wisata dengan daerah sekitar, Pelaku wisata, media dan dunia usaha.
23. Pengembangan wisata kebangsaan sebagai edukasi nasional dalam Pembangunan karakter nasional.
24. Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif.
25. Pengembangan Kota Blitar sebagai pusat pengembangan ekonomi kreatif di level regional.
26. Peningkatan pemasaran produk ekonomi kreatif pada pasar nasional dan internasional.
27. Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah sekitar, media dan dunia usaha/asosiasi usaha.

28. Penguatan promosi wisata di tingkat regional dan nasional dengan pengembangan paket wisata dan event wisata budaya.
29. Pengembangan kerjasama daerah membangun paket wisata kelas regional, nasional dan internasional.
30. Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata.
31. Penguatan pembangunan City Walk sebagai daya tarik urban tourism.
32. Pengembangan jalur wisata dan akses perpindahan poin to poin destinasi wisata regional.
33. Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah.
34. Peningkatan industri olahan dan manufaktur berdasarkan keunggulan kelurahan yang ramah lingkungan.
35. Peningkatan produktifitas industri olahan dan manufaktur dengan teknologi yang ramah lingkungan.
36. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang menerapkan prinsip-prinsip dari pembangunan Ekonomi Hijau (Green Economy).
37. Peningkatan ketahanan pangan dan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi *smart farming*.
38. Peningkatan ketahanan pangan melalui *smart farming* dan stabilitas harga terkait usaha pertanian.
39. Peningkatan implementasi teknologi *smart farming* dan *smart marketing* guna mewujudkan ketahanan pangan.
40. Penguatan stabilitas pasar melalui sinergitas pasar konvensional dan pasar modern.
41. Penguatan pasar tradisional/konvensional dengan teknologi informasi pasar dan pemasaran regional.
42. Peningkatan pelayanan investasi dan perizinan berbasis teknologi informasi didukung data data pendukung penarik investasi.
43. Peningkatan akses kemudahan investasi terkait regulasi, *human resources*, aksesibilitas dan konduktivitas daerah.

5.2.2.3. Arah Kebijakan Transformasi Tata Kelola

Arah Kebijakan Transformasi Tata Kelola Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Blitar 2025 – 2045 dijabarkan sebagai berikut :

1. Peningkatan peran stakeholder dalam pembangunan daerah.
2. Peningkatan partisipasi masyarakat, dunia pendidikan dan dunia usaha dalam semua tahapan pembangunan.

3. Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN Kota Blitar, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Blitar yang professional dan bebas korupsi.
4. Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward dan punishment termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.
5. Peningkatan profesionalitas ASN.
6. Penataan kelembagaan yang adaptif dengan kebutuhan daerah.
7. Peningkatan kemampuan keuangan dan aset daerah sebagai modal pembangunan.
8. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan pengembangan manfaat aset daerah di dukung kebijakan bank tanah.
9. Peningkatan pengendalian, evaluasi dan pengawasan pembangunan.
10. Peningkatan pelayanan publik terintegrasi berbasis teknologi informasi.
11. Peningkatan satu data pelayanan berbasis identitas penduduk.
12. Peningkatan interoperabilitas sistem pelayanan publik.
13. Peningkatan akses dan konektivitas internet pada pusat pelayanan publik, pusat layanan wilayah dan sub pusat layanan wilayah.

5.2.2.4. Arah Kebijakan Nyaman, Damai, Berketahanan Sosial dan Budaya

Arah Kebijakan Nyaman, Damai, Berketahanan Sosial dan Budaya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Blitar 2025 – 2045 dijabarkan sebagai berikut :

1. Peningkatan ketentraman dan ketertiban yang mantap didukung tertib hukum dan kehidupan demokrasi yang sehat dan dinamis.
2. Peningkatan pemajuan kebudayaan dan pengembangan kesalehan sosial.
3. Penguatan pelestarian cagar budaya dan obyek yang diduga cagar budaya sebagai icon penguat karakter kebudayaan daerah dan peningkatan penghormatan keberagaman sebagai bentuk kesalehan sosial.
4. Peningkatan keamanan wilayah.

5.2.2.5. Arah Kebijakan Berkelanjutan, Berwawasan Lingkungan dan Berketahanan Ekologi

Arah Kebijakan Berkelanjutan, Berwawasan Lingkungan dan Berketahanan Ekologi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Blitar 2025 – 2045 dijabarkan sebagai berikut :

1. Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas umum dan infrastruktur kota yang peduli lingkungan.
2. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan *circular economy* dan peningkatan pengelolaan dan layanan sampah B3.
3. Peningkatan pelayanan air minum dan sanitasi yang aman bagi masyarakat.
4. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan air minum dan sanitasi.
5. Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan.
6. Peningkatan jumlah rusunawa dan penataan kawasan kumuh.
7. Penguatan pengelolaan dan pengendalian tata ruang dan pemanfaatannya melalui evaluasi secara berkala dengan penyesuaian berdasarkan kebutuhan daerah.
8. Peningkatan dan penguatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan sebagai sumber energi.
9. Peningkatan pemanfaatan *solarcell* sebagai sumber listrik dan pengalihan kendaraan berbahan bakar padat menjadi kendaraan listrik.
10. Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Air yang berketahanan iklim dan ekologi.
11. Peningkatan pembangunan sumur resapan dari aliran air dan sumur biopori pada drainase lingkungan sebagai penangkap air hujan aliran air.
12. Peningkatan pengelolaan mata air di wilayah kota dan pengembangan jaringan irigasi secara terintegrasi.
13. Peningkatan kerjasama dengan Kabupaten Blitar khususnya wilayah utara sebagai *catcher* area penguatan mata air di wilayah kota.
14. Penguatan pengelolaan jalan kota.
15. Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal.
16. Meningkatkan pelayanan dan integrasi jalan yang mendukung tumbuh dan berkembangnya pusat layanan kota dan sub layanan kota dan wilayah di sekitarnya.
17. Peningkatan layanan mobilitas masyarakat dan konektivitas jaringan utama melalui integrasi multimoda dan penyiapan sarana prasarana integrasi antarmoda.
18. Transformasi tata kelola kelembagaan dalam sistem transportasi publik masal.

19. Peningkatan kerjasama dengan Kabupaten Blitar untuk peningkatan jalan penghubung antar daerah menuju akses jalur regional (JLS) dan nasional (jalan tol).
20. Peningkatan prasarana pendukung perkeretapiian pada ruas Kediri – Blitar – Malang.
21. Peningkatan pelayanan energi bagi keluarga miskin.
22. Peningkatan jaminan keluarga miskin memperoleh layanan energi melalui bantuan sosial.
23. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat tentang potensi bahaya gempa bumi, dan cuaca ekstrem maupun bahaya lainnya dengan mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana.
24. Pengembangan sistem mitigasi bencana dan pengembangan jalur dan penetapan kawasan rawan bencana melalui sistem zonasi kawasan rawan bencana.
25. Pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana pada kawasan rawan bencana berbasis partisipasi masyarakat.

5.2.3. Indikator Utama Pembangunan

Tabel 5.3
Indikator Utama Pembangunan Daerah

NO		SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN (IE)	IUP RPJPD KOTA BLITAR 2025-2045	BASELINE 2025	SASARAN 2045
1.1.1.	Terwujudnya kesehatan yang merata di Kota Blitar	Meratanya Kesehatan di Kota Blitar		Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	75,30 - 75,32	80,46 - 80,48
1.1.2.				Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)/(Angka)	49,03 - 49,01	7,91 - 7,89
1.1.3.				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	12,90 - 12,89	3,64 - 3,63
1.1.4.				Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	99,87 - 99,91	99,96 - 100
1.1.5.				Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	60,60 - 60,65	84 - 90
1.1.6.				Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	77,22-78,00	86,83 - 90
2.1.1.	Terwujudnya pendidikan yang merata di Kota Blitar	Meratanya pendidikan di Kota Blitar		Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	10,92 - 10,95	14,96 - 14,99
2.1.2.				Harapan lama sekolah (tahun)	14,79 - 14,81	16,76 - 16,78
2.1.3.				Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada assessment nasional untuk :		
2.1.3.1.				1. Literasi membaca	- Literasi SD : 88,7 - 90,68 - Literasi SMP : 91,84 - 93,5	- Literasi SD: 94,64 - 96,62 - Literasi SMP : 96,82 - 98,48

NO		SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN (IE)	IUP RPJPD KOTA BLITAR 2025-2045	BASELINE 2025	SASARAN 2045
2.1.3.2.				2. Numerasi	- Numerasi SD : 82,65 - 84,55	- Numerasi SD : 88,36 - 90,26
					- Numerasi SMP: 75,2 - 80,34	- Numerasi SMP: 90,62 - 95,76
2.1.4				Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)	21,58 - 21,60	26,08 - 26,10
3.1.1.		Terwujudnya perlindungan sosial masyarakat Kota Blitar yang adaptif	Perlindungan sosial masyarakat Kota Blitar yang adaptif	Tingkat Kemiskinan (%)	6,63 - 6,02	0,5 - 0,15
3.1.2.				Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	54,75 - 55,00	100
4.1.1.		Terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif Kota Blitar	Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif Kota Blitar	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (angka)	0,122 - 0,121	0,06 - 0,05
5.1.1.		Terwujudnya peningkatan tenaga kerja yang berkompetensi	Peningkatan tenaga kerja yang berkompetensi	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,83 - 4,19	2,94 - 1,86
5.1.2.				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	67,14 - 67,17	80,03 - 80,06
5.1.3.				Proporsi Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Formal	67,83 - 67,85	69,95 - 70,00
6.1.1.		Terwujudnya perkembangan iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi Kota Blitar	Berkembangnya iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi Kota Blitar	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	9,80 - 10,03	10,80 - 11,92
6.1.2.				Rasio PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum (%)	5,18 - 5,80	5,89 - 7,41
6.1.3.				Proporsi jumlah usaha mikro (%)	8,84 - 8,85	9,59 - 9,60
6.1.4				Rasio kewirausahaan daerah (%)	2,92 - 3,28	8,64 - 9
6.1.5.				Return On Asset (ROA) BUMD (%)	1,10 - 1,16	1,94 - 2

NO		SASARAN POKOK		ARAH PEMBANGUNAN (IE)		IUP RPJPD KOTA BLITAR 2025-2045		BASELINE 2025		SASARAN 2045	
7.1.1.		Terwujudnya transformasi ekonomi digital	Transformasi ekonomi digital dan ekonomi hijau	Persentase pemanfaatan digital pada sektor ekonomi (%)	10,88 - 11,5	52,28 - 55					
8.1.1.		Terwujudnya perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Ekspor Barang dan Jasa (%PDRB)	7,35 - 7,69	12,67 - 13					
8.1.2.				Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)	18,35 - 19,42	13,48 - 17,55					
9.1.1.		Terwujudnya stabilitas ekonomi daerah.	Stabilitas ekonomi daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB(%)	22,87 - 23	24,88 - 25					
9.1.2.				Tingkat Inflasi (%)	1,55 - 1,51	0,93 - 0,89					
10.1.1.		Terwujudnya iklim investasi yang kondusif.	Iklim investasi yang kondusif	Realisasi investasi (Triliun Rupiah)	0,05 - 0,055	0,07 - 0,075					
10.1.2.				Incremental Capital Output Ratio (ICOR) (angka)	3,53 - 3,50	3,28 - 3,25					
11.1.1.		Terwujudnya regulasi dan tata kelola Kota Blitar yang berintegritas dan adaptif	Regulasi dan tata kelola Kota Blitar yang berintegritas dan adaptif	Indeks Reformasi Hukum (angka)	96,86 - 96,98	97,00 - 97,30					
11.1.2.				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (angka)	4,54 - 4,57	5 - 5,03					
12.1.1.		Terwujudnya pelayanan publik terpadu satu data berbasis teknologi informasi	Pelayanan publik terpadu satu data berbasis teknologi informasi	Indeks Pelayanan Publik (angka)	3,94 - 4,05	4,38 - 4,49					
13.1.1.		Terwujudnya hukum yang berkeadilan, ketentraman dan ketertiban daerah yang mantap dan kehidupan demokrasi yang dinamis	Terwujudnya hukum yang berkeadilan, ketentraman dan ketertiban daerah yang mantap dan kehidupan demokrasi yang dinamis	Angka Partisipasi Masyarakat dalam Proses Politik (%)	85 - 86	88,05 - 89,00					
13.1.2.				Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya (%)	93,59 - 95,19	99,60 - 100					

NO		SASARAN POKOK		ARAH PEMBANGUNAN (IE)		IUP RPJPD KOTA BLITAR 2025-2045		BASELINE 2025		SASARAN 2045	
14.1.1.		Terwujudnya Kota yang religius dan berkebudayaan maju		Kota yang religius dan berkebudayaan maju		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) (angka)		84,36 - 84,88		92,60 - 93,12	
15.1.1.	Terwujudnya Lingkungan hidup Kota Blitar yang berkualitas dan berkelanjutan	Lingkungan hidup Kota Blitar yang berkualitas dan berkelanjutan				Indeks Kualitas Air (angka)		68,10 - 68,14		69,10 - 69,14	
15.1.2.						Indeks Kualitas Udara (angka)		71,72 - 71,76		73,72 - 73,76	
15.1.3.						Indeks Kualitas Lahan (angka)		39,52 - 39,55		39,59 - 39,62	
15.1.4.						Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)		0,1 - 0,5		96,00 - 96,05	
15.1.5.	Terwujudnya kota yang berketahanan energi, air, sanitasi dan berketahanan ekologi	Kota yang berketahanan energi, air, sanitasi dan berketahanan ekologi				Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)		98,04 - 98,06		95,00 - 95,05	
15.1.6.						Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)		90,05 - 91,00		100	
16.1.1.						Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)		5,48 - 5,47		0,29 - 0,28	
16.1.2.						Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)		14 - 16		100	
16.1.3.						Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)		91,00 - 91,05		100	
17.1.1.	Terwujudnya Kota Blitar yang berketahanan bencana		Kota Blitar yang berketahanan bencana			Indeks Risiko Bencana (IRB) (angka)		66,47 - 66,45		56,6 - 48,14	

Tabel 5.4
Metadata Indikator Utama Pembangunan RPJP Kota Blitar Tahun 2045

NO	NAMA INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN
1.1.1.	Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu	Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (<i>Age Specific Death Rate/ASDR</i>) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program <i>Micro Computer Program for Demographic Analysis</i> (MCPDA) atau Mortpack
1.1.2.	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)/(Angka)	Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya persampuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup	Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dan dikali 100.000. $AKI = (JKI / JLH) \times 100.000$ Keterangan: AKI : Angka kematian ibu JKI : Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas atau estimasi pada waktu tertentu JLH : Jumlah kelahiran hidup
1.1.3.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada	Cara perhitungan (1) (1) Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

NO	NAMA INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN
		<p>menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U sesuai standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1995/MENKES/SK/XII/2010.</p> <p>a. Sangat pendek: Zscore < -3,0</p> <p>b. Pendek: Zscore z -3,0 s/d Zscore < -2,0</p>	<p>$PAB(5)P\ stunting = \frac{JAB(5)P\ stunting}{JAB(5)} \times 100\%$</p> <p>Keterangan PAB(5)</p> <p>P <i>stunting</i></p> <p>: Prevalensi anak balita yang menderita pendek (<i>stunting</i>)</p> <p>JAB(5) P <i>stunting</i> : Jumlah anak balita pendek (<i>stunting</i>) pada waktu tertentu</p> <p>JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama</p> <p>Cara perhitungan (2)</p> <p>(2) Jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>$PAB(5)SP\ stunting = \frac{JAB(5)SP\ stunting}{JAB(5)} \times 100\%$</p> <p>Keterangan PAB(5)</p> <p>SP <i>stunting</i> : Prevalensi anak balita yang 79 menderita sangat pendek (<i>stunting</i>)</p> <p>JAB(5) SP <i>stunting</i> : Jumlah anak balita sangat pendek (<i>stunting</i>) pada waktu tertentu</p> <p>JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama</p> <p>Cara perhitungan (3)</p> <p>$Prevalensi\ stunting = PAB(5)P + PAB(5)SP$</p>

NO		NAMA INDIKATOR		DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN
1.1.4.	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan baik yang pembayaran dilakukan sendiri, oleh perusahaan maupun oleh pemerintah/pemerintah daerah.	Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah peserta jaminan kesehatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia dikali 100%.	$\text{Persentase cakupan kepesertaan JKN} = \frac{\text{jumlah peserta JKN}}{\text{jumlah Penduduk Kota Bharu}} \times 100\%$	
1.1.5.	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	Persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu	$\text{Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis} = \frac{\text{jumlah kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan}}{\text{jumlah perkiraan kasus tuberkulosis}} \times 100\%$		
1.1.6.	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	Persentase pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap	$\text{Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis} = \frac{\text{jumlah pasien sembuh dan menyelesaikan pengobatan}}{\text{jumlah pasien yang diobati}} \times 100\%$		
2.1.1.	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan penduduk usia di atas 15 tahun	$\text{Rata-rata Lama Sekolah } 15+ = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} x_i$ Keterangan: P15+= Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas xi= Lama sekolah penduduk ke-i		
2.1.2.	Harapan lama sekolah (tahun)	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang	$\text{Harapan Lama Sekolah} = FK \sum_{i=1}^n \frac{E_i}{P_i}$ Keterangan :		

NO	NAMA INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN
		pendidikan usia tersebut di masa mendatang	E_i^t = Faktor koreksi pesantren Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t P_i^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t i = Usia (7, 8, ..., n)
2.1.3.	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada assessment nasional untuk :	Jumlah satuan pendidikan yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di Kota Bitar. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Agama, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu: 1. Perlu intervensi khusus 2. Dasar 3. Cukup 4. Mahir	
2.1.3.1.	1. Literasi membaca (%)		$\%kabkot\ min. SKM = \frac{\sum_{i=1}^n kabkot\ min. SKM}{n}$
2.1.3.2.	2. Numerasi (%)		Keterangan: <ul style="list-style-type: none">• $kabkot\ min. SKM$ = Kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca atau numerasi• n = Jumlah kabupaten/kota

NO		NAMA INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN
			Dikategorikan sudah "mencapai kompetensi minimum" jika paling sedikit 75% peserta didik memiliki level hasil belajar minimal "cakap".	$\% \text{satdik min. SKM} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{satdik min. SKM}}{n}$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ <i>satdik min. SKM</i> = Satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca atau numerasi▪ <i>n</i> = Jumlah satuan pendidikan
2.1.4	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkeahlian pendidikan tinggi (%)	Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkeahlian pendidikan tinggi adalah jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. <ul style="list-style-type: none">• Nilai tertinggi dari indikator ini mencapai 100% (seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas di kota tersebut sudah menyelesaikan Pendidikan Tinggi). <ul style="list-style-type: none">• Jenjang pendidikan tinggi mencakup:<ul style="list-style-type: none">o Diploma I-IVo S1o S2o S2 Terapano S3	<p><i>Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkeahlian pendidikan tinggi</i> =</p> $\frac{\text{Jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang berkeahlian pendidikan tinggi di kota}}{\text{Jumlah penduduk 15 tahun ke atas di kota}} \times 100\%$	

NO	NAMA INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN
3.1.1.	Tingkat Kemiskinan (%)	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM)	$P_a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{x - y_i}{x} \right]^a$ <p>Dimana :</p> <p>$a = 0$</p> <p>x = garis kemiskinan</p> <p>y_i = rata-rata pengeluaran perkapita sebagian penduduk yang bersedia dibasahi garis kemiskinan ($i = 1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < x$</p> <p>q = Banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan</p> <p>n = jumlah penduduk</p>
3.1.2.	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja	<p>Cakupan Jamsos Naker</p> $= \frac{\text{jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan}}{\text{jumlah Semesta penduduk bekerja}} \times 100\%$ <p>Dimana:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Peserta = Pekerja Penerima Upah (PPU), Jasa Konstruksi, dan Pekerja Bukan Penerima Upah▪ Semesta penduduk bekerja = Penduduk Bekerja yang berusia 15-65 tahun

NO	NAMA INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN
4.1.1.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (angka)	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan Pendidikan SMA/ sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan	<div>1. Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki</div> $G_i = \sqrt[3]{\left(1 + PR_i \times SE_i\right)^2 \times TPAK_i}$ $G_i = \sqrt[3]{\left(\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}\right)^2 \times (PR_i \times SE_i)^2 \times TPAK_i}$ <div>2. Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki-laki dengan rata-rata harmonik</div> $HARM(G_i, G_j) = \sqrt[3]{\frac{(G_i)^3 + (G_j)^3}{2}}$ <div>3. Menghitung indeks masing - masing dimensi</div> $IKR = \frac{\left(\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20} + 1\right)}{2}$ $IPK = \frac{TPAK_i + TPAK_j}{2}$ $IP = \frac{\left(\sqrt{PR_i \times SE_i} + \sqrt{PR_j \times SE_j}\right)}{2}$ <div>4. Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik</div> $G_{r,t} = \sqrt[3]{IKR \times IP \times IPK}$ <div>5. Menghitung Indeks Kesenjangan Gender</div> $Indeks\ Kesenjangan\ Gender = \frac{HARM(G_p, G_l)}{G_{r,t}}$ <div>6. Menghitung Indeks Ketimpangan Gender</div> $IKG = 1 - \frac{HARM(G_p, G_l)}{G_{r,t}}$

NO	NAMA INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN
5.1.1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha / pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan	$TPPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ <p>Keterangan: TPPT = Tingkat pengangguran terbuka (%) PP = Jumlah pengangguran (orang) PAK = Jumlah angkatan kerja (orang)</p>
			<div><div><div>G_1<ul style="list-style-type: none">Indeks Perumahan</div><div>G_2<ul style="list-style-type: none">Indeks Laki-laki</div><div>MTF<ul style="list-style-type: none">Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan</div><div>$MHPK20$<ul style="list-style-type: none">Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun</div><div>PR_1<ul style="list-style-type: none">Persentase perempuan di tingkat I</div><div>PR_2<ul style="list-style-type: none">Persentase laki-laki di tingkat II</div><div>SE_1<ul style="list-style-type: none">Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas</div><div>SE_2<ul style="list-style-type: none">Persentase laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas</div><div>$TRAK_1$<ul style="list-style-type: none">Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja</div><div>$TRAK_2$<ul style="list-style-type: none">Persentase angkatan kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja</div><div>$HARM(G_1, G_2)$<ul style="list-style-type: none">Agregasi Indeks perumahan dan laki-laki dengan rata-rata harmonik</div><div>IKR<ul style="list-style-type: none">Indeks difonemi kesehatan reproduksi</div><div>IP<ul style="list-style-type: none">Indeks dimensi pemberdayaan</div><div>IPK<ul style="list-style-type: none">Indeks dimensi pasar tenaga kerja</div><div>G_{10}<ul style="list-style-type: none">Agregasi Indeks dimensi dengan rata-rata geometrik</div><div>IKG<ul style="list-style-type: none">Indeks Ketimpangan Gender</div></div></div>

NO	NAMA INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN
		sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja	
5.1.2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas	<p>Keterangan :</p> <p>TPAK p = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)</p> <p>$PAKp$ = Jumlah angkatan kerja perempuan (orang)</p> <p>$P(15+,p)$ = Jumlah penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas (orang)</p> $TPAK\ p = \frac{PAKp}{P(15+,p)} \times 100\%$
5.1.3.	Proporsi Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Formal	Penempatan tenaga kerja di sektor formal dibagi penempatan tenaga kerja keseluruhan x 100%	<p>Proporsi Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Formal</p> $= \frac{\text{Penempatan tenaga kerja di sektor formal}}{\text{Penempatan Tenaga Kerja Keseluruhan}} \times 100\%$
6.1.4	Rasio kewirausahaan daerah (%)	Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing- masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan	<p>Rasio Kewirausahaan Daerah</p> $= \frac{\text{Berusaha dibantu buruh tetap Daerah}}{\text{Total angkatan kerja Daerah}} \times 100\%$

NO	NAMA INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN
		lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran	
6.1.5.	Return On Asset (ROA) BUMD (%)	Return On Asset (ROA) adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Return On Asset (ROA) dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan.	$\text{Return On Asset (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$
8.1.1.	Ekspor Barang dan Jasa (%PDRB)	Ekspor didefinisikan sebagai transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan nonresiden. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun. Ekspor barang menggunakan prinsip pencatatan dengan basis akrual di mana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeanan, sedangkan untuk ekspor jasa dicatat saat jasa	$\text{Ekspor Barang dan Jasa (\%PDB)} = \frac{\text{Ekspor Barang dan Jasa}}{\text{PDB ADHK}} \times 100\%$ Keterangan: Ekspor Barang dan Jasa = Total Ekspor Barang dan Jasa berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) PDB ADHK = Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)

NO	NAMA INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN
		tersebut disediakan atau diberikan. Ekspor barang dan jasa (% PDB) merupakan share ekspor barang dan jasa terhadap PDB.	
8.1.2	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB) merupakan share PMTB terhadap PDB Daerah.	$\frac{\text{PMTB}}{\text{PDB ADHK}} \times 100\%$ <p>Keterangan: Pembentukan Modal Tetap Bruto = Total PMTB berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) PDB ADHK = Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)</p>
9.1.1.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB(%)	<ul style="list-style-type: none">• Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.• PDRB adalah Penjumlahan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu	<p>Keterangan: $\text{PDRB per kapita} = \frac{\text{PDRB ADHB}}{\text{populasi}}$</p> <p>Keterangan: PDRB ADHB = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku populasi = jumlah penduduk regional t = periode</p>

NO	NAMA INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN
		<p>regional/negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen, di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode penghitungan.</p> <ul style="list-style-type: none">• Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah.	
9.1.2.	Tingkat Inflasi (%)	<p>Kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu dalam wilayah provinsi tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi</p>	<p>Tingkat Inflasi (%) = $\frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \times 100\%$</p> <p>Perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) berdasarkan the <i>Classification of Individual Consumption by Purpose</i> (COICOP) 2018. Pengukuran IHK dilakukan melalui Survei Biaya Hidup (SBH) oleh BPS di 90 Kabupaten/Kota sampel IHK. IHK_{t-1}</p>

NO	NAMA INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN
11.1.2.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (angka)	SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan.	Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut: $\text{Indeks Domain } i = \frac{1}{BD_i} \sum_{j=m}^n NA_{ij} \times BA_{ij}$ Dimana : ND _j : nilai indeks domain ke-j BD _j : nilai bobot domain ke-j
12.1.1.	Indeks Pelayanan Publik (angka)	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.	Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik. $\text{Nilai per indikator} = \left(\frac{\text{nilai F01} + \text{Nilai F01} + \text{Nilai F03}}{3} \right) \times \text{bobot perindikator}$ 2. Menentukan nilai setiap aspek $\text{Nilai per aspek} = \sum \text{nilai per indikator}$ 3. Menentukan indeks $\text{Nilai indeks} = \sum (\text{nilai aspek } n \times \text{bobot aspek } n)$

NO	NAMA INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN
13.1.1.	Angka Partisipasi Masyarakat dalam Proses Politik (%)	Angka partisipasi masyarakat dalam proses politik dihitung dengan tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada.	$\text{Partisipasi pemilih (\%)} = \frac{\text{Jumlah Pengguna Hak Pilih}}{\text{Jumlah Daftar Pemilih Tetap}} \times 100\%$ <p>Dimana :</p> <p>Jumlah Pengguna Hak Pilih = Suara Sah + Suara Tidak Sah</p>
13.1.2.	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya (%)	Seberapa banyak penduduk yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya. Indikator ini mencakup beberapa aspek yang meliputi penduduk yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggal pada siang dan malam hari. Indikator ini biasanya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.	$\text{PPMA} = \frac{\text{JPMA}}{\text{JP}} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <p>PPMA = Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya</p> <p>JPMA = Jumlah penduduk yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya</p> <p>JP = Jumlah penduduk</p>
14.1.1.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) (angka)	Indeks yang menggambarkan sejauh mana tingkat kerukunan umat beragama. IKUB diukur melalui tiga indikator kerukunan umat beragama, yakni toleransi, kesetaraan, dan kerja sama	$\text{IKUB} = \frac{\sum_{j=1}^3 \text{Indeks } D_j}{3}$ <p>Keterangan:</p> <p>IPK = Indeks Kerukunan Umat Beragama</p> <p>D_j = Dimensi ke-j</p> <p>Rumus menghitung indeks dimensi (D_j):</p>

NO	NAMA INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN
			$\text{Indeks } D_j = \frac{\sum_{i=1}^n SX_{ji}}{3n_j}$ <p>Keterangan: D_j = Dimensi ke-j SX_{ji} = Nilai indikator i pada dimensi ke-j n_j = Jumlah indikator dimensi ke-j</p>
15.1.1.	Indeks Kualitas Air (angka)	<p>Suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.</p> <p>Parameter air sungai wajib untuk perhitungan IKA meliputi:</p> <p>a) derajat keasaman (pH); b) oksigen terlarut (DO); c) kebutuhan oksigen biologi (BOD); d) kebutuhan oksigen kimiawi (COD); e) padatan tersuspensi total (TSS); f) nitrat (NO₃-N); g) total fosfat (T-Phosphat); dan h) fecal coliform (Fecal Coli).</p>	<p>Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tanggal 16 Desember 2021.</p> <p>1. menentukan status mutu masing-masing lokasi dengan ketentuan:</p> <p>a. $0 \leq IP_j \leq 1,0$: baik (memenuhi baku mutu) b. $1,0 \leq IP_j \leq 5,0$: cemar ringan c. $5,0 \leq IP_j \leq 10,0$: cemar sedang d. $IP_j \geq 10,0$: cemar berat</p> <p>2. menghitung jumlah masing-masing status mutu (baik, cemar ringan, cemar sedang dan cemar berat) untuk setiap data pemantauan seluruh lokasi;</p> <p>3. menghitung persentase jumlah masing-masing status mutu terhadap jumlah total untuk masing-masing wilayah;</p> <p>4. mentransformasikan nilai Indeks Pencemaran (IP) ke dalam Indeks Kualitas Air (IKA) dilakukan dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan persentase status mutu berdasarkan perhitungan di atas;</p> <p>5. pembobotan indeks diberikan batasan sebagai berikut:</p>

NO	NAMA INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN
			a. memenuhi baku mutu = 70 b. tercemar ringan = 50 c. tercemar sedang = 30 d. tercemar berat = 10 6. nilai IKA (Indeks Kualitas Air) diperoleh dengan menjumlahkan hasil perkalian persentase setiap status mutu dengan bobotnya;
15.1.2.	Indeks Kualitas Udara (angka)	Ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu	Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tanggal 16 Desember 2021. melakukan perhitungan rata-rata masing-masing parameter Nitrogen Dioksida (NO_2), dan Sulfur Dioksida (SO_2) dari tiap periode pemantauan untuk masing-masing lokasi sampling sehingga didapat data rata-rata untuk area transportasi, industri, pemukiman/perumahan, dan perkantoran; 2. melakukan perhitungan rata-rata parameter Nitrogen Dioksida (NO_2) dan Sulfur Dioksida (SO_2) untuk masing-masing kabupaten/kota sehingga menghasilkan nilai kualitas udara ambien rata rata tahunan kabupaten/kota; melakukan perhitungan rata-rata parameter Nitrogen Dioksida (NO_2) dan Sulfur Dioksida (SO_2) untuk provinsi yang merupakan perhitungan rata-rata nilai kualitas udara ambien rata rata tahunan kabupaten/kota; melakukan pembandingan nilai rata-rata Nitrogen Dioksida (NO_2) dan Sulfur Dioksida (SO_2) dengan baku mutu udara ambien Referensi EU untuk mendapatkan

NO	NAMA INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN
			<p>Indeks Nitrogen Dioksida (NO₂) dan Indeks Sulfur Dioksida (SO₂).</p> <p>Rata-rata Indeks Nitrogen Dioksida (NO₂) dan Sulfur Dioksida (SO₂) menghasilkan Index Udara model EU (IEU) atau indeks antara sebelum dikonversikan ke Indeks Kualitas Udara IKU;</p> <p>Indeks Udara model EU (IEU) dikonversikan menjadi indeks IKU melalui persamaan sebagai berikut:</p> $IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} (IEU - 0,1) \right)$ $IEU = \frac{Indeks\ NO_2 + Indeks\ SO_2}{2}$ $Indeks\ NO_2 = \frac{Rata - rata\ NO_2}{Baku\ Mutu\ E_u}$ $Indeks\ SO_2 = \frac{Rata - rata\ SO_2}{Baku\ Mutu\ E_u}$ <p>Untuk perhitungan IKU , maka •</p> <p>Rata-rata NO₂ = Rerata hasil pengukuran NO₂ dari 4 lokasi •</p> <p>Rata-rata SO₂ = Rerata hasil pengukuran SO₂ dari 4 lokasi</p> <p>Untuk perhitungan IKU Provinsi, maka •</p> <p>Rata-rata NO₂ = Rerata hasil pengukuran NO₂ dari kab/kota •</p> <p>Rata-rata SO₂ = Rerata hasil pengukuran SO₂ dari kab/kota</p>

NO		NAMA INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN																		
				<div>KATEGORI INDEKS KUALITAS LULUSAN</div> <table><tr><th>Nomor</th><th>Kategori</th><th>Angka Rentang</th></tr><tr><td>1</td><td>Sangat Baik</td><td>90 ≤ x ≤ 100</td></tr><tr><td>2</td><td>Baik</td><td>70 ≤ x < 90</td></tr><tr><td>3</td><td>Sedang</td><td>50 ≤ x < 70</td></tr><tr><td>4</td><td>Kurang</td><td>25 ≤ x < 50</td></tr><tr><td>5</td><td>Sangat Kurang</td><td>0 ≤ x < 25</td></tr></table>	Nomor	Kategori	Angka Rentang	1	Sangat Baik	90 ≤ x ≤ 100	2	Baik	70 ≤ x < 90	3	Sedang	50 ≤ x < 70	4	Kurang	25 ≤ x < 50	5	Sangat Kurang	0 ≤ x < 25
Nomor	Kategori	Angka Rentang																				
1	Sangat Baik	90 ≤ x ≤ 100																				
2	Baik	70 ≤ x < 90																				
3	Sedang	50 ≤ x < 70																				
4	Kurang	25 ≤ x < 50																				
5	Sangat Kurang	0 ≤ x < 25																				
15.1.3.	Indeks Kualitas Lahan (angka)	Nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tanggal 16 Desember 2021. Perhitungan IKL dilakukan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut: $IKL = 100 - \left(84,3 - \left(\left(\frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \right) \times \frac{50}{54,3}$ di mana LTL = luas Tutupan Lahan LW = luas Wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi DKK = dampak Kanal dan kebakaran di Kesatuan Ekosistem Gambut Hasil bagi LTL dengan LW adalah nilai Tutupan Lahan (TL). Adapun tata cara perhitungan TL sebagaimana Lampiran IV.																			
15.1.4.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset		$PSA = \frac{IRTST+IRTFLT}{IKTS} \times 100\%$ PSA = Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses																		

NO	NAMA INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN
		dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T)	sanitasi aman $JRTSPAL = \text{Jumlah rumah aanga yang memiliki akses terhadap SPALD-T}$ $JRTIPLT = \text{Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangka septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT)}$ $JRTS = \text{Jumlah rumah tangga seluruhnya}$
15.1.5.	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	<u>Timbulan Sampah</u> Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial,	Langkah ke-1: Menghitung Jumlah Sampah Terolah Terdapat dua alternatif menghitung jumlah sampah terolah: Cara (1) $SO = ST - MFPA + RDP$ Keterangan: SO : Sampah terolah (ton/hari) ST : Sampah terkumpul (ton/hari) MFPA : Sampah yang masuk ke fasilitas pemrosesan akhir sampah (ton/hari) RPD : Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari) Cara (2) $SO = MFPPD + DPA - RPD$

NO	NAMA INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN
		<p>kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.</p> <p>Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.</p> <p>Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangan;</p> <p>karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Sampah diolah berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.</p> <p>Kegiatan pengolahan sampah yang diukur meliputi kegiatan;</p> <p>a. Pengolahan sampah organik seperti pengomposan, dan/atau pengolahan sampah organik lainnya seperti biokonversi maggot BSF, vermi composting, biodigester, dsb.</p> <p>b. Daur ulang materi (material recovery) merupakan upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna</p>	<p>Keterangan:</p> <p>SO : Sampah terolah (ton/hari)</p> <p>MFPD : Sampah yang masuk ke fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari)</p> <p>DPA : Material daur ulang yang diambil dari fasilitas pemrosesan akhir oleh sektor informal (ton/hari)</p> <p>RPD : Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari)</p> <p>Langkah ke-2: Menghitung Timbulan Sampah</p> <p>$TS = TP \times (TPRT + TPNRT)$</p> <p>Keterangan:</p> <p>TS : Timbulan sampah (kg/hari)</p> <p>TP : Total populasi (orang)</p> <p>TPRT : Timbulan sampah per kapita dari rumah tangga (kg/orang/hari)</p> <p>TPNRT : Timbulan sampah per kapita dari non-rumah tangga (kg/hari)</p> <p>Jika tidak terdapat informasi TPNRT, maka pendekatan dapat di estimasi menggunakan perhitungan berikut.</p>

NO		NAMA INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	
			setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu, Jenis sampah yang diutamakan di daur ulang seperti; plastik, kardus, kertas, kaca, logam, dan sejenisnya. Rantai nilai daur ulang materi biasanya melibatkan beberapa langkah seperti industri daur ulang swasta yang membeli, memproses, dan memperdagangkan bahan mulai dari pengambilan hingga diproses ulang menjadi produk, bahan, atau zat yang memiliki nilai pasar. Pada rantai daur ulang materi ini melibatkan pemulung informal, lapak, pengepul, bandar, dan pendaur ulang rantai akhir. Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan sebagai berikut; TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah dan/atau swasta. Catatan: Mengacu pada definisi global dari UN-Habitat, bahwa makna dari waste recovery sepadan dengan kegiatan pengolahan sampah. Pemulihan (recovery) itu sendiri merupakan setiap	$TS = 70\% \text{ dari rumah tangga} + 30\% \text{ dari non - rumah tangga}$ $TS = \frac{TSRT}{70\%}$ Keterangan: TS : Timbunan sampah (ton/hari) TSRT : Timbunan sampah rumah tangga (ton/hari)	Langkah ke-3: Menghitung Tingkat Sampah Terolah $\%SO = \frac{SO}{TS} \times 100\%$ Keterangan: %SO : Tingkat sampah terolah (%) SO : Sampah terolah (ton/hari) TS : Timbunan sampah (ton/hari)

NO	NAMA INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN
		<p>kegiatan yang secara prinsip utamanya adalah sampah memiliki fungsi untuk mengganti bahan material lain untuk memenuhi fungsi tertentu, dalam alur produksi atau ekonomi yang lebih luas. Kegiatan pengolahan sampah menjadi energi dan/atau bahan bakar lainnya tidak dihitung ke dalam indikator sampah terolah.</p>	
16.1.1.	<p>Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)</p>	<ul style="list-style-type: none">• Ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.• Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase atau probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya	$PoU = \int_{x < MDER} f(x) dx$ <p>Keterangan:</p> <p>PoU: Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal</p> <p>MDER: Kebutuhan minimum energi yang diukur dengan kkal (<i>Minimum Dietary Energy Requirement</i>)</p> <p>f(X): fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata per kapita individu dalam suatu populasi tertentu</p>

NAMA INDIKATOR		DEFINISI OPERASIONAL		RUMUS PERHITUNGAN	
16.1.2.	Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut 1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; 2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di dalam rumah (on premises); 3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan 4) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023.	<ul style="list-style-type: none">• PASMPP: Persentase rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan.• JRTASMP: Jumlah rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan.• JRT: Jumlah rumah tangga seluruhnya	$PASMPP = \frac{JRTASMP}{JRT} \times 100$	
16.1.3.	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	Rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan. Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi:	<p>1. Apabila sudah menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh menggunakan rumus sebagai berikut:</p> <p>Persentase Rumah Tangga yang mengakses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan</p> $PHLTB = \frac{JRLTHLTB}{JRT \times 100}$		

NO	NAMA INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN
		<p>a. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat</p> <p>b. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan.</p> <p>Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ketahanan bangunan (durable housing) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat2. Kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space) yaitu luas lantai perkapita $\geq 7,2 \text{ m}^2$3. Memiliki akses air minum layak4. Memiliki akses sanitasi layak	<p>PHLTB: Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan;</p> <p>JRTHLTB: jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan;</p> <p>JRT: Jumlah rumah tangga</p> <p>2. Apabila belum menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh maka dapat menggunakan indikator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak, dan memiliki akses sanitasi layak).</p> $\text{PHLTB}(\text{proksi}) = \frac{\text{JRTHLTB}(\text{proksi})}{\text{JRT} \times 100}$ <p>PHLTB (proksi): Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan;</p> <p>JRTHLTB (proksi): jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan;</p> <p>JRT: Jumlah rumah tangga</p>

NO	NAMA INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN
17.1.1.	Indeks Risiko Bencana (IRB) (angka)	IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.	$Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$ <p>Keterangan</p> <p>Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (<i>magnitude</i>) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya.</p> <p>Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan.</p> <p>Kapasitas (<i>Capacity</i>) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan;(2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;(3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik;(4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana;(5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;(6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan(7) Pengembangan sistem pemulihan bencana

BAB VI PENUTUP

RPJPD 2025 – 2045 merupakan perencanaan pembangunan yang bersifat melanjutkan RPJPD 2005 – 2025. Pada saat penyusunan RPJPD 2025 - 2045, RPJPD 2005 – 2025 masih berlaku, oleh karena itu perlu diatur tentang proses transisi antara keduanya. Selain itu, perlu diatur kaidah pelaksanaan, mengingat RPJPD dengan kerangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang secara imperatif ditetapkan meliputi 4 (empat) RPJMD yaitu tahap I (2025-2029), Tahap II (2030-2034), Tahap III (2035 – 2039) dan Tahap IV (2040 – 2045).

Guna menghadapi kondisi dinamis baik tingkat kota, provinsi, nasional maupun global, maka perlu diatur proses perubahan dokumen dengan tingkat fleksibilitas terbatas untuk mengantisipasi apabila terjadi kondisi luar biasa yang mengakibatkan berubahnya kondisi jauh melebihi dari asumsi awal.

6.1. Pedoman Transisi

Pedoman transisi memuat berbagai hal yang perlu dilakukan pada saat masa transisi dokumen perencanaan pembangunan. Hal ini merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan dokumen pada saat masa transisi antara dokumen perencanaan yang lama dan dokumen perencanaan yang baru.

Berbagai hal yang perlu diatur antara lain sebagai berikut:

1. Pada saat berlakunya RPJPD 2025 – 2045, RPJMD 2021-2026 masih dinyatakan tetap berlaku sampai ditetapkannya RPJMD yang baru. Hal ini disebabkan karena APBD 2025 disusun dan ditetapkan berdasarkan RPJMD 2021-2026.
2. Mengingat Pembangunan tahun 2025 masih berpedoman pada RPJPD 2005 – 2025 dan RPJMD 2021-2026, maka hasil pembangunan tahun 2025 tidak bisa langsung dibandingkan dengan target dalam RPJPD 2025-2045 atau produk perencanaan turunannya.
3. Apabila RPJMD 2025 -2029 dapat ditetapkan sebelum Perubahan APBD 2025 maka APBD 2025 **dapat** disesuaikan dengan program dan kegiatan dalam RPJMD 2025 - 2029 dalam Perubahan APBD.
4. Dalam hal direncanakan penyesuaian sebagaimana point 3, maka penyusunan Perubahan RKPD 2025 dapat didasarkan pada draft RPJMD 2025 -2029.
5. Dalam hal dilakukan atau tidak dilakukan Perubahan APBD 2025, maka hasil capaian pembangunan tahunan 2025 **dapat** sebagian atau seluruhnya dipergunakan sebagai capaian target RPJMD 2025 – 2029 dan atau RPJPD 2025 - 2045.

6.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bertujuan untuk menciptakan petunjuk umum pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi lintas Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan arah kebijakan RPJPD secara efektif dan efisien. Koordinasi, sinkronisasi dan integrasi tersebut bertujuan untuk mengelola sumber daya pembangunan secara optimal serta dapat dilakukan dengan pembagian tugas secara tepat agar mencapai tujuan pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan. Adapun kaidah pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2025 – 2045 adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan RPJMD Tahap I sampai dengan Tahap IV harus berpedoman pada RPJPD 2025 -2045.
2. Semua Perangkat Daerah pengampu Indikator Utama Pembangunan harus membuat kertas kerja rencana pencapaian selama 20 tahun baik dalam bentuk jangka menengah (5 tahunan) maupun jangka pendek (1 tahunan).
3. Perangkat Daerah pengampu urusan Perencanaan Daerah mengkoordinasikan seluruh Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, agar semua perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) memperhatikan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan lima tahunan .
4. Perumusan visi, misi dan arah kebijakan RPJMD selama tahun 2025 -2045 harus selaras dengan arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045;
5. Penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dokumen RPJMD harus mengacu target indikator sasaran pokok RPJPD Kota Blitar Tahun 2025 – 2045 pada periode berkenaan;
6. Apabila terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar, maka penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan menyesuaikan dengan peraturan daerah tentang Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang baru dan memastikan seluruh urusan dapat tertangani dengan baik.

6.3. Kerangka Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Evaluasi dilakukan terhadap pencapaian hasil pembangunan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan tahap berikutnya.

Pengendalian dan evaluasi dilakukan diatur sebagai berikut:

1. Pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Blitar dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah yang mengampu urusan perencanaan daerah.

2. Pengendalian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Blitar dilaksanakan melalui pengendalian rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) dan jangka pendek (RKPD) yang disertai dengan identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya
3. Pengendalian perencanaan juga dilakukan terhadap perencanaan Perangkat Daerah dalam jangka menengah (Rentsra PD) dan jangka pendek (Renja PD).
4. Pengendalian pelaksanaan pembangunan dilakukan melalui koordinasi pada saat penetapan anggaran belanja tahunan dengan perangkat daerah terkait.
5. Evaluasi hasil pembangunan jangka menengah dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah yang mengampu urusan perencanaan daerah. Hasil pembangunan jangka menengah dipergunakan sebagai pengendalian progres pencapaian target RPJPD 2025 -2045, yang hasilnya disampaikan kepada Kepala Daerah.
6. Evaluasi terhadap kondisi yang berpengaruh pada pencapaian IUP baik di tingkat kota, provinsi, nasional dan global dilakukan oleh masing masing kepala Perangkat Daerah pengampu IUP yang hasilnya dipergunakan sebagai bahan pertimbangan penetapan target IUP.

6.4. Mekanisme Perubahan

Mengingat adanya faktor faktor yang tidak dapat dikendalikan maka RPJPD Kota Blitar 2025 – 2045 dapat ditinjau kembali untuk dilakukan perubahan dengan ketentuan :

1. Hasil Evaluasi RPJMD dan atau hasil evaluasi perangkat daerah pengampu IUP menunjukkan adanya capaian target meleset lebih dari 20 persen dari asumsi dasar.
2. Terjadi perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, atau perubahan kebijakan nasional yang mengakibatkan perubahan kondisi lebih dari 10 persen atas asumsi dasar.

6.5. Pembiayaan Pembangunan

Upaya mewujudkan Visi “Kota Cerdas, Inklusif, Maju dan Berkelanjutan” memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai. Mengingat keterbatasan kemampuan pembiayaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka perlu dilakukan upaya kerjasama dengan berbagai pihak baik pemerintah pusat, provinsi, pemerintah daerah sekitar atau pihak pihak lain. Maka selain upaya peningkatan PAD baik

melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi diharapkan pembiayaan pembangunan Kota Blitar juga didukung oleh sumber pembiayaan APBN, APBD Provinsi, BUMN, BUMD, swasta, filantropi, Lembaga Donor, serta sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Hal yang utama dilakukan adalah pengalokasian biaya pembangunan yang didasarkan pada prioritas, efektifitas dan efisiensi yang didukung dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan yang baik.

Akhirnya, RPJPD 2025-2045 merupakan bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan. Melanjutkan pembangunan jangka panjang 2005 - 2025 dan akan dilanjutkan dengan jangka panjang paska 2045. Fungsi perencanaan pembangunan adalah untuk mencapai pembangunan yang efektif atau berhasil guna yaitu pembangunan yang tepat sasaran dan dapat menyelesaikan permasalahan daerah secara benar, tepat dan mendasar. Karena itu, RPJPD disusun dengan pendekatan teknokratik, politis, atas bawah bawah atas dan partisipatif yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang tidak saja untuk kebaikan dalam kapasitas lokal tetapi juga berdampak positif dan menyumbang kesejahteraan pada level provinsi dan nasional.

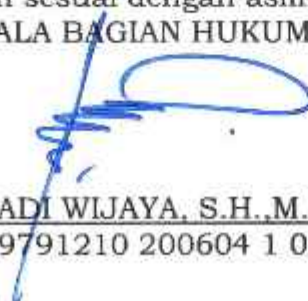
Pembangunan berkelanjutan dan upaya peningkatan kesejahteraan itu dapat diwujudkan hanya jika RPJPD 2025 - 2045 dipergunakan sebagai pedoman bagi semua pihak dalam membangun Kota Blitar. Dimana kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kota Blitar baik jangka menengah maupun tahunan harus berpedoman pada RPJPD 2025 - 2045. Demikian juga semua kegiatan dunia usaha dan masyarakat yang didukung oleh para akademisi dan media massa harus berpedoman pada RPJPD 2025 - 2045. Sebab keberhasilan pembangunan daerah bergantung pada kebersamaan para pihak yang saling mendukung untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan daerah.

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008